

Sof 2009

**RELASI KUASA SUAMI-ISTRI BEKERJA BERDASARKAN
PENGELOLAAN PENGHASILAN dan PEMBAGIAN KERJA**
Studi Kasus Terhadap Suami-Istri Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ketapang
Propinsi Kalimantan Barat



TESIS

LELI RUSPITA
NIM: 7105060041

T

24995

**PROGRAM STUDI KAJIAN WANITA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
2008**

**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS INDONESIA**



UNIVERSITAS INDONESIA

**RELASI KUASA SUAMI-ISTRI BEKERJA BERDASARKAN
PENGELOLAAN PENGHASILAN dan PEMBAGIAN KERJA**
Studi Kasus Terhadap Suami-Istri Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ketapang
Propinsi Kalimantan Barat

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
MAGISTER SAINS KAJIAN WANITA**

**LELI RUSPITA
NPM: 7105060041**

**Program Studi Kajian Wanita
Program Pascasarjana
Universitas Indonesia
Jakarta, 2008**

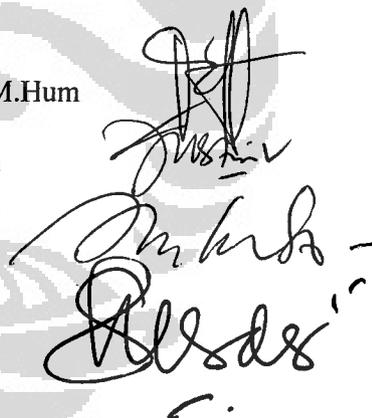
LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Leli Ruspita
NPM : 7105060041
Program Studi : Kajian Wanita
Judul Tesis : RELASI KUASA SUAMI-ISTRI BEKERJA
BERDASARKAN PENGELOLAAN
PENGHASILAN dan PEMBAGIAN KERJA
(Studi Kasus Suami-Istri Pegawai Negeri Sipil
di Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan
Barat)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Wanita Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia pada tanggal 25 Juni 2008 dan dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan.

DEWAN PENGUJI

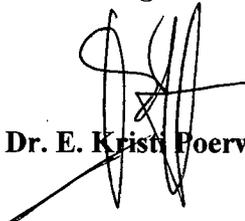
Pembimbing : Dr. E. Kristi Poerwandari, M.Hum
Pembimbing : Yustina Rostiawati, M.Hum
Penguji : Nur Iman Subono, M.Hum
Penguji : Shelly Adelia, M.Hum



Jakarta, Juli 2008

Mengetahui,

Ketua Program Studi Kajian Wanita


Dr. E. Kristi Poerwandari, M. Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tesis ini merupakan bentuk cinta dan hormat yang tidak bisa saya utarakan dalam sikap dan kata-kata kepada Umak yang memberikan hidupnya untuk membesarkan kami, Abah yang memberikan kesempatan yang sama kepada anak perempuan dan laki-laknya dalam mendapatkan pendidikan.

Khusus untuk Abah dan semua saudara laki-laki, tujuan penulisan tesis ini bukan untuk merendahkan peranan laki-laki dalam kehidupan perempuan juga bukan mengibarkan bendera konflik dalam hubungan laki-laki dan perempuan.

Tetapi merupakan langkah untuk meretas jalan bagi persoalan budaya di sekitar kita yang memposisikan perempuan tidak setara dalam berelasi dengan laki-laki. Langkah awal bagi perempuan untuk terlibat sebagai salah satu pengelola isi bumi ini.

KATA PENGANTAR

Sebelum kuliah di Kajian Wanita Universitas Indonesia saya telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama enam tahun. Pertama bertugas saya di tempatkan di bagian sosial di kantor Kecamatan Sandai. Selama dua tahun saya bersentuhan langsung dan melihat bagaimana perempuan di pedesaan pada umumnya menghadapi kelahiran anak, kemiskinan dan kebutuhan keluarga sebagai persoalan masyarakat biasa.

Kemudian saya bertugas di Pemberdayaan Perempuan, yang membuka pikiran saya tentang kehidupan perempuan. Selama enam belas bulan berkecimpung di Pemberdayaan Perempuan, saya menyadari bahwa hal di atas bukan sekadar isu perempuan, tetapi sudah merupakan persoalan yang harus dibicarakan dan dicari solusi penyelesaiannya. Pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan perempuan terutama kehidupan perempuan bekerja kemudian mengganggu pikiran saya. Untuk memperdalam pengetahuan saya akan persoalan perempuan dan laki-laki, pada pertengahan tahun 2005 saya memutuskan mengikuti tugas belajar di Program Pascasarjana Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia.

Melalui pemahaman-pemahaman dan diskusi di Kajian Wanita saya mendapatkan semacam pencerahan dalam diri untuk menyelesaikan persoalan perempuan termasuk menyelesaikan konflik dalam diri. Pencerahan yang dapat memberikan pikiran baru kepada saya tentang makna hidup. Tentang apa yang disebut patriarki yang mengkonstruksi secara sosial kehidupan perempuan dan laki-laki dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Konstruksi yang mempergunakan gender sebagai atribut sosial yang membedakan antara perempuan dan laki-laki.

Puji syukur yang tidak terhingga saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas izin dan ridho Nya maka saya dapat menulis tesis ini. Kemudian ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada beberapa pihak yang membantu dan mendukung saya dalam menjalani pendidikan di Kajian wanita dan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Kepada:

- Dr. E. Kristi Poerwandari, M. Hum dan Yustina Rostiawati, M.Hum yang dengan sabar memberikan bimbingan dan mendorong saya untuk maju. Sekali lagi buat mba Kristi dan Mba Yustin terima kasih serta maaf yang sebesar-besarnya, karena saya sering menghilang ketika tidak menemukan ide untuk tulisan saya.
- Nur Iman Subono, M.Hum selaku penguji tesis ini, terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan tesis ini.
- Shelly Adellia. M.Si, yang menjadi penguji sekaligus *reader* tulisan ini. terima kasih atas kesediaannya membaca draft tesis ini, juga atas masukan-masukan yang diberikan ketika saya menjalani penulisan tesis ini.
- Ibu Prof. Dr. Saparnah Sadli dan semua pelopor berdirinya Kajian Wanita Universitas Indonesia, terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mendirikan lembaga pendidikan yang menjadi wadah bagi proses perbaikan diri dan cara berpikir banyak perempuan dalam memandang hidup. Khusus untuk ibu Anita Rahman, M.Hum sebagai pembimbing akademik saya dan seluruh dosen di Program Kajian Wanita Universitas Indonesia, saya sampaikan terima kasih atas isi pikirannya ketika saya menjalani perkuliahan.
- Rekan-rekan di Deputy I Bidang Pengarusutamaan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan, khususnya Bapak Drs. Soerjadi Suparman yang pada waktu itu menjabat Deputy I, terima kasih atas bantuan dan kesempatan yang diberikan selama tiga bulan ketika saya magang untuk mata kuliah Isu-isu gender di Indonesia, terutama dalam mempelajari strategi pemberdayaan perempuan dalam skala nasional.
- Bupati Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat yang memberikan kesempatan tugas belajar kepada saya untuk mempelajari persoalan perempuan dari sisi akademis di Kajian Wanita Universitas Indonesia. Kesempatan ini merupakan sebuah anugrah bagi saya, sehingga saya bisa duduk berhadapan dan bertukar pikiran dengan orang-orang yang sebelumnya hanya bisa saya kagumi melalui tulisannya.

- Bapak Drs H. Bachtiar dan Bapak Drs. F. Sungkalang serta Bapak Drs. H. Sabran Amien yang memberikan masukan pada konsep berpikir saya, ketika saya akan mengambil kuliah Magister di Kajian Wanita. Sehingga, saya bisa menyelaraskan pikiran saya dengan pemahaman ilmu di Kajian Wanita sebagai sebuah strategi penguatan dan pematapan diri. Semoga ilmu yang saya dapatkan menjadi bekal bagi saya untuk kembali bekerja, dan bermanfaat bagi perbaikan hidup perempuan, khususnya perempuan di Kabupaten Ketapang.
- Bapak Drs H. Syarief Tahir, MSi, Bapak Drs. Ibnu Syarief, MSi, Ibu Hj. Normaniah S.sos, dan Ibu Rosalina Razali, BA yang memberikan kepercayaan dan dorongan kepada saya untuk melangkah ke Jakarta. Terima kasih yang tak terhingga atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, khususnya kepada Ibu Hj. Normaniah yang mengingatkan saya untuk tidak mundur dan kuat menjalani proses perkuliahan Universitas Indonesia.
- Seluruh staf akademik Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia, mba Dewi dan Mba Yuni yang selalu sabar dalam membantu proses administrasi dan menyemangati untuk segera menulis, mba Yati yang selalu mengerti akan keperluan kami dalam meminjam buku, mas Sukron dan mas Hamid yang selalu kami repotkan ketika akan memulai kegiatan perkuliahan.
- Mba Endah yang banyak memberikan masukan dalam penulisan tesis ini, teman-teman seangkatan: Nanen, Tini, Iklillah, Aci, Els, mba Nanda dan mba Iin yang membantu mengenal Jakarta, dan juga diskusi tentang perkuliahan yang sangat membantu ketika saya mengalami proses pemahaman terhadap konsep-konsep pemikiran di Kajian Wanita.
- Rekan-rekan kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, terutama Pak Dwi dan Bu Ani di bagian Kepegawaian, serta Mardiana di Pemberdayaan Perempuan dan rekan-rekan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih kalian telah membantu saya mengelola keuangan saya selama kuliah.

- Kedua orangtua yang telah melahirkan saya ke dunia ini, terutama Umak yang telah memberikan hidupnya untuk membesarkan kami, Abah yang memberikan kesempatan kepada anak perempuan dan anak laki-laki untuk sekolah sesuai kemampuan. Terima kasih Abah, atas nasihatnya bahwa *di atas segalanya, isi bumi dan kehidupan ini diatur yang Khalik, maka siapapun (perempuan dan laki-laki) yang dekat kepada-Nya akan diberi kepercayaan untuk mengelola isi bumi ini.*
- Saudara laki-laki saya, Bang Wawan, Agus, dan Hendra yang memberikan bantuan dan kesempatan kepada kami saudara perempuannya untuk bisa sekolah tinggi. Terima kasih pendidikan ini membuat saya sedikit mengerti bahwa hidup tidak untuk diri sendiri. Adik-adik tercinta, Yayu dan Neni yang telah menyediakan waktunya untuk bertukar pikiran, tanpa disadari ternyata kalian lebih dewasa.
- Kepada seluruh informan dan perempuan Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Kabupaten Ketapang, terima kasih atas kesediaannya untuk diwawancara dan mencurahkan kisah hidupnya dalam berkeluarga dan bekerja. Khusus buat ibu-ibu yang mencemaskan saya yang belum menikah, karena telah berusia kepala tiga dan mengambil jurusan pendidikan yang tidak lazim. Terima kasih atas perhatiannya, saya merasa dengan keadaan sekarang justru saya merasa semakin mapan untuk melangkah dalam kehidupan berkeluarga.

Akhir kata saya sampaikan bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, namun saya berbesar hati karena telah diberi kesempatan untuk menyelesaikannya. Harapan saya semoga tesis ini dapat bermanfaat dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan bidang perempuan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

Jakarta, Juni 2008

Leli Ruspita

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leli Ruspita
NPM/NIP : 7105060041
Program Studi : Kajian Wanita
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

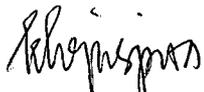
demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

"RELASI KUASA SUAMI-ISTRI BEKERJA BERDASARKAN PENGELOLAAN PENGHASILAN dan PEMBAGIAN KERJA (Studi Kasus Suami-Istri Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat)".

berserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Juli 2008
Yang menyatakan


(Leli Ruspita)

**POWER RELATION IN WORKING HUSBAND-WIFE BASED ON
HUSBAND'S-WIFE'S INCOMES and WORK DISTRIBUTION
A Case Study on Civil-Servant (PNS) Husband-Wife in Ketapang District, West
Kalimantan Province**

The construction of patriarchal culture which develops among the society has formed a comprehension about the roles of men and women in the family. A man is entitled to the role as the financial provider in the family, while a woman has a role as the housewife who manages the household activities. In its development, economic needs in a household have brought many women to get involved in an effort to meet their household needs. A situation which often occurs is the involvement of women in an effort to meet the household needs is not followed by fewer responsibilities for them in doing the household chores.

This thesis is written based on the results of a qualitative research conducted on Civil Servant women, in Ketapang District, West Kalimantan. It was conducted on 30 research informants; however, later during the process the number dropped into 16 informants due to the consideration that the needed data managed to be completed by conducting a depth interview to 16 informants. The decision to choose Civil Servant women whose spouses are also Civil Servants is made due to the consideration that Civil Servant Women, especially in local regions, constitutes the representatives of women who are educated and earn a fixed income. They also have a social status and are likely to use it to improve their life starting from their life in the family, and this is especially perceived from their ability in engaging in an equal husband-wife relation.

The research results show how a Civil Servant couple (husband-wife) earns their fixed incomes, manage and make use of them for the family needs. The process of managing and their incomes and the work distribution among them show that the women's bargaining position in fostering a husband-wife relationship is less advantageous. This can be observed clearly in the distribution of the household chores which tend to allocate more chores to the women.

There are a number of factors which influence why a woman's income does not reduce their household workload. Those factors include among others a cultural construction about family structure and gender role distribution which become established and contain stereotypes about the roles of women in the society and in the family. Such a cultural construction later provides a sense of establishment and comfort for men. In consequence, there is some kind of effort made by men to maintain the condition through their power and position in the family, especially from the perspective of his role and position as the financial provider in the family. Another factor is the women's awareness of the meaning of their own job and income, especially in their ability to see the benefits they can bring such as to meet their own needs and their family's.

Working women have started to shift their position in the family into a wife who accompanies her husband in the society and the family, works to meet the family's needs, and carries out the household chores. Whereas the husband is in a more advantageous position because he is served by his wife and family, has a power entitled to his position as the head of a family, faces less burdensome task as a provider thanks to the wife's income.

Nevertheless, there are a number of cases which show that the opportunity the women get to work which contributes to the incomes of the family constitutes an opportunity for the improvement of their position in engaging a husband-wife relationship and in a wider scope. For that reason, it is necessary to raise women's awareness and strengths in order to change the comprehension about the roles of husband-wife which is constructed in the society. Women can do that by paying attention to their interests and needs in the family and in the society.

This research illustrates the condition of working women with the setting of Ketapang District, which may be different from that of other towns and regions. It makes it possible to present recommendations and a more specific treatment in changing the comprehension about gender construction concerning the roles of husband and wife in the family and in the society.

ABSTRAK

Konstruksi budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat membentuk pemahaman mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Laki-laki sebagai pencari nafkah keluarga, perempuan sebagai ibu rumah tangga yang melaksanakan kegiatan rumah tangga. Dalam perkembangannya, kebutuhan perekonomian sebuah rumah tangga membawa perempuan terlibat dalam pemenuhan ekonomi rumah tangga. Sering terjadi, keterlibatan perempuan dalam pemenuhan ekonomi rumah tangga tidak diikuti dengan berkurangnya kewajiban perempuan dalam penyelesaian kerja rumah tangga.

Tesis ini ditulis dari hasil penelitian kualitatif terhadap perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS), di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Dilakukan terhadap 30 informan penelitian, kemudian dalam prosesnya menjadi 16 orang informan, dengan pertimbangan kebutuhan data sudah terpenuhi dari 16 orang informan yang diwawancara secara mendalam. Pemilihan Perempuan PNS struktural yang berpasangan dengan PNS, dengan pertimbangan bahwa perempuan PNS, khususnya di daerah merupakan perwakilan perempuan yang berpendidikan dan berpenghasilan tetap. Memiliki status sosial dan kemungkinan untuk digunakan dalam proses perbaikan hidup perempuan yang dimulai dari kehidupan perempuan dalam rumah tangga, terutama dilihat dari kemampuan perempuan membina relasi suami-istri yang setara.

Hasil penelitian memperlihatkan bagaimana suami-istri PNS yang memiliki penghasilan tetap, mengelola dan menggunakan penghasilannya untuk kebutuhan keluarga. Proses pengelolaan dan penghasilan suami-istri maupun pembagian kerja keduanya memperlihatkan posisi tawar perempuan dalam membina relasi suami-istri ternyata kurang menguntungkan. Hal ini terlihat jelas dari proses pembagian kerja rumah tangga yang lebih banyak diserahkan kepada perempuan.

Banyak faktor yang memengaruhi kenapa penghasilan perempuan tidak mengurangi beban perempuan dalam kerja rumah tangga. Diantaranya konstruksi budaya terhadap struktur keluarga dan pembagian peran gender yang kemudian menjadi baku dan menstereotipe peran perempuan dalam masyarakat dan dalam

rumah tangga. Konstruksi budaya ini kemudian memberikan keamanan dan kenyamanan kepada laki-laki, sehingga ada semacam upaya laki-laki mempertahankan kondisi tersebut melalui kekuasaan dan posisinya dalam keluarga, terutama dari sisi peran dan posisinya sebagai pencari nafkah keluarga. Faktor lain adalah kemampuan perempuan untuk menyadari arti perkerjaannya dan penghasilannya sendiri, terutama dalam melihat manfaatnya bagi kebutuhan diri dan kebutuhan keluarga.

Kondisi perempuan bekerja (PNS) kemudian membawa posisi perempuan dalam keluarga sebagai istri yang mendampingi suami dalam masyarakat dan dalam rumah tangga, bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga, dan melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Sedangkan suami, berada dalam kondisi yang menguntungkan karena mendapatkan pelayanan dari istri dan keluarga, memiliki kekuasaan dengan posisi sebagai kepala keluarga, mendapat keringanan mencari nafkah dari kontribusi penghasilan istri. Kemudian tetap terbebas dari kewajiban menjalankan peran rumah tangga.

Meskipun demikian, ada beberapa kasus yang memperlihatkan bahwa kesempatan perempuan bekerja di luar rumah yang memberikan kontribusi penghasilan, merupakan peluang bagi perbaikan posisi perempuan dalam membina relasi suami-istri maupun perbaikan posisi perempuan secara luas. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran dan kekuatan perempuan mengubah pemahaman peran gender suami istri yang dikonstruksi dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan perempuan dengan cara memperhatikan kepentingan dan kebutuhan dirinya dalam keluarga dan dalam masyarakat.

Penelitian ini, memberikan gambaran kondisi perempuan bekerja dengan situasi daerah kabupaten Ketapang, yang mungkin berbeda dengan kondisi dan situasi daerah perkotaan atau daerah lain. Sehingga memungkinkan rekomendasi dan perlakuan yang sedikit lebih spesifik dalam mengubah pemahaman konstruksi gender tentang peran suami-istri dalam keluarga dan dalam bermasyarakat.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah PNS di Indonesia berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan	10
Tabel 2	Jumlah PNS di Indonesia berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan.....	11
Tabel 3	Jumlah PNS di Komposisi Perempuan PNS yang Menduduki Jabatan Struktural di Kabupaten Ketapang	12
Tabel 4	Pengelolaan dan Penghasilan dalam Keluarga	69
Tabel 5	Pembagian Kerja Sehari-hari dalam Rumah Tangga.....	72
Tabel 6	Persentase partisipasi usia sekolah	81
Tabel 7	Persentase usia putus sekolah	81
Tabel 8	Gambaran Umum Informan	88
Tabel 9	Gambaran Umum Informan	88
Table 10	Gambaran Umum Informan	89
Tabel 11	Gambaran Umum Informan	90
Tabel 12	Kelompok Informan Berdasarkan Suku dan Agama Suami-Istri.....	90
Tabel 13	Penggolongan Berdasarkan Usia Informan.....	91
Tabel 14	Penggolongan Informan Berdasarkan Eselon Suami-Istri.....	91
Tabel 15	Perkembangan Pendidikan Informan Suami-Istri	93
Tabel 16	Model Pengelolaan Penghasilan Suami.....	94
Tabel 17	Model Pemanfaatan Penghasilan Suami-Istri	115

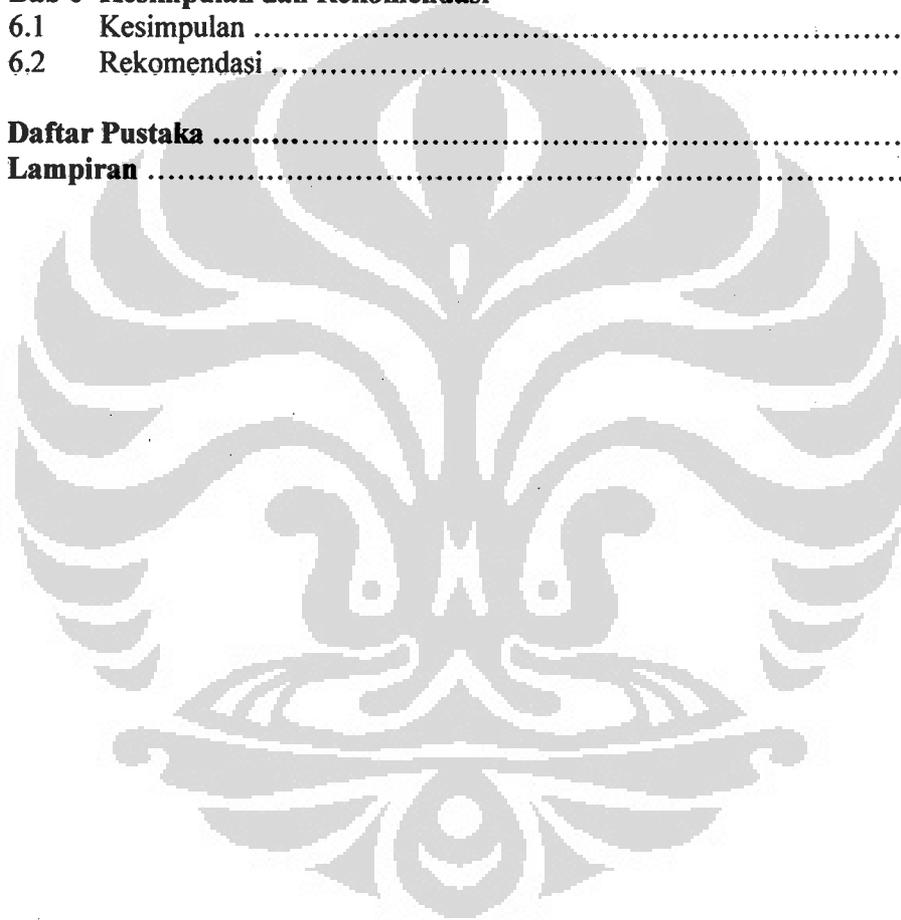
DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR ISI	xi
Bab 1 Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kenapa Saya Ingin Meneliti Penggunaan Penghasilan pada Perempuan Pasangan Pegawai Negeri Sipil.....	5
1.3 Perumusan Masalah	13
1.4 Tujuan Penelitian	14
1.5 Manfaat Penelitian	15
1.6 Sistematika Penulisan	16
Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Telaah Konseptual	
2.1 Penelitian Terdahulu	19
2.2 Telaah Konseptual	20
2.2.1 Gender dalam Konstruksi Budaya	21
2.2.1.1 Struktur Keluarga	23
2.2.1.2 Sosialisasi Peran Gender.....	27
2.2.2. Pembakuan Peran Gender dan Kedudukan Perempuan dalam Keluarga oleh Negara	31
2.2.3 Kekuasaan dalam Konsep Pembentukan Hubungan Suami-Istri	33
2.2.3.1 Kekuasaan	33
2.2.3.2 Kekuasaan dalam Poses Relasi Kuasa Suami-Istri	36
2.2.3.3 Seksualitas	39
2.2.3.4 Peran dan Posisi Perempuan dalam Pola Perkawinan.....	41
2.2.4 Analisis Kerja dalam Kerja Produksi dan Reproduksi.....	45
2.2.4.1 Pembagian Kerja dalam Analisis Kerja Perempuan.....	45
2.2.4.2 Surplus dalam Kerja Produksi dan Reproduksi.....	48
2.2.4.3 Makna Pekerjaan dan Keterasingan dalam Konsep Diri Perempuan Bekerja	49
2.3. Skema Kerangka konseptual.....	55
Bab 3 Metodologi Penelitian	
3.1 Posisi Penelitian Kegiatan Perempuan dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan	56
3.2 Penelitian Berperspektif Perempuan dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif	57
3.2.1 Pendekatan Kualitatif	58
3.2.2 Pendekatan Kuantitatif	60
3.3 Metode Pengumpulan Data	61

3.3.1	Studi Data Kepegawaian sebagai Pendekatan Kepada Informan.....	62
3.3.2	Random Sampling Sederhana	62
3.3.3	Wawancara	63
3.4	Informan Penelitian.....	65
3.5	Lokasi Penelitian	66
3.6	Instrumen Penelitian	67
3.7	Tehnik Analisis Data	67
3.8	Isu Etis	73
3.9	Proses Pelaksanaan Penelitian	74
3.9.1	Rencana dan Persiapan	74
3.9.2	Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan.....	74
3.9.3	Pencatatan Data Hasil Wawancara	77
Bab 4 Pengelolaan dan Pemanfaatan Penghasilan Suami-Istri Bekerja Formal		
4.1.	Perempuan dalam Sosial dan Ekonomi di Kabupaten Ketapang.....	79
4.1.1.	Kondisi Demografi Kabupaten Ketapang	79
4.1.2.	Perempuan dalam Sosial dan Ekonomi Kabupaten Ketapang.....	80
4.1.2.1	Pendidikan Perempuan.....	80
4.1.2.1	Perempuan dalam Ekonomi Kabupaten Ketapang	84
4.1.3	Gambaran Umum Informan.....	87
4.2	Pengelolaan Penghasilan Suami-Istri	93
4.2.1	Suami menycraahkan seluruh penghasilan untuk dikelola istri	95
4.2.2	Suami menyerahkan seluruh gaji tetapi tidak menyerahkan penghasilan lain untuk dikelola istri.....	99
4.2.3	Suami menyerahkan sebagian gaji, dan tidak menyerahkan penghasilan-penghasilan lain untuk dikelola istri.....	109
4.2.4	Suami sekali tidak menyerahkan penghasilan kepada istri, tetapi membiayai kebutuhan hidup keluarga yang bersifat pokok dan rutin.....	111
4.2.5	Suami sama sekali tidak menyerahkan penghasilan kepada istri dan tidak terlibat dalam membiayai kebutuhan pokok keluarga yang bersifat rutin ...	113
4.3	Pemanfaatan Penghasilan Suami-Istri.....	114
4.3.1	Penghasilan istri 100 % untuk keluarga tanpa bisa menabung.....	115
4.3.2	Penghasilan istri 100 % untuk keluarga dan masih bisa menabung dan masih bisa menabung untuk keluarga.....	118
4.3.3	Penghasilan istri ditabung semua untuk kepentingan istri.....	124
4.3.4	Penghasilan istri sebagian ditabung, sebagian untuk diri sendiri, sebagian untuk diri sendiri (kurang 20%).....	125
4.3.5	Penghasilan istri digunakan untuk keluarga tanpa sempat menabung dan masih bisa untuk diri sendiri (kurang 20%).....	129
4.4.	Diskusi	
4.4.1	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Pengelolaan Penghasilan Suami-Istri.....	131
4.4.1.1	Relasi kuasa dan pemaknaan suami tentang penghasilan.....	131
4.4.1.2	Suami mengingkari peran tradisional menafkahi keluarga.....	134
4.4.1.3.	Suami memanfaatkan kontribusi penghasilan istri.....	138

4.4.2	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemanfaatan Penghasilan Suami-Istri	141
4.4.2.1	Mempertahankan citra keluarga	141
4.4.2.2	Kemampuan negosiasi istri dengan suami.....	143
4.4.2.2.1	Negosiasi istri yang mengelola gaji bulanan suaminya secara penuh.....	143
4.4.2.2.2	Negosiasi istri yang mengelola gaji bulanan di luar penghasilan lain-lain suaminya	144
4.4.2.2.3	Negosiasi istri pada suami yang menyerahkan sebagian gaji, dan tidak menyerahkan penghasilan-penghasilan lain untuk dikelola istri	147
4.4.2.2.4	Negosiasi istri pada suami yang sama sekali tidak menyerahkan penghasilannya kepada istri, dan terlibat dalam membiayai kebutuhan pokok keluarga yang bersifat rutin.....	147
4.4.2.2.5	Negosiasi istri pada suami yang sama sekali tidak menyerahkan penghasilannya kepada istri, dan tidak terlibat dalam membiayai kebutuhan pokok keluarga yang bersifat rutin.....	149
4.4.3	Implikasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Penghasilan Suami-Istri terhadap Perempuan	149
4.4.3.1	Status Quo Keamanan Gender Laki-laki yang Melahirkan Kekerasan Psikologis terhadap Perempuan.....	150
4.4.3.2	Eksplorasi Ekonomi terhadap Perempuan	153
4.4.4	Strategi Perempuan dalam Mengatasi Kebutuhan Ekonomi Keluarga di Luar Upaya Memengaruhi Suami	154
4.4.4.1	Menekan dan Meniadakan Pengeluaran untuk Diri Sendiri	154
4.4.4.2	Mempergunakan Jasa Simpan Pinjam.....	156
4.4.4.3	Menekan Pengeluaran Konsumsi Keluarga	157
4.4.4.4	Menekan Pertumbuhan Jumlah Anggota Keluarga	159
Bab 5 Pembagian Peran dalam Rumah Tangga		
5.1	Pemaknaan Keluarga dan Relasi Suami-Istri.....	162
5.1.1	Kepercayaan Suami Kepada Istri sebagai Mitra Berkeluarga.....	162
5.1.2	Status Sosial Perempuan dalam Pengelolaan Penghasilan.....	166
5.2	Pembagian Kerja Suami-Istri	169
5.2.1	Pembagian kerja suami-istri dalam keluarga dengan suami menyerahkan seluruh penghasilan untuk dikelola istri	170
5.2.2	Pembagian bekerja suami-istri pada keluarga dengan suami yang menyerahkan seluruh gaji tetapi tidak menyerahkan penghasilan lain untuk dikelola istri	172
5.2.3	Pembagian kerja suami-istri pada keluarga dengan suami menyerahkan sebagian gaji, dan tidak menyerahkan penghasilan-penghasilan lain untuk dikelola istri.....	174
5.2.4	Pembagian kerja suami-istri pada keluarga dengan suami tidak menyerahkan penghasilan kepada istri, tetapi memenuhi beberapa kebutuhan pokok.....	176
5.2.5	Pembagian kerja suami-istri pada keluarga dengan suami tidak menyerahkan sama sekali penghasilan kepada istri	177
5.3	Diskusi	177
5.3.1	Perempuan menganggap rendah pekerjaannya.....	177

5.3.2	Implikasi Pembagian Kerja Suami-Istri terhadap Pengembangan Diri Perempuan	180
5.3.2.1	Pilihan karir setelah karir suami.....	180
5.3.2.2	Tidak ingin bersaing dan berkonflik.....	182
5.3.2.3	Perendahan terhadap perempuan dalam kerja rumah tangga.....	183
5.3.2.4	Kesadaran perempuan memperbaiki diri	188
5.3.3.	Pemanfaatan Ekonomi dan Tenaga Kerja Perempuan	190
5.3.3.1	Pemanfaatan ekonomi dan peran perempuan dalam keluarga.....	190
5.3.3.2	Pemanfaatan peran dan tenaga kerja perempuan	191
5.3.4	Relasi kuasa dalam pengelolaan penghasilan menurut pembagian kerja suami-istri.....	193
Bab 6	Kesimpulan dan Rekomendasi	
6.1	Kesimpulan	197
6.2	Rekomendasi	202
Daftar Pustaka	205
Lampiran	209



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstruksi budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat membentuk pemahaman yang membakukan peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Laki-laki sebagai pencari nafkah keluarga, perempuan sebagai ibu rumah tangga yang melaksanakan kegiatan rumah tangga. Perkembangan yang ada memperlihatkan kalau kebutuhan ekonomi sebuah rumah tangga kemudian membawa perempuan terlibat dalam pemenuhan ekonomi rumah tangga. Kondisi yang ada memperlihatkan keterlibatan perempuan dalam pemenuhan ekonomi rumah tangga sering tidak diikuti dengan berkurangnya kewajiban perempuan dalam penyelesaian kerja rumah tangga. Disamping itu, hasil kerja perempuan dalam menunjang ekonomi rumah tangga sering tidak terlihat atau kurang diperhitungkan karena dilaksanakan bersamaan dengan penyelesaian kerja rumah tangga dan hasilnya habis digunakan untuk membiayai kerja rumah tangga.

Konstruksi budaya patriarki terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga juga saya alami dalam kehidupan berkeluarga orangtua saya. Saya dibesarkan dalam keluarga tradisional dengan konsep keluarga *Batih* yang terdiri atas ibu, bapak dan anak-anak. Pelaksanaan kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga menempatkan ibu sebagai ibu rumah tangga yang melaksanakan semua kegiatan rumah tangga, menerima penghasilan bapak dan mengelolanya untuk membiayai kebutuhan keluarga. Karena penghasilan bapak tidak mencukupi keperluan keluarga, maka ibu mengelolanya bersama hasil kebun agar kebutuhan konsumsi dan pendidikan anak-anak terpenuhi. Tanpa kami sadari, ibu seperti

kebanyakan perempuan di sekitar kami sebenarnya menyumbang cukup besar dalam perekonomian keluarga. Namun karena kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh ibu bersamaan dengan kegiatannya menjalankan peran rumah tangga, terutama kewajibannya menyediakan konsumsi keluarga sebagai sesuatu yang biasa terjadi di lingkungan tempat tinggal kami, maka sumbangan ekonomi yang dilakukan perempuan dalam membesarkan keluarga tidak terlihat.

Sebagai pencari nafkah keluarga, laki-laki di sekitar saya mendapat tempat utama dan harus dilayani dengan baik ketika ia berada di rumah. Kondisi lingkungan serta sikap kebanyakan laki-laki yang menempatkan dirinya sebagai orang yang harus dilayani, berkembang menjadi sebuah konsep dalam pikiran saya tentang suami sebagai kepala keluarga yang pantas dihormati dan dilayani. Konsep ini tertanam di dalam pikiran saya dan berkembang menjadi model yang saya pikir akan saya jalani bila hidup berkeluarga. Saya akan menerima penghasilan suami dan mengaturnya untuk keperluan keluarga, dan sebagai istri wajib melaksanakan semua kegiatan rumah tangga dan melayani suami.

Ketika memasuki dunia kerja, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) saya memiliki penghasilan yang hanya cukup untuk diri sendiri. Namun ada yang mengganggu pikiran saya, tentang bagaimana rekan kerja perempuan di kantor yang menghitung gajinya untuk keperluan rumah tangga tanpa memikirkan keperluan mereka pribadi. Mereka menganggap dengan terpenuhinya kebutuhan anggota keluarga terutama konsumsi dan biaya pendidikan anak-anak berarti terpenuhi kebutuhan dirinya. Tidak ada keluhan meskipun mereka telah menghabiskan tujuh jam setiap harinya untuk bekerja di kantor, dan harus melaksanakan kewajiban dalam mengatur belanja dan mengelola konsumsi

keluarga, serta mengasuh anak-anaknya. Sebagian dari ibu-ibu tersebut menggunakan waktu satu jam istirahat siang untuk pulang menyediakan makan siang dan menjemput anak-anak sekolah.

Melihat pembagian peran dan penggunaan penghasilan dalam keluarga yang mengikuti pembagian peran, saya merasakan ada yang tidak seimbang dalam pola hubungan suami-istri di keluarga teman-teman saya. Sebab ternyata keterlibatan perempuan menyumbang ekonomi rumah tangga, tidak selalu diikuti keterlibatan suami dalam kerja rumah tangga. Ketika keperluan belanja rumah tangga sudah terpenuhi melalui penghasilan istri, kebanyakan mereka menggunakan penghasilan suami kepada barang-barang yang bersifat permanen seperti rumah, tanah, sepeda motor, mobil dan lainnya. Bahkan tidak jarang suaminya langsung menggunakan penghasilannya tanpa berkompromi dengan istrinya.

Pada awalnya saya melihat hal ini sebagai konsekuensi sebuah perkawinan yang tidak saya pahami karena saya belum menjalani perkawinan. Setelah seorang teman dekat mengalami proses perceraian yang semula mereka dikenal sebagai pasangan serasi, dan kemudian saya melihat bagaimana ia menempatkan suaminya sebagai prioritas utama dalam keluarga dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ia mengorbankan kesempatan meraih pendidikan yang lebih tinggi dan karier yang lebih mapan agar suami tetap berada di atasnya. Ia bahkan kemudian keluar dari rumah dengan status janda anak dua, tanpa membawa apapun karena semua harta yang dimiliki bersama secara hukum atas nama suami.

Saya kemudian melihat ada yang perlu dibenahi dari konsep hubungan antara perempuan dan laki-laki dalam membangun rumah tangga selama ini,

terutama menyangkut hak dan otoritas kaum perempuan serta kedudukannya sebagai istri maupun sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Namun pada waktu itu saya merasa tidak nyaman untuk memikirkan dan berbicara, karena situasi sebagai perempuan yang belum menikah menempatkan saya pada posisi orang yang belum berpengalaman. Di samping itu, membicarakan hak perempuan dalam pernikahan ternyata menimbulkan rasa tidak nyaman dalam diri perempuan dan mengganggu keberlangsungan hubungan dalam keluarga. Karena, hal tersebut bisa menciptakan konflik antara anggota keluarga khususnya suami-istri.

Sebelum kuliah di Program Kajian Wanita, saya tidak pernah menyadari bahwa ibu saya dalam situasi ekonomi rumah tangga yang tidak pasti, berusaha mengatasi persoalan ekonomi rumah tangganya. Bagaimana ibu menghadapi kelahiran anaknya setiap dua tahun tanpa perencanaan dan persiapan. Ia berusaha memberikan pendidikan dengan mengajarkan menapakkan kaki, membaca dan menulis, menyemangati untuk sekolah meskipun ia harus menanggung beban ekonomi yang tidak pasti.. Baru saya sadari bahwa hal-hal kecil inilah yang menjadikan saya bisa menjadi manusia seperti sekarang.

Mata saya semakin terbuka dengan membaca dan memahami kedudukan dan peran suami-istri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1971 tentang perkawinan. Terutama pada pasal 31 ayat 1 yang menyatakan jika hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam bermasyarakat. Namun kesamaan hak dan kedudukan tersebut menjadi kabur maknanya setelah membaca pasal 31 ayat 3 yang menguatkan kedudukan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga

dan istri sebagai ibu rumah-tangga. Pada pasal 34 ayat 1 dan 2 juga ditegaskan kewajiban laki-laki sebagai pencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Berangkat dari pengalaman melihat kehidupan berkeluarga kedua orangtua saya dan teman-teman saya, dan adanya pertentangan perasaan dan pikiran di dalam diri saya, mengenai kewajiban dan hak-hak yang didapat laki-laki dari kedudukannya sebagai suami, bapak, dan kepala keluarga membawa saya pada perenungan mengenai kelayakan hidup sebuah keluarga, terutama kehidupan perempuan. Penelusuran saya pada kewajiban suami-istri yang dilakoni perempuan dan laki-laki dalam perkawinan membawa saya pada proses penulisan tesis ini.

1.2 Kenapa Saya Ingin Meneliti Penggunaan Penghasilan pada Perempuan Pasangan Pegawai Negeri Sipil

Ada penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap persoalan dan pengalaman perempuan dalam mengelola ekonomi rumah tangga yang memberikan gambaran yang saling bertolak belakang. Moore (1998) mengangkat hasil penelitian Salaff tentang latar belakang keluarga dan pengalaman perempuan bekerja formal dan informal di Hongkong serta penelitian terhadap perempuan bekerja di luar rumah yang dilakukan oleh Barbara Ibrahim (1985) di Kairo dan penelitian Carmel Dinan (1977) di Ghana. Hasil penelitian Salaff memperlihatkan bahwa dalam ekonomi keluarga berpenghasilan rendah di Hong Kong, keberlangsungan sebuah keluarga sangat tergantung kepada penggabungan penghasilan beberapa anggota keluarga. Tekanan budaya dan agama yang menempatkan garis keturunan bapak yang lebih mengutamakan laki-laki dalam keluarga. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi anak laki-laki dan memaksa

anak perempuan tertua memasuki lapangan kerja di usia yang lebih dini untuk menyokong perekonomian keluarga. Meskipun ada sebagian anak perempuan di Hongkong mendapatkan otoritasnya dalam menentukan berbagai keputusan dalam keluarga termasuk keputusan menentukan pilihan pasangan untuk menikah, dan menabung biaya pernikahan agar lebih dihargai suami dan keluarga suami. Namun Salaff mengungkapkan relasi perempuan dan laki-laki kurang menguntungkan terutama dilihat dari kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan penghasilan yang masih sangat lebar. Hal ini dikarenakan anak perempuan memiliki akses yang lemah terhadap penghasilannya, karena tigaperempat dari penghasilan anak perempuan digunakan untuk keperluan keluarga, di antaranya membiayai pendidikan saudara laki-lakinya. Sedangkan penelitian Ibrahim dan Dinan memperlihatkan bekerja di luar rumah memberikan lebih banyak kemerdekaan sosial dan ekonomi perempuan terhadap laki-laki. Menurutnya bekerja memperkuat posisi perempuan, memberikan kesempatan untuk dihormati dan bersuara dalam setiap pengambilan keputusan dalam keluarga.

Di Indonesia sendiri ada penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap persoalan dan pengalaman perempuan dalam mengelola ekonomi rumah tangga, salah satunya penelitian Ihromi (1991), terhadap perempuan dari keluarga menengah ke bawah pada pasangan-pasangan suami-istri yang bekerja non formal seperti buruh bangunan, petani dan berbagai tipe keluarga kelas bawah lainnya. Hasil penelitian memperlihatkan kontribusi perempuan pada ekonomi rumah tangga menengah ke bawah yang memberikan peluang otoritas atau meningkatkan posisi tawar perempuan terhadap keputusan-keputusan penting dalam keluarga.

Kemudian hasil penelitian tesis Maria Hardy (1995) pada keluarga menengah ke bawah yang memiliki sumber penghasilan tidak teratur dan terbatas di daerah Jakarta, memperlihatkan bahwa kontribusi ekonomi perempuan bekerja terhadap perekonomian keluarga meningkatkan otoritas perempuan. Terutama terhadap relasi kuasa suami-istri berdasarkan pengaruh perempuan terhadap keputusan-keputusan yang dibuat dalam keluarga.

Menurut Saptari dan Holzner (1997), semakin tinggi penghasilan masing-masing anggota keluarga akan muncul kecenderungan anggota keluarga menyimpan sebagian penghasilan sendiri untuk dikonsumsi langsung atau diinvestasikan untuk masa depan. Secara tidak langsung kecenderungan ini akan menimbulkan ketegangan atau konflik dalam menentukan besarnya kontribusi yang akan diserahkan untuk dikelola sebagai pemenuhan konsumsi bersama. Saya menduga ketika otoritas atau otonomi masing-masing pihak dalam hal ini suami-istri semakin besar, maka akan semakin besar kemungkinan masing-masingnya untuk menyimpan atau menggunakan penghasilannya pada kepentingan pribadi.

Di Indonesia, kesempatan pendidikan yang diberikan kepada perempuan membuka peluang untuk terlibat aktif bekerja di luar rumah dengan penghasilan tetap. Bidang-bidang pekerjaan formal yang dimasuki perempuan berupa pegawai pemerintah yang dikenal dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan berbagai badan produksi lain yang dikelola oleh pemerintah dan swasta. Keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan memberikan dampak secara ekonomi dan politik bagi kehidupan perempuan dalam keluarga dan dalam bermasyarakat. Bekerja memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memiliki penghasilan dan bersosialisasi di luar rumah. Sejalan dengan kondisi ini,

pekerjaan perempuan dan laki-laki memberikan pengaruh terhadap kontribusi ekonomi dalam keluarga.

Saya tertarik dengan kehidupan perempuan PNS dalam mengelola kehidupan perekonomian keluarga, karena beberapa hal berikut:

- 1) Di saat pembakuan peran dalam keluarga oleh masyarakat dan negara tentang kewajiban suami sebagai pencari nafkah utama keluarga, sesungguhnya perempuan PNS juga berperan dalam menyumbang perekonomian keluarganya. Bahkan tidak jarang mereka menjadi tulang punggung bagi perekonomian keluarganya. Pembakuan peran gender perempuan dan laki-laki secara sosial membawa perempuan PNS yang berpasangan dengan laki-laki PNS pada situasi hubungan suami-istri yang mendukung perkembangan karir suaminya, termasuk dalam pemanfaatan penghasilannya untuk kepentingan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari catatan perkembangan pendidikan dan peningkatan karir PNS perempuan dan PNS laki-laki.
- 2) Menurut catatan BPS (2005), hampir dua puluh lima persen perempuan yang berpendidikan di Indonesia terutama di daerah dan pedesaan mengambil profesi sebagai PNS, karena memberikan jaminan penghasilan dan pensiun tetap. Sayangnya cukup banyak perempuan PNS yang mengambil posisi atau diposisikan sebagai tenaga fungsional non struktural. Posisi ini kurang memberikan kesempatan kepada perempuan dalam mengambil keputusan. Pada kenyataannya, suara dan kepentingan perempuan yang bekerja sebagai PNS masih tenggelam dalam dominasi dan kepentingan laki-laki.

Catatan perkembangan karir perempuan PNS di Indonesia terlihat dari komposisi perempuan PNS yang menempati dua pertiga total jumlah PNS di Indonesia. Pada akhir tahun 2007, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Badan Kepegawaian Negara mencatat jumlah PNS perempuan adalah 1.727.797 dari total 3.728.868 jumlah PNS di Indonesia. Namun angka ini kurang berarti bagi keterlibatan perempuan dalam level kebijakan karena kebanyakan perempuan PNS yang berpendidikan Diploma II dan III adalah PNS yang berprofesi sebagai guru SD, tenaga penyuluh pertanian dan perkebunan, serta tenaga medis perawat dan bidan yang menempati posisi PNS fungsional. Dalam kapasitasnya, PNS fungsional memberikan jasa pelayanan yang membutuhkan keterampilan, sedangkan PNS struktural memiliki peluang untuk terlibat di level pembuat kebijakan.

Jika dirinci menurut Jenis Kelamin dan Jabatan, pada umumnya pegawai yang menduduki jabatan struktural, persentase laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Pada jabatan fungsional umum, persentase laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan (46.957% dan 33.095%), sedangkan pada jabatan fungsional tertentu persentase perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki (63.098% dan 42.226%). Tabel 1 berikut memperlihatkan komposisi perempuan dalam eselon atau tingkat jabatan di lingkungan PNS di Indonesia sampai akhir tahun 2005.

Tabel 1
Jumlah PNS di Indonesia berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan
Keadaan September 2005

JABATAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH
	Laki-laki		Perempuan		
	JML	%	JML	%	
Eselon I	590	0.027%	63	0.004%	653
Eselon II	10,485	0.479%	755	0.049%	11,240
Eselon III	47,587	2.176%	7,444	0.483%	55,031
Eselon IV	167,099	7.641%	47,348	3.071%	214,447
Eselon V	10,783	0.493%	3,095	0.201%	13,878
Fungsional Tertentu	923,453	42.226%	972,953	63.098%	1,896,406
Fungsional Umum	1,026,908	46.957%	510,305	33.095%	1,537,213
Jumlah	2,186,905	100.00%	1,541,963	100.00%	3,728,868

Sumber: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Badan Kepegawaian Negara (2007).

Penjurangan karir PNS pada eselon yang lebih tinggi juga dipengaruhi oleh jenis dan tingkat pendidikan PNS. Penjurangan PNS untuk jabatan struktural membutuhkan pendidikan S-1 ke atas, jika rata-rata PNS perempuan banyak yang berpendidikan D-2 dan D-3, maka akan sulit untuk naik ke level pembuat kebijakan. Berikut ini tabel yang memperlihatkan sebaran tingkat pendidikan PNS di Indonesia sampai akhir tahun 2005,

Tabel 2
Jumlah PNS di Indonesia berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
Keadaan September 2005

TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH
	Laki-laki		Perempuan		
	JML	%	JML	%	
SD	108,424	4.96%	5,937	0.39%	114,361
SLTP	105,117	4.81%	16,216	1.05%	121,333
SLTA	805,667	36.84%	568,212	36.85%	1,373,879
DIPLOMA I	26,395	1.21%	34,125	2.21%	60,520
DIPLOMA II	256,914	11.75%	353,149	22.90%	610,063
DIPLOMA III	161,282	7.37%	137,828	8.94%	299,110
DIPLOMA IV	6,353	0.29%	2,368	0.15%	8,721
Strata I/S-1	641,519	29.33%	399,009	25.88%	1,040,528
Strata II/S-2	68,010	3.11%	23,451	1.52%	91,461
Strata III/S-3	7,224	0.33%	1,668	0.11%	8,892
Jumlah	2,186,905	100.00%	1,541,963	100.00%	3,728,868

Sumber: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Badan Kepegawaian Negara (2007).

Formasi jabatan PNS yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki juga terlihat jelas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Berdasarkan data Kepegawaian pada desember 2006 perempuan PNS di Ketapang berjumlah sepertiga atau 2.424 orang dari 6.694 PNS di Kabupaten Ketapang. Komposisi perempuan PNS yang menempati jabatan struktural adalah 81 eselon dari 611 eselon jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Komposisi ini menggambarkan ketidaksetaraan kesempatan perempuan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah yang berperspektif perempuan. Tabel 2 berikut ini adalah tabel yang menggambarkan formasi jabatan struktural yang ditempati PNS di Kabupaten Ketapang.

Tabel 3
Komposisi PNS perempuan dan laki-laki yang menduduki jabatan struktural
di Pemerintahan Kabupaten Ketapang
Keadaan Desember 2006

No	Rekap Eselenoring	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Perempuan dan laki-laki (orang)
1	Jumlah PNS eselon IIA	1	-	1
2	Jumlah PNS eselon IIB	18	1	19
3	Jumlah PNS eselon IIIA	110	11	121
4	Jumlah PNS eselon IIIB	-	-	-
5	Jumlah PNS eselon IVA	325	61	386
6	Jumlah PNS eselon IVB	23	1	24
7	Jumlah PNS eselon VA	60	6	60
Jumlah		530	81	611

Sumber: Kepegawaian Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang (2007).

Pentingnya perkembangan pendidikan dan penjurangan eselon perempuan PNS adalah terkait dengan besarnya penghasilan dan kesempatan untuk menggunakan penghasilan bagi kebutuhan individu dan keluarga. Perempuan dan laki-laki yang bekerja sebagai PNS dengan pendidikan dan masa kerja yang sama akan memiliki penghasilan yang sama jika mereka menduduki eselon yang sama. Dalam hal ini, perempuan akan memiliki kesempatan untuk menggunakan penghasilannya bagi keperluan keluarga dan keperluan dirinya sama seperti suaminya menggunakan penghasilannya. Sering terjadi, perempuan

PNS yang memiliki pendidikan dan penghasilan yang sama atau lebih besar dibanding suaminya, kemudian menggunakan semua penghasilannya untuk keperluan keluarga tanpa memikirkan keperluan dirinya. Bahkan sebagian besar menggunakan penghasilannya untuk mendukung kesempatan suami mendapat pendidikan dan mengembangkan karir. Akibatnya, perkembangan karir perempuan sebagai istri akan berada di garis bawah setelah perkembangan karir suaminya.

1.3 Perumusan Masalah

Saya mengamati adanya kenyataan bahwa partisipasi perempuan bekerja di luar rumah dan peran aktif perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan penghasilannya, ternyata tidak selalu menyebabkan berkurangnya kewajiban perempuan dalam kerja domestik atau rumah tangga. Muncul pertanyaan besar: apakah pengamatan sekilas tersebut memang benar? Bila ya, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Mengapa kontribusi nyata perempuan dalam pemenuhan nafkah keluarga tidak mengubah posisi tawarnya dalam relasinya dengan suami?

Cara-cara mengambil keputusan serta dalam bidang apa saja laki-laki dan perempuan memiliki peran dalam keluarga sangat penting diketahui untuk mengerti posisi tawar perempuan dalam keluarga dan melihat bagaimana kekuatan tawar menawar perempuan dalam proses pengambilan keputusan. (Levy, 1949: 1-6, dalam Sajogjo, 1985).

Pertanyaan lebih spesifik yang kemudian muncul adalah, bagaimana kontribusi perempuan dari pasangan suami-istri bekerja formal khususnya

Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap ekonomi rumah tangga terutama dalam pembentukan relasi kuasa suami-istri. Berdasarkan pertanyaan besar ini, saya merumuskan pertanyaan penelitian berikut ini **“Bagaimana relasi kuasa suami-istri tertampilkan dalam pemanfaatan penghasilan, serta dalam pemaknaan pembagian peran gender di antara keduanya?”**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, saya merumuskan pertanyaan turunan berikut ini

- 1) Bagaimana suami-istri mengalokasikan penghasilan istri dan penghasilan suaminya untuk keperluan keluarga dan keperluan lain-lain.
- 2) Bagaimana istri dan suami memaknai pembagian kerja, serta peran dan posisi perempuan dan laki-laki dalam keluarga.

1.4 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan melakukan eksplorasi dan pemahaman atas persoalan dan pengalaman perempuan bekerja terhadap relasi kuasa suami-istri. Hal ini menjadi penting bagi perkembangan studi perempuan dan perjuangan perempuan dalam upaya menyetarakan relasi gender antara perempuan dan laki-laki dari sisi kebutuhan dan kepentingan perempuan. Secara khusus penelitian melakukan kajian mendalam terhadap perilaku ekonomi perempuan melalui penggunaan penghasilan suami-istri, yang sekaligus akan memberikan pemahaman mengenai bagaimana kontribusi ekonomi perempuan berdampak terhadap posisi tawarnya dalam hubungan dengan suami dalam rumah tangga.

1.5 Manfaat Penelitian

Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial dan politik disebabkan oleh ketimpangan relasi gender antara perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga. Ketimpangan relasi gender dalam rumah tangga berawal dari hubungan suami-istri sebagai inti struktur keluarga dan unit terkecil dari struktur masyarakat dan negara.

Suara dan kepentingan perempuan tenggelam dengan posisi perempuan di dunia rumah tangga. Dengan demikian, kekuatan perempuan yang terkekang oleh dunia domestik akan lebih baik jika dibuka secara alamiah. Terutama dengan ekspresi perempuan di dunia kerja, serta kemampuannya mengelola dan memimpin diri dan anggota keluarganya dalam rumah tangga.

Penelitian ini untuk menghimpun data ilmiah tentang pengalaman perempuan bekerja, khususnya pada pasangan suami-istri bekerja formal seperti pasangan suami-istri PNS. Penelitian ini mencoba menggarisbawahi bahwa, peranan perempuan bekerja untuk menyokong perekonomian keluarga tidak selalu memberikan otonomi dan memperkuat posisi tawar perempuan dalam keluarga. Meski demikian, penelitian ini juga menyoroti partisipasi perempuan di dunia kerja dan kontribusi ekonomi perempuan dalam ekonomi keluarga sebagai strategi penguatan perempuan.

Penguatan ekonomi perempuan dalam keluarga merupakan langkah untuk penguatan personal perempuan. Melalui pengalaman pribadi dari kehidupan sehari-hari dan berangkat dari kondisi sosial yang ada, perempuan memiliki

kesempatan membuat strategi yang menawarkan alternatif untuk menghadapi budaya patriarki atau dominasi laki-laki dalam keluarga. Strategi penguatan personal perempuan melalui perannya dalam ekonomi keluarga merupakan strategi untuk meningkatkan kewenangan perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi keluarga, dan memperjuangkan kepentingan dirinya yang dimulai dari lingkungan keluarga.

1.6 Sitematika Penulisan

Saya menuangkan penulisan tesis ini dalam enam bab, yaitu bab pendahuluan, kerangka konseptual, metodologi penelitian, pengelolaan dan pemanfaatan penghasilan suami-istri bekerja formal, pembagian kerja suami-istri, serta peran dan posisi perempuan dan laki-laki dalam keluarga, kesimpulan dan rekomendasi.

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian. Bab dua merupakan kerangka konseptual yang berisi penelitian terdahulu yang menggunakan tema perempuan bekerja dan perempuan dalam ekonomi rumah tangga, kerangka teori dan kerangka berpikir. Bab tiga merupakan gambaran umum tentang pelaksanaan penelitian yang terdiri atas pendekatan penelitian, metode pengambilan data, informan penelitian, lokasi penelitian, instrument penelitian, tehnik analisis data, isu etis, proses pelaksanaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab empat dan bab lima merupakan hasil temuan lapangan dan analisa. Saya membahas bab empat dalam lima subbab, subbab pertama membahas perempuan dalam sosial dan ekonomi Kabupaten Ketapang. Subbab ini berisi

kondisi demografis, perempuan dalam perkembangan pendidikan, perempuan dalam perekonomian ketapang. Kemudian subbab kedua berbicara tentang pengelolaan penghasilan suami, subbab ketiga berisi pemanfaatan penghasilan istri dan subbab keempat adalah diskusi. Dalam diskusi membicarakan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pengelolaan dan pemanfaatan penghasilan suami-istri, kemudian implikasi pengelolaan dan pemanfaatan penghasilan suami-istri terhadap perempuan. Dalam Implikasi membicarakan adanya kemungkinan eksploitasi terhadap penghasilan perempuan dan upaya laki-laki mempertahankan status quo keamanan gender yang melahirkan kekerasan psikologis terhadap perempuan. Dalam diskusi juga dibicarakan bagaimana perempuan berstrategi mengatasi kebutuhan ekonomi keluarganya di luar upaya memengaruhi suaminya.

Bab lima membicarakan pembagian peran dalam keluarga yang terdiri atas tiga subbab. Subbab pertama berisi pemaknaan keluarga dan relasi suami-istri, subbab kedua berisi pembagian kerja berdasarkan pola-pola pengelolaan penghasilan suami. Kemudian subbab ketiga berisi hasil diskusi yang membicarakan relasi kuasa dalam pembagian kerja suami-istri dan implikasinya terhadap pengembangan diri perempuan. Dalam implikasi dibicarakan pilihan perempuan untuk mengembangkan diri, kemungkinan pemanfaatan ekonomi dan tenaga kerja perempuan, kesadaran perempuan memanfaatkan penghasilan dan pelaksanaan peran rumah tangga dalam memperbaiki diri dan menjaga relasi suami-istri. Kemudian membicarakan adanya perendahan identitas gender perempuan melalui penyerahan tanggungjawab kerja rumah tangga kepada perempuan. Secara keseluruhan tulisan ini kemudian ditutup dengan bab enam yang berisi kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian.

mengembangkan kariernya. Perempuan PNS cenderung mempertimbangkan keluarga dan mengorbankan kariernya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu dalam keluarga.

Kemudian penelitian Poerwandari (1993), tentang aspirasi dan aktualisasi perempuan muda yang bekerja, meneliti bagaimana perkembangan dan partisipasi perempuan dalam masyarakat dan pembangunan masih dibatasi oleh faktor-faktor kultural dan pandangan sebagian atau sekelompok masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan faktor-faktor penghambat dari dalam seperti konsep diri, peran, dan kedudukan perempuan dari sisi pengalaman dan pemahaman perempuan. Secara umum tema mengenai aspirasi yang muncul dari penelitian ini adalah pekerjaan dan karir, kemandirian, persahabatan dan hubungan akrab (= *companionship*) dengan pasangan, dan keseimbangan hidup (= *balanced life*). Menurut Poerwandari, yang perlu dikaji lebih lanjut adalah kondisi-kondisi yang memengaruhi aktualisasi aspirasi pada perempuan bekerja, tentang perempuan bekerja membina hubungan dengan pasangannya, bagaimana relasi kuasa suami-istri terbentuk. Saya mencoba membedahnya dari sisi pengalaman perempuan bekerja formal dalam mengalokasikan penghasilannya untuk melihat bentuk kekuasaan dalam kontribusi penghasilan perempuan PNS yang berpasangan dengan PNS.

2.2 Telaah Konseptual

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini diperlukan sebuah kerangka konseptual mengenai persoalan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang menempatkan perempuan pada posisi tawar menguntungkan atau kurang menguntungkan dalam relasi kuasa suami-istri. Beberapa konsep yang akan

dipergunakan dalam menjawab persoalan penelitian ini adalah gender dalam konstruksi budaya, pembakuan peran gender dan kedudukan perempuan dalam keluarga, kekuasaan dalam konsep pembentukan hubungan suami-istri, serta analisis kerja dalam kerja produksi dan reproduksi.

2.2.1 *Gender dalam Konstruksi Budaya*

Manusia memiliki kemampuan mengklasifikasikan lingkungannya menurut simbol yang diciptakan dan dibakukan dalam tradisi dan dalam sistem budayanya. Dalam setiap kebudayaan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki pada tingkatan ideologi dan simbol selalu menempatkan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini menurut Ortner (1974) dalam Moore (1978), disebabkan setiap budaya memberikan nilai yang lebih rendah terhadap perempuan. Oleh karena itu, proses simbolisasi yang terkait dengan sistem budaya ataupun struktur sosial setiap masyarakat menempatkan perbedaan gender tidak selalu bertumpu pada perbedaan biologis.

Perbedaan gender yang dikonstruksi budaya melahirkan peran gender tradisional perempuan yang dinilai lebih rendah dibandingkan peran gender tradisional laki-laki. Penilaian peran gender yang rendah kemudian menimbulkan masalah yang perlu digugat karena menimbulkan persoalan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh 'peran gender' tersebut. Manifestasi ketidakadilan gender menurut Faqih (2001), berupa marginalisasi (kemiskinan ekonomi), subordinasi, stereotype, kekerasan, dan beban ganda terhadap perempuan.

Marginalisasi terhadap perempuan dapat kita lihat dari banyak kepala keluarga perempuan yang menjadi lebih miskin karena asumsi bahwa kepala keluarga adalah laki-laki. Akibatnya, perempuan kepala keluarga di tempat

bekerja mendapat spesialisasi pekerjaan yang lebih ringan dengan kompensasi upah lebih rendah.

Subordinasi terhadap perempuan berupa anggapan dasar bahwa perempuan itu irasional, emosional, lemah dan tidak bisa memimpin. Anggapan ini membawa perempuan pada situasi yang kurang menguntungkan. Potensi perempuan sering diabaikan di dalam masyarakat maupun keluarga. Sehingga, perempuan sulit untuk menembus posisi-posisi strategis dalam komunitasnya, terutama yang berhubungan dengan pengambilan keputusan.

Pelabelan negatif (*stereotype*) terutama perempuan terjadi. Misalnya, setiap pekerjaan yang dilakukan perempuan dinilai hanya sebagai penghasilan tambahan sehingga perempuan wajar saja dibayar rendah. Penghasilan perempuan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan utama, meskipun perempuan menggunakan seluruh penghasilannya untuk keperluan keluarga. Alokasi penghasilan perempuan juga sering tidak diperhitungkan nilainya bagi kepentingan perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan karena perbedaan gender juga terjadi. Kekerasan ini berupa kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kepada kekerasan dalam bentuk yang lebih halus seperti pelecehan dan penciptaan ketergantungan. Penciptaan ketergantungan dalam hal ini adalah ketergantungan psikologis dan ketergantungan ekonomi, dengan cara alokasi penghasilan suami kepada akses-akses permanen seperti rumah dan tanah, sampai biaya pendidikan suami dan anak yang akan meningkatkan posisi laki-laki dalam keluarga. Penghasilan perempuan dialokasikan kepada kebutuhan rumah tangga yang habis dipakai seperti biaya konsumsi yang habis dipakai dan tidak menimbulkan

ketergantungan laki-laki, sebab laki-laki memiliki penghasilan sendiri ketika perempuan tidak memiliki penghasilan.

Ada pula beban majemuk yang harus ditanggung perempuan. Karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dibanding laki-laki. Pembagian peran gender yang tersosialisasi dalam masyarakat dan keluarga menimbulkan tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa perempuan harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Beban ini menjadi ganda ketika perempuan juga harus bekerja di luar rumah untuk menunjang nafkah keluarga.

Saya mencoba menelaah konstruksi budaya terhadap peran gender perempuan dan laki-laki melalui relasi kuasa suami-istri yang tidak seimbang dengan beberapa konsep yang terdiri struktur keluarga dan sosialisasi peran gender..

2.2.1.1 Struktur Keluarga

Menurut Horton (1984), keluarga merupakan kelompok sosial yang terbentuk melalui hubungan darah, perkawinan, adopsi dan yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga. Kelompok keluarga terbagi atas tiga bagian, pertama keluarga batih (*nuclear family*) yang terdiri atas pasangan suami-istri dan anak-anaknya. Kedua, keluarga luas (*extended family*) yang terdiri dari keluarga batih plus kerabat lain dengan siapa hubungan baik dipelihara dan dipertahankan. Ketiga, keluarga hubungan kerabat sedarah (*consanguine family*) yang merupakan *klan* luas dari saudara-saudara sedarah dengan pasangan dan anak-anak mereka.

Malinowski (1913), yang dikutip oleh Collier et al., (1982) dalam (Moore, 1998), memberikan tiga definisi tentang keluarga. Yang pertama, ia mendefinisikan keluarga sebagai satu unit ikatan sosial yang istimewa dibanding unit kesatuan serupa lainnya. Kedua, ia menempatkan keluarga sebagai lokasi/kedudukan fisik rumah di mana fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pengasuhan anak diselenggarakan. Kemudian yang ketiga, ia mendefinisikan keluarga sebagai serangkaian ikatan emosional yang khas diantara anggota-anggota keluarganya.

Ketiga definisi keluarga yang dikemukakan oleh Malinowski di atas menurut Thorne (1982), lebih lanjut kemudian mengembangkan pembedaan antara wilayah domestik dan wilayah publik. Rumah merupakan wilayah '*domestik*', surga perlindungan dan pengasuhan yang terpisah dan berlawanan dari dunia kerja '*publik*'.

Keluarga terbentuk melalui proses perkawinan antara dua individu. Menurut Beauvoir (2003), tujuan sebuah perkawinan sebenarnya pelaksanaan kewajiban antara perempuan dan laki-laki yang dianggap saling menguntungkan. Secara ekonomi perkawinan menempatkan perempuan dalam situasi yang sulit. Melalui perkawinan perempuan mengubah statusnya dari anak dan saudara perempuan menjadi istri dan ibu. Tetapi perempuan tetap menjalankan peran sebagai pengelola rumah tangga dan bertanggung jawab bagi penyajian konsumsi keluarga.

Engels (dalam Tong, 1997) menguraikan dugaannya bahwa peran perempuan sesungguhnya sangat besar di masa lalu. Perkawinan laki-laki dan perempuan tidak dibatasi dengan ketat. Perkembangan kapitalisme yang

mengarahkan perkawinan menjadi monogami dengan laki-laki sebagai ‘pemilik’ merupakan representasi dominasi laki-laki yang menegaskan proses pengalihan kepemilikan oleh laki-laki kepada anak. Dominasi itu sendiri merupakan bentuk patriarki yang direproduksi oleh sistem patriarki dalam pembagian kelas melalui kepemilikan oleh laki-laki dan ketidak kepemilikan oleh perempuan. Hasil dari kekuatan kelas dan desakan kebutuhan ekonomi kemudian menjadi dasar terbentuknya sebuah perkawinan.

Konsep keluarga yang *universal* atau dianggap berlaku sama di seluruh dunia, dan sering dianggap ada dalam kebudayaan lain sebenarnya tidak sepenuhnya universal. Umar (2001), menyatakan bahwa dalam catatan sejarah masyarakat tradisional seperti masyarakat pertanian agraris di Asia yang sering hidup secara komunal, biasanya memiliki bentuk keluarga *nuclear* atau keluarga luas. Dalam keluarga luas, sebuah keluarga memiliki atau hidup dengan anggota keluarga lain dalam rumah selain anggota keluarga *batih*. Dalam pola hidup komunal proses produksi dilakukan di dalam rumah dan pengasuhan anak atau pekerjaan rumah tangga lainnya dibantu anggota keluarga lain. Ketika peran pencari nafkah dilakukan secara bersama atau dilakukan oleh laki-laki di luar rumah, maka pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh istri bersama anggota keluarga lain.

Kapitalisme kemudian menghancurkan konsep keluarga tradisional yang menganut pola hidup komunal atau bentuk keluarga *nuclear* menjadi keluarga *batih*. Perubahan struktur keluarga komunal menjadi keluarga *batih* yang hanya terdiri dari ibu, ayah, dan anak, membawa pekerjaan rumah tangga sebagai kewajiban perempuan sebagai istri dan sebagai ibu (Moore, 2003).

Menurut Horton (1984), keluarga mempunyai hubungan keterkaitan dengan lembaga masyarakat lainnya. Hubungan keterkaitan dengan lembaga masyarakat memfungsikan keluarga secara luas yang menyangkut pengaturan hubungan seksual, reproduksi, sosialisasi, kasih sayang, penentuan status, perlindungan dan fungsi ekonomis. Fungsi dan pengaturan terhadap keluarga kemudian membawa konsekuensi bagi terbentuknya hirarki atau hubungan antara anggota keluarga dan struktur keluarga.

Struktur keluarga dianggap penting dalam penelitian ini, karena keluarga merupakan wadah bagi konstruksi patriarki melalui sosialisasi peran gender dan pembentukan diri (*self*) dari individu perempuan dan laki-laki. Dalam hal ini, keluarga merupakan sarana penerapan nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap pemahaman individu mengenai peran dan kedudukan gendernya. Keluarga merupakan wadah atau struktur yang memberikan status sekaligus kewajiban dan hak seseorang dalam keluarga dan dalam masyarakat sebagai suami atau sebagai istri (Moore, 2003).

Secara umum saya melihat dalam masyarakat sekitar saya berkembang pandangan ideal mengenai keluarga. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang lengkap dengan suami, istri, dan anak, sehingga hal-hal yang berbeda dari hal tersebut dianggap menyimpang. Misalnya keluarga dengan orangtua tunggal, perceraian, dan tidak memiliki anak. Pandangan tentang keluarga ideal kemudian membentuk pandangan mengenai peran suami-istri, di mana suami memiliki peran khusus dan istri juga memiliki peran khusus yang berbeda. Bila keluarga tidak memenuhi norma ini, keluarga tersebut akan dianggap sebagai keluarga yang tidak ideal ataupun bermasalah. Agar dianggap tidak menyimpang dari

konsep keluarga ideal inii, saya melihat banyak perempuan mencoba mempertahankan pola-pola yang dianggap ideal tersebut, meskipun hal itu mengorbankan dirinya sendiri.

2.2.1.2 Sosialisasi Peran Gender

Sosialisasi merupakan proses yang dialami oleh setiap individu sepanjang hidupnya. Sosialisasi memberikan pengaruh bagaimana individu berperan dan bersikap terhadap diri dan lingkungannya. Sosialisasi merupakan proses belajar tentang nilai, norma, bahasa, simbol, keterampilan dan sebagainya untuk dapat diterima masyarakat dimana ia berada. Memenuhi syarat sebagai anggota masyarakat yang 'normal' atau diterima, diperlukan kemampuan untuk menilai secara objektif perilaku diri sendiri dari sudut pandang orang lain (Soe'oed. 1999). Seseorang yang telah memiliki kemampuan menilai diri sendiri berdasarkan pandangan orang lain dinamakan telah memiliki apa yang disebut 'self' (diri). 'Self' kemudian terbentuk dan berkembang melalui proses sosialisasi dengan cara berinteraksi dengan orang lain.

Pada dasarnya, semenjak lahir manusia sering dihadapkan pada kondisi lingkungan tempat tinggal yang akan memengaruhi pola pikir dan bertindak (Koentjaraningrat, 1984). Semenjak lahir perempuan dan laki-laki dihadapkan pada permasalahan dan situasi yang sama secara berulang-ulang terhadap objek yang sama. Misalnya, perlakuan perbedaan peran yang dilihat pada masa kanak-kanak akan melahirkan respon, persepsi, kognisi, atau tindakan terhadap perbedaan peran perempuan dan laki-laki. Menurut Lave (1996), situasi lingkungan akan memberikan serangkaian informasi ide-ide yang di'*internalisasi*'

sejak masa kanak-kanak akan cenderung memengaruhi tindakan psikologis seseorang.

Menurut Maccoby dan Jacklin (Scanzoni, 1976) yang dikutip Soe'oad (1999), perbedaan peran menurut jenis kelamin tersosialisasi sejak masih anak-anak. Terutama sosialisasi yang didapat anak melalui perlakuan orangtua. Perlakuan orangtua terhadap anak perempuan dan laki-laki yang berbeda dapat dijelaskan melalui tiga teori, yakni teori '*imitasi*', mengenai identifikasi awal seorang anak terhadap anggota keluarga yang jenis kelaminnya sama dengannya, dengan meniru tingkah laku tertentu orang dewasa. Anak mengidentifikasi dirinya dengan orangtuanya yang berjenis kelamin sama dengan dirinya. Teori yang kedua '*self-socialization*', anak berusaha mengembangkan konsep tentang dirinya sebagai perempuan atau laki-laki, dan mengembangkan pengertian tentang apa yang harus dilakukan bagi jenis kelamin yang bersangkutan. Teori yang ketiga '*reinforcement*', sanksi atau hukuman dan penghargaan yang diberikan orang dewasa dalam keluarga mendorong anak untuk bertingkah laku sesuai dengan jenis kelaminnya.

Menurut Scanzoni dan Scanzoni yang dikutip Soe'oad (1999), laki-laki disosialisasikan untuk melakukan peran yang bersifat instrumental yaitu berorientasi pada pekerjaan mencari nafkah (*task oriented*) sedangkan perempuan harus melakukan peran yang bersifat ekspresif, yaitu berorientasi pada emosi manusia dan hubungannya dengan orang lain (*people oriented*). Misalnya, seorang anak laki-laki akan disosialisasikan menjadi aktif dan tegas, dibiasakan memimpin dan menyelesaikan masalah, kemudian setelah remaja dilibatkan dalam proses pekerjaan mencari nafkah di luar rumah. Sebaliknya, anak

perempuan disosialisasikan untuk bermain di dalam rumah dengan permainan yang memprosesnya memahami pekerjaan rumah tangga dan memahami orang lain.

Proses sosialisasi yang dilalui anak sebelum menjadi orang dewasa akan menentukan sosialisasinya di dunia kerja, dalam perkawinan, dan sosialisasi menjadi orangtua bagi anak-anak. Proses sosialisasi ini sangat dipengaruhi oleh harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki berperan sebagai orang dewasa. Sosialisasi peran gender yang di'*internalisasi*' seseorang dari lingkungan semenjak lahir akan memengaruhi tindakan dan sikap peran gender yang akan diambil oleh seseorang terhadap peran gendernya setelah dewasa. Kemudian, hasil sosialisasi tersebut dibawa masing-masing pihak perempuan dan laki-laki dalam pernikahan melalui pembagian peran antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga.

Seberapa besar individu sebagai perempuan dan laki-laki memiliki peluang untuk melewati batas-batas pembagian peran gender dalam masyarakat sangat ditentukan oleh budaya dan fleksibilitas individu. Ketika perempuan memasuki dunia publik dan bekerja serta berkontribusi ekonomi rumah tangga dengan penghasilannya, berarti ia melewati batas-batas pembagian peran tradisional antara perempuan dan laki-laki. Sebaliknya, laki-laki yang memasuki peran domestik dan bertukar peran dengan perempuan masih mengalami benturan dari harapan masyarakat tentang peran gender laki-laki itu sendiri.

Peran gender menurut Goldman and Milman (1984), adalah tingkah laku, sikap, karakteristik psikologis dan kemampuan seseorang yang dituntut secara sosial sebagai perempuan dan laki-laki dalam budaya tertentu. Jika menurut Wade

and Travis (Lonner and Malpass, 1994), seks secara anatomi tidak berubah dan universal, maka gender merupakan rekaan sosial. Dengan demikian setiap budaya tertentu akan memiliki ide atau rekaan yang berbeda terhadap apa yang menjadi peran gender antara perempuan dan laki-laki menurut budaya tersebut.

Perbedaan gender memberikan permasalahan terhadap perempuan karena konstruksi budaya mensosialisasikan perempuan memilih untuk bertindak sesuai dengan harapan lingkungannya. Dalam hal ini, perempuan diarahkan untuk memilih perannya yang dianggap sesuai dengan identitas gendernya agar bisa diterima dalam masyarakatnya. Identitas gender merupakan perwujudan harapan masyarakat yang menyangkut kesesuaian dan kewajaran perilaku perempuan dan laki-laki (Moose, 2003). Konstruksi budaya yang mensosialisasikan peran gender perempuan dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan peran gender laki-laki, terutama dalam berbagai keputusan rumah tangga akan melahirkan pemaknaan yang rendah dalam diri perempuan tentang identitas gendernya.

Benokraitis dan Feagin (1995), menjelaskan akibat yang ditimbulkan perendahan identitas gender pada perempuan dapat berupa perubahan perilaku perempuan, seperti munculnya kemauan bekerja lebih keras untuk membuktikan kemampuannya. Bentuk lain berupa perasaan tidak berdaya dan rapuh (*vulnerability*), akibat rasa malu dan marah yang tidak terekspresikan. Perasaan itu nantinya termanifestasikan pada rendahnya kepercayaan dan sikap diri karena keberadaan mereka tidak dihargai dengan baik. Perilaku yang lain adalah diskriminasi terselubung dalam diri perempuan yang muncul karena pesan ambigu yang diterima perempuan (*supportive disconfirmation*). Pesan ambigu muncul karena

adanya dorongan yang bersifat positif tetapi tetap mempertahankan pola stereotip yang membatasi pilihan perempuan (*encouraged but stereotyped*).

Konteks lain juga terlihat pada kegagalan sebuah rumah tangga perempuan bekerja, dijadikan sebagai beban atau kesalahan perempuan. Terutama dari sudut pandang dan penerimaan masyarakat terhadap perempuan bekerja. Untuk diterima masyarakat, perempuan bekerja masih harus menjalani peran rumah tangga meskipun sebagian waktunya sudah habis untuk bekerja di luar rumah. Stereotipe bahwa pelaksanaan peran rumah tangga sebagai kewajiban perempuan menjadi peluang bagi teralokasinya penghasilan perempuan kepada kebutuhan pokok rumah tangga seperti belanja konsumsi secara penuh. Peluang perempuan mengalokasikan penghasilannya kepada akses rumah tangga permanen seperti tanah dan rumah menjadi rendah. Akibatnya, akses perempuan terhadap kepemilikan bersama dan pribadi dalam rumah tangga menjadi rendah. Rendahnya akses kepemilikan bersama dan pribadi akan menciptakan peluang rendahnya kontrol dan posisi perempuan dalam relasi suami-istri.

2.2.2 Pembakuan Peran Gender dan Kedudukan Perempuan dalam Keluarga

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1971 tentang perkawinan, khususnya mengenai pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri, pasal 30 disebutkan, ***"suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat"***.

Secara hukum perempuan dan laki-laki memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup sebuah keluarga. Yang berarti diberikannya kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk

beraktivitas di tengah masyarakat dan tempat kerja, serta dalam kehidupan berkeluarga.

Hak dan Kedudukan suami-istri yang seimbang dalam berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam bermasyarakat kemudian dijelaskan dalam pasal 31 ayat 1, yang menyatakan, ***"hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam bermasyarakat"***.

Namun keseimbangan hak dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, khususnya perempuan kemudian dibatasi oleh pembagian peran suami-istri dalam keluarga melalui pasal 31 ayat 3 yang berbunyi, ***"laki-laki sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga"***.

Dalam pelaksanaannya pasal 31 ayat 3 kemudian diperkuat dengan pasal 34 ayat 1 yang menyatakan, ***"suami wajib melindungi istrinya dan wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"***, dan ayat 2 yang menyatakan, ***"istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya"***.

Kedudukan suami sebagai kepala keluarga yang wajib melindungi dan memberi nafkah kepada istri memberi konotasi berkuasa dan berkedudukan lebih tinggi. Sedangkan perempuan sebagai istri berkewajiban mengatur rumah tangga dan menerima nafkah dari suami. Kedudukan perempuan dalam rumah tangga kemudian menempatkan perempuan pada kewajiban melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti pengasuhan anak, menyediakan konsumsi bagi keluarga.

Pembagian peran dalam keluarga yang dibakukan secara hukum antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berkeluarga akan memengaruhi proses

pengelolaan penghasilan. Hal yang sama juga mungkin terlihat pada pasangan suami-istri pegawai negeri sipil (PNS). Pengelolaan penghasilan akan menentukan alokasi atau kontribusi penghasilan suami-istri dalam perkawinan. Secara hukum, harta benda dalam perkawinan di atur dalam Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan, *"harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*, dan Ayat 2 , yang berbunyi *"mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"*,

Meskipun secara hukum dinyatakan milik bersama dan pengelolaannya dilakukan berdasarkan persetujuan bersama, kita masih perlu mempertanyakan penguasaan perempuan atas penghasilannya sendiri. Seperti untuk keperluan apa penghasilan istri dialokasikan, bagaimana proses alokasi, proses penggunaan, dan manfaat serta kepemilikan harta bersama secara hukum. Kita masih mempertanyakan batasan hak dan kepemilikan perempuan yang bekerja terhadap harta bersama, karena bisa dijadikan jalan untuk memperbaiki kekuatan personal perempuan dalam keluarga.

2.2.3. *Kekuasaan dalam Konsep Pembentukan Hubungan Suami-istri*

2.2.3.1. *Kekuasaan*

Kekuasaan berpengaruh secara universal dalam masyarakat, termasuk dalam pengaturan pola relasi gender antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga (Nazarudin, 1999). Banyak anggapan bahwa perempuan adalah 'feminin' sehingga lebih lembut dan lemah dibandingkan laki-laki yang 'maskulin' yang lebih tegar dan kuat. Dua kutub feminin dan maskulin merupakan dua keadaan yang menempatkan kedua jenis kelamin dalam satu garis vertikal, feminin di posisi bawah yang ter subordinasi dan maskulin di posisi atas yang

dominan. Subordinasi dan dominasi kekuasaan tersebut menempatkan adanya pihak yang diperintah dan yang memerintah.

Kekuasaan berkait erat dengan pengambilan keputusan. Weber (dalam Lukes, 1986) menghubungkan kekuasaan dengan dominasi, yaitu situasi ketika keinginan dimanifestasikan dalam bentuk perintah dari orang yang berkuasa atau membuat peraturan untuk memengaruhi tingkah laku orang yang dikuasai, sehingga terkadang perintah tersebut seolah-olah datang dari hati mereka sendiri.

Memandang proses pelaksanaan kekuasaan, Dowding, K (1996), mendefinisikan kekuasaan sebagai *Power to* dan *power over*. *Power to*, adalah kemampuan seseorang untuk menganalisis dan mengukur kemampuan diri untuk melakukan sesuatu. Dalam prosesnya lebih menitikberatkan kerjasama untuk menghasilkan kekuasaan, maka seseorang yang menjadi objek dalam *power to* merupakan seseorang yang otonom dan berhak menentukan dan mempertahankan keinginannya. Sedangkan *power over*, adalah kemampuan untuk mengubah pelaku lain menghasilkan sesuatu. Dalam prosesnya, orang yang dipengaruhi melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak orang yang memengaruhi tanpa ada pilihan untuk mengutarakan pendapat atau mempertahankan pendapat.

Dalam pandangan feminis, kekuasaan merupakan sebuah kerjasama dalam mencapai tujuan. Menurut Cantor dan Bernay (1992), kekuasaan dari kacamata feminis merupakan pengaturan nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan maskulinitas dan femininitas. Kekuasaan dalam hal ini mengandung nilai-nilai pemberdayaan terhadap orang lain yang dipengaruhi dengan tujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik.

Berangkat dari pengertian kekuasaan, teori tentang kekuasaan menurut Harstock (1998) dalam (Arivia, 2003), diperlukan untuk mengerti tentang dunia kita 'dunia perempuan'. Kekuasaan diperlukan untuk memahami bahwa dalam kehidupan material selalu terjadi penstrukturalan yang membatasi pemahaman-pemahaman hubungan sosial. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan maupun dalam perjuangan perempuan yang membicarakan keterpinggiran perempuan, kekuasaan dan relasi kuasa akan memberikan gambaran mengenai kelas yang berkuasa, ras dan gender yang secara aktif menstrukturkan hubungan sosial-materi dimana semua pihak dipaksa untuk berpartisipasi.

Membahas sumber kekuasaan dan material, Rosaldo (1974) melihat kekuasaan dan nilai yang dapat diperoleh perempuan dalam peran domestik dan publik. Kesempatan perempuan memperoleh wewenang atau kekuasaan dapat dilakukan dengan memasuki dunia laki-laki, menerima legitimasi fungsi domestik atau menciptakan suatu dunia mereka sendiri, melalui alokasi penghasilan perempuan terhadap ekonomi rumah tangga, mengumpulkan kekayaan, melalui kontrol terhadap makanan, dan membentuk kelompok atau perkumpulan tertentu dalam keluarga dan masyarakat.

Sejalan dengan pendapat Rosaldo tersebut, dari penelitian Blood dan Wolfe yang dikutip oleh Sayogio (1985), bahwa distribusi dan alokasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga berhubungan erat dengan kebudayaan masyarakat dan sumber daya pribadi (*personal resources*) yang disumbangkan dalam perkawinannya. *Personal resources* tersebut dapat berupa uang, tenaga, tanah, keterampilan, pengetahuan dan ritual keagamaan.

Menurut Sajogjo (1985), kekuasaan dalam keluarga merupakan kemampuan untuk mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan keluarga yang bisa tersebar sama nilainya dan tidak sama nilainya antara suami dan istri. Sedangkan pembagian kerja menunjuk kepada pola peranan yang ada dalam keluarga, khususnya antara suami dan istri melakukan pekerjaan tertentu. Kombinasi dari kedua aspek itu (kekuasaan dan pembagian kerja) menurut Blood dan Wolfe (1960) adalah hal yang paling mendasar dalam keluarga, hal mana dipengaruhi pula oleh posisi keluarga dalam lingkungan atau masyarakat. Oleh karena itu, besarnya peranan perempuan dalam pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan mencari nafkah tidak selalu bersamaan dengan meningkatnya otonomi atau kekuasaan perempuan dalam keluarga.

Konsep kekuasaan dalam alokasi penghasilan dan pembagian peran rumah tangga, dipergunakan untuk melihat situasi perempuan. Yang dimaksud dengan situasi disini adalah: Situasi ketika kekuasaan laki-laki atau perempuan meningkatkan atau mengurangi posisi tawarnya '*bargaining position*' dalam membuat keputusan-keputusan yang menyangkut pengelolaan uang dalam keluarga; untuk melihat bagaimana perempuan mengalokasikan penghasilannya dan situasi hubungan suami-istri atau sebaliknya, situasi hubungan suami-istri ketika mengalokasikan penghasilan keduanya.

2.2.3.2 Kekuasaan dalam Proses Relasi Kuasa Suami istri

Rogers (1978) mengembangkan pemahaman konseptual mengenai dua macam pola hubungan *Pertama*, hubungan antara perempuan dan laki-laki yang ditelaah dalam arti distribusi kekuasaan, dengan mengukur sampai berapa jauh masing-masing jenis kelamin menguasai sumber-sumber yang berharga seperti

tanah, tenaga kerja, bahan makanan, uang, pengetahuan dan ritual keagamaan sesuai dengan keberadaan masing-masing. *Kedua*, pola hubungan secara *konseptional* antara perempuan dan laki-laki atau perbedaan jenis kelamin yang dipelajari dengan menganalisa ada atau tidaknya diferensiasi dalam perilaku dan dalam ideologi.

Masih menurut Rogers (1978), diferensiasi perilaku menunjuk kepada peranan masing-masing jenis kelamin, sedangkan diferensiasi ideologi menggambarkan bahwa masing-masing jenis kelamin menganggap diri mereka berbeda. Secara umum kombinasi dari pola hubungan secara *konseptional* dan dari distribusi kekuasaan memperlihatkan dua macam hubungan antara perempuan dan laki-laki yang menunjukkan distribusi kekuasaan yang seimbang (*balanced power*) dan dominan. Kondisi seimbang memperlihatkan adanya saling ketergantungan karena masing-masing merasa berbeda dan berperilaku berbeda. Dalam hubungan yang seimbang, penguasaan terhadap sumber-sumber yang penting tidak menunjukkan hubungan yang mendominasi baik oleh perempuan maupun laki-laki. Model hubungan yang lain adalah adanya kekuasaan atau dominasi jenis kelamin terhadap jenis kelamin lain. Sehingga satu jenis kelamin memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding jenis kelamin lainnya.

Kemudian Eichler (1981) dalam Haryono (2000), mempelajari hubungan antara perempuan dan laki-laki atau relasi kekuasaan suami-istri dan menganggap relasi kekuasaan akan terbentuk karena saling ketergantungan akan kebutuhan kelangsungan hidup, kekayaan ekonomi, status dan *prestige*, prokreasi, seks dan afeksi. Eichler mengembangkan pemikiran bahwa ketergantungan ekonomi antara perempuan dan laki-laki akan membentuk empat macam hubungan

ketergantungan suami-istri. Pertama, hubungan dominasi suami yang memperlihatkan suami tidak tergantung pada istri dan istri tergantung penuh pada suami. Kedua hubungan dominasi istri yang memperlihatkan hubungan istri tidak tergantung suami dan suami tergantung penuh kepada istri. Ketiga, hubungan setara memperlihatkan hubungan suami-istri saling tergantung. Sedangkan pola hubungan yang keempat, adalah pola hubungan setara yang memperlihatkan suami-istri tidak saling tergantung.

Menurut saya, jika sebuah hubungan terbentuk atas dasar kekuasaan yang muncul dari ketergantungan ekonomi, maka keempat pola hubungan suami-istri ini bisa merupakan gambaran bagaimana *'bargaining position'* atau *'posisi tawar'* perempuan dalam membentuk *'relasi kuasa'* suami-istri. Terutama dalam memutuskan menggunakan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan peran dan tanggung jawab sebagai istri.

Miller dalam (Gilligan, 1997), beranggapan bahwa pikiran perempuan yang khas tentang kekuasaan muncul dari kombinasi antara kedudukan mereka dalam relasi sementara dan relasi tetap di antara pihak-pihak yang tidak sama. Dalam relasi sementara yang menyangkut bidang-bidang pengasuhan anak, yang berakhir dengan berakhirnya ketidaksamaan, perempuan berada dalam posisi dominan. Sedangkan dalam relasi yang menyangkut status sosial dan kekuasaan yang selamanya tidak sama perempuan berada pada posisi yang lemah. Meskipun dalam posisi sosial, perempuan lebih rendah dari laki-laki, pada saat yang sama perempuan tetap menjalin hubungan dengan laki-laki dalam relasi yang akrab dan hangat baik dalam seksualitas orang dewasa maupun dalam keluarga. Situasi ini mencerminkan sisi relasi yang saling tergantung maupun lingkup

kemungkinan-kemungkinan tanggung jawab moral yang ditimbulkan oleh relasi. Secara idealnya, perempuan mempunyai kedudukan dalam mewujudkan potensi yang ada dalam diri dan hubungan manusia, baik demi kepedulian maupun melangsungkan penindasan.

Pada pasangan suami-istri PNS yang memiliki sumber-sumber penghasilan yang sama jika ditelaah dari proses alokasi penghasilan, dan manfaat yang diterima oleh masing-masing pihak mungkin akan memberikan gambaran mengenai konsep di atas tentang peranan perempuan dalam relasi suami-istri. Dengan pertimbangan pemaknaan peran dan kedudukan dalam keluarga dari pihak yang bekerja di bidang yang sama, akan memberikan jawaban mengenai konsep kekuasaan dalam pembentukan relasi kuasa suami-istri.

2.2.3.3 Seksualitas

Seksualitas merupakan konsep, konstruksi sosial terhadap nilai, orientasi, dan perilaku terhadap seks. Seksualitas merupakan kategori sosial yang mampu membatasi dan mengatur perilaku seseorang tentang seks dan fungsi seks (Walter, 1991 dalam Parker, 1991). Individu perempuan dan laki-laki dalam memandang seksualitas akan dipengaruhi oleh pandangan dan nilai-nilai budaya yang melahirkan beragam nilai dan penghayatan tentang tubuh perempuan dan laki-laki (Beauvoir 1997).

Seksualitas perempuan sering dijadikan objek oleh masyarakat patriarki untuk mengatur kehidupan perempuan. Dalam seksualitas, perempuan menempati posisi yang dikonstruksikan budaya melalui hubungan heteroseksual, perkawinan dan melahirkan. Mackinon (1982) dalam (Arivia, 2003), mengemukakan heteroseksual, sebagai tempat yang paling tepat untuk menunjukkan kekuasaan

laki-laki atas perempuan, dan kekuasaan tersebut merupakan dasar terjadinya ketimpangan gender. Seksualitas secara hirarki merupakan cara laki-laki mengatasi perempuan. Dikonstruksikan secara sosial dari kekuasaan laki-laki yang didefinisikan oleh laki-laki, dipaksakan kepada perempuan dalam formulasi gender. Seksualitas perempuan direpresentasikan dalam pembagian peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Pemahaman mengenai seksualitas perempuan diperlukan untuk menganalisa bagaimana perempuan merepresentasikan seksualitasnya dalam menjaga hubungan dengan pasangannya. Menurut Beauvoir (1997), perempuan memaknai seksualitas dalam bentuk cinta dan kasih sayang yang akan menempatkannya dalam penyerahan diri seutuhnya kepada cinta dan membawanya dalam keputusan pernikahan. Sedangkan laki-laki memaknai seksualitasnya sebagai perwujudan eksistensi diri dan membawanya dalam keputusan menikah. Dengan demikian perempuan menikah untuk mendapatkan cinta sedangkan laki-laki menikah karena ia merasa ia harus menikah. Perbedaan makna seksualitas dalam diri perempuan dan laki-laki membawa konsep hubungan yang terpolarisasi, kemudian menempatkan laki-laki sebagai sesuatu yang nyata dan mendominasi perempuan yang larut dalam penyerahan untuk kebutuhan, keinginan dan menjadi sesuatu bagi pasangannya.

Pemaknaan seksualitas yang berbeda dalam diri perempuan terhadap pasangan akan memengaruhi proses pembentukan relasi kuasa keduanya. Menyimak pendapat Mary Daly dalam Tong (1997), perempuan bisa mengakhiri dominasi laki-laki terhadap perempuan jika bisa memikirkan tentang menjadi Diri dengan kebutuhan, keinginan dan minat sendiri. Perkembangan konsep

perempuan dan laki-laki yang membawa perempuan dalam kebutuhan, keinginan dan menjadi sesuatu untuk orang lain juga melahirkan persepsi yang sama terhadap pengalokasian penghasilan perempuan dalam keluarga. Keinginan perempuan yang larut dalam kebutuhan dan keinginan orang lain, membuat perempuan lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi orang lain.

2.2.3.4 Peran dan Posisi Perempuan dalam Pola Perkawinan

Duvall (1967) dalam Suleeman (1999), menyebut pola suami-istri dalam keluarga yang *institutional* sebagai pola yang otoriter, sedangkan pola hubungan suami-istri dalam keluarga yang *companionship* sebagai pola yang demokratis. Perubahan tersebut terjadi karena adanya perubahan sosial dalam masyarakat, dan keluarga menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada untuk tetap bertahan. Pola hubungan yang otoriter menunjukkan pola hubungan yang kaku. Sebaliknya, dalam pola yang demokratis hubungan suami-istri menjadi lebih lentur. Pada pola yang kaku, seorang istri yang baik adalah istri yang melayani suami dan anak-anaknya. Sedangkan pola hubungan yang lentur, istri yang baik adalah pribadi yang melihat dirinya sebagai pribadi yang berkembang terus.

Scanzoni dan Scanzoni (1981) (dalam Suleeman, 1999) mengatakan bahwa hubungan suami-istri dapat dibedakan menurut pola perkawinan yang ada. Menurut mereka ada 4 macam pola perkawinan yaitu *owner property*, *head complement*, *senior junior partner*, dan *equal partner*.

- 1) Pada pola perkawinan *owner property*, istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak. Istri juga harus menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga

lainnya karena suami telah bekerja menghidupi dirinya dan anak-anak. Tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami. Istri harus menurut pada suami dalam segala hal, istri harus melahirkan dan mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa membawa nama baik suami. Dalam pola ini, istri dianggap bukan sebagai pribadi melainkan sebagai perpanjangan suaminya. Istri hanya merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi dan cita-cita dari suami. Bila terjadi ketidaksepakatan, istri harus tunduk pada keputusan suami. Secara ekonomis istri tergantung kepada suami sebagai pencari nafkah yang meletakkan suami memiliki kuasa atau wewenang. Dari sudut teori pertukaran, istri mendapatkan pengakuan dari kebutuhan yang disediakan suami, mendapat pengakuan dari kerabat dan *peer group* berdasarkan suami, mendapatkan status sosial mengikuti status sosial suami, mendapatkan dukungan dan pengakuan dari orang lain karena ia telah menjalankan tugas dengan baik. Wajib memberikan kepuasan seksual kepada suami, adalah hak suami untuk mendapatkan pelayanan seksual dari istrinya kapan saja meskipun istri tidak menginginkannya. Suami bisa menceraikan istrinya jika tidak bisa memberikan kepuasan seksual.

- 2) Pada pola perkawinan *head-complement*, istri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan istri akan cinta kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Suami dan istri memutuskan

untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama. Dalam pola perkawinan ini, suami tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Istri tetap bertugas mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Perbedaannya dengan *owner property*, adalah suami-istri bisa merencanakan kegiatan bersama-sama untuk mengisi waktu luang dan dalam hal ketaatan. Contohnya ketika meminta istri untuk mengerjakan sesuatu suami akan berkata “silakan kerjakan” dan sebaliknya, istri juga berhak untuk bertanya, “mengapa” atau “saya rasa tidak perlu”. Meskipun tidak memaksa istri, pola hubungan ini menekankan keputusan terakhir tetap ditangan suami. Istri menjadi atribut pelengkap suami yang harus mencerminkan tingkah laku sosial maupun penampilan fisik material. Istri merupakan pendukung dalam mendorong suksesnya suami dalam bentuk memperhatikan penampilan, mengundang relasi, mengajarkan anak-anak akan nilai yang pantas, dan terlibat dalam *politics of status maintenance*.

- 3) Pola perkawinan yang ketiga adalah *senior-junior partner*, posisi istri tetap sebagai pelengkap dengan tambahan sebagai teman suami. Perubahan terjadi karena istri bekerja dan memberikan sumbangan ekonomi sehingga secara ekonomi tidak tergantung sepenuhnya kepada suami. Menurut teori pertukaran, istri mendapatkan kekuasaan dan suami kehilangan kekuasaan. Tetapi suami tetap memiliki kekuasaan yang lebih besar karena posisinya sebagai pencari nafkah utama. Dalam keadaan ini, penghasilan istri tidak boleh lebih besar dari suami. Istri boleh sekolah tetapi sekolah atau karier suami

didahulukan. Ini berarti status sosial suami menentukan status istri, dan istri yang berasal dari status sosial yang tinggi akan turun mengikuti status sosial suami.

- 4) Pola perkawinan keempat adalah *equal partner*, menunjukkan posisi suami-istri tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dalam hubungan ini istri mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan suami untuk mengembangkan diri dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Istri bisa memiliki penghasilan yang lebih tinggi dan berperan sebagai pencari nafkah utama. Semua keputusan yang diambil dalam hubungan ini dengan pertimbangan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Istri juga mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena kemampuan diri sendiri tanpa dikaitkan dengan suami. Perkawinan ini dalam perkembangannya menempatkan cinta sebagai perasaan yang diekspresikan, dan sebagai wadah mengembangkan diri. Konsep ini memungkinkan pria mengekspresikan kebutuhan dan perasaannya, dan perempuan mengekspresikan kemarahan yang terkontrol selama ini.

Keempat pola hubungan di atas menurut Scanzoni (1981), memberikan gambaran bagaimana kedudukan perempuan dalam keluarga. Saya melihat bahwa pola-pola hubungan di atas bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk melihat bagaimana posisi perempuan dalam keluarga yang terkait dengan pelaksanaan peran dan kedudukannya dalam keluarga, terutama dalam pembagian pekerjaan rumah tangga.

2.2.4 Analisis Kerja dalam Kerja Produksi dan Reproduksi

2.2.4.1. Pembagian Kerja dan Analisis Kerja perempuan

Pembagian peran antara perempuan dan laki-laki membawa perempuan dan laki-laki masing-masing ke dalam lingkungan kerja domestik dan publik. Pembagian kerja dalam keluarga memperlihatkan bagaimana patriarki merepresentasi diri dalam keluarga sebagai kelangsungan komunitas manusia. Pembagian kerja produksi dan kerja reproduksi atau kerja perempuan sebagai proses pelestarian sistem patriarki dan struktur sosial ditegaskan oleh Engels :

”menurut konsep materealistik, faktor penentu dalam sejarah, pada akhirnya, adalah produksi dan reproduksi dari kehidupan yang paling dekat. Hal ini, sekali lagi merupakan sifat yang mempunyai dua sisi, produksi alat untuk eksistensi, makanan, pakaian, dan rumah serta alat-alat yang penting untuk produksinya; di sisi lain, produksi manusia sendiri, kelangsungan hidup spesies. Itulah tatanan sosial yang menentukan kedua jenis produksi manusia dalam suatu masa historis tertentu.” (Tong, 1998. hal.155)

Dalam sebuah keluarga atau sekelompok masyarakat, asumsi kerja yang menghasilkan sesuatu adalah kerja produksi yang bernilai secara ekonomi dan memenuhi keperluan ekonomi anggota keluarga dan sekelompok masyarakat. Asumsi ini membawa kerja yang tidak langsung menghasilkan sesuatu secara ekonomi seperti pengasuhan anak dan pengelolaan konsumsi dalam keluarga sebagai kerja reproduksi (Saptari dan Holzner 1997). Adanya tuntutan ekonomi dalam kelangsungan hidup anggota keluarga dan sekelompok orang, dan bergesernya masyarakat dari masyarakat komunal yang mengumpulkan bahan makanan menjadi masyarakat agraris dan industri, membawa laki-laki bergerak keluar rumah untuk mencari upah melalui proses kerja produksi yang menghasilkan upah (Moore, 1998).

Kerja reproduksi sosial seperti pengasuhan dan penyediaan konsumsi bagi keluarga direpresentasikan sebagai kerja perempuan karena mengikuti kerja reproduksi biologis perempuan melahirkan dan menyusui. Kerja reproduksi ini tidak menghasilkan upah tetapi menghabiskan upah dari kerja reproduksi sehingga dipandang rendah dalam masyarakat yang menjalani kerja produksi yang diberi upah. Modus produksi dan reproduksi inilah yang kemudian mengkondisikan kehidupan sosial, politik dan intelektual suatu masyarakat yang kemudian menentukan kesadaran manusia.

Kerja reproduksi direpresentasi sebagai kerja perempuan yang tidak pernah selesai dalam duapuluh empat jam. Perempuan selalu siap mengerjakan pekerjaan reproduksi meskipun ia juga mengerjakan pekerjaan produksi. Ketika eksistensi sosial membentuk kesadaran manusia, maka eksistensi sosial terhadap perempuan dalam kerja produksi dan reproduksi mengkonstruksikan konsep diri perempuan. Eksistensi sosial menempatkan perempuan mendapatkan konsepsi dirinya melalui perannya di dalam keluarga dan di tempat kerja, dan menempatkan perempuan tetap subordinat terhadap laki-laki. Karena itu, memahami perempuan teropresi sementara laki-laki tidak, kita perlu menganalisis hubungan antara status pekerjaan perempuan dan citra diri perempuan (Marxis dalam Tong, 1998). Dalam hal ini, analisis status pekerjaan perempuan dan citra diri perempuan dapat dilakukan melalui hubungan antara perempuan dan laki-laki melalui pandangan perempuan atas peran dalam keluarga, kedudukan perempuan dalam keluarga, maupun nilai-nilai yang dikeluarkan oleh perempuan untuk melaksanakan pekerjaan reproduksi dan produksi.

Penempatan kerja perempuan sebagai kerja yang bernilai rendah terbawa dalam kerja produksi ketika perempuan memasuki dunia kerja. Dengan konstruksi sosial bahwa kewajiban dan spesialisasi perempuan adalah kerja rumah tangga maka perempuan dikondisikan sebagai pekerja sekunder dengan upah rendah. Kondisi ini sengaja dipertahankan oleh kapitalisme sebagai usaha kapitalisme untuk menekan upah serendah mungkin dan ketersediaan tenaga kerja bertambah dengan masuknya perempuan kedalam kerja produksi. Karena itu Young menawarkan analisis gender dalam pembagian kerja produksi dan reproduksi (Tong, 1998).

Menurut Young analisis kerja memberikan rincian mengenai siapa yang memberi perintah dan siapa yang melaksanakan, siapa yang melakukan pekerjaan menstimulasi dan siapa yang harus melakukan pekerjaan kotor, siapa yang mengambil pekerjaan pada jam yang disukai dan siapa yang mengambil pekerjaan yang tidak disukai, serta siapa yang dibayar lebih besar dan siapa yang dibayar lebih rendah. Analisis pembagian kerja memberikan penjelasan mengapa perempuan biasa menerima perintah, melakukan pekerjaan kasar, bekerja pada shift yang tidak disukai, dan dibayar lebih kecil dibanding laki-laki.

Analisis gender berangkat dari kondisi hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Analisis berangkat dari ketidak setaraan gender seperti pembagian kerja reproduksi sosial berupa siapa yang melaksanakan pengasuhan dan pendidikan anak, yang menyediakan konsumsi, serta siapa yang memutuskan pembagian kerja yang menjadi tanggung jawab bersama suami-istri, tetapi lebih dominan dikerjakan oleh salah satu pihak. Analisis gender terhadap

pembagian kerja dan kerja perempuan juga menyangkut tentang keseimbangan antara kewajiban mencari nafkah dan pekerjaan dalam keluarga.

2.2.4.2. Surplus dalam Kerja Produksi dan Reproduksi

Kegiatan produksi merupakan proses yang sering digambarkan sebagai kegiatan kapitalisme oleh Marxis dan feminis yang menggunakan faham ekonomi marxisme dalam menganalisis hubungan kerja perempuan dan ketertindasan perempuan dalam kerja reproduksi dan produksi dalam masyarakat.

Marx (Tong, 1998), memandang kerja produksi sebagai suatu sistem yang eksploitatif, karena dalam kerja produksi sebenarnya mempergunakan kekuatan bekerja, pengeluaran energi, dan intelegensi pekerja. Dalam hal ini, pemilik produksi hanya membayar sebagian terhadap kekuatan bekerja, energi dan intelegensi pekerja yang dijual pekerja dengan upah. Kemudian menjual komoditi yang dihasilkan oleh kerja untuk mendapatkan keuntungan atau '*surplus*'. Dengan monopoli atas modal dan bahan yang digunakan dalam kerja produksi, pekerja dikondisikan dalam pilihan bekerja untuk upah dalam sistem pertukaran yang disebut Marx sebagai '*fetisisme komoditi*'. Pekerja diyakinkan bahwa sulit bagi mereka untuk mendapatkan uang, dan secara *inheren* tidak ada yang salah dalam kondisi hubungan pertukaran yang eksploitatif tersebut.

Eksplotasi juga terjadi ketika perempuan dan laki-laki membentuk sebuah keluarga. Untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan keluarganya, perempuan dan laki-laki harus melaksanakan kerja produksi yang menghasilkan upah untuk memenuhi tuntutan ekonomi sebuah keluarga, kemudian dalam waktu yang bersamaan melaksanakan kerja reproduksi untuk melestarikan keturunan dan keluarga. Konstruksi sosial terhadap pembagian peran gender menempatkan

perempuan sebagai ibu rumah tangga yang wajib melaksanakan kerja reproduksi, dan laki-laki sebagai kepala keluarga yang melakukan kerja produksi. Ketika kerja produksi diberi nilai upah, dan kerja reproduksi dianggap tidak nyata, maka kerja reproduksi yang identik dengan kerja perempuan akan dianggap rendah. Laki-laki yang bekerja diluar rumah memiliki upah yang bernilai ekonomi yang dibutuhkan dalam membiayai proses reproduksi. Laki-laki memiliki tempat sebagai pemilik modal dalam proses reproduksi karena ia mentransformasikan penghasilannya kepada perempuan untuk membiayai proses reproduksi. Hasil dari kerja reproduksi yang dilakukan perempuan adalah keluarga dan keturunan yang dimiliki laki-laki sebagai kepala keluarga.

Sebagai pemilik keluarga dan pemilik modal, laki-laki mengambil *surplus* dari perempuan dalam pelaksanaan reproduksinya berupa pelayanan seksual, keturunan, dan status yang meningkatkan eksistensi laki-laki di tengah masyarakat. *Surplus* juga di dapat laki-laki dalam keluarga dari pasangan suami-istri yang sama-sama bekerja. Pembakuan peran rumah tangga sebagai kewajiban istri secara hukum dan konstruksi sosial pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan perempuan, membuat laki-laki bebas dari kerja reproduksi. Disisi yang lain beban laki-laki atas kewajibannya sebagai kepala keluarga menjadi berkurang dengan adanya kontribusi penghasilan istri.

2.2.4.3. Makna Pekerjaan dan Keterasingan 'alienasi' dalam Konsep Diri Perempuan Bekerja.

Menurut Karl Marx dalam Suseno (1999, hl. 95), pekerjaan sebagai sarana perealisasi diri manusia yang seharusnya memberikan kesenangan atau kegembiraan dan kepuasan, dengan pekerjaannya manusia dapat membuat dirinya

menjadi nyata. Pekerjaan membuat seseorang menjadi nyata atau eksis untuk dirinya sendiri, untuk lingkungan dan untuk orang lain. Keterpaksaan seseorang dalam bekerja membuat seseorang mengalami 'keterasing' atau '*aliensi*' dari diri, pekerjaan, lingkungan, dan sesama manusia.

Perempuan dalam konstruksi patriarki dan kapitalisme menjalankan perannya sebagai ibu rumah dan sebagai pekerja di luar rumah untuk memenuhi tuntutan hidup dan kebutuhan keluarga, bukan untuk memenuhi hasratnya bekerja. Perempuan melaksanakan pekerjaan rumah tangga karena kewajiban sebagai istri dan sebagai ibu yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Demikian juga ketika mereka bekerja di luar rumah, mereka dikondisikan oleh status sebagai perempuan lajang dan sebagai istri yang menempatkan perempuan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga. Status perempuan dalam pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan di luar rumah membuat perempuan ada bukan untuk dirinya tapi ada untuk orang lain. Akibatnya perempuan mengalami keterasingan dari dirinya karena kehilangan ada dari dirinya.

Keterasingan perempuan terhadap pekerjaan ialah karena perempuan tidak melihat hasilnya untuk dirinya sendiri, sehingga semakin ia bekerja menghasilkan uang semakin ia merasa bahwa dirinya semakin kekurangan. Karena hasilnya bekerja terasing bagi dirinya, maka perempuan semakin terasing dari pekerjaannya di dalam rumah tangga maupun ketika mencari nafkah. Akibatnya pekerjaan yang dilakukan perempuan bukan lagi sebuah pelaksanaan hakikat yang bebas dan universal atas kebutuhannya tetapi sudah merupakan sebuah keterpaksaan.

Menurut Marx, seseorang yang terpaksa bekerja baru akan merasa ada untuk dirinya sendiri ketika ia sudah tidak lagi bekerja dan jika ia bekerja ia akan berada di luar dirinya. Dalam hal ini hampir sama dengan perempuan yang melaksanakan perannya dalam rumah tangga, ia mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan tuntutan ia harus mengerjakannya untuk kelangsungan hidup keluarganya, untuk mendapat tempat di tengah masyarakat sebagai ibu yang baik. Dalam hal ini, seorang perempuan akan merasa ada atau eksis jika ia tidak melaksanakan pekerjaan rumah tangga atau berada di luar pekerjaan rumah tangga.

Tujuan perempuan bekerja di rumah tangga semata-mata sebagai pemenuhan kewajiban sosialnya sebagai ibu rumah tangga dan bekerja mencari nafkah sebagai pemenuhan hidup anggota keluarganya, maka perempuan memperlak pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhan orang lain. Perempuan kehilangan hakikatnya sebagai manusia, karena ketika semua pikirannya tercurah pada keinginan pada saat-saat pekerjaan selesai, maka perempuan kehilangan hakikat pekerjaan sebagai tempat pengembangan diri manusia. Dalam hal ini, sebagai manusia perempuan mengalami tekanan dan kehilangan eksistensinya sebagai manusia.

Bila manusia terasing dari hakikatnya sebagai manusia, maka ia akan terasing dari sesamanya sebagai manusia. Menurut Marx, dalam Suseno (1999, hlm. 97),

”keterasingan manusia dari hasil pekerjaan, dari kegiatan hidupnya dan dari hakikatnya sebagai manusia adalah keterasingan manusia dari manusia”.

Keterasingan dari sesama menyatakan kepentingan yang bertentangan berupa konflik dan merusaknya hubungan masing-masing dalam individu. Tanda-tanda keterasingan adalah kekuasaan uang dalam diri manusia terhadap manusia lainnya. Sehingga tindakan bekerja bukan lagi untuk mendapatkan nilai sebagai manusia, tetapi untuk mendapatkan uang sebagai bentuk kekuasaan.

Keterasingan perempuan dari pekerjaannya, dari dirinya, dari lingkungan, dan dari sesama manusia merupakan bentuk *alienasi perempuan* karena perempuan kehilangan eksistensi dirinya atau kesadaran tentang diri. Hubungan antara kapitalisme, laki-laki, dan perempuan yang digambarkan dalam kondisi *alienasi* individu memberikan gambaran penindasan terhadap perempuan karena laki-laki membebaskan *alienasinya* dari kapitalisme melalui perempuan. seperti yang diambarkan oleh Ann Foreman (Arivia, 2003, hal 116) bahwa,

”laki-laki sangat eksis dalam dunia sosial, bisnis, industri, dan juga dalam keluarga sehingga ia dapat mengekspresikan dirinya dalam keempat bidang ini. Sedangkan bagi perempuan, tempatnya seringkali di dalam rumah. Obyektifitas laki-laki melalui industri dan pengambilan produk kerjanya memang memberikan alienasi. Tetapi efek alienasi pada kehidupan dan kesadaran perempuan lebih mempunyai dampak yang lebih besar yaitu penindasan. Laki-laki mencari pembebasan alienasinya melalui hubungannya dengan perempuan, sedangkan untuk perempuan tidak ada jalan pembebasan karena hubungannya dengan laki-laki merupakan struktur utama penindasan.”

Alienasi perempuan terhadap diri, lingkungan, orang lain dan pekerjaannya menjadi sebuah penindasan atau opresi karena perempuan menjadi pelengkap dalam pembebasan alienasi laki-laki. Perempuan kehilangan jati diri ketika ia berada dalam struktur keluarganya maupun dalam lingkungannya. Perempuan memaknai diri menjadi 'milik' dalam keluarga orangtuanya sebagai anak, kemudian menjadi 'milik' suaminya ketika diserahkan ayahnya pada sebuah

pernikahan. Sehingga semua yang dikerjakan perempuan terkonsep untuk yang memiliki dirinya, termasuk tujuannya mengerjakan pekerjaan rumah tangga ataupun ketika bekerja mendapat upah yang dibutuhkan bagi ekonomi keluarga. Dalam prosesnya, tempat kerja merupakan sumber tekanan yang mengalienasi perempuan dan laki-laki, dan rumah sebagai tempat perlindungan, laki-laki menjalin hubungan yang mendominasi perempuan untuk membebaskan diri dari tekanan pekerjaan yang mengalienasi. Sedangkan perempuan dalam tekanan pekerjaan dan hubungannya dengan suami menempatkannya teralienasi dalam keluarga dan di tempat kerja, membuatnya sulit untuk melepaskan dirinya.

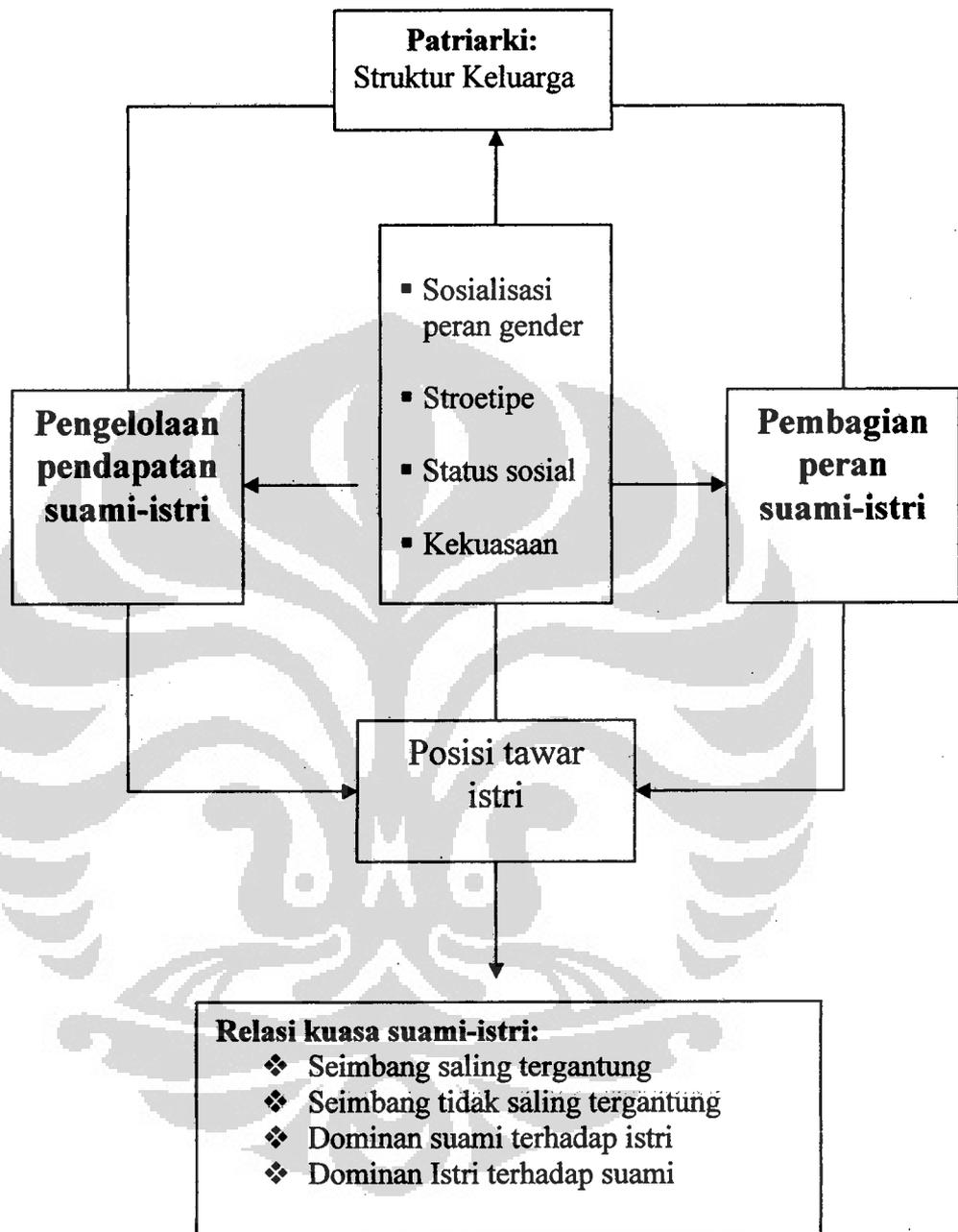
Melihat perbedaan perempuan dan laki-laki maka kita dapat melihat adanya perbedaan *psyche* antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan yang tertanam dalam pikiran perempuan dan laki-laki 'sosialisasi' dan 'internalisasi' bahwa perempuan tidak eksis untuk dirinya sendiri karena ia di miliki, tidak eksis untuk lingkungan karena ia adalah kelas kedua, dan tidak eksis untuk pekerjaannya karena keberadaannya bekerja dianggap sebagai pekerja sekunder atau pelengkap. Menurut Arivia (2003), untuk menolak proses sosialisasi dan internalisasi ini perempuan harus bisa mengkonstruksi konsep dirinya dan mendefinisikan apa itu perempuan. Perempuan perlu mengenali dirinya dan mencintai dirinya agar 'konsepsi positif' terbentuk atau sebagai perempuan 'teridentifikasi sebagai perempuan'.

Menurut Jagar (Tong,1998), selama konsep pemikiran dan wacana masih dalam kerangka pemikiran laki-laki, perempuan akan tetap merasa tidak yakin dengan pemikirannya. Perempuan harus merasa yakin dengan diri dan pemikirannya, dan mengerti bahwa operasi terhadap perempuan oleh kapitalisme

dan patriarki berupa semua hal dan juga dirinya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan keyakinan perempuan untuk memahami diri dan sumber opresi perempuan untuk membuat perlawanan terhadap opresi itu sendiri.

Menurutku pemahaman 'konsep diri' menjadi penting dalam penelitian ini karena proses dekonstruksi konsep diri perempuan menjadi 'positif' atau 'mencintai diri' memerlukan akumulasi data tentang perempuan dan mencatat ulang sejarah perempuan. Proses akumulasi data dapat dilakukan melalui suara perempuan dan menggali pengalaman perempuan. Kemudian menjadi dasar bagi proses penyadaran perempuan mengenai hakikat diri atau identitas diri perempuan melalui kepemilikan dan perbaikan kedudukannya dalam keluarga. Konsep diri positif memberikan kekuatan kepada perempuan untuk mencintai diri, memperhatikan kepentingan diri dan menjadi jalan untuk memperbaiki pemaknaan gender, situasi hubungan gender maupun tujuan bekerja perempuan di dalam keluarga dan di luar rumah sebagai sesuatu yang nyata dan bukan sesuatu yang *mengalienasi* perempuan.

2.3. Skema Kerangka Konseptual



BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Posisi Penelitian Kegiatan Perempuan dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Filsuf feminis Harstock (1983) menekankan adanya *difference* (perbedaan) dalam persoalan relasi laki-laki dan perempuan. Perempuan mempunyai kondisi khusus seperti hamil dan melahirkan yang membuatnya selalu terlibat dalam memelihara anak dan penindasan-penindasan domestik. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan yang adil harus mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu dari perempuan. Ditambahkan oleh Rose, pengetahuan berhaluan feminis harus berdasarkan pada kegiatan perempuan. Keberpihakan pengetahuan yang didasarkan kegiatan perempuan ini bagi sementara *epistemology feminis* dianggap mengambil posisi tertentu yang dikenal dengan *standpoint*. (Arivia, 2003)

Feminis Standpoint menghadapi tantangan atau pertanyaan tentang penelitian yang dilakukan pada situasi dan pengalaman perempuan di antaranya, yang pertama kemungkinan mempunyai kecenderungan etnosentrisme (superioritas diri) atas keperempuanan. Kedua, mengenai keabsahan pengetahuan yang datang dari sumbernya sendiri karena *standpoint* selalu menganjurkan untuk berangkat dari situasi yang sedang diteliti seperti penelitian terhadap situasi perempuan bekerja dan relasi suami-istri. Kemudian yang ketiga adalah apakah kehidupan perempuan dibentuk oleh budaya femininitas yang dibentuk untuk kepentingan laki-laki. Pendekatan dan analisis-analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sikap kritis dan penolakan terhadap pemikiran konvensional ilmu pengetahuan yang ditarik dari sudut pandang laki-laki dan bukan sebatas loyalitas semata (Arivia, 2003).

Pemahaman persoalan keterpinggiran perempuan dalam ilmu pengetahuan karena teori universal yang dibangun dari pemahaman laki-laki perlu mendapat transformasi atau revisi ulang, khususnya terhadap teori-teori yang berkembang dalam ilmu pengetahuan. Transformasi dan revisi dilakukan melalui penelitian yang dilakukan pada situasi dan pengalaman perempuan.

3.2 Penelitian Berperspektif Perempuan dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif

Penelitian berperspektif perempuan merupakan penelitian yang terfokus pada isu-isu gender dan mengutamakan keberpihakan atau berempati dalam masalah perempuan. Keberpihakan kepada perempuan dapat dilakukan dengan mengungkap pengalaman pribadi perempuan. Dalam penelitian yang menyangkut pengalaman perempuan dibutuhkan interpretasi makna sehingga harus dikualitatifkan. Akan tetapi penelitian ini dilakukan pada perempuan PNS struktural di Kabupaten Ketapang dengan PNS dan berjumlahnya 102 orang serta tersebar dalam populasi yang cukup besar yakni 2.424 orang PNS perempuan. Sehingga pendekatan secara purposif dan biasa dilakukan kepada informan dalam penelitian kualitatif dirasakan kurang efektif. Disamping itu, data pengelolaan penghasilan suami-istri untuk keperluan keluarga merupakan sesuatu yang sulit diinterpretasikan dalam makna. Maka pendekatan kepada informan dan pengolahan data sebelum menggunakan pendekatan kualitatif membutuhkan pendekatan kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditunjang secara kuantitatif.

Penerapan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan dalam satu tujuan penelitian menurut Sugiyono (2007) adalah sesuatu

yang sulit, karena kedua tipe pendekatan penelitian ini memiliki spesifikasi dan tujuan yang berbeda. Model penelitian kuantitatif cocok diterapkan untuk penelitian yang memiliki masalah yang sudah jelas dan dalam situasi sosial yang luas serta bertujuan untuk menguji hipotesis. Sedangkan model penelitian kualitatif cocok digunakan untuk meneliti dimana masalah penelitian belum jelas dan dilakukan pada situasi sosial yang tidak luas, sehingga hasil penelitian mendalam serta bermakna dan bertujuan untuk menemukan hipotesis atau teori.

Berangkat tujuan penelitian kuantitatif dan kualitatif serta kebutuhan akan hasil penelitian yang akurat, maka dalam penelitian ini pendekatan kuantitatif tidak digunakan untuk menarik kesimpulan dan hipotesa tetapi untuk memahami model pengalokasian penghasilan perempuan dalam keluarga. Menurutku, pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ini akan membangun struktur penelitian yang saling menunjang. Pendekatan kuantitatif akan membantu meningkatkan kualitas pendekatan kualitatif, atau sebaliknya pendekatan kualitatif meningkatkan kualitas pendekatan kuantitatif dalam penelitian.

3.2.1 Pendekatan Kualitatif

Strauss dan Corbin (1990) menyatakan penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari, membuka dan mengerti apa yang terjadi di belakang setiap fenomena yang baru sedikit diketahui (Saptari dan Holzner, 1997). Pengamatan menunjukkan bahwa pengalaman perempuan bekerja dari pasangan suami-istri Pegawai Negeri Sipil dalam mengelola penghasilannya dan membina rumah tangga merupakan fenomena yang masih sedikit dan terbatas untuk diketahui. Dengan demikian penelitian ini dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Saptari dan Holzner (1997), penelitian kualitatif menjadi penting bagi perkembangan studi perempuan karena dalam

perkembangan ilmu-ilmu sosial, dunia kehidupan perempuan, perasaan dan pikiran mereka diabaikan. Dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial, pengalaman hidup perempuan dianggap sama seperti pengalaman laki-laki, sehingga sering diwakilkan dari suara dan kepentingan laki-laki.

Menurut Saptari dan Holzner (1997), data kualitatif dapat dianalisa dengan konsep yang diambil di lapangan dengan tehnik pengumpulan data seperti wawancara, memberikan kesempatan berpartisipasi, dan mempunyai kemampuan bagi peneliti untuk mempelajari proses, mekanisme dan latar belakang. Dalam prosesnya, penelitian kualitatif menurut Poerwandari (2005), lebih menekankan pemahaman terhadap sudut pandang dan konteks kedalaman masalah pada subjek penelitian. Dengan demikian, diharapkan mampu memaparkan secara deskriptif pengalaman internal perempuan secara lebih mendalam dan lebih terbuka kepada persepsi hidup perempuan dan kemampuannya dalam membentuk pola relasi suami-istri yang seimbang,

Pada penelitian tentang pengalaman perempuan dari pasangan suami-istri bekerja khususnya Pegawai Negeri Sipil dalam mengalokasikan penghasilannya, kita menghitung kontribusi ekonomi perempuan pada keperluan rumah tangga. Dalam hal ini kita akan menghadapi situasi yang sensitif karena seolah menghitung berapa jasa perempuan yang digunakan dalam membangun rumah tangganya. Oleh karena itu, pengambilan data secara kualitatif diperlukan untuk menggali pemahaman perempuan tentang penghasilan dan kedudukannya dalam keluarga. Mengangkat bahwa sebenarnya persoalan ketimpangan gender berangkat dari hubungan antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga, yang berupa ketidakseimbangan relasi kuasa antara suami-istri. Kemudian melihat

bagaimana suara perempuan tidak didengarkan, dan bagaimana sensitifnya masalah keuangan keluarga yang dianggap sebagai sesuatu yang pribadi untuk dibicarakan.

3.2.2. Pendekatan Kuantitatif

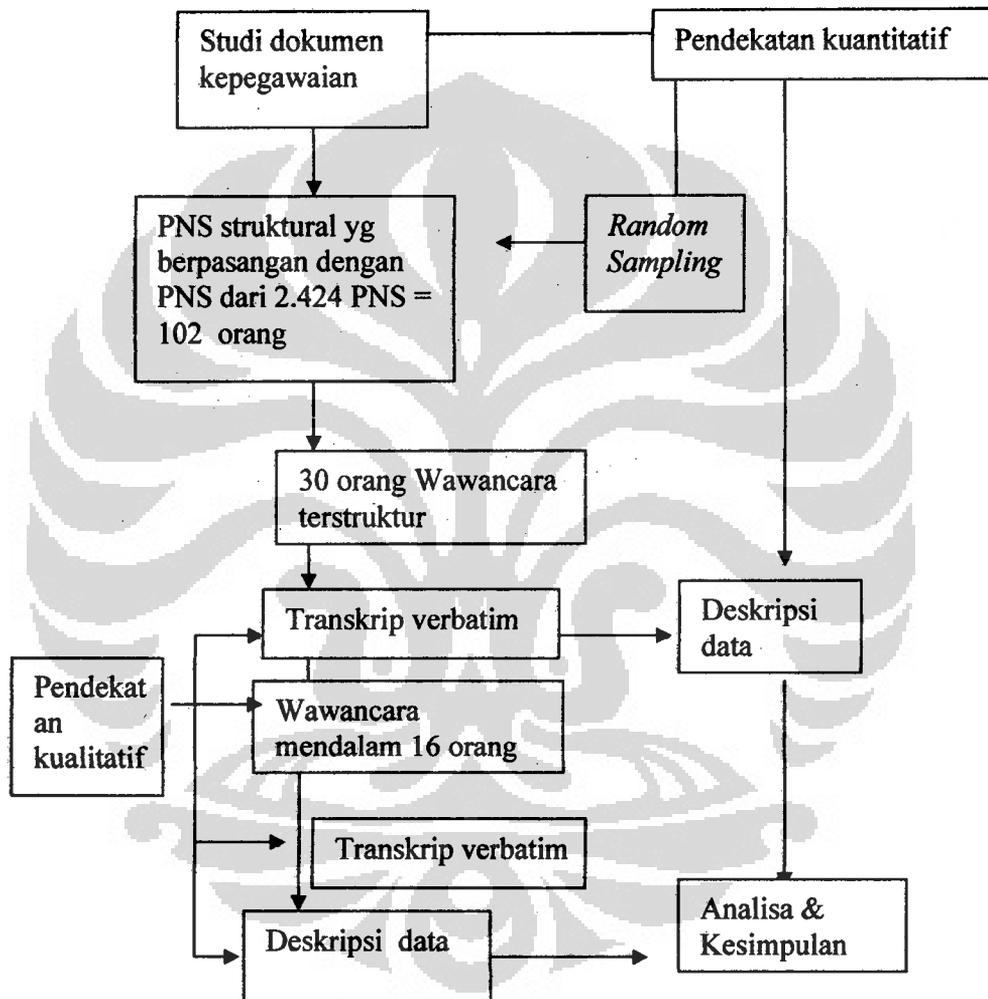
Manfaat pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini membantu memaparkan persoalan ketidakseimbangan hubungan suami-istri melalui kontribusi penghasilan istri dalam keluarga. Poerwandari (2000), mengungkapkan pendekatan kuantitatif bisa membantu perjuangan perempuan dalam mengadvokasi pembuat kebijakan yang tidak berperspektif perempuan. Data kuantitatif digunakan untuk menyajikan data dan meyakinkan pembuat kebijakan karena selama ini kebijakan sering dibuat berdasarkan data yang dihasilkan secara kuantitatif. Terutama terhadap formulasi hukum dan kebijakan yang dibuat berdasarkan persepsi masyarakat yang dipengaruhi oleh stereotipe, kebiasaan-kebiasaan dan konsep tradisional.

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian perempuan, atau dikenalkan sebagai argumentasi statistik gender oleh Hedman dkk (1996) dalam (Poerwandari, 2000), merupakan hal penting sebagai dasar aksi dalam melihat hal-hal yang berkaitan dengan isu gender. Karena, dalam negara-negara yang memiliki hukum dan aturan yang menjamin persamaan gender dan melindungi hak asasi manusia, persamaan dan jaminan tersebut belum tentu terwujud secara secara *de facto*. Argumentasi statistik gender dalam hal ini akan mampu mengungkap kesenjangan sesuatu yang secara hukum atau diatas kertas dikatakan ideal, melalui kenyataan yang tergambar oleh data statistik. Hal ini

diharapkan membawa perubahan, menghilangkan stereotif dan meningkatkan pemahaman mengenai persoalan nyata yang dihadapi perempuan dan laki-laki.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun langkah-langkah pengambilan dan pengolahan data dalam penelitian ini dapat dilihat dari skema berikut ini:



3.3.1 Studi Data Kepegawaian sebagai pendekatan kepada informan

Studi dokumen kepegawaian dilakukan sebagai jalan pendekatan kepada informan. Melalui data kepegawaian akan didapat formasi PNS perempuan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ketapang. Dari hasil studi dokumen kepegawaian di dapat beberapa hal berikut:

- 1) Jumlah PNS perempuan di banding PNS laki-laki, melihat berapa besar jumlah dan peluang perempuan yang bekerja sebagai PNS.
- 2) Perbandingan PNS perempuan yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
- 3) Jumlah PNS perempuan di lingkungan Struktural yang berpasangan dengan PNS. Untuk mendapatkan pasangan dari kelompok homogen PNS, khusus untuk perempuan PNS yang berada di lingkungan kerja struktural.
- 4) Aturan penggajian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Gaji Pokok PNS (Pegawai Negeri Sipil).

3.3.2 Random Sampling Sederhana

Random sampling sederhana dilakukan dalam populasi penelitian skala kecil dan homogen. *Random sampling sederhana* dilakukan dengan cara pengacakan untuk mendapatkan informan penelitian. Pengambilan informan sebanyak 15% dari populasi dianggap mencukupi dan dapat dilakukan dengan langkah-langkah (a) membuat daftar subyek atau calon informan dan diberi nomor

urut (b)membuat kode berwujud angka pada setiap calon informan pada sepotong kertas kecil dan (c)menggulung dan mengocok kertas-kertas tadi dan mengambilnya secara acak (Anonim, 2000)

Pengacakan dilakukan kepada 102 perempuan yang berada di lingkungan struktural dan berpasangan dengan PNS, dengan cara *undian (lotre)* dan mengambil sebanyak 30% atau 30 orang sebagai calon informan. Jumlah 30% dari populasi dianggap memadai untuk mendapatkan informasi penelitian, karena dibutuhkan minimal 15% informan atau subjek penelitian untuk mewakili dari populasi penelitian. Pengacakan dilakukan tanpa melihat kriteria lain yang terdapat pada pasangan-pasangan PNS di lingkungan struktural Pemerintah Kabupaten Ketapang.

3.3.3 Wawancara

Setelah mendapatkan data melalui studi dokumen dilakukan pengacakan terhadap perempuan PNS yang berpasangan dengan PNS, kemudian dilakukan wawancara dengan panduan terkontrol dan berkembang menjadi wawancara terbuka. Menurut Reinharz (2005), wawancara menawarkan kepada peneliti jalan masuk ke pendapat, pikiran, dan ingatan orang dalam bahasa mereka sendiri ketimbang bahasa peneliti. Nilai ini penting bagi studi perempuan, karena dengan cara ini kita belajar dari pengalaman dan pendapat perempuan yang bisa menjadi titik balik setelah berabad-abad pendapat perempuan diabaikan atau diwakilkan lewat suara laki-laki.

Metode wawancara memberikan peluang terbangunnya tingkat kepercayaan dan mendapatkan hal-hal yang tidak bisa dikuantitatifkan seperti sikap dan perasaan responden. Dalam wawancara, peneliti dan responden adalah perempuan, jadi wawancara adalah perbincangan dua orang perempuan. Wawancara bisa mencapai “yang tersirat (*subtleties*)” yang terkandung dalam perbincangan perempuan itu sendiri. Salah satu cara untuk mencapai yang tersirat ini adalah bersikap membiarkan orang yang diwawancara memimpin. Berarti wawancara tidak memusatkan perhatian pada pengupayaan agar pertanyaan bisa dijawab tetapi pada memahami orang yang diwawancara (Reinharz, 2005).

Wawancara dilakukan dengan metode wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan berdasarkan pertanyaan wawancara yang dibuat berdasar tujuan penelitian. Setelah wawancara berkembang menjadi wawancara yang terbuka dan mendalam, peneliti kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bersifat mendalam. Wawancara dilaksanakan peneliti sambil merekam percakapan, kemudian mencatat sikap yang diperlihatkan informan selama wawancara. Catatan yang dibuat peneliti bermanfaat dalam proses transkrip verbatim hasil wawancara, serta mempermudah peneliti dalam menginterpretasi jawaban informan atas pertanyaan-pertanyaan wawancara.

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian berperspektif feminis atau berperspektif perempuan, penelitiannya adalah perempuan, tempat penelitiannya kadang-kadang dunia perempuan dan nara sumber kuncinya secara khusus perempuan. (Reinharz. 2005. hlm. 72). Penggunaan nara sumber kunci atau informan perempuan adalah untuk bisa memahami pengalaman yang menunjukkan suara dan keinginan perempuan berdasarkan kepentingan perempuan, serta memberi peluang penyadaran bagi perempuan.

Menurut Poerwandari (2005. hlm, 93), dalam penelitian kualitatif penentuan sampel atau subjek penelitian memiliki karakteristik yang mengutamakan kekhususan masalah penelitian dengan memahami sudut pandang dan konteks subjek penelitian secara mendalam sehingga jumlah atau angka tidak dipersoalkan. Namun karena hasil penelitian menggunakan pengelolaan data secara kualitatif yang ditunjang oleh pemaparan atau deskripsi data kuantitatif, maka saya menentukan kriteria informan sebagai berikut:

- 1) Informan adalah perempuan dari pasangan suami-istri pegawai negeri sipil, untuk mendapatkan lingkungan penelitian dan informan penelitian yang homogen. Sehingga area penelitian lebih fokus kepada pandangan dan pengalaman istri bekerja dalam mengalokasikan penghasilannya. Secara kualitatif ini menjadi penting untuk melihat bagaimana sebenarnya situasi hubungan suami-istri ketika penghasilan suami-istri datang dalam jumlah yang tetap dan waktu bersamaan setiap bulan.
- 2) Perempuan pegawai negeri sipil dari jajaran struktural dengan suami pegawai negeri sipil dari jajaran struktural dan fungsional bukan TNI

Polri. Hal ini saya anggap penting untuk lebih memfokuskan dalam pemilihan informan agar lebih homogen. Mengingat asal instansi dan jajaran vertikal atau horisontal suami memberikan sumber penghasilan dan peraturan yang berbeda terhadap istri.

- 3) Berusia 25 sampai dengan 55 tahun, karena pada usia ini perempuan PNS masih aktif bekerja. Aktivitas informan di dunia kerja menjadi pertimbangan dan mungkin pengaruhnya terhadap sikap dan pertimbangan dalam membuat keputusan.
- 4) Pasangan atau suami informan masih bekerja aktif.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di lingkungan kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi berdasarkan faktor demografis yang menempatkan PNS perempuan kabupaten Ketapang dalam lingkup keluarga tradisional menuju situasi dan teknologi modern, akan memberikan warna yang cukup menarik bagi penelitian kehidupan perempuan. Pemilihan lokasi merupakan salah satu strategi saya untuk mengetahui secara spesifik keadaan perempuan PNS dalam perekonomian rumah tangganya, karena setelah menyelesaikan pendidikan di Kajian Wanita saya akan kembali sebagai PNS yang bekerja di Pemerintahan Kabupaten Ketapang. Sehingga data pengalaman perempuan ini akan sangat membantu saya dalam mengembangkan program pemberdayaan perempuan di Ketapang. Disamping itu pertimbangan kedekatan jalinan psikologis yang akan mudah terbangun antara saya dengan calon informan karena pertimbangan bahasa dan daerah akan membantu saya dalam melakukan penelitian.

3.6 Instrumen Penelitian

Mengingat yang ingin diketahui dari hasil penelitian adalah melihat kekuasaan dalam hubungan suami-istri melalui posisi tawar dan relasi kuasa suami-istri dalam mengalokasikan penghasilannya. Sehingga data yang dibutuhkan adalah data kontribusi penghasilan istri untuk keperluan keluarga secara rutin dan data pengalaman perempuan dalam mengelola penghasilannya. Maka, dalam penelitian ini saya menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen utama penelitian. Saya menggunakan pedoman wawancara terstruktur yang mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan berurutan berupa kuesioner yang diisi pewawancara atau peneliti pada saat wawancara berlangsung. Pedoman wawancara terstruktur saya pergunakan untuk mendapatkan data mengenai model pengelolaan penghasilan suami-istri. Kemudian saya mengembangkan wawancara menjadi pertanyaan terbuka setelah informan bersifat terbuka dalam memberikan jawaban wawancara. Wawancara terbuka bertujuan untuk mendapatkan pengalaman atau refleksi perempuan dalam mengelola penghasilannya untuk keluarga.

3.7 Teknik Analisis

Analisis yang dipergunakan adalah analisis gender, yaitu perangkat ilmiah yang digunakan untuk membedah atau menganalisis persoalan ketidakadilan struktural yang disebabkan oleh keyakinan gender yang mengakar dan tersembunyi diberbagai tempat seperti tradisi masyarakat, keyakinan agama, serta kebijakan dan perencanaan pembangunan. Melalui analisa gender, kita dimungkinkan untuk memusatkan perhatian pada relasi gender serta keluar dari pemikiran yang memfokuskan pada perempuan. Untuk menampilkan fenomena

seutuh mungkin, penelitian dilakukan dengan mengembangkan analisis berdasarkan gabungan pertanyaan penelitian, teori dan penelitian-penelitian terdahulu dan data-data yang didapat. Hal ini menurut Poerwandari (2005), merupakan suatu pendekatan untuk membangun pemahaman konseptual dengan cara menggabungkan proses induksi dan deduksi.

Proses analisis yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh proses pengumpulan data yang mengalami perubahan dan perkembangan. Berikut ini tahapan pengolahan data dan analisis data adalah:

3.7.1 Seluruh data hasil wawancara yang terekam dalam kaset ditranskrip secara verbatim.

Hasil transkrip kemudian dicocokkan dengan data-data dari catatan pendamping yang saya buat pada lembar pertanyaan kontrol atau kuesioner. Pada beberapa informan saya mengulangi beberapa pertanyaan melalui telepon. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemahaman dan pengutipan hasil wawancara.

3.7.2 Setelah transkrip verbatim, dilakukan pengolahan data terhadap hasil wawancara, data kepegawaian dan data perekonomian yang akan memberikan gambaran:

3.7.2.1 Besarnya penghasilan suami-istri dan model pengelolaan penghasilan suami-istri dalam keluarga. Hasil pengolahan data kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut:

Tabel 4. Pengelolaan penghasilan dalam keluarga

Bagian I Pemasukan keuangan			
Pemasukan	Istri	suami	Keterangan
gaji pokok (Rp,00)	-	-	
Tunjangan jabatan (Rp,00)	-	-	
Tunjangan proyek (TPP, lembur, SPPD) (Rp,00)	-	-	
Penghasilan lain (Rp,00)	-	-	
Total perkiraan penghasilan (Rp,00)	-	-	
Bagian II alokasi penghasilan suami			keterangan
(A)	Suami menyerahkan gaji, tunjangan jabatan, tunjangan proyek, penghasilan lain kepada istri		
(B)	Suami menyerahkan gaji, tetapi mengelola sendiri tunjangan jabatan, tunjangan proyek, dan penghasilan lain kepada istri		
(C)	Suami menyerahkan sebagian gaji, dan tidak menyerahkan tunjangan jabatan, tunjangan proyek dan penghasilan lain kepada istri		
(e)	Suami tidak menyerahkan samasekali penghasilannya kepada istri		
Bagian III alokasi penghasilan istri			keterangan
(a)	Penghasilan istri 100% untuk keluarga tanpa bias menabung		
(b)	Penghasilan istri 100% untuk keluarga, sebagian bisa di tabung untuk keperluan keluarga		
(c)	Penghasilan istri di tabung semua untuk kepentingan keluarga		
(d)	Penghasilan istri di tabung 100% untuk kepentingan pribadi		
(e)	Penghasilan istri sebagian untuk keluarga, tanpa sempat menabung, sebagian bisa untuk diri sendiri (-20%)		
(f)	Penghasilan istri sebagian untuk keluarga, tanpa sempat menabung tapi masih bisa menggunakan sebagian untuk diri sendiri (-20%)		

3.7.2.2 Rincian pengeluaran penghasilan suami (XY) dan istri (xy) yang dihitung berdasarkan alokasi penghasilan masing-masing dalam keluarga. Nilai ini didapat melalui pengeluaran rutin keluarga dari gaji suami atau istri ditambah pengeluaran rutin kebutuhan suami atau istri dari penghasilan suami atau istri. Berikut ini bentuk-bentuk pengeluaran dalam keluarga:

1. *Pengeluaran rutin untuk keluarga per bulan :*

- a. Konsumsi : bahan pokok, lauk pauk, konsumsi lain, susu/jajan anak
 - 1) Bahan pokok: beras, terigu/ umbi-umbian, minyak goreng, gula, kopi, teh, rempah, minyak tanah dan gas,
 - 2) kesehatan: deterjen, antiseptik, sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, shampo, alat cukur, soptex , dan racun nyamuk
 - 3) Lauk pauk: daging, telur, ikan, kacang-kacangan seperti tahu dan tempe, dan sayuran serta susu.
- b. Biaya jasa: listrik, ledeng, telepon, koran, pembantu, bensin/transport
- c. Pendidikan anak: biaya buku, biaya bulanan, biaya ekstrakurikuler dan les, serta jajan sekolah anak.

2. *Pengeluaran keluarga yang bersifat tidak rutin per bulan:*

- a. Pendidikan: biaya mainan, biaya masuk sekolah/kuliah anak
- b. Perumahan : tanah, rumah, perabot rumah tangga seperti sofa, dipan dan peralatan tidur, almari pakaian, buffet, alat-alat elektronik; perabot dapur seperti meja makan, peralatan makan dan peralatan masak. Kendaraan; mobil dan sepeda motor.
- c. Kebutuhan sandang: suami-istri yang terdiri atas pakaian kerja, pakaian rumah daster, kaos, dan celana/rok, pakaian olahraga, pakaian dalam, handuk, pakain ibadah /pakain sholat, sepatu, sandal, tas dan lain-lain. Untuk anak-anak dan anggota keluarga lain yang terdiri pakaian sekolah, pakaian rumah, pakaian pesta, pakaian oleh raga, sepatu, sandal, handuk, pakaian sholat, tas dan perlengkapan lainnya.
- d. Kesehatan; kontrol, KB, kehamilan dan persalinan, kesehatan suami, kesehatan anak dan kesehatan anggota keluarga lainnya.

e. Kegiatan sosial, sumbangan perkawinan, sumbangan kematian, gotong royong kebersihan, siskamling, biaya pesta, dan selamatan.

3. *Pengeluaran rutin untuk kebutuhan pribadi istri:*

- a. Sarana hiburan dan sarana olahraga
- b. Kosmetika, salon, dan sarana kecantikan lain
- c. Pula, hp dan berbagai penunjangnya
- d. tanggungan di luar anggota keluarga

4. *Pengeluaran rutin untuk kebutuhan pribadi suami:*

- a. Sarana hiburan dan sarana olahraga
- b. Kosmetika pria
- c. Pula, Hp, dan aksesoris lainnya,
- d. Rokok dan jajan
- e. Tanggungan di luar anggota keluarga

3.7.2.3 Pembagian peran rumah tangga dalam keluarga, yang menggambarkan jam kerja rumah tangga dan jam kerja perempuan. Pembagian peran dalam keluarga dapat dilihat dengan menghitung siapa saja yang melakukan peran rumah tangga dan berapa lama waktu yang dihabiskan untuk proses tersebut. Pembagian kerja suami-istri masing-masing keluarga informan kemudian digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Pembagian kerja rumah tangga sehari-hari dalam keluarga

No	Kegiatan	Waktu kegiatan / hari	Jumlah jam/hari	jumlah jam/minggu	Alokasi kegiatan		
					sua mi	istri	Ket
Kegiatan rutin setiap hari							
1	Di Kantor	07.00 s/d 15.00 Wib/ senin s/d jum'at (5 hari)	-	-	-	-	
2	Memasak	2 kali sarapan & akan malam					
	Menyiapkan sarapan	05.00 s/d 6.30 Wib	-	-	-	-	
	Menyiapkan makan siang	12.00 s/d 13.00 Wib ,	-	-	-	-	
	Menyiapkan makan malam	18.30 s/d 19.00 Wib	-	-	-	-	
3	Mencuci pakaian	2 kali seminggu	-	-	-	-	
4	Menyetrika	1 kali seminggu	-	-	-	-	
5	membersihkan rumah	Tiap hari,dibantu anak & ipar, mingu suami	-	-	-	-	
6	Belanja lauk pauk	3 kali seminggu hari sekali	-	-	-	-	
8	Membantu anak belajar	Tiap hari	-	-	-	-	
9	Mengantar anak kesekolah	6 hari seminggu	-	-	-	-	
	Jumlah jam kerja rumah tangga		-	3-			
8	Kegiatan pengasuhan tidak rutin: merawat anak sakit ketika sakit	24 jam/ hari – 7 jam dikantor	-	-	-	-	
kegiatan rutin per bulan							
10	Belanja sembako	Awal bulan 2 kali /bulan	-	-	-	-	
11	Belanja konsumsi lain	sekali-sekali	-	-	-	-	
12	Membayar listrik	1 kali/ bulan	-	-	-	-	
13	Membayar leding	1 kali/ bulan	-	-	-	-	

Catatan: berdasarkan hasil rekap wawancara dengan..... pada tanggal..... 2007

- 3.7.3 Menganalisa kekuasaan atau model hubungan suami istri berdasarkan alokasi penghasilan istri, dan jam kerja istri, serta pembagian peran dalam keluarga.
- 3.7.4 Kemudian melakukan pembacaan kata demi kata dari hasil transkrip verbatim wawancara yang berkembang terbuka untuk isu-isu besar yang menonjol dan seragam. Mencatat sesuatu yang tersirat 'sublities' dari ungkapan beberapa informan penelitian.
- 3.7.5 Memberikan kode-kode dan nama pada setiap isu yang muncul untuk mempermudah proses klasifikasi data secara lebih spesifik. Dari hasil

klasifikasi data secara spesifik akhirnya didapat tema-tema penting yang sesuai dengan tujuan penelitian.

- 3.7.6 Berdasarkan tema-tema penting ini saya melakukan analisis tematik untuk menjelaskan gejala atau informasi yang muncul dari data kualitatif sesuai kebutuhan penelitian. Dalam hal ini sebagai peneliti dibutuhkan kemampuan untuk melihat tema secara induktif atau melalui informasi mentah data, dan secara deduktif yang berasal dari teori atau penelitian-penelitian sebelumnya (Boyatzis 1998 dalam Poerwandari 2005).
- 3.7.7 Selanjutnya membuat kesimpulan dari hasil penelitian secara berperspektif perempuan dan menuliskan laporan hasil penelitian.

3.8 Isu Etis

Menurut Poerwandari (2005. hlm. 201), isu etis harus diperhatikan guna menghindari tindakan tidak etis yang bisa terjadi di semua tahapan proses, mulai dari menetapkan pertanyaan penelitian, mengambil data, mengolah dan menganalisisnya, sampai menuliskan laporan. Menurut Poerwandari (2005. hlm. 202), isu etis merupakan dilema-dilema atau konflik yang muncul, serta pertimbangan yang diambil dalam menyeimbangkan dua kepentingan, yaitu hasil penelitian dan kondisi praktis di lapangan. Dalam hal ini, penelitian harus memperhatikan dan melindungi kepentingan informan serta keakuratan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, isu etis yang harus diperhatikan adalah persetujuan informan untuk terlibat dalam penelitian, kerahasiaan identitas dan keamanan informan dan komunitasnya harus dilindungi ketika hasil penelitian dipublikasi.

Konsekuensi negatif penelitian terhadap informan seperti trauma, stress dan tertekan ketika informan menjalani wawancara mendalam. Kemungkinan penyadaran serta alternatif terapi lebih lanjut bagi informan dalam memperbaiki relasi kuasa dan keadilan gender dalam rumah tangganya.

3.9 Proses Pelaksanaan Penelitian

3.9.1 Rencana dan Persiapan

Dalam mendekati informan penelitian, saya mempersiapkan beberapa hal berikut:

- 1) Surat pemberitahuan kepada Bupati Kabupaten Ketapang tentang proses penelitian yang akan dilaksanakan di lingkungan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ketapang
- 2) Melaksanakan studi dokumen kepegawaian
- 3) Membuat gambaran singkat tentang rencana penelitian dan hal apa saja yang ingin diketahui dari informan.
- 4) Surat pengantar kesediaan informan untuk menjadi subjek penelitian sekaligus menentukan jadwal wawancara
- 5) Menghubungi sekali lagi untuk menegaskan jadwal wawancara sekaligus memberikan gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan, dan apa saja yang dibutuhkan dari informan.

3.9.2 Pelaksanaan Kegiatan Di Lapangan

Dalam proses pengambilan data, beberapa hal yang perlu saya catat adalah:

- 1) Jalan masuk kepada informan atau pemilihan informan dilakukan dengan pendataan PNS perempuan secara keseluruhan. Kemudian,

dilakukan pemisahan PNS perempuan yang berkerja di lingkungan struktural dan PNS perempuan yang ada di lingkungan fungsional seperti guru, perawat, bidan, penyuluh dan dokter. Kemudian mencari data PNS perempuan yang menikah dengan PNS baik PNS struktural maupun PNS fungsional kecuali Polri dan TNI.

- 2) Rencana awal pengambilan data adalah dengan penyebaran kuesioner setelah studi dokumen kepegawaian dan pengacakan calon informan. Kemudian diikuti metode wawancara mendalam untuk pengambilan data lebih lanjut. Tetapi setelah melakukan uji coba terhadap pengisian kuesioner oleh dua orang informan, saya mendapatkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh informan kurang efektif dalam memberikan data serta informasi yang saya inginkan. Kemudian saya melakukan metode wawancara terhadap tiga orang informan dengan model jawaban tertutup dan mengacu kepada isian kuesioner, sambil saya melakukan sendiri pengisian kuesioner dan merekam hasil wawancara. Hasilnya lebih efektif dan memberikan informasi yang saya inginkan serta mempermudah saya dalam melakukan wawancara mendalam.
- 3) Berdasarkan hasil uji coba tersebut saya memutuskan model wawancara tertutup terhadap tiga puluh orang calon informan yang kemudian berkembang menjadi wawancara terbuka dan mendalam terhadap enam belas orang informan, karena mereka memberikan jawaban-jawaban terbuka dan mendalam sesuai dengan tema dan tujuan penelitian.
- 4) Sebagian informan yang saya wawancara memberikan sikap yang keberatan pada awal wawancara. Mereka memberikan jawaban

yang sifatnya tertutup dan hati-hati. Namun sebagian informan memberikan jawaban yang justru sangat mendalam dan terbuka selama proses wawancara.

- 5) Sebagian wawancara saya lakukan pada jam-jam kerja maupun jam istirahat dengan mendatangi informan di tempat kerjanya, sebagian lagi menerima saya pada hari sabtu dan minggu di rumah kediamannya.
- 6) Saya melihat informan bersedia di wawancara dengan beberapa alasan diantaranya; kesediaan membantu penelitian; keinginan berbagi pengalaman dan mengungkapkan berbagai persoalan rumah tangga dalam ekonomi, hubungan suami istri, kelanjutan pendidikan dan pekerjaannya.
- 7) Pada wawancara berjalan dan berkembang beberapa informan yang memberikan jawaban terbuka dan mendalam ke arah tujuan penelitian meskipun wawancara yang saya lakukan masih pada tahap wawancara yang memberikan pertanyaan tertutup.
- 8) Saya juga membiarkan informan yang saya wawancara membawa arah pembicaraan dan banyak bercerita.
- 9) Pada wawancara yang berkembang saya banyak menemukan beberapa kesamaan atas pengalaman perempuan bekerja dan mengalokasikan penghasilannya.
- 10) Beberapa calon informan mengundurkan diri atau tidak bersedia diwawancara. Satu orang dengan alasan rumah tangganya sedang dalam masalah kemudian mencari informan pengganti. Sedangkan satu orang lagi dengan alasan tidak ingin persoalan pribadinya dijadikan objek penelitian.

- 11) Pada beberapa informan yang mengetahui status saya yang belum menikah dan sudah berumur tiga puluh tahun sering memberikan komentar bahwa saya belum berpengalaman dalam kehidupan berkeluarga, sehingga menganggap hal-hal kecil ini sebagai sebuah persoalan yang belum saya mengerti. Mereka kadang-kadang memberikan jawaban yang singkat dan menjaga jarak, bahkan tidak jarang saya disarankan untuk menikah agar mengerti persoalan yang sebenarnya dalam berkeluarga. Menurut mereka persoalan keuangan dalam keluarga akan menjadi pertimbangan yang menghambat saya untuk menikah. Dalam hal ini saya mencoba untuk tidak terlibat secara emosional dengan informan karena akan menghambat proses pendekatan saya dengan informan.
- 12) Setelah membaca hasil wawancara dan melakukan analisa, saya merasa perlu melakukan wawancara kedua terhadap beberapa informan yang saya anggap mendekati tujuan penelitian saya.

3.9.3 *Pencatatan Data Hasil Wawancara*

Total wawancara dilakukan terhadap tiga puluh orang informan. Kemudian, dengan beberapa pertimbangan seperti kurangnya waktu untuk melakukan pendekatan kepada beberapa informan yang bersedia diwawancara mendalam, serta pemenuhan kebutuhan data yang dirasa mencukupi, maka saya memutuskan jumlah informan yang dijadikan dalam penelitian ini menjadi enam belas orang informan. Dalam proses wawancara tiga belas orang bersedia direkam, dan sisanya tiga orang tidak bersedia direkam. Dua orang yang tidak ingin direkam karena merasa

persoalan yang dibicarakan sangat pribadi, secara tidak langsung mereka menunjukkan sikap atau pernyataan bahwa rekaman bisa digunakan untuk hal-hal yang merugikan mereka. Kedua informan ini bersuamikan PNS dengan jabatan yang cukup tinggi. Sedangkan yang satu orangnya, menduduki jabatan yang cukup baik namun sedang memiliki persoalan dengan suaminya sehingga tidak ingin diwawancara.

Nama dan data pribadi dari informan di simpan sebagai arsip file saya dan untuk menjaga kerahasiaan dan kepentingan informan, maka saya memberikan kode kepada setiap informan ketika proses analisa dan pelaporan hasil penelitian. Dari hasil wawancara ujicoba pada tiga informan saya melihat adanya sesuatu yang tersirat yang terungkap lewat pengalaman perempuan. Sesuatu yang tersirat ini berhubungan dengan tema-tema besar yang kemudian muncul selama wawancara dengan beberapa informan lain.

Tema-tema besar ini mengarah kepada tujuan penelitian saya. Oleh karena itu, pada beberapa informan yang cukup terbuka dan spesifik dalam memberikan jawaban saya mengubah tehnik wawancara. Saya membiarkan mereka berbicara sepenuhnya, sehingga saya sering tidak menggunakan pedoman wawancara sebagai sesuatu yang baku. Dalam hal ini saya mengubah model pertanyaan langsung kepada pertanyaan terbuka tanpa mengubah tujuan penelitian dari proses eksplorasi wawancara.

BAB 4

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PENGHASILAN SUAMI-ISTRI BEKERJA

4.1 Perempuan dalam Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya di Kabupaten Ketapang

4.1.1 Kondisi Demografi Kabupaten Ketapang

Secara geografis Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten yang memiliki dua tipe wilayah, yakni wilayah pantai yang bersentuhan langsung dengan Laut Jawa, dan wilayah pedalaman yang berbukit-bukit. Wilayah yang bersentuhan langsung dengan Laut Jawa membuat kabupaten Ketapang terbuka terhadap wilayah lain, sehingga memengaruhi kondisi demografinya. Pengaruh ini bisa dilihat dari kondisi sosial berupa keberagaman etnis dan perpaduan budaya yang memengaruhi tingkat pendidikan dan kesehatan perempuan. Kemudian penambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang memperlihatkan perkembangan masyarakat ketapang.

Secara demografis, jumlah penduduk Kabupaten Ketapang yang meliputi 24 Kecamatan adalah 473.880 jiwa (pada tahun 2004) yang terdiri dari laki-laki 217.885 jiwa dan perempuan 205.931 jiwa. Sex ratio 109 yang menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 109 laki - laki. Berdasarkan hasil pencatatan registrasi penduduk dari tahun 2000 sampai 2008 dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk kabupaten Ketapang sebesar 2,74 % per tahun. Tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi ini dimungkinkan karena terjadinya migrasi, seperti banyak penduduk yang masuk ke Ketapang karena tertarik dengan berkembangnya industri perikanan, perkebunan-perkebunan besar, maupun oleh tingkat kelahiran yang relatif lebih tinggi karena program KB yang terhambat faktor geografis dan sebagainya (BPS Kabupaten Ketapang, 2006).

Kabupaten Ketapang memiliki sebaran penduduk 13 jiwa/km², yang dihitung berdasarkan perbandingan luas wilayah sebesar 35.809 km² dan jumlah penduduk 473.880 jiwa. Berdasarkan data statistik kependudukan, penyebaran penduduk di ketapang terlihat belum merata dimana kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terpadat yaitu Kecamatan Delta Pawan dengan kepadatan penduduk sebesar 3.129 jiwa per Km², kemudian diikuti Kecamatan Benua Kayong sebanyak 91 jiwa per km² dan singkup sebanyak 57 jiwa per km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk yang paling jarang adalah kecamatan Hulu Sungai yaitu 2 jiwa per km². Kepadatan penduduk di kecamatan Delta Pawan dan Benua Kayung merupakan dua kecamatan yang menjadi pusat kota kabupaten. Sedangkan kecamatan Singkup merupakan kecamatan yang menyerap tenaga kerja pendatang dan penduduk lokal di bidang perkebunan. (BPS Kabupaten Ketapang, 2006).

Sebaran penduduk yang tidak merata yang terjadi karena adanya pemusatan tenaga kerja dan kegiatan ekonomi, baik itu di kota kabupaten maupun kecamatan yang memiliki perkebunan besar, juga diikuti oleh sebaran tenaga kerja perempuan. Termasuk sebaran tenaga kerja perempuan yang bekerja di bidang formal seperti PNS dan pegawai swasta, maupun yang bekerja di bidang informal seperti tenaga buruh diperkebunan, pembantu rumah tangga, dan beberapa pekerja industri rumah tangga.

4.1.2 Perempuan dalam Sosial dan Ekonomi Kabupaten Ketapang

4.1.2.1 Pendidikan Perempuan

BPS Pusat (2005) mencatat kalau angka melek huruf perempuan di Kabupaten Ketapang adalah 84,3 % dari jumlah penduduk perempuan, sedangkan laki-laki mencapai 94,1 % dari jumlah penduduk. Rata-rata lama bersekolah

perempuan juga lebih rendah dibandingkan laki-laki, yakni 5,3 tahun untuk perempuan dan 6,2 tahun laki-laki. Hal ini disebabkan oleh besarnya angka putus sekolah dan partisipasi tingkat pendidikan yang lebih rendah dari laki-laki. Tabel berikut ini memberikan gambaran persentase usia partisipasi dan persentase usia putus sekolah.

Tabel 6. Persentase partisipasi usia sekolah

NO	Usia (tahun)	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Total (%)
1	7-12	45,2	44,8	90
2	13-15	34,1	32,4	66,5
3	16-18	19,0	18,6	37,6
4	19-24	2,0	1,4	3,4

(Biro Pusat Statistik Pusat, 2005).

Tabel. 7. Persentase usia putus sekolah

NO	Usia (tahun)	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Total %
1	7-15	1,4	3,6	5,0
2	16-18	4,8	7,7	11,9
3	19-24	1,4	1,0	2,4

(Biro Pusat Statistik Pusat, 2005)

Rendahnya angka putus sekolah pada perempuan yang berusia 19-24 tahun disebabkan pada usia tersebut tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena menikah atau membantu orangtua mencari nafkah. Faktor lain juga karena anak perempuan banyak melanjutkan pendidikan ke jenjang Diploma I dan II, dan anak laki-laki melanjutkan ke Diploma VI atau S1, sehingga ada kecenderungan pada usia tersebut angka putus sekolah menjadi rendah.

Partisipasi sekolah dan putus sekolah merupakan indikator bagi kesetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tingginya angka partisipasi dan putus sekolah pada anak perempuan, mengindikasikan keutamaan anak laki-laki untuk

melanjutkan sekolah. Misalnya, dalam kondisi ekonomi tidak memadai untuk membiayai pendidikan, maka keluarga cenderung untuk menyekolahkan anak laki-laki daripada anak perempuan. Perempuan harus berterima kasih kepada keluarga, terutama kepada saudara laki-laki dan bapak ketika diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sampai kejenjang yang lebih baik. Mereka harus memberikan pelayanan yang besar dalam keluarga sebagai balas jasa atas biaya dan jasa yang ditanamkan oleh saudara laki-laki maupun oleh orangtuanya.

Perkembangan pendidikan di Kabupaten Ketapang sebelum tahun 1970 an, kabupaten ketapang hanya memiliki satu buah SMA Negeri, satu Sekolah Pendidikan Guru, satu Sekolah Perawat, 3 buah SMP Negeri dan 3 SMP swasta yang didirikan gereja dan beberapa SD negeri yang dikembangkan di lima belas kecamatan. Pada tahun-tahun ini, pilihan pendidikan untuk anak perempuan di daerah-daerah kecamatan adalah pendidikan agama yang tidak formal dan didapat di rumah maupun yang di pusatkan di tempat-tempat ibadah. Sedangkan pendidikan formal jarang sekali sampai tamat SD, karena hanya untuk mendapatkan pelajaran berhitung dan baca tulis. Model pendidikan ini kemudian sangat memengaruhi pola pikir terhadap peran perempuan dan laki-laki dalam berumah tangga di masyarakat ketapang.

Perkembangan perempuan masuk ke dunia pendidikan di kabupaten Ketapang dimulai akhir tahun 1970 an, ketika banyak orangtua memasukkan anaknya ke sekolah formal dan mengirim anaknya ke sekolah putri setingkat SMP dan SMA di beberapa kecamatan atau di kota kabupaten. Beberapa keluarga kemudian menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi di kota propinsi. Generasi-generasi inilah kemudian yang mewarnai masuknya perempuan

ketapang ke dunia kerja di luar rumah sebagai PNS maupun sebagai pegawai swasta di tahun 1980 an.

Pada pertengahan tahun 1980-1990 an, sekolah-sekolah setingkat SMA dan SMP mulai didirikan di setiap kecamatan, sedangkan di kabupaten diperbanyak sampai 3 SMA negeri, 3 kejuruan, dan 8 sekolah swasta yang didirikan yayasan islam dan yayasan khatolik. Pada masa ini pendidikan anak perempuan dan anak laki-laki mulai di galakkan. Banyak keluarga kemudian memberikan kesempatan yang sama kepada anak perempuan dan laki-laki untuk mendapat pendidikan formal. Hasil pendidikan di tahun 1980 an ke atas kemudian semakin mewarnai keterlibatan perempuan ketapang di dunia kerja.

Perkembangan perekrutan pegawai negeri sipil perempuan dengan pendidikan diploma dan setingkat sarjana kemudian meningkat tajam awal tahun 1990 an sampai sekarang. Data terakhir (Sekretarat Daerah Kabupaten Ketapang, 2006), menunjukkan dari 6.694 PNS di kabupaten ketapang, 2.424 orang adalah perempuan dan memiliki masa kerja di bawah 20 tahun, yang berarti direkrut di atas tahun 1980 an. Konsentrasi perempuan yang bekerja sebagai PNS hanya mewakili 1,3 % jumlah penduduk perempuan, sedangkan PNS laki-laki mewakili lebih dari 2% jumlah penduduk laki-laki. Bahkan di awal tahun 1970 an, dapat dikatakan selain tenaga medis dan guru tidak ada perempuan yang bekerja sebagai PNS struktural di Pemerintahan Kabupaten Ketapang.

Bekerja di luar rumah seperti PNS masih merupakan sasaran atau tujuan pendidikan dari sebagian masyarakat ketapang, terutama kaum perempuan. Karena memberikan jaminan sosial dan ekonomi yang tergolong stabil terhadap perubahan situasi ekonomi dan sosial di daerah setingkat kabupaten. Sebagian

besar perempuan yang berpendidikan SMA dan Perguruan Tinggi di daerah ini memilih pekerjaan sebagai PNS, sehingga dapat dikatakan perempuan PNS adalah perwakilan dari perempuan berpendidikan di Kabupaten Ketapang. Pendidikan dan pekerjaan kemudian menempatkan perempuan PNS pada lapisan sosial menengah ke atas.

4.1.2.2 Perempuan dalam Ekonomi Kabupaten Ketapang

Sebelum perkebunan besar dan industri kayu belum masuk ke wilayah kabupaten ketapang, masyarakat di wilayah pedalaman menggantungkan hidupnya pada hasil tani, isi hutan, perkebunan karet rakyat, dan perikanan darat. Pada waktu ini masyarakat hidup secara komunal, dimana satu keluarga *batih* atau lebih hidup bersama anggota keluarga lainnya dalam satu rumah. Semua kegiatan produksi dilakukan bersama, misalnya bertanam padi dan jagung pada musim tanam dilakukan dengan cara *urunan* atau saling membantu antara perempuan dan laki-laki. Setelah musim tanam selesai perempuan dan laki-laki dewasa masuk ke dalam hutan, untuk mengambil hasil karet atau hasil hutan yang lainnya. Perempuan terlibat sebanyak 85% kegiatan produksi pertanian, perikanan, hutan dan karet rakyat. Menurut data Dinas Pertanian Kabupaten Ketapang, 85 % proses produksi pertanian di kerjakan tenaga kerja perempuan sebagai tenaga kerja keluarga yang tidak berupah (BPS Kabupaten Ketapang, 2006). Setelah tahun 1980, perusahaan kayu dan perkebunan sawit mulai membuka pabrik di Ketapang, melakukan eksploitasi terhadap hasil hutan dan mulai merekrut tenaga kerja.

Rendahnya kesempatan perempuan mengakses pendidikan dan keterampilan formal, kemudian kehilangan hutan dan lahan garapan karena terkonversi menjadi lahan perkebunan, mengakibatkan marginalisasi terhadap perempuan dari perkembangan perekonomian ketapang. Perempuan tidak bisa

masuk dalam perekrutan tenaga kerja oleh pabrik dan perkebunan karena tidak memenuhi standar pendidikan dan keterampilan yang diminta oleh perusahaan. Mereka kemudian bermigrasi ke kota kabupaten dan propinsi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau buruh kasar dipabrik. Sebagian lagi yang menetap, kemudian menjadi buruh-buruh yang bekerja lepas di pabrik kayu atau buruh perkebunan. Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang mencatat 30% tenaga kerja buruh kasar dengan upah terendah di perkebunan besar Ketapang adalah perempuan. Masuknya perusahaan kayu dan perkebunan yang mengambil hasil hutan, membuka pabrik-pabrik pengolahan kayu dan pengelolaan perkebunan, kemudian melibatkan tenaga kerja perempuan sebagai buruh. (BPS Kabupaten Ketapang, 2006).

Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Ketapang sebanyak 49% dari 473.880 jiwa, dan di atas 70% perempuan produktif secara keseluruhan berpendidikan tidak tamat SMP. Partisipasi perempuan Ketapang dalam angkatan kerja pada tahun 2002 mencapai 34,5 % dan diperkirakan meningkat sampai 2 % setiap tahunnya dari jumlah penduduk perempuan. Rata-rata upah di sektor non pertanian di Ketapang pada tahun 2002 sebesar Rp 572.200,- lebih rendah dari upah laki-laki yang mencapai Rp615.500,- (BPS Pusat, 2005). Kemudian data beberapa pabrik kayu dan perkebunan besar memperlihatkan kalau upah pekerja dengan keahlian setara SMA yang dikontrak bulanan berdasarkan upah minimum kabupaten Ketapang adalah Rp666.673,- untuk 25 hari kerja setara Rp26.800/hari. Sedangkan upah buruh harian yang didominasi perempuan dengan jam kerja 7 jam/hari berkisar Rp15.000,- sampai Rp20.000,-. (BPS Kabupaten Ketapang, 2006).

Proses marginalisasi terhadap perempuan dalam bidang pertanian karena mempergunakan alat-alat modern juga terjadi karena akses perempuan terhadap teknologi pertanian lebih rendah dibanding laki-laki. Kemudian adanya proses konversi hutan rakyat menjadi perkebunan mengakibatkan semakin rendahnya keberdayaan ekonomi perempuan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kontribusi pendapatan perempuan Ketapang dalam menyumbang ekonomi rumah tangga. Data BPS Pusat (2005) menunjukkan kalau perempuan di kabupaten Ketapang hanya berkontribusi 32,8 % pendapatan keluarga dibanding laki-laki yang mencapai 67,2 %.

Perkembangan perekonomian masyarakat pinggiran pantai lebih cepat dibandingkan perkembangan masyarakat pedalaman. Perempuan terlibat dalam menjalankan perekonomian rumah tangga sama dengan laki-laki. Mereka bekerja sama dalam berbagai kegiatan produksi. Secara tradisional, perempuan terlibat dalam sistem pertanian, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan panen serta penanganan hasil panen. Pada sebagian keluarga tani biasanya setelah musim tanam kaum lelaki akan pergi melaut, masuk hutan, atau menjadi buruh pabrik. Ketika laki-laki meninggalkan rumah kaum perempuan akan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan tanaman dan ternak di rumah. Sebagian perempuan ada yang pergi ke pasar untuk bekerja sebagai buruh lepas, sambil memelihara tanaman sampai waktu panen. Kemudian tidak jarang perempuan ini terlibat dalam pengolahan dan pemasaran hasil laut dan hutan yang dibawa oleh kaum lelaki.

Pada keluarga yang hidup dengan mata pencaharian di bidang nonpertanian, seperti pedagang, buruh, nelayan, pegawai swasta, dan pegawai

pemerintahan, perempuan juga menjalani peran sebagai pencari nafkah tanpa meninggalkan kewajiban mereka terhadap pengelolaan rumah tangga. Bakunya kerja rumah tangga sebagai pekerjaan perempuan, kemudian dibenarkan oleh nilai-nilai tradisional masyarakat. Beban kerja perempuan yang sebenarnya berlipat, menjadi biasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat ketapang. Tidak ada gugatan dari pihak perempuan bahwa mereka diperlakukan secara tidak adil, karena kerja yang dilakukan perempuan yang secara ekonomi menghasilkan uang, dilaksanakan bersamaan kerja perempuan menyelesaikan kerja rumah tangga. Hasil kerja kemudian menjadi tidak bernilai karena habis digunakan untuk membiayai penyelesaian kerja rumah tangga.

4.1.2 Gambaran Umum Informan

Informan penelitian berjumlah 30 orang istri yang berasal dari pasangan suami-istri pegawai negeri sipil (PNS). Kemudian dalam proses pengambilan data informan ditetapkan sebanyak 16 orang dengan pertimbangan kebutuhan data terpenuhi dari 16 orang informan. Dalam proses pengolahan dan analisis data, ke 16 orang informan ini diberi nama samaran untuk menjaga kerahasiaan dan etika penelitian. Wawancara dimulai dengan menggali gambaran umum informan yang terdiri atas umur, usia pernikahan, pangkat/golongan, masa kerja, pendidikan ketika masuk PNS, pendidikan sekarang, jumlah anak, jumlah tanggungan keluarga, serta penghasilan suami-istri yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan proyek, dan penghasilan lain-lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara maka didapat gambaran umum informan yang terurai dalam tabel-tabel berikut ini:

Tabel 8. GAMBARAN UMUM INFORMAN PENELITIAN DARI KELOMPOK SUAMI YANG MENYERAHKAN SELURUH PENGHASILANNYA UNTUK DIKELOLA ISTRI

No	Gambaran	Informan							
		Fina		Muna		Susi		Uci	
		Istri	Suami	Istri	Suami	istri	suami	istri	suami
1	Umur	35	33	43	46	37	41	31	41
2	Pangkat/Gol	III/c	III/c	III/a	III/C	III/a	III/d	III/c	III/c
3	Masa kerja PNS (th)	8	10	22	24	3	16	8	10
4	Penghasilan	2,385,000	2,625,000	2,090,000	3,018,000	1,650,000	3,745,000	6,612,000	2,851,000
	a. Gaji pokok (Rp,00)	1,495,000	1,735,000	1,590,000	2,028,000	1,350,000	1,970,000	1,522,000	1,761,000
	b. Tjg jabatan (Rp,00)	390,000	390,000	0	390,000	0	675,000	390,000	390,000
	c. Tjg proyek (Rp,00)	500,000	500,000	500,000	300,000	300,000	500,000	700,000	700,000
	d. Penghasilan Lain (Rp,00)	0	0	0	300,000	0	600,000	4,000,000	0
5	Pendidikan masuk PNS	S-1	D-IV	SMA	SMA	S-1	S-1	S-1	S-1
6	Pendidikan sekarang	S-1	S-1	D-3	D3,S-1	S-1	S-2	S-2	S-1
7	Jabatan	eselon IV	Eselon IV	-	Eselon IV	-	eselon IV	Eselon IV	eselon IV
8	Jumlah anak	1 org		2 org		1 org		1 org	
9	Usia Pernikahan	5		20		9		7	

Tabel 9. GAMBARAN UMUM INFORMAN PENELITIAN DARI KELOMPOK SUAMI MENYERAHKAN GAJI TETAPI TIDAK MENYERAHKAN PENGHASILAN LAIN UNTUK DIKELOLA ISTRI

No	Gambaran	Informan							
		Fifit		Gina		Iis		Mei	
		Istri	Suami	Istri	Suami	istri	Suami	Istri	Suami
1	Umur	43	42	42	47	43	48	41	39
2	Pangkat/Gol	III/b	II/c	III/a	III/a	III/b	II/d	III/a	III/a
3	Masa kerja PNS (th)	23	18	22	25	22	25	15	14
4	Penghasilan	2,220,000	1,950,000	2,935,000	2,124,000	2,274,000	2,300,000	2,474,000	3,000,000
	a. Gaji pokok (Rp,00)	1,920,000	1,650,000	1,935,000	1,624,000	1,974,000	1,500,000	1,974,000	1,500,000
	b. Tjg jabatan (Rp,00)	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Tjg proyek (Rp,00)	300,000	300,000	1,000,000	500,000	300,000	300,000	300,000	500,000
	d. Penghasilan Lain (Rp,00)	0	0	0	0	0	500,000	200,000	1,000,000
5	Pendidikan masuk PNS	SMP	SMP	SMA	SMA	SMA	SMA	SMA	SMA
6	Pendidikan sekarang	SMA	SMP	D-3, S-1	SMA	SMA	SMA	SMA	D-3
7	Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jumlah anak	2 org		5 org		2 org		3 org	
9	Usia Pernikahan	23		22		21		15	

Lanjutan Tabel 9. GAMBARAN UMUM INFORMAN PENELITIAN DARI KELOMPOK SUAMI MENYERAHKAN GAJI TETAPI TIDAK MENYERAHKAN PENGHASILAN LAIN UNTUK DIKELOLA ISTRI

No	Gambaran	Informan					
		Nina		Roro		Marwah	
		istri	Suami	Istri	Suami	istri	suami
1	Umur	55	54	49	54	42	43
2	Pangkat/Gol	III/c	IV/b	IV/a	IV/b	III/a	III/b
3	Masa kerja PNS (th)	18	31	23	25	19	22
4	Penghasilan	2,490,000	5,300,000	2,710,000	5,348,000	1,770,000	2,195,000
	a. Gaji pokok (Rp,00)	1,600,000	2,300,000	1,820,000	2,348,000	1,470,000	1,695,000
	b. Tjg jabatan (Rp,00)	390,000	1,500,000	390,000	1,500,000	0	0
	c. Tjg proyek (Rp,00)	500,000	1,500,000	500,000	1,500,000	300,000	500,000
	d. Penghasilan Lain (Rp,00)	0	0	0	0	0	0
5	Pendidikan masuk PNS	SMA	D-2	D-2	D-2	SMA	SMA
6	Pendidikan sekarang	SMA	S-1	S-1*	S-1	-	D-3
7	Jabatan	Eselon IV	Eselon IIb	eselon III	eselon II b	-	-
8	Jumlah anak	3 org		3 org		2 org	
11	Usia Pemikahan	30		24		18 th	

Tabel 10. GAMBARAN UMUMI INFORMAN PENELITIAN DARI KELOMPOK SUAMI YANG MENYERAHKAN SEBAGIAN GAJI DAN MENGELOLA SENDIRI SEBAGIAN GAJINYA BERSAMA DENGAN PENGHASILAN LAINNYA

No	Gambaran	Informan			
		Nana		Kurnia	
		istri	Suami	istri	Suami
1	Umur	53	49	34	33
2	Pangkat/Gol	III/d	III/c	III/a	III/a
3	Masa kerja PNS (th)	25	24	5	5
4	Penghasilan	3,070,000	2,300,000	2,800,000	1,900,000
	a. Gaji pokok (Rp,00)	2,180,000	1,300,000	1,500,000	
	b. Tjg jabatan (Rp,00)	390,000	0	0	
	c. Tjg proyek (Rp,00)	500,000	1,000,000	400,000	
	d. Penghasilan Lain (Rp,00)	0	500,000	0	
5	Pendidikan masuk PNS	S-1	SMA	SMA	SMA
6	Pendidikan sekarang	S-1	D-3	D-3, S-1	D-3, S-1
7	Jabatan	Eselon IV	-	-	-
8	Jumlah anak	2 org		1 org	
11	Usia Pemikahan	24		2 th	

Tabel 11. GAMBARAN UMUM INFORMAN PENELITIAN DARI KELOMPOK SUAMI YANG TIDAK MENYERAH MENYERAHKAN SAMA SEKALI PENGHASILANNYA UNTUK DIKELOLA ISTRI

No	Gambaran	Informan					
		Popi		Rosa		Marni	
		istri	Suami	istri	suami	istri	Suami
1	Umur	39	43	45	46	42	45
2	Pangkat/Gol	III/a	II/d	III/b	II/d	II/c	IV/A
3	Masa kerja PNS (th)	12	13	25	27	8	26
4	Penghasilan	1,990,000	2,100,000	2,643,000	7,128,000	1,630,000	6,554,000
	a. Gaji pokok (Rp,00)	1,790,000	1,600,000	1,643,000	1,828,000	1,130,000	2,454,000
	b. Tjg jabatan (Rp,00)	0	0	0	0	0	900,000
	c. Tjg proyek (Rp,00)	200,000	500,000	1,000,000	300,000	300,000	700,000
	d. Penghasilan Lain (Rp,00)	0	0	0	5,000,000	200,000	2,500,000
5	Pendidikan masuk PNS	D-2	SMA	SMA	SMP	SMA	SMA
6	Pendidikan sekarang	D-2	SMA	SMA	SMA	D-3, S-1	D-2, S-1
7	Jabatan	-	-	-	-	-	eselon III
8	Jumlah anak	4 org		4 org		4 org	
11	Usia Pernikahan	12		25		24 th	

Data-data informan di atas kemudian dikelompokkan berdasarkan usia, agama, suku, perkembangan pendidikan sejak bekerja sebagai PNS sampai sekarang, maupun golongan dan eselon yang diduduki oleh masing-masing suami-istri. Berikut adalah tabel-tabel penggolongan tersebut:

Tabel 12. Kelompok informan berdasarkan suku dan agama suami-istri

No	Suku (Istri+ Suami)	Jumlah	Informan	Agama
1	Jawa + Bugis	1 pasang	Fina	Islam
2	Jawa + Melayu	3 pasang	Susi, Nina, Popi	Islam
3	Jawa + Madura	1 pasang	Kurnia	Islam
4	Bugis + Melayu	1 pasang	Rosa	Islam
5	Dayak + Melayu	1 pasang	Marni	Islam
6	Melayu + Melayu	3 pasang	Roro, Marwah, Uci	Islam
7	Dayak + Dayak	2 pasang	Mei, Gina	Khatolik

Tabel di atas memperlihatkan pembauran antara suku di Ketapang terlihat dengan adanya pernikahan antar suku. Beberapa informan yang menikah dari suku berbeda dibanding informan yang menikah dari suku yang sama, ternyata suami bersikap sama dalam memahami peran dan kedudukan suami. Suami sebagai kepala keluarga dan berperan mencari nafkah keluarga, sedangkan istri memahami kerja rumah tangga adalah kewajiban perempuan sebagai istri.

Berikut ini merupakan tabel-tabel yang memperlihatkan penggolongan informan berdasarkan usia, eselon dan penjenjangan pendidikan suami-istri.

Tabel 13. Penggolongan berdasarkan usia Informan

No	Usia (tahun)	Jumlah informan	Informan
1	20 – 30	(-)	(-)
2	30,5 – 40	5 orang	Fina, Suci, Uci, Kurnia, Popi,
3	40,5 – 50	9 orang	Muna, Fifit, Iis, Mei, Roro, Marwah, Nana, Rosa, Marni
4	50,5 – 60	2 orang	Nina, Nana

Tabel 14. Kelompok informan berdasarkan eselon suami-istri

Eselon	Eselon istri		Eselon suami	
	Jumlah	Informan	Jumlah	Informan
I	(-)	(-)	(-)	(-)
II	(-)	(-)	2 orang	Roro, Nina
III	1 orang	Roro	1 orang	Marni
IV	4 orang	Fina, Uci, Nina, Nana	4 orang	Fina, Muna, Susi, Uci
V	(-)	(-)	(-)	(-)
Tanpa eselon	11 orang	Muna, Susi, Fifit, Gina, Iis, Mei, Marwah, Kurnia, Popi, Rosa, Marni	9 orang	Fifit, Gina, Iis, Mei, Marwah, Kurnia, Nana, Popi, Rosa

Tabel 13 dan 14 memperlihatkan kalau latar belakang pendidikan S1 akan mempermudah perempuan menduduki jabatan atau eselon yang lebih baik. Hal ini dikarenakan pendidikan S1 memberikan peluang kenaikan satu golongan

dibanding informan dengan pendidikan Diploma II, III atau SMA. Informan yang berpendidikan S1 seperti Fina, Susi, dan Uci memungkinkan perempuan mengawali karirnya di usia yang lebih muda (kurang dari 40 tahun) serta memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menduduki eselon yang lebih tinggi sebelum memasuki masa pensiun. Meskipun demikian posisi PNS struktural atau fungsional juga perlu dipertimbangkan, karena pada kasus Nana yang memulai karirnya dari penyuluh KB fungsional dengan ijazah S1, ternyata kurang berpengaruh terhadap jenjang karirnya. Setelah berpindah ke jajaran struktural dan menduduki jabatan beberapa tahun yang lalu, penjenjangan karir Nana baru terlihat.

Tabel 15 berikut ini memperlihatkan perkembangan pendidikan informan suami-istri. Data memperlihatkan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang D3 dan S1 ternyata masih diprioritaskan pada suami. Hal ini terlihat pada tingkat pendidikan di awal menikah, 4 orang informan berpendidikan S1 dan hanya 2 orang suami informan berpendidikan S1. Perkembangan pendidikan selanjutnya menunjukkan hanya 4 orang informan berpendidikan D2 dan SMA melanjutkan ke S1, 2 diantaranya melanjutkan setelah suami menyelesaikan S1. Sedangkan suami yang melanjutkan S1 dari pendidikan D2 dan SMA sebanyak 6 orang. Pada penjenjangan pendidikan dari tingkat SMA ke D3, laki-laki juga lebih diprioritaskan. Selain informan yang kuliah dari SMA ke D3 dan S1, terhitung hanya Muna informan yang melanjutkan ke jenjang D3, sedangkan suami para informan yang melanjutkan ke jenjang D3 ada 4 orang. Banyak faktor yang memengaruhi mengapa prioritas penjenjangan pendidikan pada pasangan suami-istri PNS dengan latar belakang pendidikan yang sama lebih banyak diberikan

kepada suami. Kondisi sosial dan ekonomi merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga dari penghasilan suami-istri.

Tabel 15. Perkembangan pendidikan informan (suami-istri)

Pendidikan	Pendidikan masuk PNS				Melanjutkan pendidikan			
	Istri		Suami		Istri		Suami	
	Jumlah	Informan	Jumlah	Informan	Jumlah	Informan	Jumlah	Informan
SMP	1 org	Fifit,	2 org	Fifit, Rosa	(-)	(-)	(-)	(-)
SMA	8 org	Muna, Gina, Iis, Mei, Nina, Marwah, Kurnia, Rosa, Marni	9 org	Muna, Gina, Iis, Mei, Marwah, Kurnia, Nana, Popi, Marni	1 org	Fifit	1 org	Rosa
D2	2 org	Roro, Popi,	2 org	Roro, Nina	(-)	(-)	(-)	(-)
D3	(-)	(-)	(-)	(-)	1 org	Muna	3 org	Marwah, Mei, Nana,
DIV	(-)	(-)	1 org	Fina,	(-)	(-)	(-)	(-)
S1	4 org	Fina, Susi, Uci, Nana	2 org	Susi, Uci,	4 org	Kurnia, Gina, Roro, Marni	6 org	Fina, Muna, Roro, Marni, Kurnia, Nina
S2	(-)	(-)	(-)	(-)	1 org	Uci	1 org	Susi

4.2 Pola-pola Pengelolaan Penghasilan Suami-

Dari hasil wawancara mendalam terhadap 16 orang informan (istri) dari pasangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diketahui sumber-sumber penghasilan PNS berupa penghasilan tetap yang diterima setiap bulan dan penghasilan tidak tetap. Penghasilan tetap setiap bulannya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan berupa tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, dan tunjangan jabatan. Sedangkan penghasilan tidak tetap berupa tunjangan proyek, honor tim, uang lembur, dan uang biaya perjalanan dinas di dalam dan ke luar daerah. Penelitian

ini mencoba menelaah pengelolaan dan pemanfaatan penghasilan suami-istri: siapa yang bertanggungjawab mengelola, dan bagaimana pemanfaatannya dilihat dari kebutuhan hidup yang dibiayai, baik itu dari penghasilan suami maupun dari penghasilan istri.

Berdasarkan cara suami menyerahkan atau tidak menyerahkan penghasilan untuk dikelola istri, kemudian didapat pola-pola pengelolaan penghasilan suami. Pada setiap cara atau model pengelolaan penghasilan suami ternyata ditemukan juga cara istri istri memanfaatkan penghasilan suami yang diserahkan kepada istri maupun cara istri mengelola penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Secara umum model-model pengelolaan penghasilan suami dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 16. Model pengelolaan penghasilan suami

No	Pengelolaan penghasilan Suami	Jumlah Informan (orang)	Pasangan dari Informan
1	Suami menyerahkan seluruh penghasilan untuk dikelola oleh istri	4 (25 %)	Fina, Muna, Susi Uci
2	Suami menyerahkan gaji untuk dikelola istri dan mengelola sendiri penghasilan lain	7 (44 %)	Fifit, Gina, Memi, Nina, Roro, Marwah
3	Suami menyerahkan sebagian gaji kepada istri, dan mengelola sebagian lagi bersama penghasilan lain-lainnya sendiri	2 (12,5 %)	Kurnia, Nana
4	Suami tidak menyerahkan penghasilannya kepada istri, tetapi terlibat dalam pembiayaan kebutuhan rutin keluarga	2 (12,5 %)	Popi, Rosa
5	Suami tidak menyerahkan penghasilannya kepada istri dan tidak terlibat dalam pembiayaan rutin keluarga	1 (6 %)	Marni

4.2.1.1 Suami menyerahkan seluruh penghasilannya untuk dikelola istri

Dari informan kelompok ini, semua istri menggunakan keseluruhan penghasilan yang diserahkan suami kepadanya untuk keperluan keluarga yang bersifat rutin dan tidak rutin. Pada sebagian informan, penghasilan suami hanya mencukupi sebagian besar kebutuhan keluarga, sedangkan informan yang lain, penghasilan suami memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Informan kelompok ini berjumlah empat orang yakni Fina, Susi, Uci, dan Muna.

Informan Uci

Informan yang seluruh penghasilan suaminya telah dapat memenuhi semua kebutuhan keluarga ternyata hanya satu orang, yakni informan Uci. Pada kasus Uci, bahkan penghasilan suami juga dianggap mencukupi pemenuhan kebutuhan keluarga termasuk kebutuhan personal Uci, misalnya membeli baju membantu biaya pendidikan Uci ketika meneruskan ke S2.

Menurut Uci, di awal pernikahan suaminya sempat tidak menyerahkan penghasilan lain di luar gaji dan tunjangan seperti uang lembur atau honor-honor lainnya, bahkan Uci tidak mengetahui keluar masuk keuangan dari usaha yang dikelola suaminya. Setelah beberapa bulan pernikahan, Uci kemudian menyadari sifat suaminya yang memberikan sebagian penghasilan kepada keluarga suami. Uci kemudian mulai meminta setiap uang yang ada pada suaminya dan mulai terlibat dalam pengelolaan usaha suaminya, serta menanamkan penghasilannya dalam usaha tersebut. Proses keterlibatan Uci dalam usaha suaminya dimulai ketika Uci melihat tempramen suaminya yang meningkat jika sedang sibuk dengan pekerjaan kantor dan pekerjaan di tokonya. Untuk mengatasi sikap suaminya, Uci kemudian mencoba untuk membantu dengan mengerjakan

beberapa bagian usaha suaminya sampai kemudian terlibat dalam semua keputusan menjalankan kegiatan usaha suaminya.

Informan Fina dan Susi

Informan Fina, dan Susi, mengatakan bahwa penghasilan suaminya hanya mencukupi sebagian kebutuhan keluarga, dan mereka memenuhi kekurangan tersebut dengan penghasilannya. Dalam kelompok ini, informan mengutarakan selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mereka bisa mempergunakan kurang dari 20% penghasilannya untuk kebutuhan dirinya, kemudian menabung sebagian penghasilannya untuk keluarga.

Fina mengelola penghasilan suaminya sejak mereka berpacaran dan memutuskan untuk menikah. Suaminya menyerahkan semua penghasilannya untuk dikelola Fina yang kemudian mengelola dengan cara mengirim sebagian untuk keluarga suaminya, menggunakan sebagian untuk biaya hidup suaminya, dan menabung sebagian sebagai persiapan biaya pernikahan mereka. Proses ini kemudian berlanjut sampai mereka menikah. Menurut Fina, penghasilan suaminya sebenarnya tidak memenuhi seluruh kebutuhan keluarga terutama ketika suaminya harus melanjutkan pendidikan dari D4 ke S1, sehingga Fina harus memenuhi kekurangan tersebut dari penghasilannya.

Pada informan Susi, suaminya menyerahkan semua penghasilannya sejak awal menikah tanpa diminta. Susi kemudian membagi penghasilan tersebut sebagian untuk biaya hidup bersama anaknya, menabung sebagian, dan menyerahkan kembali sebagian gaji untuk biaya hidup suami di kecamatan, karena suaminya bertugas di kecamatan dan terpisah jauh dari Susi. Pada waktu itu Susi belum bekerja sebagai PNS dan masih berstatus sebagai tenaga honorer dengan gaji yang kecil. Setelah Susi bekerja sebagai PNS, suaminya kemudian

memutuskan untuk kuliah di kota lain, dengan mempergunakan sebagian tabungan keluarga dan membawa seluruh gajinya. Praktis selama dua tahun suaminya kuliah, Susi membiayai hidupnya dengan anaknya dari penghasilannya sendiri. Ketika suaminya selesai kuliah dan tinggal bersama Susi, suaminya pernah mengelola penghasilannya sendiri. Susi kemudian memperotes dengan mengingatkan kembali proses pengelolaan penghasilan di awal pernikahan. Kemudian, proses pengelolaan penghasilan suaminya berjalan seperti biasa, meskipun kadang-kadang suaminya mengisi tabungan atas namanya sendiri dari penghasilan bekerja di luar pekerjaannya sebagai PNS.

Informan Muna

Informan lainnya adalah Muna yang mempergunakan dan menabung penghasilannya untuk kepentingan keluarga tanpa bisa menggunakan penghasilannya untuk diri sendiri. Menurut Muna penghasilan suaminya tidak bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga yang meningkat. Oleh karena itu, Muna menggunakan penghasilannya untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga yang bersifat pokok dan rutin.

Muna mengelola semua penghasilan suaminya sejak awal menikah. Menurutnya, ia dan suaminya tidak pernah membuat kesepakatan mengenai proses pengelolaan penghasilan suami-istri. Melainkan karena Muna mengelola konsumsi keluarga, maka suaminya menyerahkan penghasilannya kepada Muna. Pada awal menikah, Muna menggunakan sebagian penghasilan suami-istri untuk keperluan keluarga, sebagian lagi ditabung untuk keperluan keluarga. Ketika suaminya berangkat kuliah, selama enam bulan pertama suaminya membawa semua tabungan keluarga dan menggunakan semua gajinya setiap bulan untuk biaya hidup selama kuliah.

Muna kemudian memutuskan untuk menyusul suaminya ke kota B dengan tujuan agar lebih mudah mengatur biaya hidup keluarga dan biaya pendidikan suami. Secara ekonomi ia bisa mengelola keuangan keluarga dalam satu pintu, dan mengawasi pendidikan anak-anaknya. Ketika suaminya memutuskan untuk mengambil S-1 jika telah menyelesaikan D-3 nya dengan alasan perkembangan karirnya, Muna berpikir akan semakin lama ia menganggur karena mendampingi suami kuliah. Setelah mengitung biaya pendidikan suaminya dan keperluan keluarga setiap bulannya, serta memperkirakan penerimaan keuangan dari gaji suami-istri dan bantuan biaya pendidikan suami, Muna kemudian mengusulkan kepada suaminya agar ia juga sekolah. Awalnya suami Muna agak keberatan karena takut biaya pendidikannya dan biaya hidup keluarga akan terganggu. Setelah meyakinkan suaminya, Muna akhirnya mengikuti tes dan lulus untuk kuliah di tempat yang sama dengan suaminya. Untuk itu, Muna harus hati-hati mengatur gaji dan tunjangan belajar suaminya untuk pemenuhan biaya kebutuhan keluarga, biaya kuliah suami dan biaya kuliahnya. Muna mencoba mengelola keuangan dengan menekan serendah mungkin pengeluaran biaya konsumsi dengan cara belanja sendiri dan menggunakan bahan yang lebih murah.

Pada wawancara kedua, Muna mengungkapkan pada bahwa waktu kuliah ia pernah menggugurkan kandungannya sebanyak dua kali. Menurutnya ia menggugurkan kandungan karena kesibukannya di kampus, rumah dan tempat kerja membuatnya tidak punya waktu mengontrol KBnya. Keputusannya menggugurkan kandungan karena ia memperhitungkan kesulitannya mengatur waktu dan keuangan jika ia hamil dan melahirkan pada waktu itu.

Proses pengelolaan keuangan dalam keluarga Muna sebenarnya memberikan Muna kemampuan membuat berbagai keputusan ekonomi yang cukup besar dalam keluarga. Diantaranya, memutuskan membeli rumah, menyusul suaminya sambil mengurus proses kepindahan pendidikan anak-anak, dan mengikuti kuliah D-3 di saat suaminya kuliah. Muna juga memiliki kemampuan untuk memutuskan pindah ke kota kabupaten, memperjuangkan proses kepindahan yang baginya sangat memengaruhi perkembangan karir dan pendidikan anak-anaknya.

Menurut Muna, setelah anak-anak memasuki dunia pendidikan, pernah ada perubahan pola pengelolaan keuangan dalam keluarga. Seperti pengelolaan penghasilan suami yang bersumber dari penghasilan lain seperti hasil kebun dan ternak, dikelola langsung oleh suaminya dalam bentuk tabungan. Meskipun keputusan akhir pengelolaan tabungan yang dianggarkan untuk biaya pendidikan anak selalu dilakukan oleh Muna, masih ada penggunaan penghasilan suaminya yang dilakukan tanpa pengetahuan Muna. Muna kemudian meminta kepada suaminya agar pengelolaan keuangan keluarga sepenuhnya diserahkan kepadanya, karena menurutnya biaya hidup keluarga yang semakin besar dan penghasilan tidak memenuhi kebutuhan keluarga memerlukan pengawasan yang kuat. Hal ini dimaksudkan Muna untuk mempermudah pengelolaan dan menghindari penggunaan penghasilan pada kebutuhan yang tidak penting dan kurang mendesak.

4.2.1.2 Suami menyerahkan seluruh gaji tetapi tidak menyerahkan penghasilan lain untuk dikelola istri

Masuk dalam kelompok ini adalah suami-istri, dengan karakteristik hanya gaji suami diserahkan untuk dikelola istri, sementara penghasilan-penghasilan lain

suami tidak diserahkan pada istri. Informan kelompok ini berjumlah tujuh orang yang terdiri atas Fifit, Gina, Iis, Mei, Nina, Roro dan Marwah.

Temuan dari informan kelompok ini menunjukkan, bahwa penghasilan suami yang dikelolanya (gaji tanpa tunjangan jabatan suami) tidak dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan keluarga informan kemudian menggunakan penghasilannya. Dalam mempergunakan penghasilannya, informan melakukan dengan cara yang berbeda karena kebutuhan dan kondisi ekonomi rumah tangga masing-masing informan juga berbeda. Sebagian informan menggunakan seluruh penghasilannya dan menyimpan dalam bentuk tabungan untuk kepentingan keluarga tanpa sempat menggunakan sebagian dari penghasilannya untuk diri sendiri. Sebagian lagi masih bisa menggunakan kurang dari 20% penghasilannya untuk kebutuhan dirinya. Sedangkan informan yang lain bisa menggunakan sebagian penghasilannya untuk diri sendiri, meskipun semua penghasilannya digunakan untuk keluarga dan ia tidak sempat menabung.

Beberapa informan yang masih bisa menabung penghasilannya untuk kepentingan keluarga dan tidak bisa mempergunakan penghasilannya untuk diri sendiri adalah informan Fifit, Mei, Marwah, dan Iis. Sebenarnya penghasilan suami-istri yang dikelola keempat informan ini hanya cukup untuk kebutuhan keluarga tanpa bisa menabung, untuk itu mereka melakukan strategi dalam mengelola keuangan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Informan kelompok ini mempergunakan jasa Koperasi Pegawai Negeri (KPN) untuk berbelanja kebutuhan bahan pokok setiap bulan dan kemudian dibayar pada bulan

berikutnya. Uang belanja pada bulan itu ditabung sebagai cadangan keuangan keluarga, atau dipergunakan untuk membeli barang kebutuhan yang lain.

Informan Fifit

Dari wawancara yang lebih mendalam pada informan Fifit terungkap jika Fifit merasa ada beberapa persoalan dalam perekonomian keluarganya. Dimulai di awal pernikahan, ketika suami tidak menyerahkan penghasilan dengan alasan penghasilannya kecil dan sudah habis untuk biaya rokok dan bensin, sehingga Fifit terpaksa membiayai keperluan keluarganya. Bahkan pada waktu itu Fifit juga membiayai keperluan keluarga mertua karena mereka masih tinggal bersama mertuanya. Fifit memutuskan mereka pindah ke rumah kontrakan agar lebih mudah mengatur biaya kebutuhan keluarganya. Kemudian proses Fifit mengelola penghasilan suaminya bukan karena kesadaran suami menyerahkan penghasilan tetapi bermula ketika anak sakit dan Fifit meminta biaya rumah sakit dari suaminya, karena penghasilannya sendiri sudah habis untuk biaya hidup mereka sekeluarga. Karena tidak siap dengan kondisi tersebut suaminya kaget, dan menyerahkan sebagian penghasilan yang masih ada padanya. Setelah kejadian tersebut, suami Fifit kemudian menyerahkan gajinya setiap bulan di luar tunjangan jabatan.

Menurut Fifit, gaji suami setiap bulannya tidak mencukupi biaya kebutuhan hidup keluarga, sehingga Fifit harus memenuhi sebagian kebutuhan hidup keluarganya. Meskipun tahu kalau gaji yang diberikannya tidak memenuhi kebutuhan keluarga, suaminya tidak memberikan penghasilan lain-lain yang didapatnya meskipun Fifit memintanya. Fifit juga tidak mengetahui kemana saja suaminya memanfaatkan penghasilan yang lain seperti honor dan uang perjalanan dinas, kecuali untuk membeli barang elektronik atau memenuhi kebutuhan

pribadi suaminya. Bahkan tanpa berkompromi dengan Fifit, suaminya membeli kendaraan bermotor untuk menunjang kegiatannya di luar rumah. Pembelian kendaraan dengan mencicil dari gaji suami setiap bulan, akibatnya uang yang diserahkan kepada Fifit berkurang setiap bulannya. Pada wawancara kedua, Fifit mengutarakan bagaimana ia menekan biaya konsumsi menjadi serendah mungkin dengan cara belanja dan mengolah sendiri makanan dari bahan yang murah. Menekan pengeluaran-pengeluaran keluarga menjadi sekecil mungkin dan meniadakan pengeluaran untuk dirinya. Misalnya membeli pakaian untuknya hanya setahun sekali terutama pada waktu lebaran. Bahkan Fifit menekan bertambahnya biaya hidup dengan menekan bertambahnya jumlah anggota keluarga. Fifit pernah menggugurkan kandungan ketika hamil anak yang ketiga karena takut penghasilannya suami-istri tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Setahun kemudian ia melakukan hal yang sama, menggugurkan kandungan pada usia kehamilan enam minggu sebelum akhirnya menggunakan kontrasepsi yang lebih permanen.

Informan Mei

Informan Mei mengutarakan, meskipun suaminya memiliki usaha sampingan yang memberikan pemasukan cukup besar, Mei tidak pernah sekalipun diberi kesempatan untuk menyimpan atau mengelola uang tersebut. Mei membiarkan saja suaminya mempergunakan penghasilannya untuk membangun rumah, membeli mobil dan menginvestasikan kepada beberapa bidang tanah. Meskipun kehabisan uang pada akhir bulan Mei tidak pernah meminta uang tambahan dari suaminya. Ia berusaha memenuhinya dari penghasilannya yang lain atau dari tabungan gaji yang disimpannya. Untuk menekan pengeluaran keluarga

serendah mungkin Mei juga menggunakan tanaman pekarangan sebagai tambahan konsumsi keluarga.

Ketika ditanya mengapa ia tidak pernah meminta uang tambahan belanja selain gaji yang diserahkan oleh suami. Mei mengatakan kalau ia merasa tidak perlu meminta, karena ia menganggap keuangan yang dikelolanya hanya untuk belanja keperluan sehari-hari. Persoalan disini adalah kenapa Mei menganggap keperluan pokok keluarga seperti konsumsi sebagai hal yang biasa, padahal itu menyangkut kelangsungan hidup anggota keluarga. Mei menganggap kalau apa yang dikerjakan dan dibiayai dari gaji suami-istri yang dikelolanya menghabiskan banyak uang, hasilnya tidak terlihat karena habis terpakai. Mei juga beranggapan kalau pengeluaran biaya konsumsi sebagai tanggungjawabnya karena ia bertugas menyediakan konsumsi. Oleh karena itu, ia menganggap gaji suami dan penghasilannya sudah cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga.

Tanggungjawab terhadap cukupnya keuangan untuk belanja keluarga kemudian membawa Mei pada usaha mempertahankan jumlah anak dengan cara mencegah terjadinya kehamilan. Mei bahkan pernah mencoba menggugurkan kandungan pada saat kehamilan anak ketiga tetapi gagal sampai usia kandungan empat bulan. Kemudian ketika anak ketiganya masih menyusu, ia kembali terlambat haid selama tiga minggu dan berhasil menggugurkan kandungan yang keempat dengan cara meminum peluntur. Mei tidak menyadari bahwa ia menggugurkan kandungan, menurutnya ia hanya mempercepat datangnya haid yang terlambat lebih dari tiga minggu.

Informan Marwah

Informan Marwah termasuk istri dari pasangan yang tidak mengelola penghasilan lain-lain suaminya kecuali gaji setiap bulannya. Menurut Marwah,

gaji suami dan penghasilannya setiap bulan sebenarnya tidak memenuhi biaya kebutuhan hidup keluarga setiap bulannya. Marwah memiliki ciri yang hampir sama dengan informan Fifit dan Mei dalam menyikapi masalah keuangan keluarganya. Marwah menggunakan jasa KPN untuk menstabilkan keuangan keluarganya, menekan pengeluaran keluarga terutama biaya konsumsi maupun biaya lainnya, serta menekan pertumbuhan jumlah anggota keluarga.

Menurut Marwah, pada awal pernikahan suaminya menyerahkan semua gaji dan penghasilan lain kepada Marwah. Perubahan pengelolaan penghasilan suami terjadi setelah suami pulang dari tugas belajar, kemudian bertugas di tempat yang memberikan penghasilan lebih besar dari gaji bulan yang diserahkan kepada Marwah setiap bulan. Meskipun Marwah mengetahui kalau penghasilan suaminya sekarang lebih besar, tetapi penghasilan tersebut tidak pernah sampai ke tangan Marwah, karena sudah digunakan suaminya untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu mendesak seperti, pembelian perangkat elektronik yang memenuhi kesenangan suaminya. Menurut Marwah, ia sebenarnya ingin meminta uang tersebut dari suaminya, karena ia merasa biaya hidup mereka sekeluarga dan tabungan pendidikan anak-anak masih memerlukan banyak uang. Tetapi Marwah tidak punya kemampuan untuk meminta uang tersebut, karena merasa sudah menguasai gaji suaminya setiap bulannya.

Pada waktu suaminya tugas belajar di kota P, Marwah dan anak-anak ikut pindah ke kota P. Keputusan ini menurut Marwah dilakukan setelah suaminya mengalami kesulitan mengelola gaji dan biaya tugas belajar yang tidak mencukupi pengeluaran belajar suaminya. Agar penghasilan tersebut mencukupi, Marwah kemudian mengikuti suami agar lebih mudah mengelola keuangan suami dan

keuangan keluarga. Selama tiga tahun mengikuti kegiatan tugas belajar suaminya, penghasilan Marwah digunakan untuk biaya hidup dan kebutuhan keluarga yang lainnya. Pada situasi inilah Marwah melakukan beberapakali mencegah terjadinya kehamilan ketika haidnya tertunda beberapa minggu dengan meminum peluntur terlambat bulan. Menurutnya, situasi keuangan keluarga yang kurang baik, dan pendidikan suaminya memerlukan biaya yang cukup besar, membuatnya harus siap mencegah kehamilan. Keterbatasan biaya membuat pilihan kontrasepsi pil yang beresiko gagal menjadi pilihan Marwah dalam mencegah kehamilannya, bahkan obat peluntur yang berbahaya juga digunakan dengan pertimbangan murah dan mudah didapat.

Informan Iis

Informan yang juga menggunakan jasa simpan pinjam koperasi dalam mengatur keuangan keluarganya adalah Iis. Menurutnya penghasilan suaminya tidak mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga ia menggunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Menurut Iis, awal mereka menikah suaminya memberikan semua penghasilannya kepada Iis. Seiring dengan meningkatnya penghasilan Iis dan penghasilan suaminya, maka proses pengelolaan penghasilan suami mengalami perubahan. Suami kemudian menyimpan sendiri penghasilan lain selain gaji pokoknya. Menurut Iis, awalnya dimulai ketika suaminya membutuhkan biaya untuk mengembangkan beberapa usaha pertanian dan peternakan. Setelah usaha tersebut berkembang, suaminya tidak pernah memberikan penghasilan tambahannya kepada Iis. Penghasilan tambahannya diperkirakan Iis dalam jumlah besar karena suaminya memiliki rekening sendiri. Iis sendiri tidak memiliki kemampuan meminta penghasilan suaminya yang lain, karena sudah

menerima gaji suami setiap bulan. Hal ini karena ia pernah mengingatkan suaminya untuk memberikan penghasilannya, namun dijawab suaminya dengan balik bertanya kemana saja gaji dan penghasilan Iis.

Informan Roro dan Nina

Informan berikutnya adalah informan yang bisa mempergunakan penghasilannya untuk diri sendiri serta mempergunakan sebagiannya lagi untuk keluarga dan menabung yakni Roro dan Nina. Kelompok ini merupakan keluarga dengan penghasilan suami-istri yang besar dan melebihi kebutuhan pokok keluarga setiap bulannya.

Informan Nina

Pada awal menikah, Nina tidak mengelola penghasilan lain-lain suaminya. Sehingga ia tidak tahu kemana saja uang tersebut digunakan oleh suami. Ketika ketiga anaknya kuliah dalam waktu yang hampir bersamaan, sedangkan keuangan mereka tidak sebaik sekarang, suaminya menyerahkan semua penghasilan untuk dikelola Nina, dengan tujuan mengontrol biaya pendidikan anak kuliah dan keperluan rumah tangga lainnya. Ketika penghasilan lain-lain meningkat, suami kembali mengelola sendiri penghasilan di luar gajinya. Bahkan suaminya mengambil alih pembiayaan anak kuliah dari penghasilan lain di luar gaji, sehingga Nina masih bisa menabung penghasilannya maupun penghasilan suami yang dikelolanya. Meskipun demikian, menurut Nina ia selalu dilibatkan oleh suami dalam proses investasi dan transaksi pembelian barang-barang yang dilakukan oleh suaminya, karena suaminya mempergunakan Nina untuk proses hukum investasi penghasilan seperti, jual beli tanah maupun kendaraan.

Informan Roro

Pada awal pernikahan, Roro mengelola semua gaji dan penghasilan lain suami. Karena penghasilan suami tidak memenuhi semua kebutuhan keluarga, Roro kemudian memakai penghasilannya untuk memenuhi kekurangan kebutuhan keluarga. Pada waktu Roro mengelola penghasilan suami secara keseluruhan, pembelian barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dilakukan bersama setelah mereka berunding. Namun setelah penghasilan suami meningkat terutama penghasilan di luar gaji setiap bulannya, suami kemudian menyimpan dan memutuskan sendiri ketika menginvestasikannya. Menurut Roro, ia tidak protes karena setelah ia dan suami sama-sama menduduki jabatan, gaji suami-istri yang dikelolanya setiap bulan kemudian mengalami peningkatan, dan memenuhi semua kebutuhan pokok keluarga. Meskipun demikian, ia merasa ada yang kurang tepat mengenai cara mengelola penghasilan suaminya sekarang. Menurutnya, ia mengelola semua penghasilan ketika keadaan keuangan memerlukan pengawasan yang tepat, termasuk ketika ia harus mendampingi suami ketika suami menyelesaikan tugas belajar S1. Kemudian setelah penghasilan meningkat, suami mengelola sendiri penghasilannya, bahkan biaya pendidikan anak dalam jumlah besar dikelola suami. Memang ada sumber keuangan lain yang dikelola Roro, misalnya pemasukan dan pengeluaran uang sewa beberapa rumah yang mereka miliki.

Melihat kondisi keuangan keluarga yang bisa menabung, dan biaya pendidikan anak banyak dibiayai suami dari penghasilannya yang lain, Roro memutuskan untuk kuliah. Suami Roro merasa keberatan ketika Roro meminta pendapatnya untuk kuliah. Alasan suami karena ia juga membatalkan kuliah S2,

karena anak-anak masih membutuhkan biaya yang besar dan perhatian mereka. Roro melanjutkan tekad dan keinginannya kuliah meskipun suami kurang setuju, karena biaya pendidikannya bersumber dari penghasilannya sendiri, sehingga tidak akan mengganggu belanja keluarga. Disamping itu, ia memiliki waktu luang yang banyak karena pekerjaan rumah tangga dikerjakan pembantu, sedangkan anak-anak kuliah dan tinggal di lain kota, sehingga tidak membutuhkan banyak perhatiannya.

Informan Gina

Informan Gina merupakan informan yang mempergunakan kurang dari 20% penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya, meskipun semua penghasilannya yang lain telah habis dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga dan tidak sempat menabung. Menurut Gina, gaji yang diserahkan suaminya tidak cukup membiayai kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Gina kemudian menggunakan penghasilannya untuk memenuhi biaya konsumsi keluarga, terutama belanja lauk pauk setiap hari, dan membiayai sebagian pendidikan anak-anak. Setiap akhir bulan Gina sering kehabisan uang, dan sering meminjam uang kantor yang dikelolanya untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Selain menggunakan uang kantor, Gina juga berusaha menekan pengeluaran konsumsi keluarga dengan cara berbelanja bahan makanan yang murah dan pergi belanja serta mengolah makanan sendiri. Gina juga mengatur pertambahan jumlah anggota keluarga, hal ini dilihat dari usaha Gina mengatur jarak kelahiran anak dan mencoba berbagai macam kontrasepsi sampai kemudian ia memutuskan operasi tubektomi.

Menurut Gina, suaminya menyerahkan gaji secara penuh setiap bulannya setelah ia mengatur pengelolaan keuangan suami seperti mengatur proses pembelian rumah yang ditempati dengan menggunakan Bapertarum suami, dan dibayar dengan cara mencicil dari gaji suami setiap bulannya. Gina juga menyarankan proses pengambilan kredit dari gaji suaminya untuk membiayai perbaikan rumah dan pendidikan anak-anak. Menurut Gina, ia melakukan hal ini untuk mengontrol kemana saja habisnya penghasilan suami selama ini. Gina mempergunakan cara ini agar suami menyerahkan gajinya secara penuh, karena sebelumnya suami hanya menyerahkan sebagian gajinya kepada Gina. Setelah Gajinya terpotong oleh berbagai kredit, maka suami Gina menyerahkan gaji pokok secara penuh, namun tetap tidak menyerahkan penghasilan yang lain.

4.2.1.3. Suami menyerahkan sebagian gaji, dan tidak menyerahkan penghasilan-penghasilan lain untuk dikelola istri

Istri pada kelompok ini hanya memperoleh dan mengelola sebagian gaji suami, sementara sebagian gaji yang lain dan penghasilan-penghasilan tambahan suami, dipegang sendiri oleh suami. Dengan perolehan gaji yang sangat terbatas dari suami, para istri ini harus mengelola uang yang tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Akibatnya, mereka lebih banyak menggunakan penghasilan mereka sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa kebutuhan keluarga lebih banyak dipenuhi dari penghasilan istri daripada penghasilan suami.

Informan Nana dan Kurnia

Dua orang informan yang termasuk dalam kelompok ini yakni Nana dan Kurnia, kemudian menggunakan penghasilannya dengan cara berbeda untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satu informan ada yang mempergunakan penghasilannya untuk diri sendiri setelah mempergunakan sebagian

penghasilannya untuk keperluan keluarga, sedangkan informan yang lain hanya bisa mempergunakan dan menabung sebagian penghasilannya untuk keluarga.

Informan Nana mengatakan penghasilan suami yang diserahkan kepadanya hanya cukup membiayai bulanan anak yang kuliah di kota lain, sehingga ia mempergunakan penghasilannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga. Menurut Nana sebenarnya ia tidak bisa menabung penghasilannya, karena gajinya setiap bulan sudah dikurangi oleh berbagai potongan dari bank. Potongan ini untuk melunasi pinjamannya ketika akan menambah biaya semesteran anaknya, ketika ia dan suaminya tidak memiliki simpanan uang. Menurut Nana, untuk mengatasi kondisi keuangan keluarganya selama beberapa tahun terakhir, Nana memperkecil biaya konsumsi dan menekan serendah mungkin pengeluaran-pengeluaran keluarga yang lain termasuk kebutuhan dirinya.

Pada informan Kurnia yang mempunyai anak satu berusia satu tahun, mengatakan kalau penghasilan suami yang dikelolanya tidak memenuhi kebutuhan keluarga secara penuh, bahkan tidak mencukupi untuk biaya konsumsi mereka selama sebulan. Oleh karena itu, ia harus mempergunakan penghasilannya untuk membiayai sebagian kebutuhan keluarga.

Pada awal pernikahan, suami Kurnia memang hanya menyerahkan sebagian dari gaji pokok dengan alasan membiayai pendidikan D3 dan S1 nya. Karena Kurnia juga sedang menyelesaikan pendidikan yang sama dengan suaminya, maka ia menerima saja ketika suami hanya memberikan sebagian dari penghasilannya. Setelah menyelesaikan pendidikan, suami Kurnia tetap tidak menyerahkan gaji secara penuh kepada Kurnia. Meskipun menyumbangkan penghasilannya lebih besar untuk keperluan keluarga, termasuk rumah dan

perabotnya serta sepeda motor yang digunakan bersama suami saat ini Kurnia tidak pernah bisa meminta penghasilan suami secara penuh. Menurut Kurnia, ia pernah mencoba meminta sisa gaji suami tetapi suami menolak memberikan dengan alasan penghasilan Kurnia lebih besar dan telah mencukupi keperluan keluarga.

4.2.1.4. Suami sama sekali tidak menyerahkan penghasilan kepada istri, tetapi membiayai kebutuhan hidup keluarga yang bersifat pokok dan rutin

Pada kelompok suami tidak menyerahkan penghasilannya kepada istri, informan mempergunakan semua penghasilan sepenuhnya untuk keluarga tanpa sempat menabung maupun mempergunakannya untuk diri sendiri. Akan tetapi, dalam kelompok ini bukan berarti kebutuhan pokok keluarga sepenuhnya dibebankan pada istri. Popi dan Rosa berbagi tugas dengan suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga. Suami membelanjakan sendiri penghasilannya untuk keperluan konsumsi dan keperluan lain yang bersifat pokok setiap bulannya, sedangkan istri membiayai dan mengolah pengadaan lauk pauk setiap hari.

Informan Rosa

Rosa berbagi belanja kebutuhan pokok dengan suaminya sejak awal pernikahan. Proses berbagi belanja itu sendiri dimulai dengan proses pemenuhan kebutuhan pokok seperti konsumsi dan berbagai keperluan keluarga yang lain menjadi tanggung jawab Rosa, sedangkan penghasilan suami sepenuhnya digunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah. Setelah jumlah anak bertambah dan biaya kebutuhan hidup keluarga terutama konsumsi mulai meningkat, Rosa kemudian meminta suami menyerahkan penghasilannya. Suami Rosa kemudian hanya menyerahkan gaji pokok yang tidak cukup memenuhi

seluruh kebutuhan keluarga. Sejak menyerahkan gajinya, suami Rosa bersikap seolah tidak mau tahu mengenai kekurangan biaya kebutuhan keluarga.

Pada situasi ini, Rosa pernah menggugurkan kandungan ketika hamil yang tidak direncanakan pada kehamilan ke empat. Setahun berikutnya ketika suaminya kuliah dan tinggal terpisah dengannya di kota lain, Rosa kembali hamil namun gagal menggugurkan kandungannya dan melahirkan sendiri. Alasan Rosa menggugurkan kandungannya karena tidak tahan terhadap situasi perekonomian keluarga dan berpikir tidak akan sanggup membiayai kebutuhan keluarga dari penghasilan suami-istri yang ada.

Melihat tanggung jawab ekonomi keluarga secara keseluruhan diserahkan kepada dirinya, ketika suaminya kembali dari pendidikan, Rosa kemudian kembali menyerahkan penghasilan suaminya dan menegaskan agar suaminya ikut terlibat membiayai kebutuhan keluarga secara keseluruhan.

Informan Popi

Informan Popi melakukan pengelolaan terhadap penghasilan suami-istri secara terpisah sejak awal pernikahan. Popi dan suaminya membagi belanja berdasarkan tugas dan kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Pengelolaan penghasilan suami Popi dilakukan sendiri oleh suaminya, namun dengan sepengetahuan Popi. Karena penghasilan suaminya digunakan pada kebutuhan keluarga yang membutuhkan biaya besar dan bersifat terjadwal, seperti biaya membangun rumah dan membiayai pendidikan anak-anak, maka penghasilan suami Popi banyak ditabung.

Menurut Popi, ia dan suaminya menjalani pembagian biaya sejak hari pertama menikah, pada waktu itu, mereka mulai merencanakan pembangunan rumah yang didirikan di atas tanah warisan orangtua Popi. Dalam pembagian

tugas membiayai kebutuhan keluarga, menurut Popi mereka tidak membuat perjanjian tertulis, tetapi mereka membicarakan dan merencanakannya bersama, terutama pada saat mereka merencanakan membangun rumah dan membeli motor yang dianggap menggunakan sebagian besar penghasilan mereka.

4.2.1.5. Suami sama sekali tidak menyerahkan penghasilannya kepada istri dan tidak terlibat dalam membiayai kebutuhan pokok keluarga yang bersifat rutin

Informan kelompok ini hanya satu orang dari enam belas informan yakni Marni. Pada keluarga Marni, suami tidak menyerahkan penghasilannya sehingga informan membiayai semua keperluan keluarga yang bersifat pokok seperti konsumsi dan biaya lainnya.

Setelah Marni bekerja sebagai PNS, suaminya tidak pernah menyerahkan penghasilannya, praktis penghasilan suaminya sama sekali tidak terpakai untuk kebutuhan pokok keluarga. Informan Marni harus sepenuhnya memastikan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga yang bersifat rutin dan pokok, karena penghasilan suami dipergunakan bagi perkembangan usaha. Penghasilan suaminya kemudian dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak yang mulai kuliah, membeli barang-barang kebutuhan seperti pembelian mobil, tanah, dan membangun rumah. Bahkan setelah Marni menjadi PNS dan memiliki penghasilan tetap, suaminya memutuskan untuk membiayai kuliah D2 dan S1nya.

Meskipun tidak ada kesepakatan dalam pengelolaan gaji masing-masing, Marni tidak keberatan suaminya mengelola penghasilan sendiri. Marni menganggap hal ini wajar karena suaminya bekerja dan membutuhkan penghasilannya untuk modal usaha dan berbagai biaya kuliahnya maupun kuliah

anak-anaknya. Selain itu, Marni tidak ingin direpotkan oleh berbagai persoalan lain diluar keperluan konsumsi keluarga, dan Marni juga tidak ingin merasa bersalah karena kekurangan uang atau menghabiskan gaji suaminya.

Sikap Marni yang menerima proses pengelolaan penghasilan suami-istri dengan cara di atas sebenarnya memberikan beban ekonomi kepada Marni. Marni harus memastikan sendiri pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga yang bersifat rutin dan utama. Untuk mengatasi persoalan ekonomi rumah tangganya, Marni melakukan berbagai upaya, seperti penggunaan jasa simpan pinjam, membuka usaha katering sebagai tambahan penghasilan keluarga, sampai kepada menekan pertumbuhan jumlah anggota keluarga. Marni pernah menggugurkan kandungan pada kehamilan anak yang ke lima. Alasan Marni menggugurkan kandungan adalah usia yang sudah di atas empat puluh tahun dan kurang sehat untuk memelihara anak. Sebenarnya alasan utama Marni adalah alasan ekonomi, karena penambahan jumlah anggota keluarga membuatnya kesulitan mengatur penghasilannya untuk membiayai keperluan keluarga.

4.3. Pemanfaatan penghasilan suami-istri

Berdasarkan penuturan ke 16 orang informan mengenai pengelolaan penghasilan suami kemudian diketahui pemanfaatan penghasilan suami-istri dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Gambaran pemanfaatan penghasilan suami-istri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 17. Model pemanfaatan penghasilan suami-istri

No	Pemanfaatan penghasilan istri	Informan	Keterangan pengelolaan penghasilan suami
1	Penghasilan istri 100% untuk keluarga tanpa bisa menabung	Popi Rosa Marni	Popi ; suami tidak menyerahkan penghasilan tetapi terlibat dalam biaya rutin keluarga Rosa ; sama dengan Popi Marni ; suami tidak menyerahkan penghasilan dan tidak terlibat dalam biaya rutin keluarga
2	Penghasilan istri 100% untuk keluarga, sebagian bisa ditabung untuk kepentingan keluarga	Muna Fifit Iis Mei Marwah Nana	Muna ; suami menyerahkan semua penghasilan kepada istri Fifit, Mei, Iis, Marwah ; suami menyerahkan gaji, tetapi tidak menyerahkan penghasilan lain kepada istri Nana ; suami menyerahkan sebagian gaji kepada istri dan mengelola sebagian bersama penghasilan lainnya
3	Penghasilan istri ditabung semua untuk kepentingan istri	Uci	Uci ; suami menyerahkan semua penghasilan kepada istri
4	Penghasilan istri sebagian untuk keluarga, sebagian ditabung, sebagian (<20%) untuk diri sendiri	Fina Nina Roro Kurnia Susi	Fina, Susi ; suami menyerahkan semua penghasilan kepada istri Nina, Roro ; suami menyerahkan gaji kepada istri dan mengelola penghasilan lainnya sendiri Kurnia ; suami menyerahkan sebagian gaji dan mengelola sebagian bersama penghasilan lainnya
5	Penghasilan istri digunakan untuk keluarga tanpa sempat bisa menabung tetapi masih bisa untuk diri sendiri (<20%)	Gina	Gina ; suami menyerahkan gaji tetapi mengelola penghasilan lainnya sendiri

4.3.1 Penghasilan istri 100 % untuk keluarga tanpa bisa menabung

Informan yang menggunakan seratus penghasilan penghasilannya bagi kebutuhan keluarga berasal dari pasangan suami yang tidak menyerahkan penghasilannya kepada istri yakni informan Popi, Rosa dan Marni.

Informan Popi

Pemanfaatan penghasilan suami-istri pada keluarga Popi dilakukan masing-masing dengan cara membagi biaya pemenuhan kebutuhan keluarga. Popi memanfaatkan penghasilannya untuk membiayai kebutuhan keluarga yang bersifat rutin seperti biaya konsumsi dan lauk pauk sehari-hari, jajan anak, susu anak dan biaya kebutuhan sandang berupa pakaian anak-anak. Popi menyisakan

gajinya untuk membeli beberapa kebutuhan pokok yang bersifat tidak rutin seperti peralatan memasak, perlengkapan dapur lain yang menunjang kegiatan di dapur seperti perlengkapan makan, peralatan memasak dan berbagai peralatan di dapur yang mendukung kegiatan Popi di dapur. Popi juga mencicil pembelian motor dari gajinya untuk mempermudah kegiatannya belanja ke pasar, ke kantor, dan pulang istirahat siang untuk menyiapkan makan siang anak-anaknya. Sedangkan penghasilan suaminya, dikelola langsung oleh suami untuk biaya pembangunan rumah dan membeli perabot rumah. Biaya kebutuhan rutin setiap bulan berupa biaya jasa listrik, air bersih, dan biaya transport keluarga. Suami Popi juga membelanjakan penghasilannya pada kebutuhan pokok yang digunakan untuk konsumsi setiap bulannya. Popi dan suaminya bersama-sama membiayai pendidikan anak secara rutin dan menyediakan asuransi pendidikan anak-anaknya.

Meskipun berbagi dengan suaminya dalam membiayai kebutuhan keluarga, ternyata beban biaya ekonomi keluarga pernah membuat Popi berusaha menggugurkan kandungannya pada kehamilan yang ke empat, namun gagal dan melahirkan. Popi merasa cemas tidak sanggup membiayai kebutuhan hidup anak-anak jika harus menambah jumlah anak. Disamping itu anak yang ketiga masih kecil dan membutuhkan biaya susu dan perhatiannya.

Informan Rosa

Rosa dan suaminya memanfaatkan penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga dengan cara berbagi belanja. Suami Rosa terlibat dalam pembiayaan kebutuhan rutin keluarga yang bersifat bulanan. Pada awal pernikahan penghasilan suami Rosa dimanfaatkan untuk membiayai pemenuhan kebutuhan pokok seperti membeli tanah, membangun rumah dan kendaraan bermotor. Sedangkan penghasilan Rosa digunakan untuk membiayai kebutuhan

konsumsi keluarga. Setelah kebutuhan hidup seperti biaya pendidikan anak meningkat, maka Rosa meminta suaminya juga membiayai kebutuhan rutin keluarga seperti pengadaan sembako dan beberapa kebutuhan rutin yang lain seperti air bersih, telepon dan listrik. Penghasilan suami Rosa juga digunakan suami untuk membiayai pendidikan anak-anak yang bersifat rutin dan terjadwal seperti biaya masuk sekolah dan uang semesteran maupun uang bulanan. Sedangkan Rosa menggunakan penghasilannya untuk menyediakan lauk pauk setiap hari, membiayai jajan dan pendidikan anak dan membelanjakan penghasilan pada barang-barang perabot rumah.

Rosa kemudian banyak mempergunakan penghasilannya untuk membiayai kebutuhan sandang dan papan keluarga seperti memperbaiki rumah, mengganti dan menyediakan perabot rumah, membeli pakaian seluruh anggota keluarga dan kendaraan sepeda motor. Menurut Rosa ia langsung mempergunakan penghasilan yang didapat di luar gaji setiap bulannya pada kebutuhan sandang dan papan keluarga, karena ia tidak mungkin menyimpannya sebab akan terpakai untuk biaya kebutuhan pokok maupun biaya pendidikan anaknya yang menjadi kewajiban suaminya. Disamping itu, jika ia memiliki simpanan berupa uang ia tidak bisa memaksa suaminya untuk membiayai sebagai kebutuhan pokok keluarga seperti sembako maupun biaya pendidikan anak setiap bulannya.

Informan Marni

Marni, memanfaatkan penghasilannya untuk membiayai kebutuhan keluarga yang bersifat rutin seperti sembako dan lauk pauk. Penghasilan suami Marni digunakan untuk memodali usaha, membiayai pendidikan anak-anak, serta membiayai pendidikan suaminya kejenjang D2 yang dilanjutkan ke S1.

Penghasilan suami Marni juga diinvestasikan pada barang-banrang tidak bergerak seperti membangun rumah sewa dan membeli kendaraan bermotor.

Pada awal pernikahan, sebelum Marni bekerja sebagai PNS, sebagian penghasilan suaminya pernah dimanfaatkan untuk biaya konsumsi keluarga, sebagian lagi digunakan untuk membangun rumah. Pada saat itu, Marni juga harus bekerja di luar rumah untuk membiayai kebutuhan konsumsi keluarga yang tidak terpenuhi dari penghasilan suaminya. Dalam proses membiayai kebutuhan keluarga, Marni mengikuti pembagian peran sebagai pengelola konsumsi keluarga. Menurut Marni, sewaktu Marni belum bekerja sebagai PNS suaminya mengelola sendiri penghasilannya untuk membeli bahan pokok kebutuhan keluarga, mengatur pembelian bahan untuk membangun rumah dan memberikan biaya lauk pauk yang tidak cukup untuk dua minggu kepada Marni. Marni kemudian mencukupi kekurangan tersebut dari penghasilannya bekerja di tempat swasta.

4.3.2 Penghasilan istri 100 % untuk keluarga dan masih bisa menabung untuk keluarga

Informan yang memanfaatkan seluruh penghasilannya untuk keluarga dan menabung sebagian penghasilannya untuk kepentingan keluarga adalah Muna, Fifit, Iis, Mei, Marwah dan Nana.

Informan Muna

Muna menggunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena penghasilan suami tidak mencukupi. Proses pemanfaatan penghasilannya dilakukan Muna bersamaan dengan kegiatan mengelola dan memanfaatkan penghasilan suaminya dalam memenuhi keperluan keluarga. Muna memprioritaskan penghasilannya untuk mengirim biaya pendidikan anaks etiap

bulan bersama sebagian gaji suaminya, mencicil rumah, membeli kendaraan bermotor untuk mempermudah kegiatannya ke kantor, dan menyimpan sebagian penghasilannya dengan penghasilan suami sebagai cadangan keuangan keluarga. Sedangkan penghasilan suami digunakan sebagian untuk biaya hidup suaminya selama tiga minggu ketika bertugas di kecamatan, membiayai konsumsi keluarga, dan kebutuhan rutin lainnya seperti listrik dan air bersih. Pemenuhan kebutuhan sandang yang bersifat terjadwal seperti biaya pendidikan anak masuk kuliah, biaya semesteran anak, fasilitas kendaraan, serta berbagai keperluan keluarga yang lain seperti pakaian dibiayai dari penghasilan tambahan suami seperti hasil kebun dan ternak, kadang juga digunakan uang tabungan keluarga.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bagian pengelolaan penghasilan suami, Muna mempergunakan penghasilannya untuk membiayai pendidikannya. Kesempatan ini dilakukan oleh Muna ketika ia mengikuti suami tugas belajar.

Informan Fifit

Pemanfaatan penghasilan Fifit setiap bulannya diawali dengan kegiatan Fifit mengirimkan sebagian gajinya untuk biaya hidup anaknya yang sedang kuliah di kota lain, membayar uang sekolah dan biaya pendidikan lain bagi anaknya yang masih SMP. Kemudian ia menyimpan sebagian penghasilannya untuk keperluan pendidikan anaknya dan menggunakan sebagian untuk membiayai kebutuhan konsumsi keluarga. Fifit memanfaatkan penghasilan seperti honor lembur, biaya perjalanan dinas dan beberapa insentif hari raya untuk memenuhi kebutuhan sandang keluarga seperti pakaian keluarga, dan peralatan rumah tangga terutama peralatan untuk melakukan kegiatan konsumsi.

Sedangkan penghasilan suami Fifit, sebagian digunakan untuk mencicil kendaraan bermotor, membayar kredit bank yang diambil ketika membangun

rumah, dan sisanya digunakan bersama penghasilan Fifit untuk memenuhi konsumsi keluarga yang terdiri atas Fifit, suami dan satu orang anaknya yang masih SMP serta membiayai kebutuhan rutin lainnya. Penghasilan suaminya yang lain seperti honor, tunjangan jabatan fungsional, dan biaya perjalanan dinas, sejak awal perkawinan tidak pernah sampai ketangan Fifit. Bahkan Fifit tidak tahu uang tersebut digunakan suaminya untuk keperluan apa saja, selain membeli peralatan elektronik dan beberapa barang lain yang kurang mendesak.

Sebenarnya penghasilan Fifit dan gaji yang diberikan oleh suaminya tidak memenuhi kebutuhan biaya hidup setiap bulannya. Oleh karena itu, Fifit mempergunakan jasa koperasi. Fifit memenuhi kebutuhan rutin keluarga dengan cara berhutang di awal bulan agar bisa menyimpan sebagian penghasilannya, kemudian membayar di awal bulan berikutnya. Bahkan tekanan ekonomi kemudian membawa Fifit pada upaya menekan kebutuhan dirinya menjadi serendah mungkin, termasuk dengan mempergunakan biaya kontrasepsi oral yang lebih murah namun beresiko gagal karena ia sering lupa menggunakannya. Fifit juga mempergunakan obat tradisional dan peluntur kehamilan yang murah ketika ia mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki tanpa memikirkan bahaya terhadap kesehatannya.

Pada awal pernikahannya, Fifit mengikuti penyetaraan pendidikan dari tingkat SMP ke SMA karena ketika masuk PNS ia dan suaminya berpendidikan hanya tingkat SMP. Meskipun mendapat batuan dari tempat bekerja, Fifit masih harus menggunakan penghasilannya untuk menambah biaya pendidikannya. Pada kesempatan inilah menurut Fifit ia bisa mempergunakan penghasilannya untuk kepentingan dirinya.

Informan Mei

Mei mengelola penghasilannya bersama dengan gaji suami yang diserahkan kepadanya. Mei menggunakan penghasilan suami-istri dengan cara memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu. Mei membelanjakan uang yang dikelolanya untuk sembako, membayar rekening listrik dan air bersih, kemudian membayar uang bulanan sekolah anak-anaknya. Setelah itu ia membeli susu untuk anak terkecil yang masih balita, menyisihkan uang jajan untuk 3 orang anaknya. Kemudian Mei menabung sebagian penghasilan mereka untuk cadangan keuangan keluarga yang biasanya digunakan pada minggu keempat ketika uang yang ada ditangan Mei sudah habis. Kalau mendapat honor atau insentif lain maka Mei tidak menggunakan tabungan pada bulan itu. Untuk menstabilkan keuangan keluarga Mei sering mempergunakan jasa koperasi yang memberikan pinjaman uang atau menawarkan barang /perabot rumah tangga dengan pembayaran menciil.

Penghasilan suami yang tidak diserahkan kepada Mei digunakan untuk membangun rumah, investasi tanah, membeli kendaraan, membiayai sebagian pendidikan suami ketika masih kuliah D3, dan membiayai pendidikan anak seperti biaya masuk sekolah. Kemudian menabung dalam bentuk modal usaha yang terus dikembangkan. Sebagian penghasilan suami Mei digunakan untuk membiayai kebutuhan pribadi seperti perlengkapan olahraga, bensin, rokok, pembelian telepon genggam yang mengikuti model, serta biaya pergaulan sesama rekan bisnis suaminya. Sebenarnya gaji dan penghasilan suami-istri yang dikelola oleh Mei tidak memenuhi kebutuhan keluarganya. Akan tetapi Mei tidak pernah meminta tambahan keuangan, kecuali pada saat akan hari raya seperti natal, karena ia membutuhkan cukup banyak uang untuk memenuhi biaya perayaan

natal. Dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang Mei menggunakan jasa koperasi dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga dengan cara berhutang barang di koperasi yang akan dilunasi di bulan berikutnya.

Tanggungjawab pemenuhan kebutuhan rutin keluarga yang tidak bisa ditunda membawa penggunaan penghasilan Mei untuk keperluan keluarga secara penuh. Sehingga Mei cenderung mengabaikan kebutuhan dirinya, seperti pemenuhan kebutuhan akan kontrasepsi yang permanen, akibatnya Mei mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dan menggunakan obat peluntur yang murah untuk menghentikan kehamilan tersebut.

Informan Iis

Iis mempergunakan penghasilannya bagi pemenuhan kebutuhan keluarga yang bersifat rutin bersama kegiatannya mengelola kegiatan rumah tangganya. Yang pertama dilakukan Iis adalah membayar uang bulanan sekolah anaknya, membeli sembako untuk sebulan, membayar biaya jasa seperti listrik dan air bersih, menyalakan untuk belanja lauk setiap hari, menyalakan untuk jajan anaknya yang masih SMA dan SMP, dan menabung sebagian penghasilan suami-istri untuk biaya pendidikan anak yang akan masuk kuliah. Adapun penghasilan lain-lain yang dimiliki oleh suaminya digunakan untuk membiayai beberapa keperluan pribadi suami seperti fasilitas olahraga, pembelian rokok, bensin, pembelian telepon genggam dan pulsa suaminya. Kemudian sebagian digunakan untuk keluarga seperti memperbaiki rumah, menyicil kendaraan bermotor yang digunakan oleh suaminya, sebagian lagi ditabung suaminya dalam rekening sendiri yang kegunaannya untuk apa belum diketahui Iis.

Sebenarnya penghasilan suami-istri yang dikelola Iis hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari, maka agar bisa menabung untuk mempersiapkan biaya

pendidikan anak-anaknya ataupun untuk membeli beberapa barang kebutuhan seperti perabot rumah tangga, Iis mempergunakan jasa koperasi. Iis mengambil barang kebutuhan pokok dari koperasi kemudian mencicil pembayaran dari gajinya pada bulan berikut, sehingga ia bisa menyimpan gaji dibulan sebelumnya.

Informan Marwah

Marwah menggunakan penghasilan suami-istri yang ada padanya untuk membiayai kebutuhan keluarga yang bersifat rutin setiap bulan seperti biaya konsumsi, biaya pendidikan anak kedua anaknya yang baru duduk dibangku SMA dan SMP, mencicil perabot rumah tangga serta menabung sebagian penghasilan sebagai cadangan keuangan keluarga. Kemudian biaya pembelian tanah dan pembangunan rumah juga bersumber dari penghasilan suami-istri yang ditabung oleh Marwah ditambah uang kredit yang dicicil dari gaji mereka berdua.

Penghasilan suami yang berasal dari luar gaji digunakan suami untuk merehab rumah, membeli peralatan rumah tangga untuk sarana hiburan, membiayai kebutuhan sehari-hari suami seperti biaya rokok, pulsa dan fasilitas olahraga. Kadang-kadang penghasilan tersebut juga digunakan suami Marwah untuk menambah biaya pendidikan anak mereka jika kebetulan uang tersebut diterima pada waktu anak membutuhkan biaya. Ketika menyelesaikan pendidikan D3 nya, suami Marwah juga menggunakan sebagian penghasilannya untuk kebutuhan pendidikannya, sedangkan penghasilan Marwah pada waktu itu dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga yang sifatnya tidak bisa ditunda seperti biaya konsumsi dan pendidikan anak.

Informan Nana

Nana memiliki penghasilan yang cukup besar, bahkan sejak awal menikah ia sudah memiliki penghasilan yang lebih besar dibanding suaminya. Sejak awal

menikah Nana tidak pernah menerima uang suami secara penuh, karena diawal pernikahan suaminya menggunakan sebagian penghasilannya untuk membiayai pendidikannya mengambil D3. Sebagian penghasilan suami Nana yang dikelola langsung oleh suami kemudian habis untuk biaya rokok, biaya bensin, dan beberapa keperluan pribadinya yang lain.

Nana mempergunakan penghasilan suami-istri yang dikelolanya untuk keperluan keluarga, berupa biaya hidup dan pendidikan anak yang kuliah di luar kota, membiayai konsumsi keluarga dan menyimpan sebagian penghasilan untuk keperluan pendidikan anak. Nana juga mencicil pembelian rumah dan kendaraan bermotor dari penghasilan bersama yang dikelolanya. Mempergunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sandang keluarga, seperti pakaian, keperluan prabot rumah tangga dan beberapa keperluan lainnya. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga dari penghasilan yang ada, Nana memperkecil pengeluaran konsumsi keluarga, mengurangi bahkan hampir tidak pernah mempergunakan penghasilannya setiap bulan untuk kepentingan pribadinya, kecuali pada saat tertentu seperti hari raya. Pada waktu itu ia dan suami mendapat tunjangan hari raya, kemudian ia membelanjakannya untuk kebutuhan pakaian setelah kebutuhan anak dan keluarga terpenuhi.

4.3..3 Penghasilan istri ditabung semua untuk kepentingan istri

Informan Uci

Penghasilan Uci sepenuhnya ditabung untuk kepentingan keluarga di masa depan, ada yang dipertahankan dalam bentuk tabungan uang, ada pula yang dipindahkan ke investasi rumah dan tanah atas nama Uci. Saat Uci mengambil pendidikan S2 (yang sudah diselesaikannya), penghasilannya juga digunakan untuk biaya pendidikan tersebut. Uci juga menanam sebagian penghasilannya

dalam modal usaha keluarga, dan memisahkan keuntungan atas namanya sesuai besarnya modal yang ia tanam.

Keleluasaan Uci memanfaatkan penghasilannya didukung oleh kondisi keuangan keluarga yang bersumber dari penghasilan suami mencukupi semua kebutuhan keluarga. Kemampuan Uci menyimpan dan mengontrol penghasilannya maupun penghasilan suami membawa konsekuensi yang cukup pada sikap suami yang menyerahkan semua kegiatan rumah tangga pada Uci.

4.3.4 Penghasilan istri sebagian untuk keluarga, sebagian ditabung, dan sebagian lagi untuk diri sendiri (kurang 20%)

Informan yang bisa menyimpan sebagian penghasilannya untuk keluarga, sebagian lagi kurang dari 20 % untuk diri sendiri. mengelola seluruh penghasilan adalah Fina, Susi, Nina, Roro, Kurnia

Informan Fina

Pengelolaan penghasilan suami-istri yang disatukan dalam keluarga Fina bersamaan dengan kewajiban Fina untuk mengatur penggunaan penghasilannya pada kebutuhan keluarga. Fina menggunakan penghasilan suami-istri sejak awal mereka pacaran, ketika mempersiapkan biaya pernikahan dari penghasilan merek berdua. Setelah menikah Fina membelanjakan penghasilan suami-istri pada kebutuhan pokok keluarga, membayar biaya listrik dan air bersih, menyisihkan sebagian untuk biaya konsumsi keluarga, memberikan sebagian kepada suami untuk membiayai kebutuhan bulanan suami seperti biaya bensin, olahraga, pulsa dan mengirimkan bantuan biaya hidup bagi orangtua suaminya setiap bulan. Kemudian menyimpan sebagian penghasilan yang ada untuk kemudian digunakan membiayai beberapa kebutuhan keluarga seperti membeli tanah, membangun rumah, dan merehab rumah.

Ketika suaminya menjalani pendidikan S1 selama dua tahun, Fina juga mendampingi suami untuk mengatur biaya pendidikan suami. Pada saat itu, atas keputusan bersama mereka menunda punya anak dengan pertimbangan biaya. Pendidikan yang membutuhkan biaya cukup besar, ditambah biaya hidup di kota yang cukup besar ternyata tidak bisa dipenuhi dari penghasilan dan bantuan belajar suami. Praktis penghasilan Fina digunakan untuk menunjang kehidupan mereka selama dua tahun.

Biaya hidup yang tidak terlalu besar karena anak baru satu orang dan masih balita, ditambah lagi penghasilan suami-istri yang meningkat memberikan kesempatan kepada Fina untuk menggunakan sebagian penghasilannya untuk kebutuhan pribadi. Fina menggunakan sebagian penghasilannya untuk memperbaiki penampilan, menggunakan pakaian dan kosmetika yang berkualitas baik, serta membiayai beberapa kegiatan sosialnya. Meskipun terlintas untuk melanjutkan pendidikan ke S2, Fina menundanya karena suami belum S2, dan pengasuhan anak yang masih kecil serta pembangunan rumah masih memerlukan biaya.

Informan Susi

Susi membelanjakan penghasilan suami-istri yang dikelolanya pada kebutuhan keluarga. Ketika suaminya masih bertugas dikecamatan, Susi memberikan sebagian penghasilan suaminya untuk biaya hidup di tempat tugas. Kemudian selama suaminya kuliah meneruskan S2 di kota lain, suaminya membawa seluruh tabungan dari penghasilan berdua yang dikelola Susi, dan Susi mengirimkan seluruh tunjangan belajar dan sebagian penghasilan mereka berdua. Praktis selama suaminya kuliah biaya hidup Susi dan anaknya yang berusia balita berasal dari penghasilan Susi. Karena masih tinggal bersama ibunya, maka Susi

berbagi belanja pengeluaran rutin dengan ibunya, misalnya bergiliran membiayai listrik dan air bersih, membiayai bersama belanja setiap hari.

Ketika suaminya selesai kuliah dan tinggal bersama di Kabupaten, suaminya memutuskan menggunakan tabungan mereka untuk membayar uang pangkal perumahan dari tabungan yang dikelola Susi dari penghasilan bersama. Cicilan rumah kemudian dipotong dari gaji bulanan suaminya. Kemudian Suami Susi memutuskan untuk membeli kendaraan bermotor dengan mencicil dari gajinya. Keputusan-keputusan yang dilakukan oleh suaminya menurut Susi dilakukan dengan sepihak, ia hanya diberitahu tanpa dimintai pendapatnya.

Susi menggunakan sebagian (kurang 20%) dari penghasilannya untuk membiayai berbagai kegiatan sosialnya, membeli pakaian dan kosmetika terbaik. Meskipun memiliki penghasilan yang berlebih, ketika ditanya mengenai keinginan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, Susi merasa masih perlu mempertimbangkan karena anak yang masih kecil membutuhkan perhatian. Disamping itu, perguruan tinggi yang membuka program magister berada di kota lain membuatnya merasa berat jika harus berpisah dengan keluarga.

Informan Nina

Nina menggunakan penghasilan suami-istri pada keperluan keluarga seperti biaya konsumsi, biaya pendidikan anak, dan biaya rutin keluarganya. Setelah sebagian anak selesai kuliah dan penghasilan suami-istri meningkat, maka Nina mempergunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti membeli perhiasan emas, menggunakan kosmetika terbaik dan pergi ke salon setiap bulannya. Nina juga menggunakan penghasilannya untuk kegiatan sosial yang menunjang sosialisasi pekerjaan suaminya.

Pada awal pernikahan ketika situasi keuangan tidak seperti sekarang, Nina masih bisa menggunakan sebagian penghasilannya untuk kegiatan sosial yang berhubungan dengan pekerjaan suaminya. Bahkan ketika suaminya kuliah di kota lain, Nina ikut mendampingi dan mempergunakan penghasilannya untuk biaya hidup bersama ketiga anaknya. Sedangkan penghasilan suami digunakan penuh untuk biaya pendidikan dan sarana penunjang belajar suami.

Meskipun memiliki kesempatan menyimpan dan mempergunakan sebagian penghasilannya, Nina tidak tertarik untuk mempergunakan penghasilannya pada hal-hal yang menunjang pekerjaannya, seperti meningkatkan pendidikan atau keterampilan. Sedangkan suami Nina bersikap sebaliknya, ketika penghasilan meningkat ia cenderung mempergunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhannya akan pendidikan dan keterampilan yang menunjang pekerjaannya. Suami Nina juga menyimpan kelebihan penghasilannya dalam bentuk tanah-tanah, rumah dan kendaraan.

Informan Roro

Roro mempergunakan sebagian penghasilannya untuk membiayai pendidikan meneruskan S1 yang tertunda karena situasi ekonomi yang tidak memungkinkan, kemudian membiayai kegiatan-kegiatan sosial yang berkaitan dengan jabatannya. Ketika anak masih kecil dan penghasilan tidak sebesar sekarang, Roro mengelola penghasilan suami secara penuh untuk membiayai ekonomi rumah tangganya.

Pada saat suami meneruskan kuliah kejenjang S1, Roro ikut mendampingi selama tiga tahun. Selama suami kuliah, Roro mempergunakan penghasilannya untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, karena sebagian besar penghasilan suami digunakan untuk membiayai pendidikannya. Sikap sebaliknya ditunjukkan

oleh suami ketika Roro akan mempergunakan penghasilannya untuk peningkatan pendidikan kejenjang S1. Alasan ekonomi yang akan terganggu jika Roro melanjutkan kuliah diajukan suami kepada Roro. Roro harus meyakinkan suami tentang penghasilan mereka yang tidak akan terganggu serta menyakinkan betapa besar kebutuhannya akan pendidikan.

Informan Kurnia

Penghasilan Kurnia lebih besar dari penghasilan suaminya. Ketika akan menikah Kurnia membawa cukup banyak kekayaan berupa tanah dan rumah permanen, kendaraan dan berbagai fasilitas rumah tangga lainnya. Sedangkan suami Kurnia membawa sedikit sekali penghasilan ke dalam pernikahan mereka. Kurnia dan suaminya sama-sama menjalani pendidikan D3 dan kemudian meneruskan ke S1 ketika mereka menikah. Oleh karena itu penghasilan suami yang diberikan untuk keperluan keluarga hanya sebagian karena digunakan untuk biaya pendidikan suaminya.

Kurnia harus mempergunakan penghasilannya untuk membiayai sebagian kebutuhan keluarga. Karena penghasilannya lebih besar dari biaya hidup mereka sehari-hari, Kurnia masih bisa menggunakan sebagian dari penghasilannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri seperti membiayai pendidikan D3 dan S1nya, membeli pakaian, kosmetika, dan membeli perhiasan, serta menabung sisanya untuk keperluan keluarga.

4.3..5 Penghasilan istri digunakan untuk keluarga tanpa sempat menabung dan masih bisa untuk diri sendiri (kurang 20%)

Informan Gina

Gina menerima gaji suami di luar tunjangan lain-lain setiap bulannya. Gina mempergunakan semua penghasilannya untuk kebutuhan keluarga tanpa

sempat menabung. Bahkan Gina mempergunakan uang kantor yang dikelolanya setiap bulan untuk menutupi kekurangan biaya kebutuhan keluarganya. Hal ini dikarenakan penghasilan suami Gina tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Namun Gina masih bisa menggunakan kurang dari 20% gajinya untuk membiayai pendidikannya ketika ia masih kuliah. Gina menyisihkan penghasilannya untuk membiayai pendidikan D3 dan S1 yang diselesaikan dalam lima tahun. Kemudian setelah pendidikannya selesai dan penghasilan meningkat, Gina mencicil pembelian kendaraan bermotor selama lima tahun, mencicil pinjaman bank untuk memperbaiki rumah, dan mempergunakan sebagian penghasilannya untuk membiayai kosmetika dan pakaiannya, biaya pulsa, membeli perhiasan, serta membeli perangkat elektronik seperti komputer untuk menunjang kegiatannya bekerja. Selain memenuhi keperluan di atas, Gina juga menggunakan penghasilan yang didapat di luar gaji untuk memenuhi kebutuhan pakaian keluarga.

Penghasilan suami Gina digunakan untuk mencicil pembelian rumah, mencicil kredit bank yang diambil untuk merehab rumah, kemudian menggunakan penghasilan lain seperti perjalanan dinas dan uang honor untuk keperluan rumah tangga seperti biaya pendidikan anak. Suami Gina juga mempergunakan penghasilannya di luar gaji untuk membiayai keperluan pribadi seperti rokok dan pembelian telepon genggam serta pembelian pulsa setiap awal bulannya.

4.4. Diskusi

4.4.1. Faktor-faktor yang Memengaruhi Keputusan Pengelolaan Penghasilan Suami Oleh Istri

4.4.1.1. Relasi kuasa dan pemaknaan suami tentang penghasilan

Sebagai kepala keluarga, laki-laki dalam masyarakat yang cenderung menganut paham tradisional mengenai peran suami-istri, ditempatkan dalam situasi sebagai orang yang dihormati dalam keluarga. Situasi ini kemudian memengaruhi pemaknaan suami tentang penghasilannya dan memengaruhi terbentuknya pola-pola pengelolaan penghasilan suami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Pemaknaan suami terhadap penghasilannya kemudian menggambarkan relasi kuasa suami-istri yang menunjukkan ada atau tidak adanya kekuasaan pada salah satu pihak baik pihak istri atau suami sehingga saling mendominasi atau seimbang.

Dominasi suami terhadap istri dalam pengelolaan penghasilan suami bisa terlihat dengan adanya penyerahan tanggungjawab pengelolaan keuangan dan konsekuensi kekurangan yang harus dihadapi oleh perempuan sendiri. Misalnya, pada informan yang menerima penghasilan suami secara penuh seperti informan Susi dan Fina, istri diposisikan sebagai perpanjangan tangan suami untuk mengatur pengelolaan rumah tangga yang dibiayai dari penghasilan suami. seperti ungkapan informan berikut ini:

“Sejak pacaran suami memberikan penghasilan kepada saya untuk diatur. Suami memang memberikan keleluasaan kepada saya untuk mengelola penghasilannya, namun resiko kekurangannya harus saya hadapi sendiri.....seolah-olahnya suami memberikan kepercayaan dan saya merasa tidak enak jika ada yang salah ketika saya mengerjakannya.....jadi sepertinya suami memberikan gaji kemudian sebisanya saya bersikap baik, memenuhi kewajiban saya mengatur keuangan keluarga, dan mencukupinya jika kurang”(Susi/ wwer/ 240607).

Bahkan pada sebagian pasangan, suami memutuskan secara sepihak penggunaan penghasilan bersama yang dikelola istri untuk kepentingan suami, seperti diungkapkan berikut ini:

“.....waktu itu suami mau sekolah.....dia bilang dia harus sekolah, ya saya mengikuti saja, karena saya pikir memang perlu juga sekolahnya, apalagi suami masih tugas di kecamatan, siapa tahu setelah S2 suami bisa ke Kabupaten. Terus suami minta tabungan yang sebenarnya simpanan gaji kita berdua, katanya buat biaya enam bulan pertama sampai beasiswa keluar.”(Susi/220607).

Wawancara di atas memperlihatkan ada kecenderungan suami membuat keputusan atas pengelolaan penghasilannya untuk kepentingan dirinya, seperti memanfaatkan tabungan bersama yang dikelola istri dari penghasilan suami-istri untuk membiayai pendidikannya. Keputusan sepihak atas penghasilan suami atau penghasilan bersama yang dikelola oleh istri menunjukkan kekuasaan suami atau relasi kuasa suami dalam membina relasi suami-istri. Keputusan sepihak terhadap proses pengelolaan penghasilan suami juga terjadi ketika suami merubah pola pengelolaan penghasilannya dari model menyerahkan penghasilan sepenuhnya kepada istri, menjadi model hanya menyerahkan gaji setiap bulan dan mengelola penghasilan yang lainnya sendiri. Seperti yang terjadi pada pasangan informan Nina, dan Roro berikut ungkapan informan:

“..Dulu suami menyerahkan semua penghasilannya untuk saya kelola, saya mencukupkan untuk semua biaya kebutuhan keluarga, kemudian semua berubah dengan hanya memberikan gajinya, ia menyimpan semua honor dan uang yang lainnya.” (Roro/wwcr/210607).

“....engga ngomong-ngomong, suami kemudian menyimpan uangnya sendiri, kecuali gaji setiap bulan saya ambil dari bendahara gajinya. Kemudian belanja barang-barang mahal, memberi uang saku anak, saya tanya kenapa begitu, kenapa uangnya tidak disimpan ke

saya,....jawabnya 'macam gini saja diribut, uang saya dan mau saya',.....sudah dapat jawaban itu saya tidak enak juga, gaji dia satu bulan penuh saya kelola, saya mau minta apalagi, harusnya syukur.”(Nina/wwcr2/280607)

Gambaran lain dari kekuasaan adalah kemampuan suami untuk mempertahankan dan mengelola sendiri penghasilannya. Dalam hal ini, perempuan tidak berdaya meminta penghasilan suaminya untuk dikelola, dan membiarkan suami mengelola sendiri penghasilannya. Contohnya pada keluarga Marni yang tidak menerima sama sekali penghasilan suaminya untuk memenuhi kebutuhan rutin keluarga. Marni menerima begitu saja pengaturan uang belanja dari gaji suami ketika ia belum bekerja sebagai PNS. Bahkan setelah ia bekerja sebagai PNS, suaminya memutuskan melanjutkan kejenjang S1 tanpa berkompromi dengan Marni. Suami Marni pernah menyarankan kepada Marni untuk mempergunakan penghasilannya dalam memenuhi kebutuhan Marni. Karena suami tidak memberikan uang belanja dapur, Marni menganggap kalau suaminya memandang penghasilannya adalah untuk biaya dapur, dan kebutuhan dirinya adalah kebutuhan di dapur. Oleh karena itu Marni tidak pernah meminta atau bertanya kenapa suaminya tidak memberikan gajinya seperti suami-suami yang lain. Berikut wawancara Marni,

“....saya nurut saja bapak bilang saya menggunakan uang saya untuk kebutuhan diri, karena tidak pernah pegang uang belanja, saya pikir kebutuhan saya adalah kebutuhan belanja dapur.....kalau suami tidak memberikan penghasilannya, saya juga tidak apa, yang penting pendidikan anak kuliah dia yang tangani.”(Marni/wwcr/050707)

Suami bersikap menyerahkan semua tanggungjawab keuangan dan bersikap ingin dialayani setelah menyerahkan semua gajinya kepada istri. Rosa yang mengalami kejadian ini memutuskan untuk tidak mengelola gaji suaminya,

karena menurutnya suami nampak menunjukkan kekuasaannya dengan menyerahkan penghasilannya. Berikut wawancara dengan Rosa,

“semenjak semua gaji saya ambil, suami tidak pernah mau tahu apa keperluan keluarga, ia nampaknya semena-mena, apa-apa mau dilayani, jadi saya serahkan gajinya, saya minta dia mengelola sendiri, saya suruh dia membiayai banyak keperluan, habis gara-gara gaji sebulan, dia jadi seperti berkuasa, sedangkan saya harus membiayai semua”(Rosa/wwcr/300607).

4.4.1.2. Suami mengingkari peran tradisional menafkahi keluarga

Suami yang tidak mau menyerahkan penghasilannya kepada istri untuk dikelola terlihat pada keluarga Marni, Rosa, Nana dan Kurnia. Marni pernah menerima penghasilan suaminya ketika belum bekerja sebagai PNS, kemudian ia tidak menerima penghasilan suami setelah ia memiliki gaji tetap sebagai PNS.

Kita bisa melihat adanya ketidakinginan suami menjalankan peran menafkahi keluarga secara penuh melalui sikap suami dalam membiayai rumah tangga maupun pola penyerahan penghasilannya kepada istri. Ketidakinginan suami dapat kita lihat dari sikap suami terhadap istri seperti, menolak memberikan penghasilannya ketika istri meminta penghasilannya untuk keperluan keluarga dengan alasan istri memiliki penghasilan.

Penolakan suami menyerahkan penghasilan yang pernah dialami oleh Rosa menjadi alasan kenapa kemudian ia tidak pernah meminta penghasilan suaminya, berikut penuturan Rosa,

“.....dulu saya pernah mengelola penghasilan suami selama beberapa bulan, namun tidak bertahan lama karena suami cenderung menyerahkan semua urusan keuangan keluarga dan tidak mau peduli kalau gajinya sudah habis buat beberapa keperluan pokok keluarga dan jajan anak. Terus saya pernah minta uang tambahan setiap dia pulang

ngobyek, tapi setiap saya minta uangnya, jawabannya selalu saja berbalik tanya kepada saya, misalnya. “memang duit kau kemane, kurang ke duitmu, mau beli ape sih”. ...kalau dipikir-pikir uang tersebut saya habiskan untuk keluarga ini. Akhirnya gaji suami saya serahkan kembali kepada suami sambil menegaskan kewajibannya untuk membiayai keperluan keluarga, saya minta dia membiayai pendidikan anak-anak yang besar-besar, belanja keperluan sembako setiap bulannya, dan kalau anak-anak perlu uang saya suruh saja minta sama bapaknya.....sejak itu saya tidak pernah lagi minta uang dengan suami, meskipun saya harus berusaha memenuhi kebutuhan lauk pauk keluarga setiap hari..... tetapi masih lebih ringan dibanding saya harus menerima sikap tidak peduli suami waktu saya pegang uang gajinya”. (Rosa/wwcr2/221207).

Sikap suami yang sama, suami menolak memberikan penghasilannya juga diungkapkan oleh Kurnia dan Nana. Pada kasus Kurnia dan Nana, suami hanya memberikan sebagian gaji dan mengelola sendiri sisa gaji dan yang lain-lainnya, sehingga Kurnia maupun Nana harus memastikan kekurangan keuangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Nana harus memastikan sumber pembiayaan pendidikan anak yang kuliah dan biaya kebutuhan keluarga yang lain dari penghasilan yang ada, seperti dalam uraian wawancara berikut ini,

”....sebelum keperluan lain di penuhi, biaya hidup anak yang kuliah di kirim dahulu. saya juga membuat kebijakan uang ketat dengan orang di rumah. Saya memperkecil biaya makan dengan mengurangi jajan atau membeli menu yang murah. Kalau tidak begitu, sulit buat menabung dan menisakan biaya semesteran anak kuliah. Saya juga harus memperhitungkan uang saku anak kuliah setiap bulannya. Saya hanya bisa berdo’a semoga saya meninggal ketika anak-anak sudah selesai kuliahnya. Kalau dihitung sebenarnya gaji suami yang diberikan kepada saya hanya cukup buat makan saja, jadi buat biaya bulanan anak-anak serta biaya semesteran anak kuliah semuanya dari penghasilan saya”. (Nana/wwcr/230607)

Dalam wawancara berikutnya, ketika membicarakan kewajiban suami menafkahi keluarga, Nana sempat mengutarakan nada keberatan terhadap proses

pengelolaan keuangan dalam keluarga yang lebih banyak dibebankan kepada penghasilannya, terutama atas sikap suami yang tidak terlibat dalam pengelolaan kegiatan rumah tangga. Sebagai istri, Nana menganggap jika ia berkewajiban membantu suami menafkahi keluarga dan tidak ingin menghitung berapa besar jasa yang ia tanamkan bagi keluarganya. Meskipun demikian, Nana mengajukan protes tentang anggapan bahwa keberhasilan anak, selalu merupakan keberhasilan suami, padahal suami jarang bersikap yang menunjukkan terima kasih kepada istri atau bersimpati kepada beban ekonomi yang disandang istri. Hal ini terungkap dalam wawancara berikut ini,

”keberatan sich tidak, tapi bagaimana ya, inikan menikah, sama-sama kita mau, ya sama-sama kita jalani. Kalau suami-istri punya kekurangan kita saling menutupi. Tapi, saya merasa sebagai istri kita punya kewajiban, suami juga. Kalau suami dihormati dikeluarga dan dimata orang-orang karena ia pemimpin, karena ia menafkahi keluarga. ya.... jadi istri terpaksa juga sebenarnya kalau selamanya harus gini, harus nanggung nafkah keluarga. mungkin kalau mau disebut-sebut seolah-olah menghitung jasa kita pada keluarga, tapi kenyataannya memang begitu, kalau dihormatinya suami juga karena jasa kita, karena bantuan kita, ya jadi suami harusnya terima kasihlah, gimana caranya bantu-bantu kerja rumah atau cari uang tambahan juga boleh. Coba di dengar, anak siapa yang jadi orang, ya anak bapaknya, engga ada anak ibunya. Tapi yang kerja banyakkkan ibunya”.

(Nana/wwcr2/301107)

Kesanggupan Nana menyandang kebutuhan keluarga dari penghasilannya, meskipun suami tidak memberikan penghasilan secara penuh, juga dialami oleh Kurnia yang cukup mapan perekonomiannya ketika akan menikah. Keinginan untuk memiliki status pernikahan dan usia yang cukup tinggi mendesak Kurnia mempertahankan hubungan dan melanjutkan ke pernikahan. Meskipun ia harus membiayai perekonomian keluarga, karena awal-awal menikah suami masih membiayai kuliahnya. Namun setelah kuliahnya selesai, dan Kurnia pernah

meminta penghasilannya secara penuh, suami tidak memberikan sisa gajinya dengan alasan Kurnia memiliki penghasilan lebih besar darinya.

“...mau beli apa sampai minta-minta uang lagi, memangnya kurang apa gajimu yang besar itu! Begitu suami menjawab kalau saya sebut-sebut sisa gajinya. Sekali waktu suami juga pernah bilang,... kau tahu gajiku ini rendah, kenapa harus kau minta lagi sedang gajimu sendiri masih ada mencukupi makan minum!.....padahal gaji dia hanya bisa untuk separuh biaya makan dan susu anak, saya heran juga dan kepikiran kalau ini (cat.menafkahi keluarga) kewajiban dia. Coba nanti kalau saya tidak duduk ditempat basah apa dia masih bisa bersikap lebih baik atau jangan-jangan semakin buruk ya...”
(Kurnia/wwcr2/251207)

Penuturan Kurnia di atas bukan hanya menggambarkan penolakan suami memenuhi seluruh biaya kebutuhan hidup keluarga, tetapi juga menggambarkan perubahan pemahaman terhadap konsep pencari nafkah keluarga dalam diri laki-laki. Sikap suami dari beberapa informan seperti Rosa, Nana, dan Kurnia yang juga menolak memberikan penghasilan kepada istri, termasuk mencerminkan penolakan laki-laki terhadap kewajibannya menafkahi keluarga. Hal ini karena ketidaksiapan mental laki-laki memikul tanggung jawab pencari nafkah yang cukup berat, dan juga adanya ketidakrelaan laki-laki menyerahkan penghasilan kepada istri.

Ketidakinginan laki-laki menyerahkan semua penghasilannya untuk dikelola istri, menurutku dipengaruhi oleh tidak siapnya laki-laki kehilangan kekuasaan dan intervensi terhadap penggunaan penghasilannya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pandangan laki-laki dalam menggunakan penghasilannya yang bersifat lebih *diffuse* atau *prestige*, seperti pemenuhan kebutuhan akan kendaraan dan barang mewah yang bersifat mendukung penampilan dan aktivitas di dunia publik.

4.4.1.3 Suami memanfaatkan kontribusi penghasilan istri

Melihat standar kebutuhan hidup layak dan upah minimum sebesar Rp 666.780,- dan harga kebutuhan pokok yang standar di Kabupaten Ketapang pada saat penelitian ini dilaksanakan, dapat dikatakan penghasilan bekerja buruh atau tenaga upah swasta kurang memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian melihat penghasilan PNS yang ada di atas penghasilan rata-rata upah swasta, namun masih belum mencukupi untuk membiayai hidup satu keluarga dengan istri dan dua anak. Berdasarkan kondisi ini, bisa dikatakan sejak awal menikah, ada laki-laki yang bekerja sebagai PNS yang mempertimbangkan untuk menikah dengan perempuan bekerja seperti PNS agar bisa berkontribusi ekonomi keluarga.

Pertimbangan suami memilih istri bekerja untuk berkontribusi ekonomi keluarga tersamarkan dalam pelaksanaan peran perempuan dalam keluarga. Contoh kasus, adalah Fina yang mengelola semua penghasilan suaminya dan tidak memisahkan penghasilan sendiri dengan penghasilan suaminya. Fina menganggap semua harta yang ada dalam keluarga adalah hasil dari penghasilan bersama yang seimbang. Berikut ini kutipan wawancara dengan Fina yang memberikan gambaran kesulitan perempuan membedakan penghasilannya dan penghasilan suami,

”Bagaimana ya.....uang suami saya yang kelola, kemudian kita membeli tanah dan membangun rumah dari tabungan kita dan sama-sama mengambil kredit di bank masing-masing sepuluh juta untuk membangun rumah ini.... Saya tidak bisa memastikan uang saya atau uang suami yang dipergunakan. Kalau penghasilan setiap bulan sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya saja kemana uang tersebut di gunakan sudah tanggung jawab kita berdua. Saya istrinya, jadi apa yang saya punya juga punya suami, kalau di hitung hitung bisa makan hati dan bisa menimbulkan rasa jengkel dan ini bisa jadi sumber pertengkaran suami istri karena hati tidak puas.....”(Fina/wwcr/240607)

Dari penuturannya, Fina memang tidak mau membedakan dan menghitung penghasilan siapa yang banyak digunakan untuk kebutuhan keluarga, karena ingin menghindari konflik. Kemudian untuk memastikan pendapatnya benar, Fina mengatakan kalau penggunaan penghasilan setiap bulannya merupakan tanggung jawab bersama suami-istri. Namun ketika ditanyakan mengenai pengeluaran-pengeluaran pribadi suami untuk membiayai keluarga suami, sumber biaya pendidikan suami ketika kuliah, dan uang bersama yang diinvestasikan untuk rumah, Fina baru mau mengakui kalau uangnya yang banyak digunakan untuk kebutuhan keluarga maupun ditabung untuk kebutuhan keluarga. Kemudian Fina merasa dimanfaatkan secara ekonomi oleh suami, seperti wawancara berikut ini,

”...dari dulu... kalau buat makan kita saya mempergunakan uang penghasilan di luar gaji pokok saya.....dan hampir semua gaji pokok saya masuk tabungandan uang tabungan itulah yang kita belikan ke tanah dan membangun rumah, jadi hitung-hitung banyak uang saya ya.”

”... Saya bahkan pernah berpikir merasa dimanfaatkan oleh suami secara ekonomi untuk menunjang karir dan kehidupan keluarga suami..” (Fina/wwcr/240607).

Sikap Fina menunjukkan bahwa ia tidak mengakui bahwa sebenarnya penghasilannya banyak digunakan untuk kebutuhan keluarga, bahkan lebih besar jika dibanding dengan penghasilan suaminya. Hal ini karena perempuan masih mempertahankan stereotipe bahwa pencari nafkah keluarga adalah laki-laki. Sehingga perempuan sendiri sering tidak menganggap kalau penghasilannya juga untuk menafkahi keluarga.

Jika pernikahan antara perempuan dan laki-laki yang sama-sama bekerja dan memiliki penghasilan dibentuk berdasarkan mitra dalam berkeluarga, maka suami-istri bisa memandang rumah tangga sebagai unit organisasi yang

membutuhkan kerjasama dalam pembiayaan dan dalam pengelolaan kegiatannya. Menurutku, motif ekonomi ini bisa diangkat kepermukaan, kemudian untuk menjadi dasar pembentukan kesadaran bagi perempuan tentang penghasilannya bekerja, dan penghasilan suaminya. Sehingga pengelolaan dan manfaat yang dilakukan tidak cenderung diserahkan kepada perempuan dan tidak bersifat mengeksploitasi penghasilan perempuan. Pengelolaan penghasilan suami yang tidak penuh, dan tidak adanya komunikasi suami-istri mengenai keuangan keluarga memperlihatkan sikap kurang bertanggungjawab suami terhadap kebutuhan keluarga. Menimbulkan beban ekonomi dan memberikan tekanan dalam diri perempuan. Bahkan memunculkan pertanyaan mengenai tanggungjawab pencari nafkah keluarga, seperti tersirat dalam penuturan Fifit dan Marni berikut ini,

”Jika saya memikirkan bahwa membina rumah tangga ini kewajiban berdua, dan membicarakan keuangan keluarga adalah seharusnya dilakukan bersama juga, mungkin sudah lama saya mengungkapkan siapa yang bekerja penuh untuk menghidupi rumah ini, yang membesarkan anak-anak, siapa yang membuat agar belanja cukup sampai di akhir bulan dan masih tersisa uang.... sudah terpakai semua yang ada pada kita, tapi suami merasa cukup memberikan gaji sebulan... biar kita habis-habisan untuk keluarga, suami santai dan tidak kepikiran kalau bulan depan anak yang kuliah harus bayar uang semesteran. Coba di dengar...mana ada anak ibu yang jadi sarjana, adanya anak bapak. Tapi biar saya merasa dimanfaatkan suami, saya mencoba rela dengan apa yang sudah saya perbuat.”(Fifit/wwcr/150607)

“....suami memang tidak menyerahkan penghasilan kepada saya, dia kelola sendiri, kemudian saya diberi sedikit buat lauk pauk, itu tidak cukup dua minggu dan saya mencukupkan dari gaji saya, terus suami bilang kamu harus kerja, makanya saya beniat benar untuk lulus tes PNS, pas lulus waktu tahun 1998, terus suami bilang.... kamu bisa gunakan gajimu untuk kebutuhanmu,kalau dipikir-pikir, mungkin yang dimaksud suami kebutuhan saya adalah kebutuhan biaya keluarga kali ya, soalnya selama ini suami memberikan belanja untuk

lauk pauk keluarga, setelah saya lulus PNS suami tidak memberikan belanja lauk kepada saya, dan saya memenuhinya dari penghasilan saya, apalagi sekarang saya buka catering”. (Marni/wwcr2/271207).

4.4.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Pemanfaatan Penghasilan Suami-Istri

4.4.2.1 Mempertahankan citra keluarga

Semua keluarga ingin mengembangkan citra yang baik mengenai keluarga itu sendiri. Istri memiliki tuntutan yang besar pada dirinya sendiri untuk memberikan kesan baik tentang keluarganya, dan berupaya sekuat mungkin menghindari terjadinya perceraian. Hal ini dilakukan dengan cara apapun, termasuk bersedia bersusah payah secara tidakimbang, menafkahi keluarga, dan membiarkan suami tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pencari nafkah utama. Ungkapan informan Gina, meskipun dalam tekanan ekonomi tetap mempertahankan perkawinannya karena ia tidak ingin bercerai agar anak-anak dibesarkan oleh orangtua yang utuh.

”Sekali lagi, saya memang tidak bisa memikirkan perceraian, karena saya ingin anak hidup dalam keluarga yang utuh, lagi pula orangtua saya menekankan kalau pernikahan sebaiknya hanya sekali dalam hidup. Tekanan ekonomi tidak akan membuat saya mundur, saya tetap bertahan, saya akan berusaha lebih keras, dalam meningkatkan penghasilan, saya juga kuliah”. (Gina/wwcr2/ 120208)

Informan Fina, Susi, dan Muna pada awalnya tidak mau mengakui bahwa mereka membiayai kebutuhan keluarga ketika penghasilan suami digunakan untuk membiayai kelanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka cenderung menampilkan bahwa suami membiayai kuliah dan keluarga secara bersamaan. Hal ini terungkap melalui dua kutipan wawancara dengan Susi berikut,

"Gaji suami, ya untuk kuliah, ya untuk saya dan anak juga gaji suami.....benar suami berangkat kuliah ketika saya sudah jadi PNS jadi saya sudah punya penghasilan tetap." (Susi/wwcr/220607)

"kita menggunakan penghasilan bersama untuk biaya hidup dan biaya kuliah, jadi tidak jelas itu uang siapa...., untuk hidup kita disini pakai uang kita, gaji suami dan gaji saya, sebagian gaji dikirim ke suami untuk biaya hidup sebagian untuk kita".(Susi/wwcr/220607)

Ketika ditanya berapa besar yang dikirim suami, menurut Susi lebih dari separuh gaji berdua. Hal ini berarti gaji yang tersisa untuk anak dan istri hampir sama dengan jumlah gaji istri. Bahkan menurut Muna, awal berangkat kuliah suami membawa semua tabungan keluarga yang dikumpulkan dari penghasilan suami-istri. Kemudian gaji suaminya dikirim penuh ketika ia belum menyusul suami kuliah. Hal senada dinyatakan oleh Fina, menurutnya meskipun penghasilan suami habis untuk biaya pendidikan suaminya, tetapi ia merasa tidak perlu menghitungnya karena suami kuliah juga untuk keluarga, dan untuk meningkatkan status sosial keluarga.

" selama enam bulan pertama kuliah, suami membawa semua penghasilan kita, tabungan kita, dan gaji suami setiap bulan saya kirim penuh, saya dan anak-anak menggunakan gaji saya di sini..... namanya juga untuk kebaikan, kalau suami berhasil, ya kita istri juga dipandang berhasil juga." (Muna/wwcr/ 180607).

"kalau mau di hitung ya, waktu kuliah dulu.....sebagian gaji suami untuk biaya kuliahnya karena bantuan pemda tidak cukup, dikirim ke orangtuanya sekitar tiga ratusan, waktu itu sepertiga dari gaji suami, sebagian habis untuk makan dan rumah kos kita harus ditambah gaji saya, sisa yang ada sebenarnya sisa gaji saya di tabung, tabungan inilah yang digunakan untuk membeli tanah dari rumah ini.....tapi buat apa saya hitung-hitung, saya kerja untuk keluarga, suami sekolah juga untuk keluarga, jadi untuk saya juga". (Fina/wwcr/240607)

4.4.2.2 Kemampuan Negosiasi Istri dengan Suami

Bagaimana sampai akhirnya terpolanya apakah suami menyerahkan penghasilannya secara penuh, sebagian atau tidak sama sekali kepada istri akhirnya juga dipengaruhi oleh kemampuan perempuan untuk bernegosiasi atau melakukan tawar-menawar dengan suaminya. Proses negosiasi ini sangat ditentukan oleh kemampuan perempuan bersuara dalam hubungan dengan suami untuk mengontrol penghasilannya sendiri maupun penghasilan pasangan.

Proses negosiasi istri terhadap suami terjadi ketika istri mulai menjalankan kegiatan rumah tangga. Kegiatan rumah tangga ini sendiri membutuhkan biaya, terutama proses penyediaan konsumsi, sarana dan prasarana keluarga seperti air bersih, listrik dan telepon. Persoalan pembiayaan kemudian membawa konsekuensi perempuan dan laki-laki untuk menyediakan penghasilannya agar kegiatan rumah tangga berjalan lancar. Persoalannya, ada suami menyerahkan penghasilan kepada istri tanpa diminta karena suami menyerahkan penghasilan setelah istri mengelola konsumsi keluarga. Kemudian ada suami yang tidak menyerahkan penghasilannya sama sekali kepada istri, kemudian baru memberikannya setelah diminta. Menghadapi situasi ini perempuan kemudian cenderung mengadakan negosiasi atau penawaran kepada suaminya, sehingga kemudian melahirkan pola-pola pengelolaan penghasilan suami. Berikut ini negosiasi istri pada model-model pengelolaan penghasilan suaminya:

4.4.2.2.1 Negosiasi Informan yang Mengelola Penghasilan Suami Secara Penuh.

Kasus Muna yang di awal pernikahannya tidak menerima penghasilan suami sama sekali, langsung meminta suaminya menyerahkan penghasilan kepadanya, dengan alasan agar pengeluaran keluarga terkontrol pada satu pintu.

Hasilnya, suami menyerahkan penghasilannya secara penuh, bahkan suami Muna tidak pernah protes ketika Muna mengatur pengeluaran pribadinya.

Kemampuan Uci untuk mempertahankan penghasilannya, diikuti dengan kemampuannya meminta serta mengelola penghasilan suami secara penuh. Hal ini memberikan kesempatan kepada Uci untuk memanfaatkan penghasilannya bagi kepentingan dirinya. Membuat pilihan-pilihan yang menguntungkan dirinya dalam berbagai keputusan keluarga, seperti memberikan pilihan kepada suaminya mengenai siapa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang magister, mengalokasikan penghasilan suaminya pada kebutuhan keluarga dan menyimpan penghasilannya. Uraian-uraian wawancara di bawah ini memperlihatkan Uci memiliki kekuatan tawar menawar maupun kekuasaan terhadap penghasilannya dan penghasilan suaminya.

Sedangkan Informan Fina dan Susi, sudah mengelola seluruh penghasilan suaminya sejak mereka berpacaran dan berencana menikah. Fina dan Susi mengelola penghasilan suaminya secara penuh, dan mengeluarkan semua keperluan suaminya berdasarkan perintah suaminya. Dalam hal ini, Fina dan Susi bertindak sebagai pengelola penghasilan suaminya. Ketika ditanya proses negoisasi, kedua informan mengatakan mereka tidak meminta suaminya memberikan penghasilan, namun suaminya sendiri yang menyerahkan penghasilannya dengan kesadaran bahwa kegiatan rumah tangga adalah tanggungjawab bersama yang membutuhkan biaya.

4.4.2.2.2 Negoisasi Informan yang Mengelola Gaji Bulanan Suami di Luar Penghasilan Lain-Lain Suaminya

Pada kelompok ini ada dua macam proses suami menyerahkan penghasilan istri, pertama adalah kelompok suami yang awalnya menyerahkan seluruh

penghasilan kepada istri, kemudian berubah hanya menyerahkan gajinya saja kepada istri. Pengalaman ini terjadi pada Roro, Nina dan Marwah yang mengelola penghasilan suami secara penuh, kemudian berubah tinggal mengelola gaji bulanan. Kedua informan mengalami hal ini setelah suami mereka pulang kuliah, mendapat gelar dan jabatan baru yang memberikan penghasilan lebih besar. Informan Nina dan Roro memang mempertanyakan kepada suaminya mengapa tidak menyerahkan semua penghasilan seperti biasa, namun jawaban yang diberikan masing-masing suaminya tidak menjelaskan alasan kenapa mereka menyimpan penghasilan lain-lain sendiri. Seperti wawancara Nina berikut,

“.....saya tanya saja uangnya kenapa tidak disimpan kesaya seperti biasa, jawaban suami malah bikin tidak enak ‘ masalah gini saja ribut’, saya jadi diam tidak nanya lagi”. (Nina/280607).

Sedangkan informan Marwah tidak pernah menanyakan mengapa suaminya tidak menyerahkan penghasilan lain-lain, padahal ia ingin sekali meminta penghasilan tersebut karena selama ini menurutnya suami membelanjakan uang kurang tepat, sedangkan keluarga masih membutuhkan biaya dan tabungan pendidikan anak-anak harus disiapkan.

“.....kalau tidak hati-hati uang kita tidak cukup buat belanja, bahkan tidak bisa nabung,..rasa-rasanya saya mau meminta uang jalan atau honor suami yang sering digunakan buat traktir anak-anak atau buat beli peralatan hiburannya, soalnya anak-anak perlu uang buat sekolah lanjut, jadi harusnya banyak nabung.” (Marwah/wwcar/200607)

Kedua adalah negoisasi yang terjadi pada suami yang sejak awal menikah memang menyerahkan gaji dengan kesadaran, bahwa gajinya untuk membiayai keperluan keluarga. Iis dan Mei pernah memikirkan untuk meminta penghasilan lain-lain suaminya, karena menurutnya gaji bulanan suami dan gajinya tidak

memenuhi kebutuhan keluarga. Namun Iis dan Mei tidak pernah mengutarakan keinginan tersebut karena merasa tidak enak dengan suaminya. Berikut wawancaranya,

“.....saya merasa tidak enak meminta uang tambahan ke suami, soalnya gajinya sudah saya habiskan,.....jadinya apa-apa kurang saya atasi sendiri, kalau ada yang susah saya usahakan kerja sendiri, rasanya kurang baik saja ribut masalah belanja,... (Mei/wwcr/250607).

Suami yang menyerahkan gaji setelah diminta dengan keras oleh istri adalah suami Gina. Menurut Gina, pada awal menikah suaminya tidak menyerahkan penghasilan dan baru menyerahkan setelah diminta istri. Gina kemudian melakukan upaya agar gaji suaminya bisa digunakan untuk keperluan keluarga, misalnya mengambil rumah yang dicicil dari gaji suami, mengambil hutang bank untuk berbagai keperluan seperti perbaikan rumah, pendidikan anak, maupun mencicil perabot rumah. Setelah upaya-upaya yang dilakukannya, akhirnya suami Gina menyerahkan gaji bulanan kepada Gina untuk keperluan keluarga. Merasa kesulitan meminta Gaji suaminya, Gina tidak pernah meminta penghasilan yang lain-lain suaminya, dan berusaha memenuhi kekurangan kebutuhan keluarga dari penghasilannya.

Proses yang lain adalah karena suami mengalami proses yang membuatnya menyerahkan penghasilan kepada istri. Proses ini terjadi pada Fifit yang mengelola penghasilan suami bukan karena kesadaran suami menyerahkan penghasilan tetapi bermula ketika anak sakit dan Fifit meminta biaya rumah sakit dari suaminya, karena penghasilannya sendiri sudah habis untuk biaya hidup mereka sekeluarga. Karena tidak siap dengan kondisi tersebut suaminya kaget, dan menyerahkan sebagian penghasilan yang masih ada padanya. Setelah kejadian

tersebut, suami Fifit kemudian menyerahkan gajinya setiap bulan di luar tunjangan jabatan dan penghasilan lain.

4.4.2.2.3 Negosiasi Istri pada Suami menyerahkan sebagian gaji, dan tidak menyerahkan penghasilan-penghasilan lain untuk dikelola istri

Negosiasi kelompok ini terjadi sejak awal perkawinan, karena suami hanya menyerahkan sebagian gaji suami dan kebutuhan keluarga lebih banyak dipenuhi dari penghasilan istri daripada penghasilan suami. Informan Nana mengatakan penghasilan suami yang diserahkan kepadanya hanya cukup membiayai bulanan anak yang kuliah di kota lain, sehingga ia mempergunakan penghasilannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga. Nana pernah mengajukan kepada suaminya agar bisa mengelola penghasilan suaminya secara keseluruhan, atau paling tidak mengelola gaji bulanan secara penuh. Namun dengan berbagai alasan seperti biaya sekolah, biaya rumah dan biaya lain-lainnya, suami tidak memberikan gaji secara penuh. Hal yang sama dilakukan oleh Kurnia, bedanya suami Kurnia menggunakan sebagian uangnya untuk biaya pedidikannya dan membeli tanah. Kurnia pernah meminta sisa gaji yang ada pada suaminya, namun suaminya menolak dan menanyakan untuk apa, karena ia menganggap penghasilan Kurnia cukup besar dan berlebihan.

4.4.2.2.4 Negosiasi Istri Pada Suami yang Sama Sekali tidak Menyerahkan Penghasilan Kepada Istri, tetapi Membiayai Kebutuhan Hidup Keluarga yang Bersifat Pokok dan Rutin

Rosa dan Popi berbagi tugas dengan suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga. Suami membelanjakan sendiri penghasilannya untuk keperluan konsumsi dan keperluan lain yang bersifat pokok setiap bulannya, sedangkan istri membiayai dan mengolah pengadaan lauk pauk setiap hari. Rosa berbagi belanja kebutuhan pokok dengan suaminya sejak awal pernikahan. Proses berbagi belanja

itu sendiri dimulai dengan proses pemenuhan kebutuhan pokok seperti konsumsi dan berbagai keperluan keluarga yang lain menjadi tanggung jawab Rosa, sedangkan penghasilan suami sepenuhnya digunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah. Setelah jumlah anak bertambah dan biaya kebutuhan hidup keluarga terutama konsumsi mulai meningkat, Rosa kemudian meminta suami menyerahkan penghasilannya. Suami Rosa kemudian hanya menyerahkan gaji pokok yang tidak cukup memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Sejak menyerahkan gajinya, suami Rosa bersikap seolah tidak mau tahu mengenai kekurangan biaya kebutuhan keluarga. Melihat tanggung jawab ekonomi keluarga secara keseluruhan diserahkan kepada dirinya, ketika suaminya kembali dari pendidikan, Rosa kemudian kembali menyerahkan penghasilan suaminya dan menegaskan agar suaminya ikut terlibat membiayai kebutuhan keluarga secara keseluruhan. Rosa kemudian berbagi belanja dengan meminta suaminya membiayai kebutuhan pokok yang bersifat bulanan, membiayai pendidikan anak serta berbagai keperluan lainnya. Sedangkan Rosa menggunakan penghasilannya untuk menyediakan lauk pauk setiap hari, membiayai jajan dan pendidikan anak.

Informan Popi melakukan pengelolaan terhadap penghasilan suami-istri secara terpisah sejak awal pernikahan. Popi dan suaminya menganggap gaji dan penghasilan adalah hak masing-masing individu dan mereka kemudian melakukan pembagian belanja keperluan keluarga. Popi dan suaminya membagi belanja berdasarkan tugas dan kegiatan yang dilakukan sehari-hari Popi menggunakan penghasilannya pada kebutuhan keluarga yang berhubungan dengan kegiatannya sehari-hari. Seperti biaya konsumsi bahan pokok dan lauk pauk sehari-hari. Penghasilan suaminya, dikelola langsung oleh suami untuk biaya pembangunan

rumah dan membeli perabot rumah. Biaya kebutuhan rutin setiap bulan berupa biaya jasa listrik, air bersih, dan biaya transportasi keluarga. Popi dan suaminya bersama-sama membiayai pendidikan anak secara rutin dan menyediakan tabungan bagi pendidikan anak-anaknya.

4.4.2.2.5 Negosiasi Istri pada Suami yang Sama Sekali Tidak Menyerahkan Penghasilannya Kepada Istri dan Tidak Terlibat dalam Membiayai Kebutuhan Pokok Keluarga yang Bersifat Rutin

Marni tidak pernah melakukan upaya negosiasi dengan suaminya, ia menerima pesan suaminya untuk mengelola penghasilannya bagi keperluan rutin keluarga. Suaminya mengisyaratkan keperluan rutin keluarga seperti pemenuhan konsumsi sebagai kewajiban Marni. Marni cenderung membenarkan dan menerima proses penggunaan penghasilan suami-istri dengan cara di atas. Marni harus memastikan sendiri pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga yang bersifat rutin dan utama. Meskipun untuk itu ia harus melakukan berbagai upaya, seperti penggunaan jasa simpan pinjam, membuka usaha katering sebagai tambahan penghasilan keluarga, sampai kepada menekan pertumbuhan jumlah anggota keluarga.

4.4.3 Implikasi Pengelolaan dan Penggunaan Penghasilan Suami-istri Terhadap Perempuan

Pengelolaan dan Penggunaan penghasilan suami yang diikuti oleh proses penggunaan penghasilan istri bagi kebutuhan keluarga, berdasarkan pengalaman para informan memberikan gambaran bahwa relasi perempuan dan laki-laki dari pasangan suami-istri PNS masih belum setara. Perempuan dikondisikan dalam situasi untuk menerima dan menyesuaikan diri, sehingga apa yang terjadi dalam

proses pengelolaan penghasilan suami-istri tampak sebagai suatu keseimbangan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pemaknaan perempuan dan laki-laki terhadap penghasilan suami-istri sangat dipengaruhi konstruksi budaya terhadap cara pengelolaan, pemanfaatan, maupun siapa yang berhak mengelola dan berapa besar akses masing-masing terhadap penghasilannya. Selain konstruksi budaya, ternyata ada unsur kekuasaan dan kemampuan perempuan dalam bernegosiasi dengan suami dalam menggunakan penghasilan suami-istri.

Kondisi relasi suami-istri dalam proses penggunaan penghasilan suami-istri untuk keluarga yang mengharuskan perempuan melakukan penyesuaian-penyesuaian, ternyata memberikan implikasi dalam berbagai bentuk. Implikasi tersebut dapat berupa status quo kemapanan gender laki-laki yang melahirkan kekerasan terhadap perempuan, dan eksploitasi hasil kerja perempuan.

4.4.3.1. Status Quo Kemapanan Gender Laki-laki yang Melahirkan Kekerasan Psikologis terhadap Perempuan

Pencitraan lelaki sebagai sosok pemimpin atau kepala keluarga memang masih dibius oleh acuan akar budaya paternalistis-maskulinistis yang berisi hierarkis dalam nuansa hubungan lelaki-perempuan sebagai pemimpin dan yang dipimpin, menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Data empiris yang belum dipublikasi menyebutkan masih banyak laki-laki yang belum siap menikah dengan perempuan yang berpenghasilan lebih besar, karena tidak siap menghadapi berubahnya kemapanan gender laki-laki yang dikonstruksi oleh budaya selama ini.

Ketidaksiapan laki-laki untuk berbagi peran secara adil dengan istri yang bekerja atau berekonomi mapan terlihat dari sikap dan perilaku yang diperlihatkan oleh suami Kurnia terhadap pasangannya. Suami Kurnia mempunyai kecenderungan untuk membatasi ruang gerak istri dengan aturan-aturan sepihak yang dibuatnya sebagai bentuk manifestasi kekuasaan kepada istri. Mengucapkan kata-kata yang merendahkan dan memberikan ancaman ketika sedang berdua atau di depan orang banyak jika istri berani melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh suami. Seperti yang terungkap melalui wawancara dengan informan Kurnia berikut ini,

“..Saya tidak berani, karena ia menekan saya dengan sikapnya. Misalnya ketika pacaran ia pernah mengancam akan meninggalkan saya jika saya masih melakukan aktivitas senam dan berteman dengan orang yang tidak disukainya. Dia memang belum pernah memukul, tetapi ancaman akan memukul jika saya melanggar larangannya, atau ancaman akan meninggalkan sering dilakukannya.Saya selalu dilarang untuk kegiatan monitoring atau kegiatan lainnya yang meninggalkan rumah lebih dari sehari, padahal saya tidak melarang ia pergi kegiatan yang sama. Saya selalu di antar dan di jemput suami kalau ingin pergi dan pulang dari kantor, saya masuk kerja jam tujuh, pulang makan siang jam dua belas dan masuk lagi jam satu kemudian keluar jam tiga soresaya merasa suami berbuat demikian karena ia tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga secara penuh, jadinya pelariannya kepada saya, biar kelihatan tidak diremehkan barangkali, karena kalau saya perhatikan ia seringkali melakukan hal ini di depan teman-teman yang suka meledek saya, bahwa saya menikah dengan membeli suami,... mereka tahu kalau semua fasilitas yang digunakan suami adalah dari penghasilan saya sebelum menikah”.
(Kurnia/wwcr/030707).

Dari ungkapan di atas juga terlihat bagaimana laki-laki sebenarnya tidak siap menghadapi perubahan situasi yang dianggap tidak biasa oleh masyarakat. Budaya masyarakat yang menempatkan lelaki sebagai pencari nafkah keluarga dan selalu dilayani oleh istri, secara psikologis memberikan kenyamanan kepada

laki-laki. Namun ketika istri membawa penghasilan lebih besar, sedangkan ia sendiri tidak berdaya membiayai kebutuhan keluarga, atau tidak mau memberikan seluruh penghasilannya kepada istri, kemudian memunculkan berbagai tanggapan lingkungan yang umumnya menganggap hal tersebut tidak wajar, maka laki-laki akan merasa terganggu.

Kasus suami yang Kurnia menikmati fasilitas penghasilan istri dan sudah tahu kalau Kurnia akan membawa penghasilan lebih besar kedalaman pernikahan mereka merupakan salah satu contoh ketidaksiapan laki-laki. Ketika lingkungan sekitarnya mulai berbicara tentang penghasilan dan kekayaan istri yang dinikmatinya, suami Kurnia merasa terganggu kenyamanan dan egonya. Ia kemudian berusaha menutupi ketidakmampuannya dan menunjukkan kekuasaannya dengan menekan dan membatasi ruang gerak istrinya, mengancam dan meremehkan dihadapan orang lain. Tindakan suami Kurnia bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, karena menggunakan sikap yang membatasi ruang gerak perempuan dalam beraktivitas dengan aturan-aturan yang dibuat secara sepihak oleh suami, merendahkan dan meremehkan istri dihadapan orang yang dikenal ataupun orang lain, kemudian menggunakan ancaman kekerasan jika perempuan melakukan pelanggaran terhadap aturan main yang dibuatnya secara sepihak.

Sikap yang diperlihatkan suami Kurnia merupakan salah satu upaya laki-laki mempertahankan *status quo* kemapanan gender yang memberikan keuntungan fisik dan psikis kepada laki-laki. Menyimak pendapat Kaufman (1999) dalam (Subono, 2007), kekuasaan yang diperlihatkan oleh suami Kurnia

merupakan bentuk rasa tidak percaya diri laki-laki dan kekhawatiran kehilangan kekuasaan sebagai laki-laki dan ketakutan tidak dipatuhi lagi.

4.4.3.2 Eksploitasi Ekonomi terhadap Perempuan

Motif ekonomi yang tersembunyi dalam tujuan pernikahan dan pemaknaan peran laki-laki pencari nafkah keluarga, dan perempuan pengelola rumah tangga melahirkan pemaksaan penggunaan penghasilan istri pada keperluan keluarga. Pengelolaan dan penggunaan penghasilan yang cenderung diserahkan kepada perempuan akan membawa beban ekonomi dan bersifat mengeksploitasi penghasilan perempuan. Pengelolaan penghasilan suami yang tidak penuh, dan tidak adanya komunikasi suami-istri mengenai keuangan keluarga memperlihatkan sikap kurang bertanggungjawab suami terhadap kebutuhan keluarga. Wawancara berikut ini merupakan penuturan bagaimana penyerahan penyelesaian kerja rumah tangga dan penyerahan penghasilan suami yang tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga, mengakibatkan tekanan dan eksploitasi terhadap perempuan.

”Jika saya memikirkan bahwa membina rumah tangga ini kewajiban berdua, dan membicarakan keuangan keluarga adalah seharusnya dilakukan bersama juga, mungkin sudah lama saya mengungkapkan siapa yang bekerja penuh untuk menghidupi rumah ini, yang membesarkan anak-anak, siapa yang membuat agar belanja cukup sampai di akhir bulan dan masih tersisa uang.... sudah terpakai semua yang ada pada kita, tapi suami merasa cukup memberikan gaji sebulan... biar kita habis-habisan untuk keluarga, suami santai dan tidak kepikiran kalau bulan depan anak yang kuliah harus bayar uang semesteran. Coba di dengar...mana ada anak ibu yang jadi sarjana, adanya anak bapak. Tapi biar saya merasa dimanfaatkan suami, saya mencoba rela dengan apa yang sudah saya perbuat.”(Fifit/wwcr/150607)

“....suami memang tidak menyerahkan penghasilan kepada saya, dia kelola sendiri, kemudian saya diberi sedikit buat lauk pauk, itu tidak

cukup dua minggu dan saya mencukupkan dari gaji saya, terus suami bilang kamu harus kerja, makanya saya beniat benar untuk lulus tes PNS, pas lulus waktu tahun 1998, terus suami bilang... kamu bisa gunakan gajimu untuk kebutuhanmu,kalau dipikir-pikir, mungkin yang dimaksud suami kebutuhan saya adalah kebutuhan biaya keluarga kali ya, soalnya selama ini suami memberikan belanja untuk lauk pauk keluarga, setelah saya lulus PNS suami tidak memberikan belanja lauk kepada saya, dan saya memenuhinya dari penghasilan saya, apalagi sekarang saya buka katering ". (Marni/wwcr2/271207).

4.4.4. Strategi Perempuan dalam Mengatasi Kebutuhan Ekonomi Keluarga di Luar Upaya Memengaruhi Suami

Strategi perempuan dalam mengatasi ekonomi rumah tangga dapat dikatakan sebagai bentuk penyesuaian perempuan terhadap beban ekonomi rumah tangga, bukan sebagai perbaikan posisi tawar atau kedudukan perempuan dalam keluarga. Penuturan para informan mengenai pengalaman mereka dalam mengelola ekonomi keluarga dan menggunakan penghasilan suami-istri, menunjukkan penghasilan perempuan dari pasangan bekerja formal tidak selalu memperbaiki posisi dan kedudukan perempuan dalam keluarga. Besarnya tuntutan dan beban ekonomi yang dialami istri ketika memenuhi kebutuhan keluarga terlihat dari cara perempuan menyikapi kondisi keuangan keluarganya. Saya kemudian mengartikan kondisi perempuan dalam menyikapi dan bertindak terhadap persoalan ekonomi rumah tangganya, sebagai permasalahan yang menunjukkan perempuan dalam posisi tidak menguntungkan. Adapun sikap atau tindakan yang diambil perempuan terhadap tekanan ekonomi keluarganya adalah:

4.4.4.1. Menekan atau meniadakan pengeluaran untuk diri sendiri

Hampir semua informan mengungkapkan pemenuhan kebutuhan dirinya berada di urutan terakhir dari semua kebutuhan keluarga. Ketika diminta membuat

daftar kebutuhan keluarganya, perempuan menempatkan kebutuhannya akan pakaian dan kosmetika diurutan terakhir. Sedangkan kebutuhan anak seperti biaya konsumsi keluarga, susu dan pendidikan anak menempati urutan pertama, menyusul berbagai biaya kebutuhan lain seperti listrik, air bersih dan telepon. Berikut ungkapan Fifit dan Nana yang memperlihatkan bagaimana perempuan memomorduakan atau meniadakan kebutuhan pribadinya, sebelum kebutuhan keluarga terpenuhi.

“...yang pasti buat anak dulu, kebutuhan pokok dulu, kalau untuk kita (cat.kebutuhan sendiri) jarang dari gaji bulanan, biasa gaji saya habis sebelum akhir bulan, jadi tidak kepikir buat beli baju baru kalau gajian, urusan rumah dulu”. (Fifit/wwcr/150607)

“...saya yang penting anak-anak dulu, kalau yang di Pontianak sudah terkirim, terus buat bulanan di rumah cukup, tidak beli baju setahun juga tidak apa-apa”. (Nana/wwcr/230607)

Pada beberapa informan yang bisa menggunakan penghasilan untuk kebutuhan dirinya, biasanya menyisihkan penghasilannya atau telah merencanakan terlebih dahulu apa yang dibutuhkannya sebelum ia memergunakannya untuk keperluan keluarga. Berikut wawancara Gina yang mengutarakan bagaimana ia bisa menyisihkan gajinya agar bisa kuliah sampai S1 kemudian membeli komputer untuk memudahkannya menyelesaikan pekerjaan kantor yang dibawa pulang.

“biasa habis bulan habis gaji, jangankan buat beli-beli baju, tiap bulan saya selalu nombokin belanja pakai uang kantor yang saya kelola. Makanya biar bisa sekolah, saya selalu menyimpan dulu sedikit gaji saya buat biaya kuliah, kalau gak bisa saya pinjam uang kantor dulu, saya cicil bayarnya tiap bulan, gitu deh sampai selesai sekolahnya. Terus untuk beli komputer buat mudah kerja, saya ngutang dulu, terus dicicil tiap bulan, kalau ndak mana bisa saya gunakan uang buat saya”. (Gina/wwcr/160607)

Wawancara di atas juga memperlihatkan kalau perempuan memandang penghasilan sebagai alat bagi kelangsungan hidup keluarganya, sehingga tidak sempat memikirkan untuk menggunakan penghasilannya bagi diri sendiri. Tekanan ekonomi membuat beberapa informan menggunakan sarana kesehatan reproduksi yang murah agar bisa memperkecil pengeluaran. Roro dan Mei meskipun mengelola gaji suaminya, mereka mempertimbangkan penggunaan kontrasepsi yang lebih murah seperti Pil dan suntikan yang dikontrol setiap bulan, ketika penghasilan masih rendah ketika penghasilan lebih meningkat barulah mereka menggunakan kontrasepsi permanen, karena sudah mampu membiayainya proses pemasangannya. Pada kasus Popi dan Gina, mereka harus menunggu beberapa waktu untuk memakai kontrasepsi permanen seperti tubektomi dan spiral karena mereka harus menabung. Kedua orang ini juga pernah menggunakan peluntur haid untuk menghentikan kehamilan anak mereka dengan pertimbangan harga lebih murah.

4.4.4.2. Mempergunakan jasa simpan pinjam

Beberapa informan yang bisa menabung sebagian penghasilannya sedangkan penghasilan suami-istri yang dikelolanya tidak memenuhi kebutuhan keluarga mempergunakan jasa koperasi untuk mendapatkan pinjaman atau berhutang barang kebutuhan pokok setiap bulannya. Hal ini dilakukan informan dalam menyiasati penghasilan suami-istri yang tidak cukup, dan bagaimana caranya agar mereka bisa memiliki cadangan keuangan dalam keluarga, serta bisa membeli barang-barang kebutuhan yang lainnya.

Proses pengelolaan keuangan yang mempergunakan jasa simpan pinjam di koperasi dan belanja dengan cara berhutang di awal bulan, kemudian dibayar di

awal bulan berikutnya, menurut mereka adalah hal biasa dan umum dilakukan oleh rekan-rekan kerja perempuan. Menurut Mei, ia penghasilannya sebenarnya habis bahkan hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga setiap bulannya, namun karena ia menggunakan jasa pinjaman koperasi, ia jadi memiliki uang cadangan setiap bulannya. Proses ini tanpa disadari oleh perempuan merupakan usaha untuk menstabilkan keuangan keluarga dan upaya untuk mempertahankan hidup keluarga dari tekanan dan tuntutan ekonomi. Berikut ini, wawancara salah satu informan yang menceritakan proses pengelolaan keuangan keluarga dengan simpan pinjam,

”.....jadi uang gaji yang ada sebagian langsung saya simpan ke Bank, sebagian saya pegang untuk pembeli bahan lauk-pauk mentah dan sayuran setiap harinya....., jadi gaji saya yang dipotong langsung setiap bulannya.....bayar bon KPN dan warung langganan....., dengan begitu saya mempunyai keuangan cadangan setiap bulannya.....”.
(Mei/wwcr/250607).

Praktis proses pengelolaan penghasilan istri seperti di atas juga mengarahkan perempuan untuk membelanjakan penghasilannya pada kebutuhan pokok keluarga yang menentukan kelangsungan hidup anggota keluarga. Karena proses pembayaran hutang atau simpanan di koperasi dilakukan dengan mencicil atau membayar dari gaji mereka. Hal ini bisa saja tidak terjadi jika suami Mei menyerahkan penghasilan lain-lainnya selain gaji bulanannya yang dikelola Mei.

4.4.4.3. Menekan pengeluaran konsumsi keluarga

Pengelolaan konsumsi keluarga setiap bulan yang dikelola oleh perempuan memberikan tanggung jawab terhadap pengaturan bahkan penyediaan biaya bagi ketersediaan konsumsi keluarga sebagai kewajiban perempuan. Ketika keuangan keluarga mengalami krisis karena penghasilan yang dikelola tidak memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan lainnya, perempuan cenderung

mengawasi dan mengontrol pengeluaran untuk konsumsi keluarga. Mereka berusaha memajemen pengeluaran dan menekannya menjadi serendah mungkin dengan cara menggunakan bahan baku yang murah dan mengolah sendiri. Proses ini kemudian menambah daftar kegiatan kerja rumah tangga yang harus diselesaikan oleh perempuan setiap harinya.

“....., yang pertama dipikirkan waktu gaji menipis adalah bagaimana caranya bisa masak dengan menggunakan sedikit uang, yang pasti masak sendiri, ke pasar sendiri, dan beli barang kualitas kurang baik atau yang berharga murah, biar dapatnya banyak, biar gaji cukup, biar gak tekor diakhir bulan.” (Fifit/wwer/150607)

“, suami mana peduli kita kurang uang, buktinya tu gaji dipegang ama dia sebagian, saya ambil inisiatif belanja banyak, murah, atau belanja mahal dikit, jadinya makannya juga gak enak, gak menarik menunya, suami mau ngomel atau apa, melihat lauk yang ada, aku yang penting anak kuliah sudah di kasih bulanan tiap bulannya.”(Nana/230607)

Menghadapi kebutuhan keluarga yang makin tinggi, perempuan menggunakan kemampuannya memajemen keuangan keluarga, dan menerapkan prinsip ekonomi bagi pengeluaran konsumsi keluarga. Perempuan terbiasa dengan kondisi dapur dan segala kebutuhan pemenuhan keluarga, sehingga sebelum semua anggota keluarga situasi keuangan keluarga, perempuan sudah lebih dahulu menyiasati dengan memperkecil biaya konsumsi keluarga. Perempuan melakukan penekanan pengeluaran konsumsi keluarga, menunjukkan jika penghasilan suami dan penghasilannya tidak bisa memenuhi keluarga. Sedangkan suami tidak pernah tahu atau tidak mau mengenai kondisi keuangan keluarga, karena suami tidak mengerti praktek harga barang di pasar bisa mengases kondisi keuangan.

4.4.4.4. Menekan pertumbuhan jumlah anggota keluarga

Penghasilan suami-istri yang tidak mencukupi dan kebutuhan hidup yang meningkat memaksa perempuan untuk bertanggung jawab terhadap ketersediaan berbagai keperluan keluarga. Bertambahnya jumlah anggota keluarga berarti beresiko meningkatnya biaya kebutuhan hidup keluarga. Hampir semua informan pernah berpikir untuk menggugurkan kandungan anak yang ke tiga atau ke empat, dan beberapa diantaranya mengakhiri kehamilan anak keempat dan kelima, sebelum kemudian mereka menggunakan kontrasepsi yang lebih permanen. beberapa informan bahkan pernah melakukannya berulang untuk menekan penambahan jumlah anggota keluarganya. Alasan mereka menggugurkan kandungan adalah kehamilan yang tidak direncanakan, anak terakhir yang masih kecil, serta tekanan ekonomi dan ketakutan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga karena penambahan anggota keluarga.

Semua informan yang menggugurkan kandungan menempuh cara yang tidak sehat dan berbahaya dengan alasan keuangan dan kondisi sosial yang tidak memungkinkan proses menggugurkan secara medis. Beberapa informan mengungkapkan mereka menggugurkan kandungan dengan cara meminum obat peluntur terlambat bulan, melakukan aktivitas fisik yang berat bahkan sampai meminum obat-obat keras. Sebagian informan memang berhasil menggugurkan kandungannya, namun sebagian lagi gagal sampai kandungannya lahir.

Pengalaman Marni yang mencoba menggugurkan kehamilan anak keempat namun gagal dan melahirkan. Kemudian menggugurkan kembali pada saat kehamilan kelima dan usia kandungan memasuki minggu keempat. Setelah itu ia memutuskan untuk menggunakan kontrasepsi spiral yang bersifat lebih permanen.

Tekanan ekonomi membuat Marni mencoba mencegah bertambahnya anggota keluarga, hal yang sama dilakukan oleh informan Fifit, Muna dan Marwah yang juga pernah menggugurkan kandungan pada kehamilan ketiga dan kedua. Informan lain seperti Popi dan Rosa juga pernah menggugurkan kandungan ketika kehamilan yang keempat. Rosa berhasil menggugurkannya, namun hamil lagi dan melahirkan, kemudian memutuskan untuk menggunakan suntikan. Sedangkan Popi gagal menggugurkan kandungan dan melahirkan anak keempat, ketika anak ke empat baru berusia enam bulan, ia pernah meminum peluntur terlambat bulan, kemudian menggunakan kontrasepsi spiral yang permanen. Alasan ekonomi dan anak yang masih kecil juga menjadi sebab mereka menggugurkan kandungan. Berikut hasil wawancara dengan Popi,

”.....saya minum obat keras dan peluntur untuk membuang kehamilan yang keempat. Sampai-sampai saya turun ke lapangan setiap minggu, agar capek dan keguguran. Tapi sampai umur kandungan empat bulan tidak ada tanda-tanda keguguran.....saya jadi susah karena anak masih kecil-kecil, gaji kecil.....bagaimana makan dan pendidikannya nanti..... waktu lahir bayinya perempuan, kecil Cuma 2,4 Kg.....”.
(Popi/wwcr/260607).

Tanggungjawab terhadap cukupnya keuangan untuk belanja keluarga kemudian yang membawa perempuan pada usaha mempertahankan jumlah anak dengan cara mencegah terjadinya kehamilan juga dilakukan Mei. Mei pernah mencoba menggugurkan kandungan pada saat kehamilan anak ketiga tetapi gagal sampai usia kandungan empat bulan. Kemudian ketika anak ketiganya masih menyusu, ia kembali terlambat haid selama tiga minggu dan berhasil menggugurkan kandungan yang keempat dengan cara meminum peluntur. Mei tidak menyadari bahwa ia menggugurkan kandungan, menurutnya ia hanya mempercepat datangnya haid yang terlambat lebih dari tiga minggu.

Muna mencegah kehamilan anak yang ketiga dengan alasan ekonomi dan gagal KB, pada waktu itu ia menggunakan kontrasepsi seperti pil. Muna melakukan penghentian kehamilan ketika usia kandungan memasuki delapan minggu. Pada waktu itu ia dan suaminya sedang kuliah, sehingga secara ekonomi dan waktu merasa tidak sanggup jika harus menghadapi kelahiran anak. Muna menghentikan kehamilannya dengan datang ke dukun di kota tempat ia dan suaminya kuliah.

Marwah juga melakukan hal yang sama pada waktu sedang mendampingi suami kuliah. Tekanan ekonomi karena penghasilan suami digunakan untuk membiayai kebutuhan keluarga dan kebutuhan suami kuliah, membuat Marwah memilih obat peluntur sebagai jalan menghentikan kehamilannya yang memasuki minggu keenam. Marwah melakukan hal ini sebanyak tiga kali, dan memutuskan kontrasepsi permanen setelah mengalami pendarahan yang cukup banyak.

BAB 5

PEMBAGIAN PERAN DALAM RUMAH TANGGA

5.1 Pemaknaan keluarga dan relasi suami-istri

5.1.1 Kepercayaan Suami Kepada Istri sebagai Mitra Berkeluarga

Memahami peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga dalam konteks kelompok informan penelitian ini, terlihat bahwa meskipun bekerja dan terlibat aktif mencari nafkah, namun konsep yang tertanam dalam setiap informan bahwa suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban mencari nafkah, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga yang mengelola kegiatan rumah tangga. Meskipun konsep ini berakar kuat dalam diri perempuan dan laki-laki, pada prakteknya dalam kehidupan sehari-hari laki-laki masih tidak siap menjalankan sepenuhnya peran pencari nafkah, dan sejak dulu perempuan terlibat dalam proses pencari nafkah keluarga.

Ketidaksiapan psikologis laki-laki menyanggah beban ekonomi rumah tangga sendiri, bisa kita lihat melalui pola-pola yang terbentuk dari proses pengelolaan dan penyerahan penghasilan yang dilakukan oleh suami kepada istri. Pola-pola ini sesungguhnya menggambarkan tidak semua laki-laki mau menyerahkan penghasilannya kepada istri secara penuh. Bahkan ada yang sama sekali tidak menyerahkan penghasilannya kepada istri, tetapi langsung mengelolanya sendiri. Jika konsep kedudukan dan kewajiban laki-laki sebagai pencari nafkah keluarga sangat kuat dalam diri suami-istri, ada apa sebenarnya dibalik ketidakrelaan laki-laki menyerahkan penghasilan kepada istri, tetapi mereka tetap menuntut kedudukan sebagai kepala keluarga yang harus dilayani,

termasuk ketidaksiapan laki-laki bertukar peran atau terlibat dalam kerja rumah tangga.

Saya melihat ada semacam ketidakpercayaan laki-laki terhadap perempuan sebagai istri yang mengelola penghasilannya. Hal ini terungkap dari wawancara terhadap beberapa informan yang hanya mengelola gaji tanpa tunjangan dan penghasilan lain-lain suaminya, ternyata pernah mengelola penghasilan suami secara penuh ketika ekonomi keluarga sedang sulit dan penghasilan tidak mencukupi. Dalam hal ini ternyata terjadi penyerahan tanggungjawab pengelolaan dan ketersediaan kebutuhan keluarga oleh laki-laki kepada perempuan, karena kemampuan perempuan memajemen keuangan yang minimal bagi kebutuhan keluarga.

Perubahan pengelolaan penghasilan terjadi ketika suami kemudian memiliki penghasilan lain-lain yang lebih besar, dan memutuskan menyimpan serta mengelola sendiri penghasilan tambahan tersebut. Menurut Roro suaminya kemudian mengakomodir pembiayaan pendidikan anak-anaknya setelah penghasilan lain-lain meningkat. Ketika ditanya apakah ia tahu alasan suami mengelola sendiri penghasilannya, Roro hanya menduga suaminya tidak ingin ia tahu berapa banyak dan darimana saja sumber uang tersebut. Namun ketika ditanya lebih lanjut, tentang kewenangannya sebagai istri untuk mengelola keuangan suami secara penuh seperti ketika keuangan keluarga masih sulit, Roro kemudian menggambarkan secara gamblang bahwa ada ketidakpercayaan suami kepadanya, mengenai sumber dan penggunaan uang tersebut. Hal ini terurai dalam wawancara berikut,

” bapaknya mungkin tidak ingin saya tahu berapa besar uang yang dia kelola, takut saya akan membicarakan uang tersebut dan bertanya asalnya darimana.” (Roro/wwcr/210607)

”....memang ada pertanyaan di hati, apalagi waktu lihat rekening bapak, saya kaget juga, kenapa bapak tidak menyerahkan uangnya kepada saya, kenapa harus membuat rekening sendiri. Padahal dululu tidak ada yang namanya sembunyi-sembunyi, semua diserahkan saya, semua saya yang mengatur. Rasanya sikap suami kepada saya tidak adil, ketika uang sedikit diserahkan saya dan saya harus mengaturnya dengan hati-hati agar tidak kekurangan, sekarang begitu uang banyak seperti tidak percaya, tapi itu hak suami, saya hanya merasa tidak enak meminta lagi karena gaji kita berdua saja sudah cukup besar, dan saya sekarang bisa menabungnya”. (Roro/wwcr2/201207)

Ketidakpercayaan suami menyerahkan penghasilannya dalam jumlah besar kepada istri, menurutku terkait dengan kedudukan sebagai kepala keluarga dan manfaat yang didapat suami ketika mengelola penghasilannya. Sebagai pemilik uang terbesar dalam keluarga, suami akan memiliki kekuasaan yang besar dan akan sangat berpengaruh terhadap kedudukan suami dalam keluarga. Hal ini karena ada kecenderungan suami memanfaatkan penghasilannya untuk menanamkan pengaruh kepada anak-anak tentang siapa pencari nafkah dan pemilik kekuasaan dalam keluarga. Berikut kutipan wawancaranya,

“...dua tahun terakhir ini saya malah tidak mengurus biaya bulanan dan biaya pendidikan anak kuliah, tinggal satu orang yang kuliah apalagi bapaknya punya penghasilan lebih besar sekarang, kalau dulu uang lagi susah, saya yang mengatur biaya pendidikan anak-anak, sekarang anak-anak minta sama bapaknya...”.(Nina/wwcr2/261207).

“...saya percaya saja sama bapak, uangnya tidak akan digunakan yang bukan-bukan, Cuma itu....sejak penghasilan bapak meningkat dan bapak mengelola langsung biaya pendidikan anak, saya merasa anak jadi lebih dekat bapaknya.....mungkin kalau minta uang dengan bapak tidak ditanya-tanya langsung dikasih, kalau sama saya pasti ditanya lagi buat apa, saya kan banyak yang mau dibeli.”(Roro/wwcr2/201207)

Wawancara Roro dan Nina di atas mengutarakan kalau suaminya kemudian mengambil alih pengelolaan pembiayaan pendidikan dan uang jajan anak yang sudah besar ketika penghasilannya meningkat, informan mengungkapkan anak menjadi lebih dekat kepada suaminya. Ungkapan ini memperlihatkan ada perempuan yang merasa tidak nyaman dengan proses pergeseran pembagian peran pengasuhan anak yang diambil alih oleh suami. Akan tetapi jika kita lihat pengambilalihan peran pengasuhan anak yang terjadi ketika anak menjelang remaja dan dewasa, maka kita bisa melihat sebenarnya disini ada upaya penanaman pengaruh atau sosialisasi sebagai kepala keluarga dan peran pencari nafkah oleh suami kepada anak-anak.

Proses sosialisasi sering diperkuat oleh pembenaran lingkungan melalui konsep ideal sebuah keluarga. Keluarga ideal dengan struktur yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga, perempuan sebagai ibu rumah tangga, dengan anak-anak di dalamnya, merupakan struktur patriarki yang cukup kuat untuk menempatkan perempuan dalam proses pembagian kerja rumah tangga sebagai pelaksana. Struktur keluarga yang memberikan kenyamanan dan kekuasaan laki-laki dalam struktur sosial masyarakat, menimbulkan ketakutan laki-laki akan kehilangan kekuasaannya ketika menyerahkan penghasilannya ataupun ketika melibatkan dirinya dalam kerja rumah tangga.

Kembali kepada peran perempuan dalam mengelola penghasilan keluarga dan posisi tawarnya dalam keluarga, ternyata sangat dipengaruhi oleh kemampuan perempuan untuk bersuara atau bertanya kenapa proses pengelolaan penghasilan suaminya berubah. Seperti kasus Roro dan Nina yang merasa tidak enak untuk bertanya mengenai kenapa suami tidak mau menyerahkan penghasilannya yang

lebih besar, ternyata informan merasa tidak nyaman karena sudah mengelola gaji suami. Berikut wawacaranya,

“....engga ngomong-ngomong, suami kemudian menyimpan uangnya sendiri, kecuali gaji setiap bulan saya ambil dari bendahara gajinya. Kemudian belanja barang-barang mahal, memberi uang saku anak, saya tanya kenapa begitu, kenapa uangnya tidak disimpan ke saya,....jawabnya ‘macam gini saja diribut, uang saya dan mau saya’,.....sudah dapat jawaban itu saya tidak enak juga, gaji dia satu bulan penuh saya kelola, saya mau minta apalagi, harusnya syukur.”(Nina/wwcr2/280607)

Berangkat dari pernyataan Nina mengenai jawaban suami dan perasaan tidak nyaman karena telah mengelola penghasilan suami, seharusnya perempuan bisa melihat manfaat yang didapat dalam hubungan suami-istri ketika penghasilan suami digunakan. Selain itu, perempuan juga harus melihat kemana saja ia memanfaatkan penghasilannya, serta berapa banyak penghasilan suami-istri yang ia gunakan untuk kepentingan dirinya. Kemudian dibutuhkan keterbukaan laki-laki terhadap perempuan mengenai jumlah penghasilannya, dalam hal ini kita menawarkan sebuah kemitraan atau kerjasama antara suami-istri dalam pengelolaan penghasilan.

5.1.2 Status Sosial Perempuan dalam Pengelolaan Penghasilan

Pilihan bahwa laki-laki menikah dengan perempuan karena perempuan bekerja dan memiliki penghasilan dan latar belakang pendidikan serta status sosial keluarga yang baik sering diungkapkan responden dalam beberapa wawancara. Menyadari bahwa pernikahannya didasari status sosial, maka perempuan kemudian mempergunakan penghasilannya untuk kebutuhan diri yang mengarah kepada upaya untuk mempertahankan perkawinannya. Perempuan mempergunakan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat

menunjang penampilan baik di depan suami ataupun untuk menjaga status sosial suami, seperti diungkap oleh Fina dalam kutipan wawancara berikut ini,

”.....saya selalu sisihkan penghasilan untuk memperhatikan penampilan saya. Maklumlah perempuan harus melihat hal ini sebagai bagian yang tidak bisa dilengahkan kalau tidak ingin suaminya pergi. Saya tidak mau menuntut dan menggantungkan keperluan saya untuk pakaian pada penghasilan suami. Saya ingin suami melihat saya dengan apa yang saya miliki dari luar dan dari dalam diri saya. Karena sebenarnya saya tidak bisa menutup mata dari kenyataan suami memilih menikah dengan saya karena saya PNS yang memiliki penghasilan, karena saya memiliki latar belakang sosial yang baik, serta pendidikan yang cukup baik (Fina/wwcr/240607).

Nana bahkan menjelaskan kalau perkembangan karir suami mengikuti popularitas jabatannya, karena ia menduduki jabatan strategis. Bahkan kemudian suaminya leluasa mempergunakan namanya untuk berbagai keperluan yang mempermudah usahanya menjalankan pekerjaan di luar kantor. Suaminya kemudian juga mempergunakan sebagian besar penghasilannya untuk meningkatkan pendidikan sampai jenjang D3, sehingga mengurangi gaji yang diberikan kepada Nana, bahkan beberapa kali tidak memberikan gajinya sehingga Nana membiayai sendiri kebutuhan hidup keluarga. Selain pengurangan uang yang diberikan, ternyata suami Nana memanfaatkan kondisi sosial Nana sebagai jalan untuk tidak memberikan seluruh penghasilannya, dan menekan Nana dengan membuat posisi Nana menjadi lebih rendah. Berikut ini kutipan wawancara dengan Nana,

“.....dulu awal menikah suami baru saja beberapa bulan kerjanya, sedangkan saya meskipun baru, tetapi sudah menduduki jabatan karena saya sarjana... suami kemudian kuliah dengan menggunakan rekomendasi dari saya, bahkan kemudian mempergunakan penghasilannya penuh untuk biaya kuliah. Saya diam saja, jarang

protes, karena waktu itu kebutuhan hidup tidak seperti sekarang juga karena suami sering bilang, kalau bukan karena saya pegawai, kalau bukan karena pendidikan dan status sosial saya yang bekerja, dia tidak mudah untuk menikah dengan saya, alasan sosial dan pernikahan inilah kemudian menjadi alasan suami mempertahankan sebagian penghasilannya.” (Nana/wwcr2/010208)

Kasus lain adalah Marni, sebagai informan yang tidak menerima penghasilan suaminya, menjaga hubungan suami-istri dengan membiayai kebutuhan ekonomi keluarganya. Marni selalu merasa segan untuk meminta uang kepada suaminya karena rasa tidak nyaman dan beranggapan bahwa pekerjaan menyediakan konsumsi keluarga merupakan kewajibannya. Sedangkan informan Mei merasa tidak nyaman mempersolakan masalah uang belanja sehingga berusaha mengatasi masalahnya sendiri. Berikut wawancaranya,

“.....saya merasa kewajiban saya menyediakan makan minum, terus sudah dibilang suami agar saya memenuhi keperluan dengan gaji saya, jadi rasanya tidak nyaman saja meminta gaji suami”. (Marni/wwcr/050707).

“.....saya merasa tidak enak meminta uang tambahan ke suami, soalnya gajinya sudah saya habiskan,.....jadinya apa-apa kurang saya atasi sendiri, kalau ada yang susah saya usahakan kerja sendiri, rasanya kurang baik saja ribut masalah belanja”. (Mei/wwcr/250607).

Wawancara Mei dan Marni di atas juga memperlihatkan bagaimana konstruksi sosial yang menempatkan pengelolaan konsumsi keluarga sebagai kewajiban perempuan, membuat perempuan bungkam dan takut bersuara dalam persoalan ekonomi keluarga yang dihadapinya. Adanya anggapan bahwa persoalan ekonomi keluarga merupakan persoalan dan rahasia pribadi suami-istri. Ketidakmampuan perempuan menjaga rahasia ekonomi keluarga dan mengatasi persoalan ekonomi keluarganya akan menempatkan perempuan sebagai perempuan yang kurang baik. Oleh karena itu, perempuan memandang

penggunaan penghasilannya sebagai sebuah cara untuk diterima di dalam keluarga dan masyarakat.

Situasi perempuan yang dikondisikan oleh budaya seperti terurai di atas membawa perempuan dalam relasi kuasa yang cenderung kurang menguntungkan bagi perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan dikondisikan untuk menerima sikap dan hubungan yang ditawarkan pasangannya, terutama jika dilihat dari proses pengelolaan penghasilan suami. Disamping itu, perempuan sebagai istri juga dikondisikan untuk menggunakan penghasilannya yang mendukung stabilnya struktur keluarga, atau terbentuknya keluarga ideal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kita memerlukan pembedahan pembagian kerja dari pola-pola pengelolaan penghasilan suami.

5.2 Pembagian Kerja Suami-Istri

Hasil penelitian (tabel 18) memperlihatkan kalau penyelesaian seluruh/ragam pekerjaan reproduktif dalam 16 keluarga informan hampir semua pekerjaan rumah tangga yang bersifat rutin setiap hari diselesaikan oleh istri. Bahkan pada beberapa keluarga informan, suami tidak terlibat sama sekali dalam penyelesaian kerja rumah tangga baik rutin maupun tidak rutin. Hal yang sama juga terjadi pada penyelesaian pekerjaan rutin mingguan atau bulanan. Secara umum informan menggambarkan suami hanya terlibat dalam beberapa kegiatan yang bersifat tidak rutin seperti pergi belanja kebutuhan pokok keluarga setiap bulan. Pada beberapa informan keterlibatan suami dalam kegiatan belanja sembako dan lauk pauk dilakukan karena menemani istri. Kegiatan rumah tangga rutin yang cukup banyak melibatkan suami adalah proses pengasuhan anak, seperti mengantar dan menjemput anak ke sekolah atau ke penitipan anak setiap

hari, sesekali mengajak anak bermain atau mengajarkan anak belajar. Meskipun demikian, keterlibatan suami dalam pengasuhan anak tidak sepenuhnya dilakukan suami, karena pada sebagian informan suami mengerjakan tugas pengasuhan secara bersama-sama atau hanya sekadar membantu istrinya. Sebagian informan menyatakan suami mengerjakan kegiatan yang bersifat rutin bulanan seperti melunasi biaya jasa listrik, telepon, dan air bersih, dan semua suami terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang bersifat sekali-sekali. Suami juga terlibat dalam kegiatan rekreasi keluarga, dan mengajak anak laki-laki yang sudah remaja terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Tabel 18. Rekapitulasi pembagian kerja suami-istri berdasarkan pelaksanaan oleh suami/istri

No	Jenis Pekerjaan Rumah Tangga	Keterlibatan Rutin(orang)		Keterlibatan tidak rutin (orang)		Ket
		S	I	S	I	
	Rutin tiap hari					
1	Memasak :					
	Menyediakan sarapan		16			*makan diluar,
	Makan siang		16	3*		pembantu
	Makan malam		16			
2	Mencuci piring		16			
3	Mencuci pakaian		16			
4	Menyetrika		14	2		
5	Membersihkan rumah		14	2		
6	Belanja ke pasar		16	3		
7	Membantu anak belajar		13	3	1*	*membantu
8	Mengasuh anak		16	10*		*membantu
	Rutin per bulan					
8	Belanja sembako		14	2		
9	Pergi membayar listrik		9	7		
10	Pergi membayar jasa air bersih		9	7		

5.2.1. Pembagian kerja suami-istri dalam keluarga dengan suami menyerahkan seluruh penghasilannya untuk dikelola istri.

Sama seperti tampilan kelompok informan secara umum, dalam kelompok ini pekerjaan rumah tangga hampir semuanya dilakukan oleh istri. Suami terlibat

hanya pada beberapa bagian dari pekerjaan yang bersifat rutin setiap harinya, kemudian pada beberapa kegiatan yang terjadwal per minggu atau setiap bulan. Dengan demikian, jam kerja perempuan masih lebih banyak dibanding laki-laki.

Informan Fina menggambarkan suami terlibat dalam penyelesaian rumah tangga yang dilakukan bersama-sama dengan istri seperti mengantar dan menjemput anak ke penitipan anak ketika mereka bekerja, membantu istri ketika belanja sembako dan lauk pauk. Pergi membayar biaya jasa seperti rekening telepon, listrik, dan air. Meskipun suami terlibat cukup banyak, jika dibandingkan dengan jam kerja istri dalam rumah tangga, keterlibatan suami Fina hanya seperlima dari seratus persen jam kerja Fina.

Pada keluarga Susi, kerja rumah tangga lebih banyak dilakukan dengan jasa pembantu. Suami dan istri sama-sama terlibat dalam kerja pengasuhan anak, kecuali ketika suami bekerja di luar kota dan pada waktu suami mengambil S2, pengasuhan anak dilakukan oleh istri secara penuh.

Pada keluarga Uci, kerja rumah tangga dilakukan oleh Uci secara penuh dengan bantuan pegawai yang bekerja dalam usaha keluarga. Dapat dikatakan suami Uci tidak terlibat sama sekali dalam semua kerja rumah tangga. Bahkan dengan jelas suami Uci mengungkapkan jika dalam keluarganya laki-laki mendapat pelayanan dari istri atau perempuan di dalam rumah. Di awal perkawinannya, Uci pernah merasa terganggu dengan kebiasaan suami yang minta disediakan dan dilayani saat makan.

Informan Muna menggambarkan suaminya terlibat hanya dalam pengasuhan dan pendidikan anak ketika balita dan SD seperti mengajar anak membaca dan menulis, dan belajar pendidikan agama. Setelah anak berusia SD

menjelang remaja, pendidikan anak banyak dilakukan oleh istri, karena anak lebih banyak bersama istri pada waktu suami Muna mengikuti pendidikan S-1 di kota lain.

5.2.2. Pembagian kerja suami-istri pada keluarga dengan suami yang menyerahkan seluruh gaji tetapi tidak menyerahkan penghasilan lain untuk dikelola istri

Pada kelompok ini, pembagian kerja juga memperlihatkan bagaimana jam kerja istri dalam kerja rumah tangga rata-rata lebih besar dibanding jam kerja suami. Hampir semua suami informan tidak terlibat dalam kegiatan rumah tangga di dalam rumah, kecuali beberapa kegiatan rumah tangga yang menyangkut pembayaran jasa seperti rekening listrik, koran, rekening air, dan telepon. Sebagian Informan kelompok ini bahkan menggambarkan suaminya saat ini ada yang tidak terlibat sama sekali dalam pekerjaan rumah tangga.

Wawancara terhadap informan Roro, Nina, Marwah dan Fifit, menggambarkan tidak adanya keterlibatan suami dalam kerja rumah tangga. Pada informan Nina, suaminya pernah terlibat dalam pengasuhan anak pertama ketika masih bayi, karena suaminya tidak terlalu sibuk dalam pekerjaan kantor. Setelah anak kedua sampai sekarang, suami Nina tidak pernah terlibat dalam kegiatan rumah tangga. Sedangkan suami informan Roro, Marwah dan Fifit, sejak awal pernikahan sampai sekarang tidak pernah terlibat dalam penyelesaian kegiatan rumah tangga. Iis, Gina, dan Mei merupakan keluarga yang memperlihatkan keterlibatan suami dalam kerja rumah tangga, namun terbatas pada kerja yang dilakukan di luar rumah dan terjadwal sebulan sekali seperti pembayaran biaya jasa rekening listrik dan rekening air bersih setiap bulannya. Kelompok ini

menunjukkan jika keterlibatan suami dalam kerja rumah tangga karena suami masih mengelola penghasilan-penghasilannya yang lain dan biasanya cukup besar.

Informan Marwah dan Fifit, mengungkapkan suami tidak pernah terlibat dalam penyelesaian kegiatan rumah tangga. Suami Fifit bahkan sama sekali tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap keluarga. Misalnya membiarkan Fifit mengerjakan beberapa pekerjaan yang biasa dikerjakan laki-laki seperti naik ke atas atap untuk mengganti beberapa bagian atap yang rusak. Menyerahkan tanggung jawab pendidikan anak baik itu biaya maupun proses pendidikan sebagai tanggung jawab istri. Kalau keluarga Marwah, memperlihatkan bagaimana suami tidak mau terlibat dalam berbagai kerja rumah tangga, termasuk membantu kegiatan pendidikan anak. Suami Marwah, di awal pernikahan pernah bersikap selalu ingin dilayani makan dan minumannya. Setelah pernikahan berjalan beberapa tahun, Marwah menggunakan kerja di kantor atau pekerjaan rumah yang lain sebagai alasan untuk tidak menemani suami makan. Sikap Marwah kemudian dapat dimengerti oleh suami, sehingga tidak mengharuskan Marwah untuk selalu duduk di dekatnya menemani makan.

Dalam keluarga Nina dan Roro, sejak awal perkawinan tanggung jawab penyelesaian pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak menjadi kewajiban istri. Suami tetap meminta dan mengingatkan istri menjalankan kewajibannya sebagai istri yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga. Seperti sikap suami yang mengingatkan istri akan kewajibannya berbelanja ketika sudah beberapa hari tidak pergi ke pasar, atau menyiapkan makanan sekadarnya. Suami selalu pulang untuk makan di rumah, tetapi tidak pernah terlibat dalam proses penyediaan makanan. Dalam proses pengasuhan anak, suami Roro dan Nina

cenderung menyerahkan pengasuhan anak seperti tanggungjawab pendidikan kepada istri. Misalnya, menyerahkan kegiatan mengontrol dan membantu anak belajar kepada istri. Kemudian kalau ada masalah yang berkaitan dengan perilaku anak atau anak gagal dalam pendidikannya, suami cenderung menyalahkan istri.

Suami Gina menolak pekerjaan rumah tangga dengan cara tidak mau terlibat atau tidak mau mengerti cara mengerjakannya. Proses sosialisasi di dalam keluarganya yang menempatkan laki-laki di hormati dan tidak terlibat dalam kerja rumah tangga, memberikan kesan bahwa suami Gina menganggap pekerjaan rumah tangga lebih rendah dari pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan laki-laki. Jika suami Gina menolak kerja rumah tangga dengan tidak mau terlibat atau pura-pura tidak mengerti, maka suami Mei dan Iis sering mempergunakan bantuan keluarganya untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang tidak terselesaikan oleh istri. Suami Iis misalnya, sering mengajak anak-anak makan di rumah orangtuanya jika istri sedang bertugas di luar kota lebih dari sehari. Suami Mei, meminta bantuan orangtuanya untuk mengasuh anak atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan Mei karena ditinggalkan dinas di luar kota. Karena Sikap suaminya, Iis dan Mei merasa tidak nyaman dengan keluarga suami, dan merasa terbebani jika meninggalkan rumah dalam waktu yang lama.

5.2.3. Pembagian kerja suami-istri pada keluarga dengan suami menyerahkan sebagian gaji, dan tidak menyerahkan penghasilan-penghasilan lain untuk dikelola istri

Dalam kelompok ini, penghasilan suami hanya memenuhi sebagian kecil kebutuhan hidup keluarga sehingga istri harus memastikan terpenuhinya kebutuhan keluarga. Kurnia dan Nana sama-sama hanya mendapat sebagian gaji pokok suaminya, dan mengelola penghasilan mereka untuk memenuhi kekurangan

gaji suaminya dengan cara berbeda. Meskipun sudah menggunakan penghasilannya untuk kegiatan rumah tangga dalam jumlah besar, sementara suami tidak mau terlibat dalam proses penyelesaian kerja rumah tangga. Masing-masing suami dari kedua informan ini hanya terlibat sesekali dalam pengasuhan anak, membersihkan rumah dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang bersifat bulanan seperti pergi membayar biaya rekening listrik, telepon dan air bersih. Hal ini dilakukan karena mereka masih mengelola sebagian dari penghasilannya.

Dalam keluarga Nana yang sudah memiliki anak remaja, otomatis pendidikan pengasuhan anak tidak menyita waktu dari suami maupun istri. selanjutnya proses pekerjaan rumah tangga yang dikerjakan suami seperti membersihkan rumah dan membayar rekening-rekening bulanan kemudian berpindah kepada anak. Dengan demikian, keterlibatan suami dalam kerja rumah tangga menjadi kurang. Sedangkan keluarga Kurnia yang masih memiliki anak kecil, kegiatan pengasuhan anak banyak menyita waktu dan sering dikerjakan bersama-sama, sehingga dapat dikatakan ada keterlibatan suami dalam penyelesaian kerja rumah tangga.

Pada keluarga Nana dan Kurnia, suami tidak pernah terlibat dalam penyediaan konsumsi keluarga, terutama dalam proses pengolahan dan penyajiannya. Hal ini dikarenakan suami Nana dan Kurnia memberikan pandangan yang kurang baik jika istri meminta dibantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Menurut Nana dan Kurnia, suaminya tidak mau terlibat karena merasa diremehkan jika harus membantu di dapur. Bahkan suami Kurnia menganggap kalau wilayah dapur adalah wilayah perempuan. Hal ini karena di

rumahnya, laki-laki memang tidak pernah terlibat dalam proses pekerjaan dapur. Menurut Kurnia, ia pernah meminta suaminya menyediakan konsumsi dan pekerjaan lain seperti menyetrika pakaian, namun suaminya menganggap Kurnia meremehkannya dengan permintaan tersebut karena ia tidak mampu membiayai rumah tangga.

5.2.4. Pembagian kerja suami-istri pada keluarga dengan suami tidak menyerahkan penghasilan kepada istri, tetapi memenuhi beberapa kebutuhan pokok

Pada kelompok ini, informan juga memperlihatkan rendahnya keterlibatan suami dalam penyelesaian kerja rumah tangga. Suami Popi dan Rosa misalnya, terlibat dalam kegiatan belanja sembako dan pergi melunasi rekening listrik, telepon dan air bersih setiap awal bulannya karena pembagian belanja keluarga. Suami Popi dan Rosa mengelola sendiri keperluan pokok keluarga dari penghasilan mereka karena penghasilannya tidak diserahkan kepada istri untuk dikelola. Sedangkan Popi dan Rosa sendiri mengelola dan membiayai keperluan lauk pauk dari penghasilan sendiri. Menurut keduanya, pembagian kerja yang terjadi mengikuti kegiatan yang biasa mereka lakukan sebagai suami-istri sehari-hari.

Suami Popi dan Rosa memberikan sikap yang berbeda ketika diminta untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Misalnya, ketika akan keluar rumah mengikuti kegiatan sosial atau kegiatan kantor, maupun kegiatan lain yang bersifat pribadi, maka suami Popi akan mengerjakan tanpa komentar atau penolakan. Sedangkan suami Rosa memberikan sikap yang berbeda, ia akan mencari-cari alasan untuk menolak dan memberikan jawaban seolah-olah istrinya tidak bekerja, seperti menegaskan kalau pekerjaan tersebut adalah tugas istri.

5.2.5. Pembagian kerja suami-istri pada keluarga dengan suami tidak menyerahkan sama sekali penghasilan kepada istri

Pada keluarga Marni, pengelolaan kegiatan rumah tangga sepenuhnya diserahkan kepada istri, kemudian menempatkan Marni bertanggungjawab dalam pembiayaan kegiatan ekonomi rumah tangga. Suami Marni hanya terlibat dalam kegiatan rumah tangga yang bersifat bulanan seperti kegiatan pelunasan rekening listrik dan air bersih setiap awal bulannya, ditambah pengelolaan biaya pendidikan anak. Menurut Marni kegiatan mengerjakan pekerjaan rumah tangga sekaligus membiayai kebutuhan pokok keluarga sebagai tanggung jawabnya, sudah dijalani Marni sejak menjadi PNS.

Marni mengutarakan kalau pembagian kerja rumah tangga yang diserahkan kepadanya disebabkan aktivitas suami di luar rumah sebagai PNS dan sebagai pengusaha kecil-kecilan banyak menyita waktu suaminya. Akibatnya, waktu suami berada di rumah untuk terlibat dalam penyelesaian kerja rumah tangga menjadi rendah. Akan tetapi, setelah anak menjelang remaja dan penghasilan suami kemudian meningkat, suami kemudian terlibat pengasuhan anak karena ia membiayai dan mengelola pendidikan anak-anak. Meskipun memberikan alasan yang membenarkan suaminya tidak terlibat dalam kerja rumah tangga, Marni masih mempertanyakan kenapa suaminya tidak pernah mau menyempatkan dirinya untuk terlibat dalam kerja rumah tangga.

5.3. Diskusi

5.3.1 Perempuan menganggap rendah pekerjaannya

Pekerjaan rumah tangga bukan hanya membawa Fina kepada pilihan untuk menunda pendidikannya, tetapi juga membawa Fina pada perasaan lebih rendah atau subordinat terhadap suaminya. Informan merasa pekerjaan atau jabatan

suaminya lebih penting dari pekerjaan atau jabatan yang dia duduki, sehingga informan merasa berkewajiban mendukung karir suami dengan selalu berada di rumah untuk melayani dan memomorduakan pekerjaan kantornya, atau menolak kesempatan untuk menerima tugas yang mengharuskan meninggalkan rumah dalam waktu lama. Perasaan rendah dalam diri Fina membuatnya ingin terlihat baik di mata suami dengan tidak melanggar hal-hal yang dianggapnya kurang baik. Misalnya, keputusannya memilih menolak pendidikan atau pelatihan yang meninggalkan rumah dalam waktu lama sehingga ia merasa melalaikan keluarganya. Hal ini terlihat dalam ungkapan di bawah ini,

”.....selama ini suami menduduki jabatan yang membutuhkan perhatian dan keberadaannya. Seperti sekarang ia xxxxxx sedangkan saya kasi di xxxxxx. Jadi kalau saya ada kegiatan kantor yang membutuhkan waktu lama di luar daerah, saya biasanya tidak mengikuti karena takut suami tidak setuju dan tidak ada yang melayaninya. (Fina /wwcr/240607)

Ketika ditanyakan apakah ia pernah tidak diizinkan untuk bertugas ke luar kota, ternyata Fina belum pernah mendapat dilarang jika ingin dinas ke luar kota.

Berikut kutipan wawancara Fina,

”Selama ini saya belum pernah tidak diizinkan dinas yang lama, karena saya belum pernah meminta izin. Biasanya saya selalu memilih kegiatan yang tidak lebih dari dua hari, dan kalau lebih dari itu saya langsung menyerahkan ke orang lain. Selama ini saya berat buat ngomong minta izin dari suami, ada perasaan tidak nyaman jika saya meninggalkan rumah untuk kegiatan kantor dalam waktu yang lama. Kecuali kegiatannya tersebut sifatnya wajib.” (Fina/wwcr /240607)

Perasaan yang muncul dalam diri Fina bisa jadi merupakan perwujudan dari pemaknaannya bahwa kerja rumah tangga sebagai kewajiban istri, akibatnya Fina

memusatkan dirinya dalam kerja rumah tangga sebagai kewajibannya. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran perempuan untuk mendefinisikan kerja rumah tangga sebagai bukan keharusan seorang istri. Sehingga langkah perempuan di dunia luar rumah tidak terbebani oleh kerja rumah tangga.

Kemudian terkait dengan penggunaan penghasilan, beberapa informan yang memilih mengalokasikan penghasilannya pada kebutuhan keluarga, dan mendukung karir suaminya, membatasi keinginan atau pilihan untuk segera melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, menganggap hal ini sebagai pilihan untuk memelihara hubungan dengan suami agar tetap harmonis, dan upaya menjalankan peran yang terkait dengan posisinya sebagai istri. Sebagai pembenaran atas pilihan dan tindakan yang mereka buat mereka menganggap mendapat keuntungan dari pengaruh suaminya untuk perbaikan karir mereka, seperti yang terungkap dari wawancara mendalam terhadap Fina berikut ini,

”....., karena saya mempertimbangkan kebaikan hubungan kita berdua, makanya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan memang nomor dua setelah suami. terutama jika saya ingin hubungan saya dan suami terasa nyaman. Ini memang keputusan bersama yang tidak pernah kita ucapkan atau kita buat tertulis, tetapi karena keadaan yang mengharuskan demikian. (Fina/wwcr/240607).

“ Banyak pertimbangan yang saya rasa menguntungkan kita berdua diantaranya agar suami mendapat kesempatan lebih baik yang secara tidak langsung juga memberikan kesempatan lebih baik kepada saya. Kelak jika suami saya jadi pejabat, bukan tidak mungkin kepentingan karir saya juga dipertimbangkan.” (Fina/wwcr/240607).

”.....Saya pikir saya memang saya mendapatkan keuntungan dengan bersuamikan dia, karir saya lebih mudah di urus, bahkan saya bisa menempati jabatan dengan kenaikan pangkat pilihan karena bertugas di kecamatan mengikuti dia. Tapi saya rasa setimpal juga jika saya meminta kesempatan S-2 setelah jasa-jasa saya terhadap keluarganya. Meskipun pada akhirnya untuk kepentingan keluarga ini saya harus memilih kembali mendampingi suami kuliah sebelum melaksanakan niat saya kuliah.” (Fina/wwcr/240607).

“.....Saya mengikuti suami kemanapun suami bertugas, Pertama memang secara tidak tertulis istri PNS yang PNS juga harus mengikuti kemanapun suami bertugas, kedua sebagai istri camat otomatis saya adalah ketua TP PKK kecamatan dan harus mendampingi suami dimanapun suami bertugas jika ingin sosialisasi suami sebagai kepala wilayah berhasil dan jabatannya meningkat. Ketiga, saya tidak ingin bertahan di kabupaten dengan alasan karir sedangkan suami sendiri dalam bertugas, terutama memikirkan makan dan minumannya..... Kalau di kecamatan, biasanya dipanggil ibu camat. Jadi biar tidak jadi camat, saya sudah dipanggil ibu camat ketika sebagai istri camat, saya bisa menyatakan atau melakukan sesuatu dengan pengaruh jabatan suami sebagai camat.”
(Roro/wwcr/210607)

5.3.2 Implikasi Pembagian Kerja Suami-Istri terhadap Pengembangan Diri

5.3.2.1. Pilihan karir setelah karir suami

Pengelolaan penghasilan suami-istri dan pembagian kerja dalam prosesnya membawa pengaruh terhadap perkembangan karir dan pilihan perempuan untuk untuk mengembangkan diri. Sebagai contoh dapat kita lihat pada informan Roro yang mengalami hambatan perkembangan karir karena perkembangan karir suami.

”Dulu pernah saya masuk dalam Tim analisa jabatan untuk menduduki jabatan yang cukup strategis, tetapi kemudian dicoret dan kembali tetap pada jabatan sekarang.Alasan yang saya dengar sich karena suami sudah menduduki jabatan sebagai xxxxx, jadi di bagi-bagilah katanya. Padahal kalau memang kita dianggap mampu harusnya jabatan suami tidak mempengaruhi promosi ini.....”
(Roro/wwcr/210607).

Dalam kondisi ini Roro ditempatkan dalam situasi yang kurang menguntungkan, dalam keluarga dan masyarakat masih ada anggapan posisi suami harus lebih tinggi, sehingga perempuan yang memiliki prospek yang bagus bagi perkembangan pekerjaannya di hambat, karena suami sudah mendapatkan

tempat yang sama. Secara politis, pembagian jabatan dalam lingkungan pemerintahan ternyata kurang responsif terhadap perempuan karena menempatkan perempuan pada urutan kedua setelah pasangannya.

Fina, yang telah menikah selama lima tahun dan menurutnya tidak ada persoalan dalam proses penggunaan uang suami istri. Fina mengelola penghasilan mereka sejak mereka pacaran dan mengetahui kemana saja penggunaan penghasilan mereka berdua. Persoalan dalam diri Fina muncul ketika ia berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister, namun karena pekerjaan rumah tangga dan anak yang masih kecil, Fina memendam keinginannya tersebut sampai kemudian suaminya mengikuti test magister dan siap berangkat tahun berikutnya. Fina baru berani mengutarakan keinginannya untuk kuliah juga ketika suaminya membicarakan rencana keberangkatan kuliahnya.

Dalam situasi ini Fina memilih untuk mendahulukan suaminya kuliah, mendampingi ke kota J dan meninggalkan pekerjaannya sementara suaminya kuliah. Fina kemudian merencanakan untuk kuliah di Ketapang setelah suaminya selesai dengan pertimbangan tidak meninggalkan pekerjaan rumah tangga dan anaknya. Disamping itu Fina juga menganggap pendidikan suaminya akan lebih bermanfaat dalam perkembangan karir suaminya dan karirnya sendiri, serta meningkatkan prestige keluarga.

Peran rumah tangga dan pengasuhan anak yang masih kecil membuat Fina tidak mampu mengutarakan keinginannya untuk kuliah. Disamping itu ketakutan akan gagal karena sulit berkonsentrasi antara kuliah dan kerja rumah tangga, dan

pertimbangan biaya membuat Fina memilih mendahulukan suaminya, seperti yang terungkap dalam penuturan berikut,

”Maunya, tapi takut gagal berdua karena kurasa S-2 lebih berat ketimbang S-1 dan memerlukan konsentrasi penuh. Lagipula suami sudah test dan sudah siap berangkat, ya lebih baik suami dulu saya membantu saja. Dulu pernah terpikir saya mau s-2 juga, saya mau test di sini atau di pontianak saja yang tidak jauh dari keluarga. Tetapi karena pertimbangan biaya dan anak yang baru berumur dua tahun, saya menyimpan saja niat ini, lagipula suami juga belum ada menyinggung apakah kita berdua akan S2. Sampai kemudian suami ikut test dan lulus, baru saya berani mengutarakan keinginan saya. Tapi sudah terlambat, karena bagaimana juga suami mempunyai peluang lebih dulu, karena sekarang ia tinggal menunggu waktu yang tepat untuk berangkat kuliah”. (wwcr/Fina /240607)

5.3.2.2. Tidak ingin bersaing dan berkonflik

Faktor lain yang membuat Fina menunda keinginannya untuk kuliah ialah tidak ingin bersaing dan dianggap egois oleh suaminya. Apalagi ketika mempersiapkan keberangkatan kuliahnya suami Fina mulai mengelola penghasilan lain di luar gaji bulanan dengan cara menabung direkening sendiri. Tidak seperti biasa, ia menyerahkan penghasilan lainnya di luar gaji untuk dikelola Fina. Sikap suaminya menimbulkan rasa tidak nyaman dalam diri Fina, dan ia merasa suaminya membuat jarak dan menyusun kekuatan sendiri karena keinginannya untuk kuliah juga. Seperti ungkapan berikut ini,

”..... Kalau saya dengan suami sama-sama melanjutkan S2 sepertinya akan bersaing-saing dengan suami, tidak enak rasanya. Jadi lebih baik saya yang mengalah, biarlah suami dulu yang kuliah, saya mungkin kuliah setelah suami selesai, sekarang banyak program pemda dan Untan (cat.universitas Tanjungpura) Pontianak untuk PNS S-2..... mungkin karena saya juga telah mengutarakan untuk mengambil S-2.....saya bilang selama ini saya sudah cukup banyak menolongnya, saya juga ingin S-2, untuk karir saya, mungkin itu yang menyebabkan suami membuat tabungan sendiri.....Ketika tahu suami membuat tabungan saya jadi berpikir dia mulai membuat kekuatan sendiri dan menjaga jarak dari saya bahkan timbul dalam hati saya rasa tidak enak juga, seolah-olah saya egois”.(wwcr/Fina /240607)

5.3.2.3 Perendahan terhadap perempuan dalam kerja rumah tangga

Menurut Gina ada semacam konsep atau pemahaman dalam pemikiran suaminya bahwa peran pengasuhan anak dan pengelolaan kegiatan di rumah adalah tanggung jawab istri, karena pekerjaan tersebut dianggap merendahnya jika dilakukan oleh suami. Proses sosialisasi yang diserap suami dari lingkungan keluarga bisa jadi penyebab suami tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, padahal ia bisa menerima sekaligus menikmati hasil pekerjaan istrinya dalam membantu nafkah keluarga. Hal ini terungkap dari kutipan wawancara berikut,

” Tidak ada kesepakatan tertulis ataupun omongan lisan kalau sebenarnya kewajiban memelihara anak dan kegiatan dalam rumah yang lainnya adalah kewajiban saya sebagai istri, sedangkan suami mencari nafkah. Karena kalau ada, saya bisa saja meminta secara penuh tanggungjawabnya mencari nafkah, sebab selama perkawinan kami penghasilan suami tidak pernah memenuhi kebutuhan keluarga secara penuh.Juga bukan karena tidak paham bagaimana cara melaksanakan pekerjaan rumah tangga, maka suami tidak mau campur tangan dalam pekerjaan di rumah. Hanya saja suami merasa diremehkan jika harus ikut memasak setiap hari atau membereskan anak..... Dalam keluarganya, memang tidak lazim laki-laki di dapur, mungkin itu sebabnya suami memandang rendah pekerjaan rumah.....tapi, jika dibandingkan dengan ibunya, saya adalah perempuan bekerja dan membiayai lebih dari separuh kebutuhan keluarga ini, sedangkan ibunya tidak mencari nafkah.”
(Gina/wwcr1/160607).

Sikap suami Gina merupakan sikap penolakan terhadap pembagian kerja dalam rumah tangga, karena suami Gina memandang pekerjaan rumah tangga lebih rendah yang berarti menganggap perempuan lebih rendah dan kedudukannya sebagai lelaki lebih tinggi dari perempuan atau dari istrinya. Oleh karena itu, suami Gina menganggap kalau permintaan Gina kepadanya untuk membantu kerja rumah tangga sebagai perendahan atau terhadap dirinya.

Kemudian biaya hidup sebagai konsekuensi dari kegiatan pengasuhan tidak bisa terpenuhi dari penghasilan suami dan penghasilan yang dimilikinya. Dengan meningkatkan pendidikannya, Gina berusaha memperbaiki potensi bekerja dan meraih prestasi yang lebih baik, sehingga bisa mendapatkan posisi strategis yang bisa meningkatkan penghasilannya. Gina menganggap perbaikan ekonomi dirinya untuk perbaikan ekonomi keluarga sebagai salah satu cara memperbaiki situasi hubungannya dengan suami. Berikut ini wawancara Gina,

”Saya memang tidak bisa memikirkan perceraian ketika tekanan ekonomi dan persoalan pernikahan berada dalam kondisi yang kurang baik, karenanya saya memilih memperbaiki diri dengan pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik, setidaknya untuk memperbaiki kondisi keuangan di masa yang akan datang.....Saya memutuskan untuk kuliah, meskipun harus berpikir bagaimana menyediakan waktu dan biaya.....Sulit bagi suami untuk menempatkan diri dalam kegiatan rumah tangga, dan saya juga tidak ingin menciptakan konflik dalam hubungan kami, maka saya memilih memperbaiki diri, memperbaiki penghasilan untuk kepentingan keluarga. Di luar itu, saya juga tidak bisa memaksa suami untuk melakukan hal yang sama tanpa kesadaran suami, bahwa penghasilan yang ada tidak memenuhi kebutuhan keluarga. Saya bahkan tidak akan meminta penghasilan lain yang dikelola oleh suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga ini. Cukup bagi saya sikap suami yang tidak mau mencampuri urusan rumah tangga sebagai sikap tidak menerima diri saya,saya tidak ingin merendahkan diri dengan meminta penghasilannya yang lain.
(Gina/wwcr2/120208)

Gina menganggap posisinya sebagai penerima penghasilan suami dengan cara meminta akan membuatnya nampak rendah, bahkan dari wawancara di atas terungkap kalau Gina merasa direndahkan oleh suami dengan sikap suami yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan rumah tangga. Situasi yang berbeda terlihat pada Informan Uci. Uci tidak segan-segan meminta penghasilan suaminya secara keseluruhan dan memisahkan penghasilannya untuk disimpan dan dipergunakan

atas namanya. Persamaannya adalah situasi pembagian kerja dan pengelolaan peran rumah tangga yang sepenuhnya dilakukan oleh istri.

Suami Uci mempergunakan alasan kewajiban rumah tangga (istri) sebagai alat untuk mengurangi laju kecepatan karir Uci. Bahkan ada kecenderungan sikap suami Uci merupakan bagian dari perendahan terhadap identitas gender perempuan yang tersosialisasi dari keluarga orangtuanya. Suami Uci menciptakan ketergantungan dirinya terhadap Uci melalui pelayanan konsumsi dan pelayanan lain dalam rumah tangga. Ketidaksiapan suami Uci menerima keberhasilan istrinya dalam berkarir di luar rumah terlihat ketika Uci menduduki jabatan terlebih dahulu dibanding suaminya.

Kebiasaan suaminya yang biasa dilayani dan disediakan makan dan minum setiap hari mulai dari sarapan, makan siang dan makan malam sempat membuat Uci merasa terganggu. Uci merasa dengan kondisi pekerjaan mereka di luar rumah yang cukup menyita waktu dan tenaga, suaminya akan memberikan pengertian kepadanya untuk tidak menuntut disediakan konsumsi setiap waktu.

Kondisi ini kemudian berkembang kearah yang kurang baik bagi situasi hubungan suami-istri ketika Uci mendapatkan kesempatan menduduki jabatan lebih dahulu dibanding suaminya. Kondisi ditempat kerja dengan jabatan baru yang berarti peningkatan volume dan beban kerja mengharuskan Uci meluangkan waktu dan pikiran yang lebih besar. Konsekuensinya, waktu Uci untuk keluarga terutama untuk menyediakan sarapan pagi dan makan siang suaminya sering tertinggal karena Uci berangkat lebih awal dan sering tidak pulang makan siang. Kondisi hubungan semakin buruk dengan posisi suaminya yang belum mendapatkan jabatan, Uci merasa kurang nyaman menghadapi situasi di tempat

kerja dan hubungan dengan suaminya. Sebab berkurangnya pelayanan yang diberikan Uci meningkatkan temperamen suami dan sering memicu kemarahan-kemarahan yang menurut Uci dipicu oleh perasaan suami yang merasa direndahkan jika tidak dilayani.

”.....waktu itu aku harus membagi waktu untuk bekerja di kantor, kemudian aku juga harus menyiapkan pekerjaan rumah agar suami tidak merasa aku remehkan dan tertekan. Ternyata ada pengaruhnya ketika aku harus naik jabatan dahulu sedangkan dia belum.....”
(Uci/wwcr/010707)

”Akhirnya aku mengalami tekanan di kantor karena pekerjaan tidak selesai tepat waktu dan aku suka datang siang..... aku dalam posisi yang sulit waktu itu..... atasan menekan dan menginginkan aku kerja tepat waktu.....aku tidak bisa, pagi harus menyiapkan sarapan suami, siang menemani makan siang dan pulang tepat jam tiga. Padahal dengan jabatan yang ada aku memerlukan datang jam tujuh tepat, siang mungkin tidak pulang untuk makan siang dan sore membawa pulang pekerjaan....., karena atasanku menginginkan pekerjaan selesai ada hari itu juga.” (Uci/wwcr/010707)

Menghadapi situasi di dalam rumah yang kurang nyaman dan atasan yang cukup disiplin, Uci kemudian memutuskan untuk kuliah mengambil gelar magister di kota P. Pilihan kuliah dilakukan Uci dengan berbagai pertimbangan pertama, meninggalkan pekerjaan sementara tugas belajar sambil menunggu suaminya mendapat jabatan. Kedua, Uci memanfaatkan peningkatan pendidikan untuk persiapan penjenjangan karirnya. Setelah menyelesaikan studinya selama dua tahun, Uci kemudian kembali ke kabupaten, ia dan suaminya sama-sama menduduki jabatan. Dalam hal ini Uci memiliki *bargaining* untuk memutuskan dan memberikan pilihan kepada suami siapa yang akan sekolah diantara ia dan suaminya, seperti ungkapannya di bawah ini,

” Sekolah..... aku ambil S2 dan meninggalkan jabatan untuk menunggu waktu sampai suamiku diangkat menjadi kasi atau apalah..... dan Alhamdulillah setelah kuliahku selesai dan aku kembali dengan menempati jabatan yang baru, suamiku juga sudah mendapatkan jabatan.”

“.....aku dulu membuat pilihan dia atau aku yang sekolah dulu.....dia menyarankan aku berangkat sekolah.....pusing juga mengatur situasinya, aku punya anak kecil, suami dan anak kutinggal di rumah orangtua, jabatan juga terlepas. Tapi untuk perbaikan ke depannya aku usahakan meskipun agak tersendat”. (Uci/wwcr/010707)

Sikap atau perilaku yang diperlihatkan oleh informan terhadap proses penggunaan penghasilan suami-istri dan dalam menjaga hubungan seperti yang tergambar di atas sebenarnya merupakan perendahan terhadap proses dan hasil kerja rumah tangga yang dianggap sebagai kerja perempuan. Proses perendahan dimulai ketika konsep kerja rumah tangga tersosialisasi dalam diri laki-laki dan perempuan sebelum memasuki lembaga perkawinan. Konsep ini kemudian berkembang dalam struktur masyarakat bersamaan pembentukan perkawinan dan pembagian peran suami istri yang patriarki. Konsep perkawinan dan pembagian peran dalam keluarga yang terbentuk adalah struktur keluarga *Batih* dan berkembang bersama kerja produksi yang mempergunakan patriarki sebagai kendaraannya. Sejalan dengan kondisi ini, perempuan PNS bekerja untuk memenuhi tuntutan ekonomi keluarga, namun patriarki tidak mau mengubah konsepnya yang memberikan kemapanan pada struktur sosial laki-laki dalam keluarga. Ketika kewajiban mencari nafkah dipenuhi oleh perempuan bekerja, laki-laki tidak mau terlibat dalam penyelesaian kerja rumah tangga. Kekakuan laki-laki dalam memahami peran, menyuburkan patriarki dalam struktur keluarga, termasuk alasan bagi pertahanan dan keutuhan struktur keluarga.

5.3.2.4 Kesadaran Perempuan Memperbaiki Diri

Dalam kondisi atau situasi yang kurang menguntungkan bagi perkembangan karirnya, beberapa informan membuat strategi dengan memanfaatkan dan mempertahankan kondisi sebagai pendamping suami. Namun keduanya dalam situasi yang berbeda, Fina berusaha agar situasi hubungan suami-istri berjalan baik dengan cara mengalah dan tidak ingin menimbulkan persaingan. Kemudian dengan alasan peran dan tanggung jawab sebagai istri yang mendukung suami baik dari segi materi maupun moril, serta karena tanggung jawab pengasuhan bagi anaknya yang masih kecil Fina membenarkan keputusannya menunda keinginan untuk sekolah. Seperti terungkap dari kutipan wawancara berikut ini,

“.....saya rasa setimpal juga jika saya meminta kesempatan S-2 setelah jasa-jasa saya terhadap keluarganya. Meskipun pada akhirnya untuk kepentingan keluarga ini saya harus memilih kembali mendampingi suami kuliah sebelum melaksanakan niat saya kuliah.”
(wwcr/Fina /240607)

”.....kalau saya dengan suami sama-sama melanjutkan S2 sepertinya akan bersaing-saing dengan suami, tidak enak rasanya. Jadi lebih baik saya yang mengalah, biarlah suami dulu yang kuliah, saya mungkin kuliah setelah suami selesai, sekarang banyak program Pemda dan Untan (cat.universitas Tanjungpura) Pontianak untuk PNS S2. Saya mungkin akan ikut program ini dengan pertimbangan tidak perlu meninggalkan rumah dan bisa mengurus anak dan suami.
(Fina/wwcr/240607).

Sedangkan Roro membentuk kesadaran setelah melihat pentingnya keterampilan dan ilmu bagi pelaksanaan tugasnya. Meskipun menurut Roro ketika ia memutuskan kuliah, tidak ada beban ekonomi dan pengasuhan anak, suaminya dengan alasan ekonomi dan anak-anak membatasi atau mencegah Roro untuk kuliah. Hal ini memperlihatkan bagaimana suami tetap berusaha mempertahankan

posisinya yang dominan dan memiliki kekuasaan dengan cara membatasi pilihan perempuan untuk mendapat pendidikan yang lebih baik. Hal ini bisa kita simak dari ungkapan berikut ini:

”Memang kalau dilihat dari usia dan penjenjangan karir saya sudah memasuki tahap mapan, bahkan sebenarnya kuliah saya tidak berpengaruh. Tetapi terhadap pola pikir dan beban kerja, maka penyetaraan pendidikan dengan kuliah ini sangat saya perlukan. Waktu saya akan melanjutkan kuliah ke S1 bapak sepertinya agak keberatan. Alasan dia (suami) dulu pernah ditawarkan oleh Pemda untuk penjenjangan S2, waktu kuliahnya sabtu minggu, namun mengingat kondisi biaya dan anak-anak perlu diperhatikan, akhirnya bapak memilih mengundurkan diri. Waktu itu saya belum kuliah, selang setahun baru kemudian saya kuliah, waktunya juga sabtu dan minggu serta beberapa hari setelah pulang kerja. Tetapi saya tetap berkuat hati untuk kuliah,.....meski dengan berat hati akhirnya bapakpun menerima saya kuliah..... Keputusan kita kuliah lagi juga karena keuangan sekarang sudah lebih baik dibandingkan dahulu.....Yang jelasnya kalau untuk biaya kuliah dari saya sendiri, tanpa mengganggu gaji dan belanja dapur.Saya juga jadi mudah kuliah karena penghasilan saya meningkat dan anak-anak tidak memerlukan perhatian penuh seperti dulu. (Roro/wwcr/210607).

Adapun bentuk lain dari proses alokasi penghasilan suami-istri yang mendapat sikap atau perilaku perempuan yang berbeda. Gina dan Uci, keduanya dari kelompok proses alokasi penghasilan suami dan penghasilan istri yang berbeda. Gina mempergunakan sebagian penghasilannya untuk memperkuat diri, dengan cara memperbaiki pendidikannya. Gina berhasil menyelesaikan pendidikan D-3 dan S-1 nya secara estafet di sela-sela kegiatannya bekerja dan mengatur kehidupan berkeluarganya. Kesadaran Gina untuk memperbaiki diri dengan cara meningkatkan pendidikan dirasakan Gina ketika peran pengasuhan anak dan kebutuhan keluarga sepenuhnya diserahkan suami kepadanya tanpa berusaha untuk terlibat atau campur tangan.

5.3.3 Pemanfaatan ekonomi dan tenaga kerja perempuan

5.3.3.1. Pemanfaatan ekonomi dan peran perempuan dalam keluarga

Fina juga merasa telah dimanfaatkan suaminya secara ekonomi untuk menunjang perkembangan karirnya dan perekonomian keluarganya. Sehingga merasa wajar jika meminta kesempatan S2 , seperti ungkapan berikut,

”.....Iya, dari dulu kalau buat makan kita saya mempergunakan uang penghasilan di luar gaji pokok saya.....dan hampir semua gaji pokok saya masuk tabungan. Saya bahkan pernah berpikir merasa dimanfaatkan oleh suami secara ekonomi untuk menunjang karir dan kehidupan keluarga suami.” (wwcr/Fina /240607)

Informan Nina, yang memiliki suami seorang pejabat juga merasa harus berhati-hati dalam bersikap dan bicara. Menurutnya ia harus hati-hati dalam mempergunakan penghasilannya, karena suaminya selalu mengingatkan kedudukan mereka. Nina tidak memiliki kemampuan mempergunakan penghasilannya sesuai dengan keinginannya, karena ia harus mempertimbangkan pendapat suaminya. Seperti yang terungkap berikut ini,

”awal pernikahan memang kita tidak pernah membuat kesepakatan tentang mengelola gaji dan keperluan keluarga.....saya bersikap sesuai dengan aturan main keluarga, ya aturan main suami, tentang bagaimana saya bicara, bagaimana saya berpakaian, dan bagaimana saya harus membawa diri bekerja di kantor, termasuk ketika akan mempergunakan gaji buat apa dan apa saja yang paling penting dalam keluarga. Soalnya awal-awal nikah, sering suami komentar tentang kegiatan saya, tentang belanja apa saja, gunanya untuk keluarga apa. Pokoknya saya hati-hatilah biar tidak dikomentari tidak bisa mengatur uang. Tetapi ya sayameskipun saya memberikan semua penghasilan dan perhatian kita, masih kurang, bingung maunya suami apa...../Pesan suami, saya harus hati-hati menjaga sikap dan bicara, kalau tidak bisa fatal akibatnya. Karena sebagai PNS, dan suami PNS kita bisa jadi panutan sebagian orang, bahkan kalau sebagai pejabat kita adalah panutan bawahan, meskipun yang jadi pejabat adalah suami kita”. (Wwcr/Nina/ 120208).

Informan Roro, berusaha mendapat simpati suami dengan mempergunakan semua penghasilannya untuk kebutuhan keluarga, setelah penghasilannya habis barulah ia mempergunakan penghasilan suami dan menabung sebanyak mungkin. Roro memposisikan penghasilannya nomor dua setelah penghasilan suami, sehingga menggunakannya untuk keperluan keluarga terlebih dahulu. Seperti ungkapan Roro berikut ini:

”..... Rasanya gaji saya semua untuk keperluan rumah tangga, soalnya sebelum gaji kita (saya) habis saya jarang mengurangi gaji suami yang ada di amplop..... saya cenderung menghabiskan uang saya dahulu baru uang suami,.....”(wwcr/Roro/ 210607).

5.3.3.2. Pemanfaatan peran dan tenaga kerja perempuan

Ada yang menarik dari diri perempuan dalam menjaga hubungan suami-istri dalam mengelola penghasilan suami-istri. Disadari atau tanpa disadari perempuan akan menggunakan kemampuannya dalam mengelola rumah tangga dan keuangan sebisa mungkin untuk menjaga situasi ini. Kemudian laki-laki memanfaatkan kondisi ini, untuk terbebas dari kewajiban-kewajiban rumah tangga. Misalnya informan Uci, jika melihat kegiatannya dalam menjaga situasi hubungan suami-istri. Uci seperti menggambarkan ‘*Bionic Women*’, yakni perempuan super yang mampu mengerjakan semua dan berjumpalitan selama duapuluh empat jam. Dimulai ketika Uci mengontrol keuangan keluarga dan semua akses dalam usaha maupun dalam rumah tangga, Uci seperti memiliki kekuasaan terhadap suaminya. Namun ada konsekuensi yang harus dilakukan Uci, yakni mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, mengontrol semua kegiatan dalam usahanya. Hal ini dilakukan Uci karena merasakan sikap emosional suami dan sikap ingin dilayani

sebagai bentuk ketidakpuasan dan sikap tidak terima suami terhadap kegiatan Uci di luar rumah. Berikut wawancaranya,

"Aku, suamiku itu tergantung sekali denganku, kalau aku tidak ada dia makannya indomie, tapi kalau ada aku maunya makan disaji di meja. Dulu aku pernah kaget, dia marah-marah karena makannya aku suruh ambil di dapur sendiri....rupanya mau di saji di meja, pernah juga jadi sumber kekesalanku. Tapi aku mencoba belajar memahami, akhirnya aku biasa melayani dan dia juga berkurang minta dilayani..... dia orangnya jarang makan diluar..... selalu pulang kerumah buat makan. Jadi kalau dikantor dan aku kalau punya waktu buat pulang makan siang, aku pasti pulang buat makan siang. Kemudian kalau aku dinas luar, aku pasti usahakan buat pulang segera, aku sudah diberikan kesempatan untuk pergi, suami tidak keberatan aku pergi kemanapun, tapi sebisanya aku usahakan buat menyelesaikan tugas di rumah. Suamiku tergantung besar sekali denganku."(Uci/wwcr/010707).

Sejauh apapun Uci melangkah meninggalkan rumah dan menjalankan karirnya, Uci masih harus mengimbangi dengan memperhatikan semua keperluan suami dan anak-anaknya. Tanpa disadari oleh Uci, suaminya memanfaatkan rasa kasihan Uci karena tampak tidak terurus jika Uci tugas di luar kota lebih dari 24 jam. Suami Uci mempergunakan pelayanan Uci untuk menciptakan ketergantungan dirinya pada Uci untuk membatasi langkah Uci di luar rumah. Bahkan bisa dikatakan kalau suami Uci menggunakan sikap ketergantungannya sebagai peringatan bagi Uci, bahwa pekerjaan rumah tangga adalah kewajiban perempuan.

Pemanfaatan tenaga kerja perempuan dalam pekerjaan rumah tangga melalui peran dan penyerahan penghasilan suami, dilakukan hampir semua suami dengan cara menyerahkan kegiatan kerja dalam rumah tangga terhadap pasangannya. Kemungkinan terbaik bahwa perempuan mengelola semua penghasilan suaminya, ternyata memiliki konsekuensi yang kurang

menguntungkan, karena harus menyesuaikan diri dengan suami seperti mengerjakan semua tugas rumah tangga dan juga sebagian dari pekerjaan suaminya, seperti pada kasus Uci yang bisa menggunakan dan menyimpan penghasilannya sesuai keinginannya.

Dalam kasus Uci, sebagai pemilik modal yang mempertahankan kekuasaannya melalui penghasilannya yang dikelola istri, laki-laki meyakinkan kepada perempuan bahwa tidak ada yang salah dari hubungan suami-istri seperti di atas. Perempuan diingatkan akan kewajibannya dan laki-laki tetap mendapat keuntungan “surplus” dari hubungan tersebut berupa kebebasan dari kerja rumah tangga dan mungkin pewaris dari keturunan yang dihasilkan.

5.3.5 Relasi kuasa dalam pengelolaan penghasilan menurut pembagian kerja suami-istri

Saya mencoba melihat relasi kuasa suami-istri dalam proses pembagian kerja berupa banyaknya waktu menyelenggarakan kerja rumah tangga, dan jenis pekerjaan yang diambil atau diselesaikan oleh masing-masing suami-istri. Proses pembagian kerja akan menggambarkan posisi perempuan dihadapan suami dan sangat memengaruhi keterlibatan suami-istri dalam menyelenggarakan kehidupan berumah tangga. Biasanya dimulai dengan proses sosialisasi ketika dua orang perempuan dan laki-laki berencana menyelenggarakan hidup berumah tangga sebagai suami-istri. Sedangkan konsep pembagian kerja dalam berumah tangga sangat ditentukan oleh pemahaman yang didapat seseorang melalui pendidikan di lingkungan keluarga ketika ia dibesarkan, maupun di lingkungan pendidikan umum, serta di lingkungan kerja setelah ia dewasa.

Perempuan informan dalam penelitian ini adalah perempuan bekerja Formal pasangan suami-istri PNS yang menghabiskan 7 jam kerja di luar rumah.

Rata-rata jam kerja rumah tangga yang dihitung berdasarkan kegiatan dan keterangan jam kerja masing-masing kegiatan yang dilakukan dalam rumah tangga informan adalah 6-10 jam per hari, dan 40 – 50 jam per minggu. Berarti perempuan PNS harus menggunakan 13-17 jam kerja sehari dari total 24 jam waktu sehari. Praktis perempuan bekerja formal dan aktif dalam kerja rumah tangga tidak banyak memiliki waktu untuk diri sendiri. Situasi yang kontras terlihat pada suami yang bekerja formal, ternyata banyak yang tidak terlibat dalam proses penyelenggaraan kerja rumah tangga, walaupun terlibat mereka biasanya membantu istri.

Pada beberapa informan, dalam proses pembagian kerja rumah tangga menunjukkan upaya laki-laki mempertahankan diri untuk terlibat dalam kerja rumah tangga. Laki-laki menunjukkan kekuasaannya untuk mendapatkan pelayanan dari perempuan meskipun ia tidak menyerahkan penghasilannya sama sekali kepada istri. Kasus Marni yang tidak menerima sama sekali penghasilan suami dan mempergunakan penghasilannya untuk menyelenggarakan kerja rumah tangga, ternyata tidak bisa memengaruhi suaminya untuk terlibat dalam kerja rumah tangga sehari-hari. Suami Marni kemudian memang terlibat dalam proses pengasuhan anak. Akan tetapi ini di latar belakang oleh proses dan sumber biaya pendidikan anak-anak yang sudah mulai remaja dan kuliah. Suami mengambil alih biaya pendidikan anak-anak secara langsung, sehingga memiliki pengaruh atau kekuasaan terhadap anak-anaknya. Sama dengan suami Marni, maka suami Rosa terlibat dalam pengasuhan anak setelah anak remaja dan kuliah, karena bertanggungjawab terhadap biaya dan proses pembiayaan pendidikan anak-anak.

Suami Rosa juga menggunakan pengelolaan biaya pendidikan anak sebagai media untuk mensosialisasikan kekuasaannya terhadap anak-anak.

Pada keluarga Rosa dan Popi, suami yang tidak memberikan penghasilan untuk dikelola ternyata memberikan sikap berbeda terhadap proses pembagian kerja rumah tangga. Padahal suami Rosa dan Popi merupakan tipe suami yang bertanggungjawab bagi pengadaan sembako setiap bulan. Kalau suami Rosa membantah dan menolak pembagian kerja rumah tangga yang menyangkut pengasuhan anak-anak, maka suami Popi meskipun tidak terlibat penuh, masih mau terlibat dalam pengasuhan anak.

Kekuasaan suami yang paling kuat terlihat adalah pada kelompok suami yang hanya memberikan separuh dari gaji pokok dan mengelola sebagian gajinya bersama penghasilan lain sendiri. Nana dan Kurnia, yang menggunakan banyak penghasilan untuk mengelola rumah tangganya ternyata memiliki persoalan dalam mengajak suaminya terlibat dalam kerja rumah tangga. Suami Nana dengan jelas tidak mau terlibat dalam kerja rumah tangga, hal ini terlihat ketika Nana mengungkapkan bagaimana suaminya tidak pernah mau tahu berapa besar pengeluaran untuk biaya konsumsi, dan kenapa Nana memperkecil pengeluaran konsumsi keluarga. Nana mengungkapkan bagaimana suaminya selalu mengeluh mengenai menu masakan yang selalu sederhana, padahal Nana sengaja berhemat agar bisa membiayai anak kuliah dan keperluan lainnya. Menurut Nana kalau suaminya mau memberikan sisa gaji dan penghasilan lain yang dia dapat, mungkin ia bisa mengontrol keluar masuk uang dengan lebih baik. Sedangkan suami Kurnia, menolak membantu kerja rumah tangga dengan dan menjadikan

ketidakmampuannya membiayai keluarga sebagai alat untuk menolak. Berikut penuturan Kurnia,

“Jangan mentang-mentang aku tidak bisa memberikan gaji yang besar, lantas kau meremehkan aku dengan menyuruh turun ke dapur”, begitu si abang jawab kalau diminta bikin sarapan sendiri, sejak itu aku ndak pernah lagi minta dia bikin apa-apa di dapur, kalau lagi cape aku beli makanan jadi, memang sih dalam keluarga suami, laki-laki tidak pernah ke dapur, pantang kali, kecuali bersih-bersih rumah.” (Kurnia/wwcr/030707).

Pada kelompok suami yang hanya memberikan gaji pokok di luar tunjangan dan yang lain-lainnya, suami memperlihatkan sikap yang cukup beragam mulai dari tidak terlibat sama sekali dalam proses kegiatan rumah tangga, dan ada yang terlibat dalam kegiatan beberapa kegiatan bersifat rutin. Meskipun demikian, keterlibatan suami hanya memperlihatkan beberapa persen dari keseluruhan kerja rumah tangga. Sikap dan waktu kerja suami yang sangat minim untuk terlibat dalam kerja rumah tangga ternyata tidak terpengaruh oleh kontribusi penghasilan istri dalam membiayai keperluan rumah tangga.

Hal yang sama juga terlihat dalam kelompok suami yang memberikan seluruh penghasilannya kepada istri. Suami terlibat hanya pada sebagian kerja rumah tangga dalam tahap membantu istri, bukan mengerjakan sendiri sampai selesai tanpa melibatkan istri. Meskipun demikian, kelompok perempuan yang mengelola penghasilan suami secara penuh, masih bisa dikatakan lebih baik dari kelompok perempuan yang hanya mengelola penghasilan suami sebagian, karena masih memiliki keleluasaan mengatur dan melaksanakan kerja rumah tangga dengan tekanan ekonomi yang lebih ringan.

BAB 6

KESIMPULAN dan REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana kontribusi perempuan dari pasangan suami-istri bekerja formal khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap ekonomi rumah tangga terutama dalam pembentukan relasi kuasa suami-istri. Secara lebih khusus, rumusan pertanyaan turunan adalah:

- 1) Bagaimana suami-istri mengalokasikan penghasilan istri dan penghasilan suaminya untuk keperluan keluarga dan keperluan lain-lain.
- 2) Bagaimana istri dan suami memaknai pembagian kerja, serta peran dan posisi perempuan dan laki-laki dalam keluarga.

Hasil penelitian memperlihatkan pengelolaan penghasilan suami dalam beberapa kelompok berdasar cara suami mengelola penghasilannya dengan menyerahkan atau tidak menyerahkan penghasilannya untuk dikelola istri, yaitu:

- 1) Suami menyerahkan seluruh gaji, tunjangan jabatan, tunjangan proyek dan penghasilan lainnya kepada istri. Kelompok ini terdiri dari 4 pasang/keluarga, yang berarti 25% dari subjek yang diwawancara mendalam.
- 2) Suami menyerahkan seluruh gaji, tetapi tidak menyerahkan tunjangan jabatan, tunjangan proyek, dan penghasilan lainnya kepada istri. Yang termasuk dalam kategori ini ada 7 pasang/keluarga, yang berarti merefleksikan 44% dari suami-istri PNS yang diteliti.
- 3) Suami menyerahkan sebagian gaji kepada istri, dan tidak menyerahkan sebagian gaji tunjangan jabatan, tunjangan proyek dan penghasilannya kepada istri. Masuk dalam kelompok ini, dua orang informan, merefleksikan 12,5% dari pasangan yang diteliti.

- 4) Suami tidak menyerahkan sama sekali penghasilannya kepada istri, tetapi terlibat dalam proses pembiayaan kebutuhan pokok keluarga yang bersifat rutin setiap bulan seperti konsumsi. Pada kelompok ini terdapat 2 orang suami, yang berarti menjelaskan 12,5% dari pasangan PNS yang diteliti.
- 5) Suami tidak menyerahkan sama sekali penghasilannya kepada istri, dan tidak terlibat dalam proses pembiayaan kebutuhan pokok keluarga yang bersifat rutin setiap bulan seperti konsumsi. Kelompok ini, ada 1 orang suami yang berarti menjelaskan 6% dari pasangan PNS yang diteliti.

Kemudian diketahui perempuan merefleksi pola-pola pengelolaan penghasilan suami melalui pemanfaatan penghasilannya dengan cara:

- 1) Istri menggunakan penghasilan istri sepenuhnya untuk keluarga tanpa bisa menabung ada 3 orang informan.
- 2) Penghasilan istri sebagian digunakan untuk keluarga, sebagian lagi bisa ditabung untuk keperluan keluarga dilakukan oleh 6 orang informan
- 3) Penghasilan istri ditabung semua untuk kepentingan pribadi, terdapat pada satu orang informan.
- 4) Istri yang memanfaatkan penghasilan istri sebagian untuk keluarga, sebagian ditabung, sebagian (kurang dari 20%) digunakan untuk diri sendiri sebanyak 5 orang informan.
- 5) Istri yang memanfaatkan semua penghasilannya untuk keluarga tanpa sempat menabung, tapi masih bisa untuk diri sendiri (kurang dari 20%) ada 1 orang.

Penelitian ini mengungkapkan bekerja diluar rumah dan kontribusi ekonomi perempuan dalam rumah tangga, jika kita lihat dari pembagian kerja suami-istri ternyata tidak selalu memperbaiki posisi tawar perempuan dalam

berelasi dengan suami. Rendahnya posisi tawar perempuan dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya:

- 1) Banyaknya tekanan ekonomi yang harus diselesaikan perempuan dalam pemenuhan ekonomi keluarga menunjukkan beban ekonomi yang disandang oleh perempuan. Beban ekonomi perempuan terlihat dari upaya perempuan melakukan penyesuaian-penyesuaian atau strategi bertahan terhadap kondisi ekonomi keluarganya dengan berbagai cara yakni, (1) menekan serendah mungkin biaya konsumsi keluarga, (2) menggunakan koperasi simpan pinjam dalam menyeimbangkan kondisi keuangan keluarga, (3) menekan atau meniadakan pengeluaran untuk kebutuhan pribadinya, dan (4) menekan pertumbuhan jumlah anggota keluarga dengan menggunakan kontrasepsi untuk mengatur jumlah dan jarak kehamilannya, maupun melakukan pemberhentian kehamilan yang tidak direncanakan dengan cara tidak sehat.
- 2) Adanya kecenderungan laki-laki mempertahankan kekuasaannya dalam membina hubungan dengan istri melalui pengelolaan penghasilan, diantaranya (1) menolak memberikan gaji untuk dikelola istri dan tidak terlibat dalam pemenuhan kebutuhan keluarga yang bersifat rutin. (2) menutupi ketidakmampuannya dalam bidang ekonomi dengan cara memberikan sikap yang mengatur pola hidup istri. (3) adanya kecenderungan menolak terlibat dalam peran tradisional rumah tangga, meskipun istri telah terlibat aktif dalam peran pencari nafkah. (4) memberikan penghasilan penuh kepada istri, dan menyerahkan kerja rumah tangga kepada istri.
- 3) Istri diposisikan dalam hubungan yang memanfaatkan penghasilan istri untuk mempertahankan *stereotype* suami sebagai kepala keluarga menjalankan

kedudukan sebagai pencari nafkah keluarga, sehingga manfaat yang didapat istri dari penghasilannya menjadi rendah.

- 4) Kemitraan perempuan dan laki-laki dalam membiayai perekonomian rumah tangga yang tidak diikuti oleh pembagian kerja secara adil antara suami-istri, mengakibatkan istri bekerja di luar rumah mengalami *triple burdens* atau beban majemuk karena harus menjalankan peran sosial sebagai istri, peran pencari nafkah, dan peran rumah tangga.

Dari beberapa kasus khusus yang muncul terlihat bahwa pendidikan, pekerjaan dan kemampuan ekonomi perempuan bisa dijadikan jalan masuk untuk memperbaiki kondisi perempuan khususnya dalam membina relasi suami-istri. Pekerjaan bukan hanya memberikan keberdayaan secara ekonomi kepada perempuan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkembang dan bersosialisasi di luar rumah. Sedangkan pendidikan akan memengaruhi kerangka berpikir perempuan agar sadar dan lebih kritis terhadap penyebab ketidakberdayaan perempuan. Pendidikan juga menguatkan kepercayaan diri perempuan karena akan meningkatkan pengetahuan, menambah informasi dan keterampilan perempuan sebagai modal untuk berpartisipasi dalam keputusan di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat.

Secara umum, perempuan yang bekerja khususnya sebagai PNS memiliki akses terhadap pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan serta keterampilan. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari penggunaan penghasilan dan pembagian kerja suami-istri, meskipun memiliki akses terhadap hal-hal tersebut di atas, kondisi perempuan cenderung tidak mengalami perbaikan. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran perempuan dan laki-laki untuk merubah konsep mengenai

peran dan tanggungjawab dalam keluarga. Kesadaran untuk merubah konsep ini membutuhkan penyadaran dalam diri perempuan dan laki-laki mengenai arti kebutuhan diri maupun kebutuhan keluarga, dan arti penghasilan istri dan penghasilan suami.

Melihat beberapa kesimpulan di atas secara umum dapat dikatakan kalau pasangan suami-istri bekerja seperti PNS sebaiknya melakukan perencanaan hubungan suami istri guna memperbaiki posisi tawar perempuan. Perencanaan hubungan yang dimaksud adalah semacam perencanaan ekonomi untuk kerjasama ekonomi suami-istri dalam pembiayaan kebutuhan rumah tangga atau 'kemitraan suami-istri'. Kemitraan ini sendiri dapat dilakukan dengan cara pengaturan atau perjanjian suami-istri yang dibuat secara tertulis atau tidak tertulis. Berikut ini beberapa keuntungan yang ditawarkan dalam 'kemitraan' atau kerjasama suami-istri diantaranya:

- 1) Membentuk kekuatan dan hubungan yang solid antara suami istri, sehingga mempermudah suami-istri mencapai kemajuan dalam karir karena lebih berdaya.
- 2) Kemitraan akan memperkecil konflik yang mungkin muncul dalam pengelolaan penghasilan karena adanya keterbukaan masalah keuangan dan manfaat yang didapat masing-masing suami-istri, sehingga dirasakan adanya keadilan.
- 3) Kemitraan akan memelihara keberlangsungan hubungan suami-istri karena adanya komitmen kerjasama diantara keduanya.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dan temuan lapangan diketahui posisi tawar perempuan bekerja di luar rumah khususnya PNS, dalam membina relasi suami-istri masih rendah. Hal ini dikarenakan masih rendahnya keberdayaan perempuan dalam mempergunakan penghasilannya untuk mulai menyuarakan kepentingan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Kemudian sikap suami terhadap pengelolaan ekonomi keluarga serta pembagian kerja rumah tangga antara suami-istri, yang dikonstruksi oleh budaya patriarki. Sebagai langkah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan berkesetaraan gender, serta menghormati perempuan sebagai individu yang otonom dalam penghasilannya maupun dalam membina relasi suami-istri, saya merasa perlu merekomendasikan beberapa hal berikut ini.

Pertama, dibutuhkan upaya perubahan terhadap pola pikir dan cara pandang perempuan dan laki-laki terhadap penghasilan dan tanggungjawab yang menyangkut peran dan posisi suami-istri dalam keluarga. Untuk melakukan perubahan tersebut dibutuhkan kesadaran dalam diri perempuan dan laki-laki mengenai cara pandang, keyakinan, kebiasaan, struktur sosial yang melanggengkan kesetaraan relasi perempuan dan laki-laki. Secara spesifik upaya penyadaran tersebut dapat dilakukan dengan cara membangun kerangka berpikir agar bisa kritis terhadap penyebab ketidakberdayaan perempuan dalam berpartisipasi mengambil keputusan baik di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan beberapa langkah berikut

- 1) Pendidikan gender atau *mainstreaming gender* di usia remaja. Pendidikan gender pada remaja dapat dilakukan melalui lembaga formal seperti sekolah

setingkat SLTP dan SLTA, dengan memasukan kurikulum yang *responsif* gender. Kurikulum *responsif* gender dapat dilakukan pada mata pelajaran tertentu seperti agama, ekonomi, dan ilmu sosial dan budaya.

- 2) Pengembangan modul untuk panduan suami-istri dalam pengelolaan dan pemanfaatan penghasilan suami-istri yang tepat dan membawa peningkatan status kesejahteraan keluarga. Modul ini di sosialisasikan di tempat-tempat semacam KUA, kantor catatan sipil, kepolisian, berbagai lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan yang berkompeten dengan urusan perkawinan atau urusan suami-istri.

Kedua, khusus untuk masyarakat Kabupaten Ketapang yang memiliki dua tipe masyarakat, yakni masyarakat pantai yang lahir dari keberagaman etnis dan masyarakat pedalaman yang didominasi oleh masyarakat asli dayak, perubahan terhadap pola pikir perempuan dan laki-laki mengenai peran perempuan dalam bidang ekonomi dapat dilakukan dengan langkah-langkah penyadaran perempuan yang spesifik daerah. Dalam prosesnya perbaikan hidup perempuan membutuhkan program yang melibatkan suami-istri, atau dikenal dengan kegiatan Pengarusutamaan gender, dengan tujuan (1) meningkatkan produktivitas perempuan dalam bidang ekonomi (2) memperbaiki kemampuan perempuan untuk mengatur rumah tangga (3) mengintegrasikan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan (4) meningkatkan kesehatan dan pendapatan perempuan. Khusus dalam bidang ekonomi, kegiatan yang dilakukan pada Usaha Kecil Menengah (UKM) yang disasarkan pada keluarga miskin untuk masyarakat pinggir pantai dan masyarakat pedalaman, sebaiknya menggunakan

petunjuk operasional yang spesifik lokasi dan responsif gender. Spesifik lokasi dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan demografisnya, dan responsif gender dengan mempertimbangkan akses suami-istri dalam pengelolaannya.

Ketiga, dalam rangka menyadarkan masyarakat secara luas tentang pentingnya pembagian kerja, relasi kuasa, dan posisi tawar perempuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan gender, maka dibutuhkan segera revisi Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Terutama pasal 31 ayat 3 yang membatasi keseimbangan hak dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, khususnya perempuan dalam pembagian peran suami-istri dalam keluarga yang berbunyi *"laki-laki sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga"*. Substansi yang harus terisi dalam pernyataan sebaiknya menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri memiliki kedudukan dan peran yang sama sesuai kemampuan, yang dalam pelaksanaan pada masing-masing keluarga dapat disepakati secara adil dan membahagiakan bagi semua pihak. Kemudian pasal 34 ayat 1 yang menyatakan, *"suami wajib melindungi istrinya dan wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*. Substansi yang sebaiknya terkandung adalah suami-istri wajib saling mendukung, melindungi dan saling memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan, dan Pasal 34 ayat 2 yang menyatakan, *"istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya"*. Sebaiknya diubah untuk berisi substansi yang menyatakan bahwa suami-istri secara bersama-sama wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.

Daftar Pustaka

- Acker, Joan dan Van Houten, Donald. R (1992). *Differential Recruitment and Control: The Sex Structuring of Organizations dalam Gendering Organizational Analysis*. New Delhi: Sage Publication.
- Abdullah, Irwan (2001). *Seks Gender dan Reproduksi Kekuasaan*. Yogyakarta: Tarawang Press.
- Ahmed, Leila (2000). *Wanita dan Jender dalam Islam, Akar-akar Historis Perdebatan Modern*. (Terjemahan M.S. Nasrullah). Jakarta: Lentera Basritama
- Anshori, D.S., Kosasih, E., Sarimaja, F. (1997). *Membincangkan Feminis*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Beauvoir, Simon De. (2003). *Second Sex, Kehidupan Perempuan* (Terjemahan Toni. B. Febrianto dan Nuraini Juliastuti). Jakarta: Pustaka Prometheus.
- Benokraitis, Nijole dan Feagin, Joe (1995). *Modern Sexism: blatant, subtle, and covert discrimination*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Budiardjo, Miriam. (1986). *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Budiman, Arief (1985). *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Seksiologi tentang Peranan Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta:
- Blood, Robert O. and Donald M. Wolf (1960). *Husbands and Wives. The Dynamics of Married Living*. New York: The Free Press.
- BPS Kabupaten Ketapang. (2006). *Ketapang Dalam Angka*. Ketapang: Biro Pusat Statistik Kabupaten Ketapang
- BPS Pusat (2005). *Ekonomi dan Demokrasi, Membiayai Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Biro Pusat Statistik dan Bappenas
- Chesler, Phyllis. Dan Godman E.J. (1976). *Women, Money and Power*. New York: Bantams Book.
- Chira, Susan. (2003). *Ketika Ibu Harus Memilih, pandangan Baru tentang Peran Ganda Wanita Bekerja*. Bandung: Panita.
- Cantor, D.W. dan Bernay, T. (1992). *Women in Power: the secret of leadership*. Boston : Houghton Mifflin Company.

- Dickson, Anne. (2001). *Wanita di Tempat Kerja, Strategis for Surviva and Sukses*. Jakarta: Grasindo.
- Duvall, Evelyn Millis dan Brent C. Miller. (1985). *Marriage and Family Development*. New York: Harper and Row.
- Dowding, K. (1996). *Power*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Eichler, M. (1988). 'Power, Dependency, Love and the Sexual Division Labour', *Women's Studies International Quarterly*, Vol. 4. No.2, pp. 201:219.
- Fakih, Mansour. (2001). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Frankel, Lois. P. (2007). *99 Kiat Sukses Memimpin bagi Perempuan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gilligan, C. (1976). *In A Different Voice: Psychological Theory and Women's Development* (Diterjemhkan oleh A. Sony Keraf : Dalam Suara Yang Lain). Jakarta: Pustaka Tangga.
- Goldman, George D. dan Donald S. Milman. (1969). *Modern Women: Her Psychology and Sexuality*. Springfield: Charles C. Thomas.
- Gorden, Raymond . (1969). *Interviewing, Strategy, Tehniques, and Tacties*. Home Wood III. Dorsey Press.
- Hasibuan, Malayu. S.P. (2006). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haryono, Bagus (2000). *Kekuasaan Istri Tergantung Suami*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Harstock,N. (1998), *The Feminist Standpoint Revisited*. Boston: Westview Press.
- Harstock,N. (1981). *Money, Sex, and Power: An Essays on Domination and Community*, New York: Longman.
- Hyde, Janet Shibley. (1985). *Half The Human Experence, The Psychology of Women*. Canada: United States of America.
- Ihromi, T.O. (1990). *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Yang Berperan Ganda*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ihromi, T.O. (1999). *Bunga Rampai. Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjoroningrat. (1984). *Pengantar Antrophology*. Jakarta: Balai Pustaka.

- KPP dan BKN. (2007). *Komposisi Perempuan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Badan Kepegawaian Nasional.
- Lave, M. (1996). *Encountering The World, Toward and Ecological Psychology*. Dalam Reed Edward. New York: Oxford University Press.
- Lonner, Walter. J. and Malpass (1994). *Psychology and Culture*. Modern Life MA: Allin and Bacon.
- Lukes, S. (1986). *Power*. Oxford : Basil Blackwell Ltd.
- Merton, Robert. K. ' M, Fiske and P.L. Kendall. (1956). *The Focused Interview*. New York: Free Press.
- Mosse, Julia C. (1996). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mufidah, Ch. (2004). *Pradigma Gender*. Malang: Banyumedia.
- Moore, H.L. (1988). *Gender and Status: Explaining the Position of Women, Feminist and Anthropology*. Cambridge: Polity Press. Hlm 12-41.
- (1994). *A Passion for Different*. Cambridge: Polity Press.
- Moore, H.L. (1998). *Feminisme dan antropologi*. Terjemahan. Jakarta: Proyek Pusat Studi Jender dan Pembangunan FISIP-UI
- Moser, C. (1989). *Gender Planning in The Third World*. Meeting Practical and Strategis Gender Needs. World Development. Hlm 11-17.
- Parker, Richard. (1991). *Bodies, Pleasures and Passions – Sexual Culture in contemporary Brazil*, Boston: Baecon Press.
- Parry, J., and M. Bloch. (1993). *Money and the Morality of Excahange*. Cambridge: University Press.
- Poerwandari, E.K. (1998). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Prilaku Manusia*. Jakarta: LP3S.
- Reinharz, Shulamit. (2005). *Metode-Metode Feminis dalam Penelitian Sosial*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Rogers, B. (1978). *The Domestication of Women*. London: Tavistock Publication.
- Rosaldo, Michille Z. and L. Lamphere (1974). *Women, Culture and Society*. California: Standford University Press.
- Sajogjo, P. (1985). *Peranan Wanita dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakrta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.

- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Saptari, Ratna dan Holzner, Brigitte. (1997). *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Soe'oad, R.D.F. (1999). *Proses Sosialisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soekanto, Soerjono (1982). *Sosiologi. Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Suleeman, Evelyn. (1999). *Hubungan-hubungan dalam Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suseno, Frans Magnis (1999), *Pemikiran Karl Marx*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Subono, Nur Iman. (2007). *Paradoks Kekuasaan Laki-laki*. Jakarta: Kompas
- Toha, Miftah. (1983). *Kepemimpinan dan Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Tong, Rosemary, F. (1998). *Feminist Thought*. Jakarta: Jalasutra.
- Truong, Thanh-Dam. (1992). *Seks, Uang dan Kekuasaan*. Jakarta: LP3ES.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Ketapang , Mei 2007

Kepada Yth.

Perihal : **Permohonan
Kesediaan Sebagai
Informan
Penelitian**

Ibu.....

Di
Ketapang

Memenuhi penyelesaian akhir perkuliahan saya di Program Pasca Sarjana Kajian Wanita Universitas Indonesia, saya menulis thesis yang bertema "Posisi Tawar dan Relasi Kuasa Suami Istri" dengan Studi kasus pada perempuan PNS dari pasangan suami-istri PNS di Kabupaten Ketapang.

Untuk melengkapi tujuan penulisan dan menunjang penyelesaian hasil analisa, saya mohon kesediaan ibu untuk menjadi informan lam penelitian ini. Oleh karena itu saya mohon kesediaan ibu diwawancara dan berbagi cerita mengenai pengalaman ibu dalam bekerja dan menyeimbangan keserasian hubungan suami-istri. Adapun variabel yang ingin saya dapatkan diantaranya:

- 1) Pandangan ibu mengenai peran serta perempuan membuat keputusan dan mempengaruhi keputusan dalam rumah tangga
- 2) Pandangan ibu mengenai posisi dan kemampuan perempuan sebagai PNS dalam situasi hubungan suami-istri dan kesempatan berkarir
- 3) Pandangan ibu mengenai posisi perempuan sebagai pencari nafkah dan sebagai ibu rumah tangga
- 4) Tujuan ibu ketika bekerja dan memulai pernikahan

Besar harapan saya akan kesediaan Ibu diwawancara sebagai informan penelitian saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Leli Ruspita

Gambaran Pertanyaan Wawancara

Pendidikan:

Bagaimana anak-anak mendapat pendidikan formal

1. ibu mungkin bisa cerita mengenai rencana persiapan ibu dan suami ketika salah satu anak ibu ada yang menyelesaikan pendidikan dan ingin melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.
2. bagaimana ibu dan suami menentukan jenis pendidikan anak atau mengikuti keinginan anak?
3. bagaimana ibu dan suami mempersiapkan biaya pendidikan anak dalam jangka waktu yang lebih panjang? Bisa ibu bercerita bagaimana cara mengaturnya dan siapa yang bertanggung jawab mengaturnya?
4. kalau uang pendidikan anak-anak yang bersifat rutin setiap seperti iuran sekolah dan keperluan buku-buku, diatur oleh ibu atau suami. bisakah ibu bercerita sedikit tentang cara mengaturnya?
5. biasanya dalam kegiatan pendidikan anak-anak ada kegiatan yang melibatkan orang tua murid. Bisakah ibu bercerita bagaimana ibu dan suami membagi waktu mengikuti kegiatan tersebut agar tidak mengganggu pekerjaan rumah tangga maupun pekerjaan kantor?

Kesehatan keluarga

1. ketika salah satu anggota keluarga atau anak sakit, bagaimana ibu dan suami membagi waktu antara kegiatan menjaga keluarga atau anak yang sakit dengan pekerjaan rumah tangga serta pekerjaan kantor?
2. bisakah ibu bisa bercerita tentang pengalaman mengatasi biaya rumah sakit dan obat-obatan ketika salah satu anak sakit?
3. kalau PNS biasanya dianjurkan untuk mengikuti program Keluarga Berencana ya bu? Untuk mengikuti program KB, apakah ibu mengikuti saran suami, teman atau keinginan sendiri?
4. bisakah ibu bercerita bagaimana pengalaman ibu memilih jenis kontrasepsi, maksud saya pengalaman seputar efek samping yang timbul akibat KB terhadap kesehatan ibu? Pernahkah ini dibicarakan berdua dengan suami?
5. biasanya ibu melakukan konsultasi KB secara rutin setiap bulan atau ketika merasa ada masalah dengan kesehatan ibu?
6. Bisakah ibu cerita bagaimana cara mengelola biaya kontrol kesehatan ibu dan anggota keluarga?

Pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga

1. bisakah ibu bercerita mengenai pengelolaan makanan dalam keluarga ibu?
2. biasanya makanan yang dibeli berupa bahan yang harus diolah atautkah makanan siap saji?
3. kalau bahan harus diolah, siapa yang pergi ke pasar untuk belanja dan memasaknya. Bisakah ibu bercerita berapa kali kegiatan mengolah bahan makanan dan memasak dalam sehari, dan bagaimana cara mengatur selera dan menu dalam keluarga?
4. bisakah ibu bercerita bagaimana ibu mengatur keuangan keluarga agar konsumsi keluarga terpenuhi dari pengasilan yang ada?
5. pernahkah suami ibu berinisiatif belanja ke pasar dan mengolah makanan untuk keluarga? Kalau pernah, apakah hal ini dilakukan secara rutin atau darurat karena ibu atau anggota keluarga yang lain sakit?

Pemenuhan kebutuhan sandang

1. dalam memutuskan membeli atau membuat pakaian baru untuk diri sendiri dan keluarga apakah berkonsultasi dengan suami?
2. pernahkah suami membelikan pakaian untuk istri dan anggota keluarga lain tanpa rencana dari penghasilan sendiri atau dari bonus yang secara tidak tetap?
3. kalau pakaian suami, apakah langsung dibeli suami atau dikelola oleh istri?
4. bisakah ibu bercerita sedikit tentang proses pembelian kendaraan bermotor? Biasanya suami atau ibu mempergunakannya untuk keperluan apa saja?

Pemenuhan kebutuhan papan dan akses kepemilikan

1. bisakah ibu bercerita, bagaimana ibu dan suami merencanakan bagaimana memiliki rumah ini? Kapan membangun atau membelinya?
2. untuk merehab rumah biasanya ibu dan bapak berkompromi atau tidak?
3. mungkin ibu bisa cerita bagaimana caranya ibu dan suami mengatur penghasilan untuk memperbaiki rumah atau membeli rumah atau tanah di tempat yang lain?
4. bisa ibu bercerita tentang tujuan ibu atau bapak memiliki rumah atau tanah ditempat lain? dan bisakah ibu bercerita mengenai proses atau pengaturan pembeliannya?
5. siapakah yang memiliki ide untuk membeli rumah atau tanah tersebut? Pernahkah suami membeli tanah atau barang lain seperti televisi dan sepeda motor tanpa memberitahu ibu? Bagaimana pandangan ibu tentang hal ini?
6. kalau diberi pilihan, ibu ingin membeli tanah atau membeli barang-barang isi rumah yang menunjang kebutuhan rumah tangga? Bisakah ibu bercerita mengenai pilihan ibu tersebut?
7. apakah ibu memiliki tabungan untuk menyimpan sisa penghasilan atas nama ibu sendiri, suami ibu juga memilikinya? Jika iya, bisakah ibu bercerita tentang keputusan ibu membuat tabungan tersebut?

Pembagian peran dalam kegiatan rumah tangga

1. bisakah ibu bercerita bagaimana ibu dan suami mengatur waktu dalam membagi kerja di rumah, di kantor dan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan bertetangga?
2. seperti kegiatan mencuci dan membersihkan rumah dilakukan oleh siapa saja ibu?
3. mungkin ibu bisa bercerita bagaimana membagi pekerjaan rumah tangga dengan anggota keluarga yang ada di dalam rumah?
4. Bagaimana suami ibu terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, dan dalam situasi apa ia banyak terlibat, bisakah ibu bercerita?
5. bagaimana pendapat ibu mengenai suami yang tidak pernah terlibat dalam pekerjaan rumah tangga?
6. apakah ibu juga memakai jasa pembantu? Kalau iya, siapa yang mengatur tugas pembantu dan mengatur biaya jasa pembantu?
7. jika diberi pilihan, ibu memilih bekerja diluar rumah seperti sekarang atau bekerja di dalam rumah dengan penghasilan yang sama besar? Bisakah ibu memberikan alasan atas pilihan ibu tersebut?
8. Bagaimana menurut ibu, jika suami tidak memiliki penghasilan tetap, dan ibu penghasilan ibu dijadikan sandaran pemenuhan kebutuhan hidup keluarga?
9. Menurut ibu dengan bekerja mencari nafkah, bisakah perempuan disebut kepala keluarga dan memiliki hak serta kewajiban sebagai kepala keluarga?

Pengasuhan anak

1. menurut ibu pendidikan dan pengasuhan anak di dalam rumah tanggung jawab siapa?

2. bagaimana ibu memandang kehadiran anak, misalnya sebagai penerus keluarga atau sebagai pelengkap sebuah keluarga?
3. jumlah anak sekarang memang direncanakan atau ada yang lahir di luar rencana?
4. pernahkah pengasuhan anak ibu mempergunakan jasa pembantu? Jika iya siapa yang memperhatikan pekerjaan pembantu dan yang mengelola biaya jasa pembantu? Bisakah ibu bercerita mengapa mempergunakan jasa pembantu?
5. apakah pernah mempergunakan jasa keluarga, misalnya ibu, mertua atau ipar dan saudara lain dalam pengasuhan anak? bisakah ibu bercerita alasan mempergunakan jasa keluarga?

Pendidikan dan karir

1. bisa ibu cerita tentang pekerjaan ibu dan suami ketika belum menikah dan setelah menikah?
2. pernahkah ibu berkeinginan melanjutkan pendidikan setelah menikah untuk mendapatkan jabatan yang lebih baik? Apakah keinginan tersebut terlaksana dan bagaimana pengaruhnya terhadap karir ibu?
3. setelah menikah suami ibu pernahkah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi? Sumber biayanya dari penghasilan suami atau dari kantor? Bagaimana pengaruhnya terhadap karir suami dan keadaan ekonomi rumah tangga sekarang?
4. pernahkah ibu merasakan keinginan untuk berhenti bekerja? Bisakah ibu bercerita tentang perasaan ibu tersebut?

Apakah informan bisa mengerti apa yang dibutuhkannya?

1. Bisa ibu bercerita sedikit tentang apa yang ibu pikirkan ketika akan berangkat tidur?
2. Ketika akan menerima gaji hasil bekerja, apa yang pertama-tama ibu rencanakan untuk dibeli?
3. Pernahkah ibu membelanjakan seluruh penghasilan kepentingan ibu, dan bagaimana perasaan?

Pandangan tentang konsep pernikahan:

1. Dapatkah ibu menceritakan kisah atau proses pernikahan ibu?
2. Apakah yang menjadi tujuan dan harapan ibu ketika akan menikah?
3. bisakah ibu bercerita tentang harapan yang ingin dicapai sebelum pernikahan tetapi tidak tercapai? Dapatkah ibu menceritakan sebabnya?
4. Apakah ibu memiliki cita-cita yang berbeda sebelum pernikahan dan setelah memasuki pernikahan?

Seksualitas

1. bisakah ibu bercerita tentang bagaimana ibu mendapatkan pengetahuan tentang hubungan sebagai suami istri?
2. bagaimana ibu memandang kewajiban suami-istri dalam memenuhi kebutuhan seksualnya? Bagaimana bersikap ketika ibu tidak ingin berhubungan karena letih atau sakit dan menolak keinginan suami?

Pertanyaan Kontrol

Rencana persiapan pendidikan anak

1. Memiliki tabungan persiapan jangka panjang seperti asuransi pendidikan atau tabungan: a. ada b. tidak ada
2. Kalau memiliki tabungan, siapa yang mengelola: a. istri b. suami c. bergantian

3. Uang yang sering dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan rutin tiap hari bagi keperluan sekolah anak: a. penghasilan istri b. penghasilan suami c. bergiliran
4. Siapa yang menentukan jenis pendidikan anak? a. suami b. istri c. mengikuti keinginan anak d. berkompromi
5. Yang sering mengikuti kegiatan wali murid disekolah: a. istri b. suami c. bergantian suami-istri d. cenderung diserahkan kepada istri

Kontrol kesehatan :

1. Apakah memiliki tabungan atau asuransi kesehatan: a. punya b. tidak punya
2. Jika ada tabungan atau asuransi kesehatan atas nama siapa: a. suami b. istri
3. Penghasilan siapa yang dipakai untuk membayar asuransi dan tabungan kesehatan: a. suami b. istri c. bersama
4. kontrol terhadap kesehatan keluarga: a. rutin b. tidak ruti
5. Biaya kesehatan berasal dari penghasilan: a. suami b. istri c. bersama
6. Berkompromi tentang kesehatan reproduksi dan anggota keluarga: a. kompromi b. tidak
7. Kewajiban mengontrol kesehatan keluarga: a. suami b. istri c. bersama

Pemenuhan konsumsi keluarga

1. Penghasilan siapa yang banyak dipergunakan untuk konsumsi: a. suami b. istri c. bersama
2. Siapa yang mengelola dan menyajikan makanan: a. istri b. suami c. anggota keluarga lain d. pembantu
3. Suami terlibat dalam pengelolaan konsumsi: a. tidak b. iya setiap hari c. iya, kadang-kadang

Kebutuhan sandang keluarga

1. Apakah ada perencanaan dan kompromi membeli kebutuhan sandang seperti pakaian: a. ada b. tidak
2. Uang siapakah untuk memenuhi kebutuhan sandang: a. suami b. istri c. bersama d. insidental penghasilan

Pemenuhan kebutuhan papan dan akses kepemilikan

1. Rumah yang ditempati milik: a. suami b. istri
2. Asal rumah: a. penghasilan istri setelah pernikahan b. penghasilan suami setelah pernikahan c. penghasilan bersama d. warisan istri
3. Merehab rumah memakai penghasilan: a. istri b. penghasilan suami c. penghasilan bersama
4. Kepemilikan rumah dan tanah di tempat lain: a. istri b. suami
5. Sumber keuangan membeli: a. penghasilan istri b. penghasilan suami c. penghasilan bersama
6. Yang sering melakukan transaksi jual beli rumah, tanah dan barang yang tidak habis pakai lainnya: a. istri b. suami c. tergantung sumber keuangannya
7. Memiliki tabungan sendiri: a. tidak b. punya
8. Memiliki tabungan bersama: a. tidak b. punya

Pembagian peran dalam rumah tangga

1. Suami terlibat dalam pekerjaan rumah tangga rutin: a. ya b. tidak c. diserahkan kepada pembantu

2. Pengaturan kerja pembantu dan biaya jasa pembantu dari penghalangan istri atau suami?
3. Apakah istri masih menganggap kepala rumah tangga adalah kewajiban dan kedudukan seorang suami: a. iya b. tidak
4. apakah sudah ada pola sosialisasi gender yang mengarah kepada keseimbangan dalam keluarga: a. ada b.ada dan kurang bak c. tidak ada

Pengasuhan anak

1. Diserahkan kepada istri sepenuhnya
2. Menggunakan jasa pembantu
3. Menggunakan jasa keluarga
4. Jasa pembantu dan kebutuhan anak menggunakan penghasilan istri atau suami

Pendidikan dan karir

1. Keadaan pendidikan istri sebelum pernikahan lebih tinggi atau lebih rendah dari suami? bagaimana setelah pernikahan?
2. Apakah suami melanjutkan pendidikan setelah menikah? Apakah istri juga? Dari mana sumber biaya pendidikan?
3. Siapa yang terlebih dahulu melanjutkan pendidikan? Apa yang membuat ibu atau suami memutuskan untuk sekolah lagi?
4. Apakah ibu merasa terbebani dengan pekerjaan rumah tangga sekaligus pekerjaan kantor?

Apakah informan mengerti apa yang dibutuhkannya:

1. Apakah ibu memiliki keinginan untuk menghabiskan seluruh penghasilannya dengan belanja atau pergi kesuatu tempat?
2. Apakah informan pernah berpikiran ingin terbebas dari pekerjaan rumah tangga dan kewajiban sebagai istri
3. Apakah informan bisa membedakan antara kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarga

Pandangan tentang konsep pernikahan

1. apakah informan memiliki tujuan ekonomi dalam melaksanakan pernikahannya? Misalnya karena keluarga dan kedudukan suami yang lebih baik.
2. apakah informan memiliki cita-cita sendiri sebelum pernikahan yang tidak tercapai setelah pernikahan? ingin sekolah atau mendapatkan sesuatu misalnya.
3. apakah informan memiliki cita-cita untuk dirinya selain untuk keberhasilan suami dan anak-anaknya?